

## Lampiran 1: Transkrip program *talkshow* “Diskusi Lembaga Konsumen Media (LKM)” edisi 24 Januari 2006

Restu Indah (RI) : Ya kawan Assalamualaikum..Selamat sore di program Kelana Kota setelah tadi bersama Iman Dwi Hartanto sekarang ini saya Restu Indah yang bersama-sama anda hingga nanti pkl 5. Dan seperti biasa hari Selasa kita punya program khusus jadi kami akan mengajak anda untuk menyoroti tentang media kita dalam program Lembaga Konsumen Media tentunya bersama kawan-kawan LEMBAGA KONSUMEN MEDIA ada bpk. Henri Subijakto yang sudah bersama-sama dengan saya disini. Nah sore hari ini kita akan membahas sebuah fenomena atau liputan khusus berkaitan dengan apa yang menjadi tren informasi sekarang ini, tentang demo. Jadi biasanya banyak orang mengeluhkan tentang demo tetapi di balik itu pastinya ada sesuatu tentang media kita. Nah kritiknya ada di Pak Henry. Selamat sore Pak Henry...

Henri Subijakto (HS): Selamat sore Mbak Restu...

RI: Ya Pak ini demo ya..

HS: Yak sebenarnya bukan demo tetapi persoalan buruh. Sekarang kan yang kebetulan demo itu buruh. Jadi buruh-buruh kita ini dalam beberapa minggu terakhir ini banyak mendapat sorotan setelah kira-kira 2 minggu yang lalu demo besar di Surabaya. Kemudian di berbagai media termasuk media-media nasional itu memberitakan dan termasuk radio inipun juga sangat intens memberikan pemberitaan, komentar-komentar dari berbagai narasumber maupun berbagai pihak. Namun kami di sini ingin sedikit memberikan semacam kritikan terhadap apa yang muncul di berbagai media yaitu memang ada semacam ketidakproporsionalan melihat persoalan buruh di media massa. Seakan-akan buruh-buruh kita ini adalah penyebab utama. Jadi media ini secara tidak sengaja seringkali melakukan pembingkaihan bahwa nampaknya persoalan buruh kita adalah penyebab utama dari berbagai hal berkaitan dengan katakanlah ketakutan terhadap investor yang mungkin akan lari ke luar negeri, atau ketakutan investor masuk. Seakan-akan buruh menjadi penyebab utama, kemudian ketika mereka melakukan unjuk rasa, itu pemberitaan yang banyak dimuat di media maupun yang muncul di media elektronik adalah kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman buruh. Jadi ketika buruh itu sudah menutup jalan, kemudian melakukan kekerasan di perusahaan tertentu, karena mengajak buruh-buruh yang lain atau ketika menggedor pintu di kantor gubernur misalnya begitu. Kekerasan-kekerasan merekalah yang banyak mewarnai media sementara fakta-fakta di belakang berita itu mengenai mengapa buruh itu turun ke jalan, mengapa mereka marah sampai sedemikian, itu memang acapkali tidak terekspos. Nah sore ini kita akan menunjukkan bahwa sebenarnya persoalan buruh ini bukan persoalan yang sederhana. Dan tentu saja, buruh-buruh kita, orang-orang, masyarakat kita yang dari golongan menengah bawah ini, sebenarnya memiliki persoalan-persoalan yang juga cukup pelik. Tetapi kepelikan-kepelikan ini banyak yang tidak terekspos di media

RI: Baik, karena itu nanti kita juga akan membahas lengkap ini bersama kawan-kawan narasumber dan ada Mas Djoko Susanto yang sudah hadir. Tapi sebentar sebelumnya kita akan mengajak anda dahulu kawan untuk mendengarkan informasi dari tim reporter kami...

### **BREAK**

RI: Baik ya terima kasih Dani. Demikian flash dari kawan-kawan gatekeeper Suara Surabaya. Dan sekali lagi kawan anda yang baru saja mengikuti program Kelana Kota, di sesi Kelana Kota ini akan kita isi dengan perbincangan khusus dalam program Lembaga Konsumen Media. Dan sore hari ini kita akan menyoroti tentang bagaimana peliputan demo buruh yang tadi di awal sudah diterangkan oleh Pak Henry. Menurut kacamata Pak Henri sebagai pengamat media, media kita rupanya masih belum proporsional dalam menampilkan berita-berita tentang buruh kita. Nah biasanya yang dimunculkan di media adalah anarkisme dari buruh dan juga dampak dari ya mungkin kemarahan buruh sehingga sisi-sisi lain dari buruh, kenapa mereka harus berdemo dll ini jarang sekali ditampilkan. Nah kita nanti juga akan komparasikan tentang kondisi buruh secara global itu bagaimana, karena soal-soal perburuhan ini juga dirasakan bukan hanya di Indonesia saja tetapi secara global juga punya masalah yang sama, ya Pak Henry.. Nah kita bersama Mas Djoko Susanto, beliau adalah pengamat globalisasi dari Universitas Airlangga. Selamat sore mas..

Djoko Susanto (DS): Selamat sore.

RI: Yak, tadi di awal Pak Henri sudah singkat, sedikit beliau memberikan informasi. Penilaian dari Pak Henri media kita tidak proporsional. Kami memandang anda melihat secara global, apakah

## Lampiran 1: Transkrip program talkshow “Diskusi Lembaga Konsumen Media (LKM)” edisi 24 Januari 2006 (sambungan)

memang media kita terutama di negara kita ini masih belum proporsional dalam hal peliputan demo-demo buruh itu?

DS: Yak, tidak hanya media tapi hampir seluruh sistem itu tidak terlalu mengenakan buat buruh. Jadi ada semacam kondisi sistemik yang kemudian dengan sendirinya mengarahkan pandangan yang stereotipe terhadap buruh, dan ini sudah terjadi sejak lama. Cuma untuk kasus Indonesia itu agak parah selain karena buruh sendiri serikatnya tercerai berai, perhatian terhadap buruh ini praktis menjadi berkurang, sejak kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan buruh itu diasosiasikan dengan komunisme. Dan ini di Indonesia ternyata memberikan suatu stigma yang agak parah sehingga sedikit kerusuhan atau kekerasan yang dibuat oleh buruh, itu hallow effectnya luar biasa. Karena ada stigmatisasi bahwa buruh dekat dengan komunisme dsb.

RI: Itu, stigma munculnya .. tadi kalau dari sisi siapa atau siapa yang membuat ini menjadi tidak proporsional, kan katanya seluruh sistem, gitu ya.. Tapi untuk yang mendorong menciptakan stigma yang seperti ini, dari mana Mas Djoko?

DS: Ini direproduksi terus menerus bahkan ketika kemudian kita beranjak ke reformasi, ternyata kita masih mewarisi semangat orde baru yang kemudian menganggap bahwa buruh ini tidak jauh bedanya dengan segala sesuatu dalam tanda kutip ancaman dsb. Kita sering mendengar bahwa buruh selalu dikaitkan sebagai faktor larinya modal asing di Indonesia. Terus kemudian kita melihat buruh pun masih dalam kacamata faktor produksi, terbatas pada soal itu saja. Ini tidak ada bedanya dengan yang lain, dengan faktor produksi yang lainnya, yang sifatnya benda mati. Misalkan di tengah kelesuan ekonomi, kita, media tidak mengulas sisi misalkan bahwa dengan memberikan kenaikan UMR itu akan menjadi stimulan buat kenaikan daya beli. Dan dengan kenaikan daya beli, berarti produk-produk yang sudah dibuat itu menjadi akan juga bisa bergulir di pasaran. Dan itu kan satu cara pandang yang lain, kita tidak dapati di media, begitu. Dengan begitu maka kemudian melihat bahwa kenaikan yang diberikan ke buruh itu bukan sebuah ongkos yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, tapi merupakan satu stimulan untuk kemudian pasar bagi mereka.

RI: Ini karena perspektif kita yang selalu negatif dalam memandang demo buruh

DS: Ya, kita masih melihat seperti itu. Dan bahkan kemudian wartawan yang sesungguhnya adalah buruh itu sendiri, dia tidak mengembangkan perspektif khas buruh. Kita ini terhinggapi suatu stigmatisasi kelas menengah yang menganggap bahwa buruh ini adalah ancaman terhadap keamanan, buruh ini adalah suatu persoalan yang seringkali menimbulkan problem itu sendiri, bukan bagian dari problem yang harus diselesaikan. Sehingga kemudian kita lihat bahwa gambar-gambar media itu penuh dengan suatu hiruk pikuk yang kemudian mengkhawatirkan, begitu. Terus kemudian penuh dengan investor A mau lari kemana, investor B mau lari ke mana dan bahkan kemudian ketika sehari setelah demo itu terjadi, yang diwawancarai adalah wakil presiden kita. Dan wakil presiden kita adalah seorang pengusaha.

HS (memotong): Di berbagai media juga menurut perhitungan kami, hampir setiap berita selalu ada pengusaha yang diwawancarai. Tetapi hanya 60% yang buruhnya diwawancarai, jadi 40% ngga ada buruhnya yang diwawancarai. Kemudian sebenarnya akan lebihimbang kalau misalnya yang diwawancarai itu adalah para pengamat ekonomi atau pengamat perburuhan yang netral. Bukan para pengusaha, pemerintah, atau polisi. Kalau polisi, itu jelas pasti akan sangat kontra terhadap gerakan buruh, karena beliau akan melihat dari persepektif keamanan, begitu ya...Tapi kalau pengamat. Dalam arti pengamat ekonomi, atau pengamat-pengamat sosial yang netral, dia akan memiliki pandangan-pandangan yang agak berbeda. Nah selama ini memang selalu buruh itu diframe, dianggap, didefine dia adalah masalah. Kemudian diagnose misalnya supaya untuk investor masuk, seakan-akan diagnosenya itu kalau buruhnya itu diam, bisa menerima, maka investor masuk. Padahal yang namanya investasi masuk itu belum tentu hanya persoalan buruh, banyak sekali. Cina itu bukan persoalan buruh saja yang menyebabkan investornya masuk, tetapi infrastruktur yang sangat besar, yang sangat mendukung misalnya begitu, kemudian disana jalan-jalannya sangat luas, kemudian juga semua infrastruktur itu mudah, perijinan itu mudah. Nah itu sebenarnya akan menjadi variabel-variabel yang lebih tinggi dibandingkan hanya persoalan buruh.

## Lampiran 1: Transkrip program talkshow “Diskusi Lembaga Konsumen Media (LKM)” edisi 24 Januari 2006 (sambungan)

RI: Tetapi keamanan dan kenyamanan disebut-sebut sebagai faktor utama..

HS: Keamanan dan kenyamanan itu tidak semata-mata hanya karena faktor buruh juga. Coba kita bayangkan, ada sebuah penelitian investigasi yang dilakukan oleh warga asing, dari Australi, John Billgreen yang meneliti tentang buruh di Indonesia. Sebagian besar buruh-buruh kita itu banyak yang menghabiskan waktunya di perusahaan itu 16 jam sehari, rata-rata sebagian besar 16 jam, dan mereka berdiri tidak pernah duduk misalnya begitu. Bayangkan Mbak Restu untuk duduk saja selama 8 jam, luar biasa capeknya. Ini mereka tidak duduk, itu banyak sekali dari perusahaan-perusahaan, saya tidak sebutkan perusahaannya, tetapi itu diteliti di Indonesia. Kemudian buruh-buruh kita lebih banyak bekerja dalam temperatur 40 derajat Celcius, tidak ada AC di ruang-ruang tempat mereka bekerja, kemudian dengan gaji yang UMKnya memang.. ya itu relatif.. Ada yang 650, ada yang 750, ada yang 850. Tapi ini rata-rata sebenarnya berada pada ambang batas untuk normal hidup yang katakanlah untuk menghidupi keluarga itu ambang sangat rendah. Ini yang diungkapkan oleh peneliti dari Australi itu, dengan film-filmnya, karena itu menggunakan film, itu bagaimana mereka akan menghidupi keluarganya. Itu akan menjadi lost generation, karena generasi mereka tidak mungkin anaknya akan mendapat sekolah yang baik dengan UMK yang sekian. Tidak mungkin mereka akan memiliki gizi yang baik untuk anak-anaknya, dan itu berarti generasi berikutnya akan merosot secara biologi. Artinya ini ada problem yang luar biasa, kalau mereka kita pahami saja, bukannya kita mau melindungi buruh tapi minimal kita perlu memahami bahwa ada aspek-aspek dalam kehidupan buruh di Indonesia itu sebenarnya dalam kondisi yang seringkali memprihatinkan, walaupun tidak semuanya ya.. Tapi rata-rata sebagian besar seperti itu.

RI: Ya,ok. Kawan, andapun kami undang untuk ikut berdiskusi bersama kawan-kawan dari LEMBAGA KONSUMEN MEDIA. Karena anda adalah konsumen media, anda yang ikut menilai juga bagaimana wajah media kita ya.. Terutama pada saat peliputan demo buruh. Ya, ini sekarang kita sudah bersama dua kawan kita. Kita tampung dulu ya..Selamat Sore

Pak Edi (pendengar) : Selamat Sore Mbak Restu, Pak Henri dan Pak Djoko.. Persoalan buruh itu saya pikir merupakan kesalahan masa lalu, karena ketika awal-awal Orde Baru, pemerintah kita selalu mempromosikan bahwa tenaga kerja di Indonesia itu murah, sehingga investor mengalir ke Indonesia. Nah, belakangan terjadi perubahan-perubahan sampai kepada perubahan harga-harga akibat kenaikan BBM dan menyebabkan daya beli buruh itu rendah. Persoalannya mereka akan menuntut, kan begitu..Sekarang soal peliputan, saya melihat media elektronik bahkan ketika terjadi demo di depan kantor gubernur kemarin, saya berada persis, di atap kantor gubernur, saya melihat di situ begitu antusias media elektronik ya, untuk meliput kejadian itu dan yang saya lihat mereka lebih terkonsentrasi ketika ada gejolak, ada orang mendorong dengan petugas kepolisian. Mereka melihat ini sebagai komoditas atau sebagai cadangan yang akan ditampilkan atau ditayangkan sehingga ini menarik masyarakat, gitu ya.. Dan sebetulnya ketika di dalam kantor gubernur itu ada perundingan-perundingan itu tidak terliputi. Kenapa? Ya ini yang saya pertanyakan..Terima kasih Mbak Restu.

RI: Baik, terima kasih. Selamat sore Suara Surabaya, dengan LEMBAGA KONSUMEN MEDIA.

Pak Yusuf (pendengar): Selamat sore Mbak Restu, Pak Henry, Pak Djoko. Begini, memang betul kalau media kita itu semacam memojokkan pada buruh. Saya hanya membaca Kompas saja, dari media massa ini yang memberitakan secara fair. Disana dikatakan bahwa upah untuk buruh dari perusahaan itu hanya 5%, tetapi untuk birokrat, untuk perijinan dsb itu menghabiskan 35%. Bayangkan perbandingan perusahaan itu..

RI: Itu cost yang dikeluarkan oleh pengusaha, ya pak??

Pak Yusuf (Y): Iya..Oleh pengusaha perusahaan itu lho. 35% untuk birokrat sedang 5% untuk buruh.

RI: Birokrat itu memperlicin proses perijinan?

Y: Iya, proses perijinan, uang belakang, atau uang semir dsb itu. Pokoknya yang berhubungan dengan birokrat, berarti sebenarnya menurut saya kalau buruh itu menjadi rendah upahnya itu, birokrat itu yang perlu digodok atau perlu dibenahi atau bagaimana.. dan ini pers, surat kabar harus netral, harus begitulah keadaan buruh di Indonesia itu. Jangan semata-mata buruh itu dipojokkan, yang membuat salah, dikonotasikan komunis itu. Aduh.. kasihan sekali buruh itu.

## Lampiran 1: Transkrip program talkshow “Diskusi Lembaga Konsumen Media (LKM)” edisi 24 Januari 2006 (sambungan)

RI: Tapi apakah anda memang melihat seperti itu, ya pak? Media kita memang mengarah ke stigma negatif, pak?

Y: Pada umumnya demikian, saya terus terang setuju sekali kalau Pak Djoko, kalo Pak Henri mengatakan bahwa tidak fair dalam pemberitaan. Terus terang saya mengatakan kok begitu, kenapa buruh itu menjadi seolah-olah dipojokkan, disalahkan, yang membuat onar..Padahal itu terus terang birokrat yang menyebabkan terjadi seperti itu. Ok, terima kasih Mbak Restu..

RI: Baik, terima kasih. Sama-sama..Selamat Sore.. Ya, kita tanggapi dari dua kawan kita, Pak Edi dan Pak Yusuf, sementara saya lihat juga ada beberapa kawan dari konsumen media yang ikut bergabung. Tapi sebentar ya, kita tanggapi dulu.. Ya, silakan Pak Henry.

HS: Ya sebenarnya memang media selalu akan mendahulukan opini publik dari para pembacanya atau khalayaknya. Jadi selalu media itu agak bias terhadap khalayaknya. Nah, khalayak media yang paling banyak memang kalangan menengah atas, kan. Pembaca koran itu adalah mereka-mereka yang kalangan menengah atas, buruh itu kan sedikit yang membaca koran. Kalaupun membaca, mereka satu koran bisa untuk 5 atau 10 orang di kantor, mungkin, artinya agak ada bias terhadap kelas menengah. Kemudian media elektronik pun sebenarnya arah kesana adalah lebih besar, ini mungkin faktornya agak lain. Tapi kalau radio itu biasanya adalah pendengarnya, kalau pendengarnya adalah kalangan menengah atas, maka bias menengah atas itu akan muncul sekali. Orang-orang bermobil itu pasti akan teriak-teriak ketika ada demo di jalan, karena dia langsung terganggu secara kepentingan praktisnya. Tetapi inilah kemudian yang perlu kita ketahui, bahwa sebenarnya ada persoalan-persoalan di balik itu, yang kadangkala juga perlu kita pahami dimana yang namanya buruh sebenarnya punya problema-problema besar....

RI: Tapi yang seperti ini masih harus diberikan tempat juga ya pak..

HS: Harus diberikan tempat. Misalnya, tadi yang saya katakan ya..Penelitiannya John Billgreen itu yang di sebuah film, dibuat film itu, itu memang 16 jam rata-rata tetapi ada kadangkala kalau mau export, jadi kalau pas export itu biasanya sampai ada yang 24 jam, baru diberi save karena mengejar export dan itu diwawancara betul dan itu beberapa perusahaan ditunjukkan. Nah yang repot adalah keuntungan dari para buruh itu, ketika produknya diekspor, kalau tadi Pak Yusuf mengatakan hanya buruh itu 5%, itu malah keuntungannya hanya sekitar 0,5. Karena apa? Kita lihat ketika uang rupiah kita sekitar tahun 97-98, ketika rupiah itu jatuh sampai 1 dollar itu 16 ribu, itu gaji buruh tidak dinaikkan, padahal exportnya tetap menggunakan dollar sehingga rupiahnya tinggi sekali. Keuntungannya ada dimana, di perusahaan kan.. Itu hanya contoh saja..

RI: Ya, nanti kita sambung kembali ya Pak Henry, Mas Djoko dan kawan-kawan lainnya...

### **BREAK**

RI: Ya, masih ada beberapa hal yang akan dijelaskan kembali oleh pak Henri dan Mas Djoko, tetapi rupanya ada kawan kita yang sudah menunggu. Kita tampung dulu, apa kata kawan-kawan dari konsumen media kita. Selamat sore...

Pak Iwan (Pendengar): Assalamualaikum Mbak Restu, Pak Henry, Pak Djoko. Kalau kita mendengar apa yang dinyatakan Pak Henry, menurut saya lebih dari itu pak, karena saya melihat adanya kecenderungan bahwa pers ini sengaja mau mengadu buruh dengan pemerintah, atau pemerintah setempat. Terbukti dengan eksposi-eksposi yang nyaris boleh dikatakan berlebihan. Dengan jelas, setiap aksi protes itu kok kelihatannya sekarang mesti diekspos terlalu banyak, terlalu besar, kadang-kadang logika dalam proses kejadiannya pun tidak begitu lengkap disertakan, misalnya kalangan buruh itu sesungguhnya dalam hubungan kerja pancasila kan sudah mempunyai komitmen antara buruh dan manajemen perusahaan dimana mereka berada, itu yang disebut dengan kesepakatan kerja bersama (KKB). Nah mestinya kalau mau terjadi seperti ini kan KKB nya dilihat dulu bagaimana bunyinya kan..Kalau ini kan sekarang sudah tidak melihat lagi batas-batas seperti itu, kan ini malah mengaburkan lagi suatu hubungan kerja yang pernah dirintis dulu sebelumnya dengan baik dan saya juga merasa kasihan dengan para buruh karena mereka ini yang kelihatannya diekspos berlebihan supaya

## Lampiran 1: Transkrip program talkshow “Diskusi Lembaga Konsumen Media (LKM)” edisi 24 Januari 2006 (sambungan)

mempunyai semangat yang lebih menyala-nyala untuk melakukan demo-demo berikutnya. Terima kasih...

RI: Kita pindah ke kawan berikutnya. Selamat sore...

Pak Rudi (pendengar): Sore Pak Henri dan Mas Djoko. Begini, yang terkait dengan UMK atau problem perburuhan ini, sekarang ini menjadi problem yang membuat traumatis dari kalangan pengusaha yang ada di Indonesia ini.

RI: Alasannya pak??

Pak Rudi (R): Alasannya karena terus terang saja, setiap mendekati akhir tahun sekarang itu kalangan pengusaha dibuat sport jantung, terkait dengan adanya perubahan untuk UMK itu sendiri. Karena terus terang saja, apa yang terjadi itu tidak bisa ditebak gitu ya.. Tidak bisa ditebak terkait dengan kenaikan UMK itu sendiri. Belum lagi nantinya gejolak-gejolak yang ada, itu terus terang saja dikhawatirkan sekali oleh kalangan pengusaha itu. Nah padahal saya jujur sebenarnya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Djoko, bahwa sebenarnya problem ini bukan murni ada di buruh itu sendiri atau sebenarnya bukan murni juga ada di pengusahanya sendiri. Sebenarnya ini tidak terlepas dari aspek regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang notabene harusnya memikirkan terkait dengan keberadaan atau eksistensi daripada keduanya. Kenapa saya katakan begitu? Karena begini, terkait dengan buruh itu sendiri, tadi Pak Djoko sampaikan, dengan menaikkan UMK itu akan menjadi aspek penggerak nantinya meningkatkan daya beli dan produk-produk yang dikeluarkan oleh produsen, dalam hal ini pabrikan bisa diserap oleh mereka atau diserap oleh kalangan masyarakat yang sebagai buruh, tepat sekali Pak Djoko. Tetapi dengan satu catatan, bahwa harus diberikan insentif yang sekiranya nantinya bisa membuat pengusaha itu sendiri bisa bergerak. Ini yang perlu saya tekankan sekali, mohon maaf saya ada di tengah, karena kebetulan saya distributor atau agen dari produk tertentu. Sekarang ini daya beli masyarakat sudah menurun drastis memang, daya serapnya tinggal tersisa 50, 60% saja.

RI: Ok, ini polemik antara pengusaha, buruh dan juga kita ya.. Tapi sorotan anda dengan media kita, bagaimana cara media kita...(dipotong)

R: Justru saya melihatnya media tidak proporsional dalam menempatkan problem perburuhan ini, karena saya sepakat tadi Mbak Restu menyampaikan behind the news yang ada saat ini tidak pernah diungkap. Seperti problem perburuhan itu, sebenarnya di belakang-belakang itu harusnya itu diungkapkan dan dalam problem perburuhan itu ada banyak penggerak yang sebenarnya tidak diungkapkan ke permukaan. Terus problem-problem yang ada di pengusaha itu juga seharusnya diungkapkan. Harusnya sekarang itu lebih proporsional dalam menempatkan berita untuk buruh maupun pengusaha. Nah ini yang menurut saya harusnya ditekankan kembali, saya sepakat tadi dengan Pak Iwan, bahwa ada kesan bukan hanya kesan mengadu antara buruh dan pemerintah –kalau dengan pemerintah, saya malah syukur, karena yang menjadikan keadaan seperti ini adalah pemerintah - tetapi justru diadu dombanya buruh dengan pengusaha itu sendiri. Ya, ini yang saya harap bisa dinetralisir oleh kalangan pers atau media agar tidak memanas-manasi atau mengompori, mem blow up, akhirnya yang terjadi seperti sekarang ini. Terima kasih..

RI:Terima kasih, selamat sore...Baik, kita lanjutkan tadi apa yang sudah dijelaskan Pak Henry.

HS: Ya, artinya memang apa yang dikemukakan Pak Iwan dan Pak Rudi sama-sama sebenarnya dalam menyoroti media. Kita punya pemikiran yang searah, ya mungkin yang agak berbeda cuma persoalan substansi masalah buruhnya. Karena memang sebenarnya kita tidak bicara ke sana ya.. Tetapi ketika ada term atau istilah penggerak, tadi Pak Rudi menyebutkan, itu selalu ada discourse menunjuk bahwa buruh ini baru bergerak ketika ada penggerak. Jadi seakan-akan persoalan-persoalan substansial itu tidak ada di masyarakat atau di kalangan buruh, itu yang kadangkala dan itu biasa muncul di dalam discourse-discourse orde baru, itu selalu mengatakan bahwa kalau ada orang protes karena kondisinya memang tidak bisa lagi mereka terima, mungkin ada putus asa, mungkin kondisinya sangat sulit, itu lalu orang2-orang protes itu kita lihat bahwa siapa penggerakannya. Media juga melakukan frame seakan-akan mencari penggerakannya lalu akhirnya diperkuat lagi dengan aparat keamanan yang juga akan

## Lampiran 1: Transkrip program talkshow “Diskusi Lembaga Konsumen Media (LKM)” edisi 24 Januari 2006 (sambungan)

mencari penggerak. Tetapi kenapa tidak mencari mengapa mereka bergerak? Apakah akan bergerak kalau tidak ada masalah yang mendasar? Jadi bisa saja memang ini seperti telur dengan ayam, mana yang lebih dulu, antara mengapa mereka bergerak dengan siapa penggerak. Memang itu harus ada dua-duanya, tapi kalau jumlahnya sampai ratusan ribu tidak mungkin tanpa penggerak, tapi juga tidak mungkin tanpa faktor-faktor yang menyebabkan mereka mau bergerak, motivasi. Apalagi perempuan-perempuan, ibu-ibu ikut demo dsb kan, itu bukan hal yang sederhana. Hanya karena ada orang yang menjadi pihak ketiga dsb.

RI: Ya, Mas Djoko kalau tadi kita lihat, di awal bahkan kita contohkan juga selama ini media kurang proporsional dalam hal newsnya ya, ataupun dari sisi gambar. Gambar yang ditampilkan selalu ada unsur atau faktor kekerasan. Nah apakah itu selalu berimbas negatif atau justru bisa memunculkan hal yang positif, misalnya empati? Gimana mas?

DS: Sebelum sampai ke empati, yang terimbas pasti ooh ini bahaya, ini semacam satu yang mengkhawatirkan, itu kesan pertama yang terlihat sebelum yang lain. Dan meski begitu saya kurang sepakat kalau ini dikatakan mengadu buruh dengan pengusaha, saya lebih sepakat kalau dikatakan bahwa ada beberapa domain dari persoalan yang menjadi penyebab rumitnya persoalan buruh ini, ada dalam domain pemerintah. Misalkan seperti ini -dan kita butuh peran media disitu- media ketika buruh melakukan demo mestinya dia menurunkan analisis berapa persen dari biaya produksi itu yang murni masuk ke buruh, yang lainnya masuk ke sektor yang misalkan non efisiensi, seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi. Berapa persen yang kemudian harus dibayarkan oleh seorang pengusaha kepada pemerintah? Berapa persen pungutan-pungutan yang seharusnya tidak ada itu? Itu domain pemerintah, membersihkan seluruh sektor yang terkait, kemudian menjadikannya efisien. Nah, disini sebenarnya kita terbuka suatu kreatifitas untuk kemudian mengembangkan aksi-aksi buruh ini tidak hanya ke pengusaha, tapi sekali waktu buruh juga perlu berdemo ke pemerintah. Dalam artian, pemerintah turunkanlah beberapa pungutan-pungutan yang tidak perlu kepada pengusaha. Ini tidak pernah dipikirkan yang seperti ini..

HS: Artinya tidak hanya demo UMK...

DS: Tidak hanya demo UMK tapi demo..

RI: Tapi minta demo dibersihkan pungli....

DS: Ya, terus misalkan demo juga turunkan ongkos<sup>2</sup> misalkan terminal handing, charge atau yang lain, yang itu memberatkan. Nah dalam konteks seperti itu kan bisa sebenarnya buruh dan pengusaha itu mereka saling bekerjasama, nah ini kemudian yang oleh gerakan-gerakan buruh di Indonesia belum banyak dipikirkan. Ok, di sisi lain, media juga tidak banyak mengarahkan ke situ pembahasannya. Media itu lebih, dia hanya datang melihat ooh kalau belum ada kles ditunggu ada klesnya, kalau ada negoisasi tidak perlu ditampilkan...(dipotong)

RI: Tapi apakah nanti fair ketika media sendiri memiliki agenda setting untuk mendorong buruh dan pengusaha untuk kearah sana, mas?

DS: Bukankah menjadi suatu yang konstruktif terhadap mencari jalan keluar terhadap persoalan itu, salah satu juga misi media terhadap masyarakat. Saya rasa itu bagus juga..Karena misinya itu misi yang luhur, tidak menjadi pendukung salah satu pihak tapi bagaimana memecahkan persoalan dari keruwetan yang sudah ada. Sementara yang dilakukan sekarang kan tidak seperti itu, seperti sedang menonton adu jago kemudian dia panas-panasin dan dia takut-takutin kalau ini terjadi seperti apa, terus kemudian besoknya langsung wawancaranya ditampilkan investor lari, ada yang lari dari Jawa timur ke Jawa tengah dsb. Mereka lupa bahwa ada persoalan yang lebih besar dari itu, bahwa kita semua hidup dalam suatu kerangka pikir yang namanya new liberalism, dan ini sedang menghinggapi seluruh masyarakat. Tidak hanya pemerintah kita yang bergerak ke new liberal, subsidi dicabut terus kemudian juga impor beras dan seluruhnya menunjukkan bahwa itu new liberal, tapi media sendiri bergerak dalam kerangka new liberal. Contohnya adalah media seharusnya berpikir dalam kerangka objektif, menjaga jarak. Tetapi oleh media didefinisikan sebagai jaga jarak dari pemerintah saja, itu kan

## Lampiran 1: Transkrip program talkshow “Diskusi Lembaga Konsumen Media (LKM)” edisi 24 Januari 2006 (sambungan)

new liberal, karena anti pemerintah dsb dan dia lebih pro ke dalam logika-logika pengusaha, investasi dsb itu logika pengusaha. Pertumbuhan dsb itu adalah logika-logika yang new liberal sedangkan pemerataan dsb tidak pernah dibicarakan, jadi kita rindu kalau demo buruh terjadi, misalkan ada ulasan benarkah kita sudah meletakkan sistem ini dengan benar? Contohnya UMR selama ini dihitung berdasarkan individu padahal bukan dalam kerangka mereka cukup untuk hidup sendiri, tapi apakah mereka layak untuk hidup sekeluarga? Tidak pernah dihitung. Terus kemudian kita sibuk mengatakan bahwa buruh kita minta ongkos naik tapi mereka kinerjanya rendah, pernahkah kita berpikir, barangkali sistem kita sudah baguskah? Apakah kita sudah pernah berpikir, untuk merubah sistem yang upah harian itu, dirubah menjadi upah perjam? Sementara kalau dalam upah perjam, kita terpacu untuk bekerja keras.

RI: Contohnya dimana ini?? (dipotong)

DS: Itu domain pemerintah.. (dipotong)

RI: Apakah di negara2 maju?

HS: Sebagian negara2 maju, upahnya dihitung perjam.

DS: Di Amerika dll, upahnya dihitung dalam kerangka perjam. Hitungannya lebih jelas, artinya orang yang bekerja lebih banyak akan dapat upah lebih banyak. Kalau anda selesai, anda bisa pindah ke tempat lain, orang tidak harus terikat di satu tempat, tapi asalkan punya jam yang cukup, dia bisa pindah ke tempat lain. Dihitung berdasarkan perjam. Dan di Amerika, perjam saja sudah hampir 8 dollar, sementara kita yang bekerja seharian, berdiri, kepanasan dsb rata-rata hanya 2 dollar sehari. Nasib buruk kita ini sudah sedemikian terpuruk dan sebagian besar terpuruknya bukan hanya karena persoalan pengusaha, saya sepakat itu, namun ada domain pemerintah disini. Nah itu yang tidak pernah dilakukan media dalam hal coverage bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan itu belum dilakukan. Dan itu bukan murni dari persoalan buruh-pengusaha saja, dan bukan kesalahan buruh saja, dan kalau mereka melakukan kerusakan pasti ada sesuatu akar persoalan yang jauh lebih mengakar, jauh lebih mendalam dan itu perlu diuraikan secara perlahan-lahan. Kita rindu seperti itu..

RI: Ya baik sekarang kita tampung lagi dari suara rakyat, dari suara kawan-kawan kita.. Suara Surabaya, selamat sore Pak Halim..

Pak Halim (pendengar): Pak Henri selamat sore, dan Pak Djoko. Ya, situasi ini memang dilematis antara pengusaha dan tidak dapat dipungkiri biaya hidup ini kan meningkat sedemikian rupa. Tapi apakah biaya ini hanya dialami oleh buruh? Bagaimana dengan pengusaha? Buruh ikut pengusaha, pengusaha ikut siapa? Kemudian belum lagi biaya-biaya kenaikan BBM dsb kemudian rencana tarif listrik, ya..Sedangkan penjualan mengalami penurunan, jadi kalau masih dituntut dengan upah yang meningkat sedemikian tajam, kan semakin memberatkan.

RI:Tapi dari pengkajian, pemberitaan dari sisi kacamata pengusaha kan sudah banyak di media ini?

Pak Halim (H): Mengenai, Mbak Restu?

RI: Dari sisi pengusahanya, pak. Jadi berapa cost yang harus dikeluarkan oleh pengusaha, kalau TDL naek dll. Ini kan sudah sering kan pak..

H: Tadi ada Pak Yusuf kalau tidak salah yang menyebutkan di koran Kompas bahwa upah buruh itu hanya 5% ya..Itu kalau kondisi normal seperti waktu yang lalu, kalau sudah situasi sekarang tidak cukup 5%.

HS: Berapa persen, pak?

H: Pasti bisa di atas 10%, apalagi kalau menurun ya..

## Lampiran 1: Transkrip program talkshow “Diskusi Lembaga Konsumen Media (LKM)” edisi 24 Januari 2006 (sambungan)

RI: Masih besaran yang 35% tadi ya??

H: Eee...35% itu tidak bisa dipukul rata di semua perusahaan ya. Mungkin ada yang lebih kecil, jadi parameter-parameter yang disebutkan itu sebenarnya juga tidak tepat ya, antara perusahaan yang multiinternasioanal dengan yang home industry. Tapi masalahnya yang home industry kan mendapat perlakuan yang sama, tuntutan yang sama. Nah saya setuju, bahwa kenapa pers hanya menyebutkan, menyudutkan buruh saja, karena pers itu kalau dalam sudut pandang tertentu juga menyudutkan pengusaha. Seakan-akan pengusaha itu keterlaluan, memberi upah sekian-sekian, kenapa pers tidak pernah mencari sebab, ekonomi biaya tinggi, KKN, yang menyebabkan produk Indonesia tidak bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tadi Pak Henri juga menyebutkan tentang dollar, 1 dollar 16 ribu, export dsb tadi ya pak..Saya sendiri tidak export, pak, cuman saya mendapat info dari teman waktu itu bahwa pihak buyer pun pinter, ngerti kalau dollarnya mengalami perubahan gitu ya, mereka minta diskon 35% pak..Nah itu, sedangkan produsen dalam negeri memakai produk atau bahan baku juga import. Nah, kan sebenarnya juga tidak bisa dibilang mengalami keuntungan, gitu ya..Jadi pers mudah-mudahan bisa lebih mencari, lebih tau kenapa ekonomi biaya tinggi, jadi selama ini yang disebut-sebut kan selalu pengusaha dan buruh, sehingga menyebabkan konflik horisontal. Kenapa tidak pernah vertikal? Terima kasih..

RI: Sama-sama, terima kasih...Selamat sore. Masih ada satu kawan kita lagi, tapi sebentar ini informasi untuk anda.

### **BREAK**

RI: Ya, kita sambung lagi dengan seorang kawan. Selamat sore..

Pak Sumarwito (pendengar): Assalamualaiku, selamat sore.. Saya kira pemberitaannya kan sudah berimbang, pak. Maksudnya berimbang, gini pak, kenapa kelihatan ngga berimbang karena yang demo buruh, jadi yang disoroti juga buruh, kan gitu yang nabrak pager juga buruh. Tapi coba kalau yang unjuk rasa pengusaha, yang disoroti ya pengusaha. Lha kenapa begini pak? Kan tadi buruh juga diuntungkan, apa itu tadi KHL apa itu juga disoroti dan itu kelihatan pengusaha itu kejam, lha wong hidup layak ae kok uang itu, lha mangan opo, kan gitu?? Lha ini kan sudah imbang sebetulnya.

RI: Jadi menurut anda pemberitaan kita sudah berimbang ya pak?

Pak Sumarwito (S): Ya, dan lagi juga gini lho kok ngga ada yang disoroti: lho pengusaha ini kenapa kok kudu ngekei aparaturnegara baik itu keamanan baik itu kepolisian, kadang-kadang masih dimintai partisipasi, sumbangan tujuh belasan apa itu, kan juga termasuk ongkos produksi yang memberatkan. Trus kenapa sih semua-semuanya itu minta, karena gajine ga cukup, dan operasional dari APBD ga cukup, makae kongkon golek dewe. Nah ini kan repot, nah ini kan sebetulnya berimbang, menurut saya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum...

RI: Saya berpindah dulu ke kawan-kawan gate keeper.

### **BREAK**

RI: Bersama kawan-kawan dari LEMBAGA KONSUMEN MEDIA, sore hari ini ada Pak Henri soebiakto, kawan-kawan dari LEMBAGA KONSUMEN MEDIA, dan juga bpk Djoko susanto, beliau adalah pengamat globalisasi dari Universitas Airlangga. Kita membahas, bagaimana sih sebetulnya peliputan demo buruh dari media kita, semuanya. Nah menurut Pak Henri tadi di awal beliau memberikan penilaian bahwa media kita kurang proporsional, termasuk dari Pak Djoko ya, analisa-analisa yang sudah disampaikan. Dan sekarang kita kembali dengarkan kawan kita dulu ya...Selamat sore Pak Hendry.

Hendry (pendengar): Selamat sore Mbak Restu, saya melihat kemarin ada demo buruh, ya tgl 19 yang lalu itu, pada intinya itu kalau kita melihat itu jangan dilihat soal penghidupan, layaknya itu seberapa, ada kondisi tertentu. Saya berharap dinilai dari kacamata pengusaha saja, jadi masalah-masalah

## Lampiran 1: Transkrip program talkshow “Diskusi Lembaga Konsumen Media (LKM)” edisi 24 Januari 2006 (sambungan)

tuntutan dari pemerintah itu kita mesti melihat kadang suatu yang ngga harus kita bayar, itu harus kita bayar mbak. Jadi saya melihat, ada kepentingan dari pemerintah, instansi-instansi tertentu kalau melihat ada bisnis yang begitu cerah itu datangnya cepet.

RI: Jadi Pak Hendry, kalau anda menyoroti, justru media kita masih kurang memblow up informasi dari pengusahanya? Bukan dari buruhnya pak? Kalau dari buruhnya cukup pak?

Pak Hendry (H): Kalau dari buruh itu, sebenarnya cuman ngikutin arus mbak, jadi kalau misalkan dia harus kurang ya sudah, mau bagaimana lagi. Sendiri aja ngga didengerin, banyak apalagi ngga didengerin juga. Dan juga saya pernah mendengar beberapa minggu ini, di satu stasiun TV itu menyebutkan bahwa sebenarnya disini yang bikin permasalahan sendiri itu pemerintah. Terima kasih..

RI: Terima kasih, sama2...

HS: Ya, sengaja memang saya angkat di Suara Surabaya karena pendengarnya mayoritas lebih banyak pengusaha. Jadi suaranya di Suara Surabaya ketika kita pantau memang sebageian besar itu selalu juga sedikit negatif terhadap gerakan-gerakan buruh. Kemarin itu nampak sekali bahwa dari para pendengar framenya selalu mereka harus dikerasi karena telah melakukan kekerasan. Memang tidak ada orang yang suka pada kekerasan, kekerasan yang dilakukan buruh harus kita pandang sebagai suatu hal yang buruk tetapi sebenarnya kalau kita belajar tentang crowd atau kerumunan, itu memang sangat mudah sekali untuk mereka berubah menjadi anarkis. Itu kan psikologi massa, persoalannya jangan sampai mereka itu berkumpul begitu banyak, tapi mengapa mereka berkumpul, harus dicari permasalahannya.. Itu yang kadangkala di media massa kita agak sangat jarang...

RI: Baik, nanti kita sambung kembali karena ada banyak faktor juga yang akan kita bahas sore hari ini.

### **BREAK**

RI: Ya, kawan saya Restu Indah yang masih bersama anda dalam program Kelana Kota Suara Surabaya, dan kita isi dengan perbincangan khusus bersama kawan-kawan dari LEMBAGA KONSUMEN MEDIA. Mas Djoko Susanto kawan-kawan dari Universitas Airlangga beliau adalah pengamat globalisasi yang bersama kita sore hari ini, di samping itu juga ada, Bpk. Henri Soebiakto. Ya Pak Henri ada yang ingin dilanjutkan?

HS: Ya, saya ingin melanjutkan pernyataan pak Sumarwito bahwa sebenarnya sudah imbang. Imbang diukur dari mana, kalau diukur dari misalnya sisi narasumber saja, maka menurut catatan kami, narasumber dari pengusaha dan APINDO, kemudian dari pemerintah itu jauh lebih banyak dibandingkan narasumber dari para buruh, atau wakil2 buruh, atau pengamat yang netral, itu sangat sedikit. Tadi saya katakan hampir 100% berita selalu ada pengusahanya yang diwawancara, tapi hanya 60% yang ada wakil dari buruh atau wakil dari narasumber, artinya 40% yang tidak diwawancara. Apalagi ketika masalah tentang persoalan pengusaha itu seringkali dimunculkan, berkali-kali lebih sering, misalnya pengusaha kesulitan karena harga-harga naik, BBM naik, kemudian ini listrik juga akan naik, misalnya seperti ini kan sudah dibahas banyak, itu selalu muncul. Tapi persoalan dari kehidupan buruh itu agak jarang muncul.

RI: Pak, itu jarang dimunculkan apa itu karena media sendiri agak kesulitan ketika mewawancara buruh, gitu ya? Mereka lebih banyak dibuat sebagai feature, gitu ya..

HS: Banyak faktor, memang mendingan kalau ada featurenya. Di Kompas pernah ada feature yang sangat bagus, tetapi memang tidak semua media memberikan feature-feature. SS akhir2 ini ada feature-featurenya, itu saya yakin untuk mengimbangi karena terus terang SS ini kalau saya lihat yang masuk ke Suara Surabaya sebagian besar adalah suara yang memframe bahwa persoalan itu lebih banyak kepada buruh. Jadi harus ada feature-feature, karena sebenarnya memang bukan persoalan kita harus memberikan tempat pada buruh tetapi ini persoalan supaya kita memahami permasalahan lebih mendalam. Jadi buruh misalnya, kita tahu bahwa jumlah buruh di Indonesia sekitar...(dipotong)

RI: Jumlahnya berapa ini Mas Djoko?

## Lampiran 1: Transkrip program talkshow “Diskusi Lembaga Konsumen Media (LKM)” edisi 24 Januari 2006 (sambungan)

DS: 78 juta..

RI: 78 juta ya..

HS: (dilanjutkan) sekitar 78 juta misalkan begitu ya.. Coba bayangkan kalau mereka hidup dalam suatu standard yang sangat minimal maka itu lost generation, maka bangsa Indonesia...karena 78 juta itu hampir, eee lebih besar dari jumlah penduduk Malaysia, jadi kalau mereka sistem penggajiannya itu tidak baik itu akan menghilangkan suatu generasi. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana gizi mereka, makanya jangan heran kalau buruh diberi kesempatan bicara mereka juga akan sulit menyampaikan pemikirannya karena sebenarnya sudah sangat sulit dalam kehidupan, mereka intelektualitasnya sudah sangat rendah, anaknya nanti akan semakin rendah lagi. Karena under pressure, ini kadangkala tidak dipahami, semuanya hanya hitung-hitungan ekonomi. Tetapi tidak ada hitung-hitungan mengenai persoalan di masa yang akan datang.. (dipotong)

RI: Jadi masa yang akan datang akan membahayakan kehidupan pengusaha juga ya pak??

HS: Iya, dan juga bangsa sebenarnya. Makanya ini harus dipecahkan, ini bukan salah pengusaha, yang harus dipegang adalah ini bukan salah pengusaha, tetapi ada suatu sistem yang buruk, itu yang diungkap oleh John Billgreen. Ada persoalan globalisasi misalnya. Tadi Pak Halim menyatakan mungkin lebih dari 10%, ketika buyer luar negeri itu pinter-pinter, ketika naik dollarnya, buyernya ternyata bayarnya pake rupiah. Tetapi jangan lupa ini kelihatan bahwa di Indonesia ini sebenarnya kan beragam, ada perusahaan-perusahaan yang multinasional, jadi ya memang dia punya perusahaan cabang di Indonesia, misalnya sepatu Nike atau God (??). Itu punya cabang-cabang disini dengan buruh yang dibayar dengan standard UMK di sini, tetapi dibeli dan barangnya dijual secara global. Di sini berarti apa? Bahwa ada persoalan-persoalan yang kompleks, tidak sederhana. Memang ada perusahaan yang sangat susah tetapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang mengambil untung dari UMK2 itu..

RI: Baik sebelumnya kita ke flash news dulu, baru kita ke penelepon...

### **BREAK**

RI: Selamat sore...Dengan Pak Zulfi silahkan..

Pak Zulfi (pendengar): Selamat sore Mbak Restu, Pak Henry, dan Pak Djoko.. Saya pikir begini bahwa dalam satu hal, pers ini, media harus ada penelaahan yang dalam, baik itu terutama di tingkat ujung tombaknya yaitu wartawan itu sehingga akhirnya perlu menjadikan sorotan yang tajam, bagaimana mekanisme perusahaan-perusahaan masing-masing. Dan yang kedua, ini harus kita bersama-sama dan sepakat artinya kesepakatan kerja bersama itu perlu, sehingga akhirnya kalau itu terjadi ada satu win-win solution dan kesepakatan itu dijalankan. Tetapi banyak perusahaan itu tidak dijalankan, dan di satu sisi yang lain kalau karyawannya bekerjasama dengan serikat buruh atau serikat pekerja, sekarang ini terlalu banyak serikat bekerja sehingga itu juga tarik menarik. Tapi di satu sisi yang lain, kadang-kadang ada kepentingan pengusaha dan ini kalau kita menjadikannya sebagai kesepakatan bersama itu sangat baik karena itu menjadikan suatu ketentuan dan kesepakatan untuk kita semua. Tapi satu sisi yang lain, kalau ada karyawan yang membuat seperti ini, ini juga akan terganggu dari pihak pengusaha. Oleh sebab itu, saya pikir ada pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah yang memfasilitasi untuk hal itu, supaya tidak terjadi hal tarik-menarik di antara persoalan-persoalan apapun di tingkatan buruh itu. Sehingga itu bisa menjadi kondusif, saya pikir itu..Terima kasih

RI: Baik, sama-sama, terima kasih. Mas Djoko silahkan direspon, tadi ada beberapa kawan kita...

DS: Tadi sebagian sudah direspon Pak Henry. Saya cuma kembali pada jumlah penduduk Indonesia sekitar 220an ya..Terus kemudian dengan buruh sekitar 78 juta, itu suatu kekuatan yang sangat besar untuk menggerakkan perekonomian. Kalau misalkan masing-masing saja pendapatannya meningkat 10% saja, itu sudah suatu insentif yang luar biasa, jauh lebih besar dari insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah. Dan itu jauh lebih besar daripada upaya pemerintah untuk menggerakkan daya beli dengan meningkatkan gaji pegawai negeri, karena jumlah pegawai negeri tidak sebanyak jumlah buruh. Dan mestinya kita belajar dalam konteks global, untuk tidak mengulang kesalahan tahun 30an.

## Lampiran 1: Transkrip program talkshow “Diskusi Lembaga Konsumen Media (LKM)” edisi 24 Januari 2006 (sambungan)

Kesalahan tahun 30an adalah sama, kita menekan gaji buruh kemudian memproduksi sebesar-besarnya terus kemudian sampai akhirnya masyarakat tidak bisa membeli itu sendiri, akhirnya terjadi resesi berkepanjangan. Produksi jalan tapi tidak ada yang beli. Nah, ini terjadi dimana-mana kemudian kita harus belajar dari sini, supaya kemudian menjadikan buruh ini bukan hanya sekedar faktor produksi, tapi mereka itu harus menjadi satu... inilah mereka, jembatan kita untuk menghidupkan kembali pasar kita. Nah tadi dibilang bahwa paling banter buruh bisa 5% sampai 10%, sementara kita bisa mengeluarkan untuk marketing kadang-kadang bisa sampai 20%, kenapa demikian? Ini kan suatu yang sangat menyedihkan kadang-kadang, tapi kalau dilihat dari konteks global, ini adalah suatu cara untuk bertahan selama ini. Kita sudah lama tidak memperhatikan buruh tapi kenapa kemudian daya beli juga tetep aja tinggi, karena ada mekanisme lain....

RI: Contohnya....

DS: Contohnya begini, buruh gajinya tetep kecil, tapi kenapa daya beli tetep tinggi karena di sisi lain kita ini dihidupkan dengan budaya konsumtif, jadi yang terjadi adalah suatu daya beli yang semu sehingga kemudian mereka berniat membeli motor, bukan karena punya kemampuan beli motor tetapi karena berani menghutang. Yang terjadi kan seperti itu, nah untuk menghidupkan budaya konsumsi ini, butuh biaya marketing yang besar. Itu terjadi secara global seperti itu, jadi pengusaha, perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk lari ke marketing yang besar, karena mereka ingin mencecoki kita dengan budaya-budaya konsumtif itu, dan koran pun akhirnya terlibat juga dalam upaya membudayakan konsumsi itu secara besar-besaran. Nah ini kan suatu yang sangat menyedihkan, ada satu hal yang lebih besar daripada persoalan yang dihadapi sekarang, bukan hanya terjadi di dalam konteks buruh sendiri tapi seringkali itu malah menjadi domain pemerintah untuk menyelesaikannya. Tidak hanya buruh yang seharusnya menuntut kepada pemerintah, pengusaha juga seharusnya menuntut, oke saya akan naikkan itu tapi tolong ini kurangi. Seperti kemarin ketika BBM naik, pengusaha minta kompensasi dengan mengurangi beberapa terminal handling, charge, beberapa ongkos-ongkos itu, dalam konteks buruh ini, kenapa pengusaha tidak melakukan itu? Dan itu tidak disorot oleh media. Mestinya pengusaha melakuka suatu tawaran kepada pemerintah bahwa mereka akan menaikkan UMR ini dengan kompensasi pemerintah ini menurunkan biaya ini ini ini.. Tidak kita lihat tawaran itu, tidak kita lihat, dan kemudian banyak media malah lebih fokus pada memperkeruh keadaan dengan misalkan menampilkan adanya investor yang lari dsb padahal ada banyak aspek untuk mereka pindah seperti itu..

RI: Ok, dalam konteks demo, nah ini untuk media ya Pak Henry, kalau misalnya kita memberikan informasi bahwa demo di jalan ini kemudian bisa melumpuhkan perekonomian. Nah apakah media ini juga masih tidak berimbang?

HS: Sebenarnya begini, kelihatan bahwa teman-teman media itu sekarang lebih banyak jadi runner journalist, atau jurnalisme yang hanya sekedar berlari kesana berlari kesini, untuk memotret peristiwa yang sedang terjadi, yaitu biasanya apa yang tampak misalnya kekerasan, kemudian demo buruh yang merusak sesuatu, kemudian konflik dengan aparat keamanan. Dia hanya kesana, tapi apa dibalik itu, yaitu mereka mencoba untuk mengungkap lebih dalam katakanlah menjadi penulis yang memahami betul persoalan perburuhan, itu sedikit. Jadi yang betul-betul memahami tentang konteks buruh dalam konteks ekonomi, kemudian konteks global, sampai kepada hal-hal yang lebih detail itu agak jarang sehingga akhirnya yang pemberitaan itu hanya 5W 1H, tapi tidak pernah ditambah dengan solusi misalnya. Karena sebenarnya jurnalisme menyampaikan solusi itu adalah sesuatu yang sekarang ini sangat dibutuhkan. Jadi tidak hanya sekedar memotret...

RI: Tapi kan tidak semua media bisa memunculkan sebuah solusi kan pak?

HS: Minimal memotret 5W 1H pun minimal, dia harus why nya harus banyak. Jadi why nya ini seringkali juga agak sedikit, dia hanya pada arena-arena konflik jadi misalnya seperti foto ini yang ada di media yang sekarang ada di depan saya, ini foto tentang kekerasan antara buruh dengan aparat keamanan. Di media-media lain hampir sama seperti itu, selalu gambarnya adalah gambar ketika buruh disemprot dengan air, atau ketika mereka sedang merobohkan pagar. Itu baru mereka diambil gambarnya, televisi juga melakukan hal yang sama seperti itu. Nah ini lalu yang ditampakkan hanya

## Lampiran 1: Transkrip program talkshow “Diskusi Lembaga Konsumen Media (LKM)” edisi 24 Januari 2006 (sambungan)

arena-arena konflik, tetapi mengapa konflik terjadi, mengapa ibu-ibu yang menjadi buruh yang umurnya setengah baya pun sampai mau, rela berdarah-darah, itu demo yang awal.... Itu kenapa?? Itu ngga pernah dicari dan coba diartikulasikan pernyataan mereka. Buruh itu kalau diwawancara memang kadangkala ngga menarik karena memang mereka tidak bisa bicara dengan menarik, tapi coba tangkap apa sih yang sebenarnya ada dalam pikiran dan benak mereka, pengalaman mereka.

RI: Baik, nah ini saya juga lihat ada beberapa sms yang masuk, sekaligus lewat 560000, bahkan ada beberapa yang mungkin juga menanyakan kira2 ketidakberimbangannya itu dari sisi apanya. Nanti kita akan ulangi lagi kenapa sorotan dari kawan-kawan LEMBAGA KONSUMEN MEDIA, selama ini media kita hanya menampilkan sisi anarkhisme dari buruh saja, atau dari perspektif pengusaha tetapi bagaimana kehidupan para buruh yang riil, itu ternyata masih belum banyak diberikan tempat oleh media.

### **BREAK**

RI: Ya, terima kasih Nuke. Ini informasi kembali tentang tuntutan buruh...Jangan-jangan Pak Henri dan Mas Djoko juga buruh...(tertawa)

HS: Ya Pak Djoko dan kami jelas bukan buruh, kami hanya ingin mengajak berpikir lebih mendalam memahami, yang jelas pengusaha juga punya banyak masalah sekarang, siapa sih yang tidak mendapat tekanan dengan naiknya BBM tapi sebenarnya bagi mereka-merke yang namanya buruh tadi tekanannya jauh lebih besar karena hidup dengan 650, 750 sampai 850 ini di Indonesia sangat berat.

RI: Baik, inij juga mengatasnamakan perimbangan ya pak? Karena tadi kami sudah mendengarkan beragam catatan atau suara dari konsumen media, nah sekarang kami juga harus mendengarkan dari pelaku medianya sendiri. Selamat sore, mas Iman...

HS: Selamat sore mas Iman..

Mas Iman (pendengar): Selamat sore Pak Henri dan Pak Djoko. Yang pertama harus diingatkan dulu wartawan juga buruh, itu yang penting artinya kita harus menjadi bagian dari gerakan itu. Nah, kalau saya melihat kehidupan buruh itu tidak banyak yang berubah ya pak, dari dulu sampai sekarang ya tetap seperti itu, mereka masih tetap diposisikan dan posisinya memang sama, bagian terbawah dari proses produksi. Karena posisi seperti itu, mereka perlawanannya pun dengan jenis perlawanan khas buruh, itu tidak bisa kita hindari karena saluran yang biasa digunakan tidak bisa lagi mendengar sehingga mereka harus turun ke jalan dsb. Saya tidak sepakat dengan kata-katanya Pak Henri yang mengatakan media tidak total dalam mem blow up persoalan buruh. Mungkin apa namanya.. (dipotong)

RI: Bukan tidak total mas, tidak proporsional begitu...Jadi kurang menampilkan sisi-sisi buruh, jadi kesannya media kita masih berpihak pada satu side saja yaitu pengusaha.

Mas Iman (I): Maksud saya begini, artinya kalau misalnya televisi dianggap tidak mendalam dalam persoalan pemberitaan buruh itu, saya pikir banyak hal yang melingkupinya. Padahal saya melihat di beberapa tayangan, ada tayangan in depth story yang jauh lebih dalam dari itu. Tapi saya pikir kelemahan ini ditutup-tutupi dengan pembelaan dalam hal yang lain, seperti pembelaan misalnya dengan memberitakan hal itu berulang-ulang artinya secara tidak langsung media ingin mengatakan ini persoalan yang sangat serius. Nah apakah kita tidak bisa memandang seperti itu? Yang saya khawatir justru efeknya, dengan diberitakan berulang-ulang, tapi efeknya tetep sama, ini yang dalam tanda kutip ini yang bodoh siapa sebenarnya? Dalam kasus SUTET misalnya, itu sudah diberitakan berulang-ulang tapi tidak ada reaksi dari pemerintah, tidak ada reaksi dari PLN, atau apa gitu...Saya bahkan kadangkadang bermimpi media memberitakan sekali, efeknya bisa luar biasa, dan menjadi perubahan nasib yang sedemikian fantastis pada buruh atau pada apapun yang merasa didholimi. Apakah sudah seperti itu? Terima kasih..

## Lampiran 1: Transkrip program talkshow “Diskusi Lembaga Konsumen Media (LKM)” edisi 24 Januari 2006 (sambungan)

RI: Ya, terima kasih. Ini Mas Iman dari kawan-kawan wartawan juga. Ya, silahkan ini di bagian terakhir, kita respon dari Mas Iman sekaligus kita tarik benang merahnya dari perbincangan kita, Pak Henri silahkan...

HS: Ya memang melihat masalah buruh itu dimensinya sangat banyak. Salah satunya tadi saya katakan bahwa aspek kehidupan para buruh ini yang sebenarnya sekarang menjadi persoalan rakyat besar, karena buruh ini adalah bagian besar dari rakyat. Jumlah petani dan jumlah buruh sekarang hampirimbang, buruh sudah 70an juta berarti kan sudah sangat besar. Nah problem-problem ini yang kadangkala kurang mendapat tempat di media, ketika dibicarakan di Metro TV pun yang berdebat itu hanya pemerintah dengan ketua APINDO begitu ya..Kemudian yang mewakili buruh atau yang moderat itu tidak ada. Tetapi memang kadangkala saya juga sudah melihat, ada memang semacam human interest atau feature-feature yang berkaitan dengan buruh, tapi itu sangat belum banyak yang diungkap di media-media kita, jumlahnya masih sangat sedikit kalau dibandingkan dengan problem-problem tentang larinya investor, kemudian persoalan-persoalan bahwa buruh itu menyebabkan Indonesia menjadi tidak menarik bagi investor luar negeri. Padahal itu tidak selamanya persoalan buruh, jadi intinya seperti itu. Nah kami kebetulan melakukan hitung-hitungan dan memang nampaknya secara kuantitatif maupun kualitatif, buruh-buruh kita memang agak sedikit, kurang mendapatkan tempat. Biasanya mereka baru diberitakan ketika sudah ada kejadian kekerasan, tetapi apauntutannya, mengapa mereka ada masalah, itu agak sedikit diungkap. Padahal dalam komunikasi dikatakan begini bahwa kalau sebuah peristiwa itu, katakanlah kelompok-kelompok tertentu itu diberitakan hanya ketika melakukan kekerasan, tetapi persoalan utamanya, pesan-pesan utamanya tidak banyak diberi tempat, maka dia akan cenderung untuk nanti akan melakukan kekerasan lagi, jadi seakan-akan mereka didorong. Kenapa? Karena mereka hanya mendapatkan liputan atau pemberitaan ketika mereka melakukan kekerasan...(dipotong)

RI: Jadi sebetulnya investigasi itu sudah ada ya pak, tapi hanya karena masalah waktu ya, penayangannya ya..

HS: Ya, tapi sebenarnya juga bukan berarti harus diulang-ulang. Kalau diulang-ulang hanya sama juga orang akan bosan, tetapi sebenarnya dimensi-dimensi itu, dimensi kehidupan buruh itu kan luar biasa. Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan John Billgreen ketika dia melakukan investigasi tentang perburuhan di Indonesia dimana yang diambil dari sisi kehidupan buruh, bagaimana ketika anaknya sakit, kemudian berapa gajinya, sampai ke persoalan UMK atau UMR dan kemudian hubungannya dengan global. Nah ini yang kadangkala kita ini agak jarang berpikir secara lebih sistematis, begitu...

RI: Ya, Mas Djoko silahkan..

DS: Ya, kalau dari Mas Iman tadi kan sebenarnya dari wartawan sendiri ada upaya, cuma berkali-kali dicoba juga kadang-kadang sampai pada sisi buntu. Yang ingin saya katakan bahwa, mungkin kita perlu kreativitas karena persoalan buruh versus pengusaha ini kan sampai sekarang hampir sampai pada satu titik buntu. Pengusaha juga dihambat oleh berbagai kenaikan BBM, kemudian sebentar lagi listrik. Sementara buruh juga dihimpit oleh kebutuhan yang sangat besar. Jadi memanas-manas hubungan di antara dua itu sebenarnya akan menghasilkan satu titik buntu yang meningkatkan kekhawatiran dan disini sebenarnya peran pers itu sangat penting dalam rangka membuka arena baru, jadi tidak banyak gunanya memanas buruh-pengusaha ini, tetapi lebih baik kemudian menghidupkan lagi, mendinamiskan arena baru antara misalkan buruh dan pemerintah, juga pengusaha dan pemerintah. Pengusaha dan pemerintah misalkan harus kita blow up besar-besaran pengusaha yang mengatakan misalkan saya mau bayar buruh lebih tinggi asalkan biaya-biaya tinggi pemerintah diturunkan. Itu harus kita blow up besar-besaran karena itu efek sampingnya akan banyak, bisa mengurangi korupsi, bisa kemudian mengefisienkan ekonomi dsb. Nah peran media yang kemudian mendinamiskan arena-arena baru ini sebenarnya bagian dari kreativitas yang kita cari, bukan hanya sekedar menakut-nakuti kemudian juga menambah kekhawatiran yang itu sebenarnya tidak banyak memberi sumbangan.

RI: Baik, buat kita orang-orang media tentunya akan merefleski ke dalam apakah masih banyak kekurangan sehingga dinilai tidak proporsional sementara untuk konsumen media juga kita harapkan lebih jeli lagi dalam yaaa ini kan juga tuntutan dari konsumen medianya juga.

**Lampiran 1: Transkrip program talkshow “Diskusi Lembaga Konsumen Media (LKM)” edisi 24 Januari 2006 (sambungan)**

HS: Ya, radio harus hati-hati karena memang radio itu interaktif dan ketika segmennya dari banyak pengusaha biasanya lalu suara pengusaha lebih banyak, mendominasi. Ini catatan saya untuk Suara Surabaya...

RI: Baik, terima kasih. Pak Henri dan Mas Djoko, demikian kawan tadi kita sudah menuntaskan diskusi interaktif dengan kawan-kawan dari Lembaga Konsumen Media. Dan kami juga terima kasih untuk anda, para konsumen media yang ikut bergabung dalam program ini.

## Lampiran 2: Transkrip program *talkshow* “Bedah Layanan Publik” edisi 21 Maret 2006

Mustika Muhammad (MM): Assalamualaikum...Selamat pagi apa kabar saya Mustika Muhamad kembali berjumpa dengan anda pagi ini dalam program Bedah Layanan Publik, yang hadir tiap hari Selasa mulai pukul 7 sampai pukul 8 pagi nanti. Baik kawan, pagi ini kita akan membedah layanan publik di Rumah Sakit dr. Soetomo karena RS dr. Soetomo sebagai rumah sakit rujukan terutama bagi masyarakat Jawa Timur, tentu ada banyak permasalahan yang harus dihandle para pelayan kesehatan yang ada di sana. Bahkan sering kita mendapat catatan dalam Program Kelana Kota Suara Surabaya, ada beberapa kali laporan tentang pelayanan di RS dr. Soetomo yang katanya masih kurang maksimal. Nah karena itu kita ingin membedah sebenarnya bagaimana sistem pelayanan publik yang ada di RS dr. Soetomo, kita sudah hadirkan dr. H. Slamet Riyadi Yuwono DTMH MARS, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo. Selamat pagi pak...

Slamet Riyadi (SR): Selamat pagi. Assalamualaikum...

MM: Baik kawan, selain ada dr. Slamet Riyadi Yuwono Direktur dari RS Dr. Soetomo, kita juga menghadirkan dr. Sudarso Msc, beliau selain sebagai Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Jawa Timur, beliau juga ketua Pokja Kesehatan Dewan Kota. Selamat pagi, dr. Soedarso..

Sudarso (S): Selamat pagi..

MM: Baik kawan, perbincangan ini juga menjadi milik anda, karena itu untuk anda yang nanti ingin bergabung, silahkan anda bisa memanfaatkan telpon di 560000 dan untuk catatan-catatan lalu lintas maupun kabar-kabar lainnya masih bisa anda sampaikan ya.. Untuk anda yang pagi ini sedang meluncur di kawasan kota Surabaya maupun untuk anda yang sekarang sedang meluncur ke luar kota, tentu saja menjadi harapan kami, kondisi lalu lintas yang anda lalui juga masih tetap lancar, dan nanti kalau ada informasi-informasi yang menonjol, ada kemacetan, kepadatan maupun kabar-kabar yang lainnya bisa juga anda sampaikan supaya kabar-kabar yang anda sampaikan bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan kita yang lainnya. Baik sebelum saya ke dr. Slamet, di ruang gate keeper ada informasi...

### **BREAK**

MM: Baik kawan untuk anda yang baru saja bergabung di FM 100 Radio Suara Surabaya, anda masih bersama saya Mustika Muhammad dalam program Bedah Layanan Publik, dan sekali lagi tema kita pagi hari ini kita mengangkat tentang pelayanan di RS dr. Soetomo. Baik dr. Slamet, kalau kita berbicara tentang pelayanan publik di RS. dr. Soetomo sampai saat ini kita juga masih sering mendapatkan informasi, ada keluhan, ada kurang maksimal disana. Sebenarnya apa saja bentuk pelayanan yang ada di RS dr. Soetomo?

SR: Baik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih bahwa masukan-masukan, keluhan-keluhan itu merupakan perhatian bagi kami untuk perbaikan pelayanan. Pelayanan di sana itu core business, pelayanan utama kita dalam melayani pasien itu ada dua, yaitu yang rawat jalan dan rawat inap, dan kemudian kegiatan-kegiatan penunjang. Kemudian kita ini sekarang adalah rumah sakit terbesar di Indonesia, karena lebih dari 1500 tempat tidur. Kalau di Jakarta yang terbesar 1480 sekian, Cipto...Karyawan kita juga cukup banyak, 5 ribu lebih. Kemudian rawat jalan itu terdiri dari kurang lebih 30 bagian ilmunya, kemudian ada kurang lebih 115 poliklinik. Kemudian di dalam perawatan itu, lebih dari 1500 tempat tidur. Kemudian kegiatan kegawat daruratan di IRT, dan yang terakhir, 2 tahun terakhir ini kita membangun suatu pelayanan yang private, yang untuk VIP, Graha Amerta itu ya sedang berkembang tentu dengan permasalahannya yang cukup banyak, tapi harus kita perbaiki dan makin lama makin kita perbaiki ... Itu kapasitasnya 200 tempat tidur.

MM: Nah, dari berbagai bentuk pelayanan yang ada di RS dr. Soetomo, bagaimana sistem pelayanan yang diterapkan oleh RS. dr. Soetomo sendiri, dok?

SR: Jadi begini untuk kedalam, yang jelas kita ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam manajemen rumah sakit itu sendiri. Yang kesatu adalah kita ingin menampilkan pelayanan yang baik, bermutu pada masyarakat. Yang kedua, selain bermutu penampilannya juga tidak boleh kumuh, walaupun rumah sakit pemerintah, kita penampilannya harus baik. Yang ketiga ini yang terkonsep, bahwa manajemennya harus profesional, jadi tidak asal-asalan lagi tapi kita harus bisa menjawab kepentingan

## Lampiran 2: Transkrip program talkshow “Bedah Layanan Publik” edisi 21 Maret 2006 (sambungan)

konsumen. Nah, untuk ini ada 5 dasar yang harus diperhatikan untuk bisa memberikan pelayanan yang baik. Satu: kita harus menyiapkan SDMnya terutama, brain ware nya, kita mempunyai 450 lebih dokter spesialis, kemudian ada 994 calon spesialis yang sedang belajar di sana dari berbagai tingkat, kemudian ada 850 lebih calon dokter umum yang sedang belajar di sana, namun perawatnya agak kurang, masih 60% dari kebutuhan, ini salah satu kendala mungkin kenapa pelayanannya agak kurang bagus. Yang kedua adalah hard ware nya, jadi peranagkat kerasnya termasuk buildingnya, tadi kita tata dengan master plan yang sekarang baru kita mulai, kemudian peralatan-peralatannya juga kita perbaiki lalu ruang-ruang perawatan juga kita perbaiki. Yang ketiga soft ware nya, jadi prosedur-prosedur pelayanannya harus standardnya yang internasional, terutama di Graha Amerta, lalu juga paling ngga di tingkat nasional. Dengan ISO, dengan akreditasi kita sudah mulai. Untuk tidak ketinggalan dengan dunia kedokteran di negara lain, maka info ware nya, networkingnya juga diperlukan. Jadi kita bekerjasama dengan beberapa pusat pendidikan rumah sakit di luar negeri. Dan yang tidak kalah pentingnya terakhir, yang barangkali masih kurang, yang sering menimbulkan masalah adalah heart ware nya, perangkat hati, jadi sebagus apapun, secanggih apapun kalau delivery servicenya itu tidak dengan sentuhan hati, komunikasi yang baik, itu menimbulkan masalah. Nah masalah komplain yang terbesar selama 1 tahun ini, ada 18 komplain yang masuk sampai dengan hari kemarin, itu sebagian besar, 70 persen lebih adalah masalah komunikasi yang tidak jalan, jadi penjelasan antara petugas dan pasien kurang clear sehingga menimbulkan misinterpretasi sehingga kadang-kadang menimbulkan problem yang harus kita carikan jalan keluarnya. Jadi itu prinsip-prinsip dasarnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, RS Soetomo ini adalah pusat rujukan yang untuk Indonesia bagian Timur jadi seluruh pulau-pulau di timur itu, kasus-kasus yang sulit itu, akan dikirim ke Soteomo. Yang kedua sebagai rumah sakit pemerintah, kita fungsi sosialnya sangat menonjol, jadi 60% tempat tidur kita itu adalah untuk orang miskin, jadi kelas tiga. Nah kalau orang miskin itu harus kita sentuh dengan tidak boleh mengatakan bahwa anda tidak bisa kami layani, karena anda tidak punya uang. Sekarang ada PT.Askes yang sedang mengcover dsb. Tapi di situ karena hal yang baru, ini juga masih ada problem-problem yang barangkali antar petugas kita dengan mereka. Petugas kita ada semacam secure, jadi harus correct, sebab nanti kalau salah ketika diaudit oleh Irjen dsb kita disalahkan sehingga kita saking hati-hatinya, kadang-kadang komunikasi dengan pasiennya akan tidak lancar, kemudian tidak segera lapor ke atasan, sehingga kemudian kebijakan yang sudah ditetapkan itu, operasionalnya di lapangan akan jadi problem. Tapi di sisi lain kita juga harus mulai memikirkan fungsi ekonominya, ingat bahwa 20% lebih masyarakat yang berkunjung ke dr. Soetomo itu, mereka mampu bayar. Tentu dia jangan disubsidi dong, kalau dia mampu bayar 100 ya kita berikan tarif 100, jangan dikasi 50. Nah yang kelebihannya itu kita harapkan untuk menutup ketekorrannya yang orang miskin tadi, nah ini fungsi-fungsi bisnis, tanda petik, itu harus dihitung dengan betul jadi unit costnya aktivitas itu apa, berapa, lalu kita mau jual berapa, mau profit berapa dan profitnya kita gunakan untuk perbaikan pelayanan lagi. Ini mungkin merupakan salah satu konsep yang kita kenal, sehingga kita menerapkan konsep yang namanya socio-economic unit. Jadi rumah sakit itu kita terapkan sebagai fungsi sosial, tetapi untuk berfungsi sosial itu kita harus, prinsip ekonomi harus kita terapkan. Itupun masih sangat kurang, sehingga pemerintah provinsi bukan main subsidiya untuk rumah sakit Soetomo. Alhamdulillah, pak gubernur kita, pak Sekda kita dan DPRD nya sangat mengerti itu sehingga tidak sebanding antara pendapatan rumah sakit itu dengan yang dikeluarkan, namun goal yang beliau-beliau harapkan adalah berikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Nah itu yang barangkali komitmen dari pemilik rumah sakit ini, saya harus menjabarkan itu yang pelayanan terbaik itu yang bagaimana itu. Disinilah secara operasional, secara teknis harus bisa dicerna kemudian mutunya juga harus baik sesuai dengan standar kaidah-kaidah medisnya, tetapi juga baik menurut pasien. Nah untuk pasien itu ada 5 hal, yang gampang. Yang pertama, lapis pertama yang gampang itu adalah dia ingin alur yang jelas, jadi kalau datang kesana itu habis ini kemana, yang kedua waktu yang jelas, jadi kapan saya ketemu dengan dokter, kapan saya dilayani, kapan selesai. Yang ketiga, biaya yang jelas, sebetulnya kalau saya operasi ini berapa sih biayanya. Itu lapis yang pertama... Yang kedua, dia juga ingin tempat yang nyaman, ini lapis yang berikutnya, kemudian yang bermutu, artinya jaminan keselamatan, bahwa kalau masuk Soetomo itu bukan malah berat penyakitnya tapi menjadi sembuh atau meringankan penyakitnya. Ini harapan dari pasien, yang terakhir ini kenyamanan, kalau bisa nyaman deh, harganya murah, tapi dilayani dengan senyum, istilahnya barangkali pasiennya kaki lima, tetapi pelayanannya harus bintang lima. Jadi pasien menghendaki seperti itu, disitulah ada gap antara harapan dengan kenyataan yang ada, nah kenyataan ini yang brangkali harus kita olah.

## Lampiran 2: Transkrip program talkshow “Bedah Layanan Publik” edisi 21 Maret 2006 (sambungan)

MM: Nah dokter, katakanlah di sini harapannya begitu besar kemudian realitasnya masih kurang. Tentu saja di sini ada beberapa kendala-kendala dalam memberikan pelayanan terutama kalau goalnya adalah kepuasan pasien. Nah sejauh ini yang dialami oleh pihak dr. Sotemo sendiri dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien sehingga pasien merasa terpuaskan itu apa, dok??

SR: Pertama yang paling menonjol adalah faktor SDM, jadi jumlah SDM, kalau dokternya, kita Insya Allah sudah cukup. Yang kurang menonjol adalah perawat, jadi anda bayangkan, satu orang perawat terutama kalau malam hari, ini meningkat sekali, tingkat hunian kita lebih dari 80% sekarang, tempat tidurnya hampir terisi 80% lebih dan 1 perawat itu bisa mengawasi 30 orang. Andaikata dalam waktu yang sama, 10% saja mengeluh dalam waktu yang sama, maka dia yang dicover hanya sepertiga. Berarti komplainnya, tingkat kepuasannya itu hanya 30%, itu pun kalau melayaninya baik. Jadi waktu perawat ditunggu, saya sudah mengeluh kok ngga dateng-dateng, dia tidak sedang tidur, dia sedang merawat pasien yang lain. Tetapi yang kedua ini tidak terlayani, baru berikutnya...

MM: Artinya di sini, jumlah perawat yang sangat minim seringkali juga berpengaruh pada layanan terhadap pasien ya, sehingga seringkali yang muncul pada pasien, wah mentang-mentang saya bayar murah akhirnya ngga dilayani.

SR: Lalu berikutnya, akibat yang rasio antara petugas dengan pasien, terjadi exhausted, kecapekan perawat itu sehingga kadang-kadang emosional itu menjadi sangat rentan. Ini bukannya saya excuse, jadi kalau perawat saya marah-marah terus dipahami, bukan begitu. Ini akan kami perbaiki terus oleh karena itu saya ingin mengajak masyarakat, tentu melalui organisasi yang ada, kita sudah undang dewan kita untuk barangkali datang ke Sotemo, kemudian Lembaga Perlindungan Konsumen, itu juga sudah kita undang ke rumah sakit, supaya beliau-beliau itu tahu sebetulnya apa yang terjadi di dalam. Jadi katanya kalau kita membuka rumah makan, kalau mau laris dijual itu, maka konsumennya itu kita bawa ke dapur tempat kita masak. Kita lihat dulu, kita masaknya bersih, sehingga dia yakin betul mutu makanannya terjamin. Nah bawa konsumen itu ke dalam proses produksi, kita ajak mereka bagaimana kita melakukan operasi, bagaimana mereka lihat temen-temen kita jaga 24 jam di IRT, dengan segala suka dukanya di rawat inap. Sehingga ketika memberikan masukan, kontrol itu proporsional, begitu....

MM: Selain SDM, dok.. Ada permasalahan yang lain?

SR: Yang berikutnya, faktor peralatannya, fasilitasnya ini kita pelan-pelan selama 3-4 tahun terakhir ini, sudah makin kita lengkapi tetapi alat-alat medis memang sangat mahal sehingga ini yang harus kita perbaiki. Kemudian tata letaknya, Soetomo itu tata letaknya, situasinya itu semrawut itu.. Artinya kalau masuk ke dalam itu sulit untuk keluar dsb, makanya kita tata dengan master plan dsb, maka mulai tahun lalu kita tata lagi sesuai dengan perintah bapak gubernur untuk menata itu. Insya Allah nanti sampai 2008 akan terlihat bahwa tata letaknya bagus, main gate nya, pintu masuknya mana, penunjuk arahnya mana. Ini salah satunya, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mind set kita, para petugas kesehatan kita yang tadinya merasa dibutuhkan oleh masyarakat, menjadi kita balik kita membutuhkan mereka, sebagai pelayan. Ini barangkali kata kuncinya, memang sulit tapi itu harus dilakukan dan kita harus persuasif memberikan contoh pada mereka bahwa kalau rumah sakit ini di era sekarang ini ingin dicintai oleh konsumennya, kita harus terbalik mind setnya, kita butuh mereka. Kalau kita butuh mereka, kalau mereka dateng jam 8 mungkin kita harus dateng jam 7. Tapi kalau mereka butuh kita, mereka dateng jam 7, ya nanti aja jam 10, wong mereka butuh kita kok, biarin nunggu aja. Ini barangkali kata kunci yang harus kita lakukan..

MM: Baik, kawan anda masih mengikuti program Bedah Layanan Publik dan kita mengangkat tentang pelayanan di RS dr. Soetomo. Tadi di awal sudah diberikan penjelasan oleh dr. Slamet Riyadi, Direktur RS dr. Soetomo, tentang bagaimana sistem pelayanan yang ada di RS dr. Soetomo. Baik dr Sudarso, tadi sudah banyak paparan ya, menurut anda gimana ini, dok?

S: Terima kasih, ya tadi dr. Slamet sudah nyampaikan bahwa sekarang ada perubahan paradigma dimana masyarakatlah yang harus dilayani. Sebetulnya kalo Suroboyanan itu, masyarakat itu menghendaki 4 Mu, yaitu mampu membayar, yang kedua mudah, yang ketiga tenaga kesehatan itu mumpuni, dan yang terakhir itu mustajab. Mustajab adalah arti kata menyelesaikan segala sesuatunya

## Lampiran 2: Transkrip program talkshow “Bedah Layanan Publik” edisi 21 Maret 2006 (sambungan)

secara profesional. Lalu mustajab itu, kadang-kadang keluarga pasien itu, dengan ketenangan, dengan layanan yang baik itu, sudah rasanya nyaman. Jadi datang itu dengan senyum dsb.. Jadi saya urutkan, mampu: mampu sesuai dengan kemampuan mereka memang, kemudian mudah: alurnya mudah, jelas, prosedurnya tidak berbelit. Jadi selama menunggu itu ada tretament-treatment yang tadi mustajab itu untuk keluarganya itu tenang. Jadi misalnya begini, tunggu!! (nada perintah), itu lain dengan maaf ya, ini sebentar ya, ditunggu. Itu agak berbeda kata-kata itu. Lha inilah masyarakat itu begitu kadang-kadang, sehingga kadang-kadang itu dimanjakan. Dan kalau saya melihat perkembangannya memang rumah sakit ini luar biasa, sudah mulai tertata, kalau dulu rumah sakit itu kan putih gitu ya, sekarang agak dirubah kuning-kuning,, suapaya agak nyaman. Itu luar biasa apalagi nanti di tengah-tengahnya ada pot-pot, itu kesannya sungguh nyaman...

MM: Jadi kesannya bukan lagi sebuah rumah sakit ya, dok..

S: Ya, rumah sakit tapi ya itu tadi, terkesan mustajab bagi keluarganya maupun bagi pasiennya itu. Itu yang sementara kami tangkap dari dewan kota, dari masukan para masyarakat di kota Surabaya, itu beberapa kali diskusi di dewan kota...

MM: Baik kita sudah ditunggu 2 penelepon ini, kita ajak mengudara dulu. Selamat pagi Suara Surabaya, dengan siapa ini pak??

Pak Iwan (pendengar): Selamat pagi pak dokter. Saya punya pengalaman yang agak buruk ya di dr. Soetomo. Lima tahun yang lalu, mungkin Pak Slamet belum menjabat, itu saya diobservasi di poli bedah dan saya diharuskan untuk operasi. Kemudian saya disuruh mengantri, di dekat sal H kalau tidak salah itu, kemudian disana kayaknya saya dioper, saya harus mengantri kamar operasi itu selama 6 bulan, tidak hanya saya saja, ada pasien dari luar kota juga begitu. Saya pake ASTEK ya pak, kemudian saya selama itu akhirnya tiap hari tiap minggu saya istilahnya absen untuk mendapatkan kamar operasi. Mengingat penyakit itu kalo makin lama makin disimpan itu kan tidak baik, akhirnya saya mencari informasi bahwa disitu tanda kutip ada mafia, mafia yang bisa mempercepat operasi. Akhirnya saya melakukan pendekatan dengan petugas terima, memang kalau you mau cepet operasi ya harus pilih dokternya. Kalau dokter PPDS itu lama, kalau mau cepet ya ke dokter spesialis. Silahkan pake pelayanan ASTEK, tapi dokternya harus pilih dokter ini dokter itu. Saya tanya lagi, kalo pake dokter spesialis, berapa? Sekarang masuk besok operasi. Lha saya menangkap seperti itu, itu realita memang di lapangan seperti itu, ternyata memang ada permainan seperti itu...

MM: Itu yang dimaksudkan perbedaan pelayanan, begitu yaa..Antara ASTEK dan tidak

Pak Iwan (I): Iya, betul. Dokter boleh dipilih, dokter spesialis kemudian silahkan pake ASTEK nanti kelas tidak dipermasalahan, tapi dokter terserah. Jadi saya waktu itu agak emosi, karena...(dipotong)

MM: Pak Iwan, langsung saja pada poinnya bapak..

I: Iya, saya harapkan ke depan Dr. Soteomo tidak hanya dalam segi pelayanan di rawat inap tapi dari segi medis yang lain. Terima kasih..

MM: Terima kasih...Suara Surabaya selamat pagi. Bu Nina silahkan...

Ibu Nina (pendengar): Selamat pagi dokter.. Ya, saya sebagai masyarakat peduli kesehatan yang pernah diundang bersama LPKS, bersama rekan-rekan pengamat kesehatan, dari mulai lapangan parkir sampai pembuangan limbah sudah kami kritisi kemudian ternyata di sana harus tersenyum terus menghadapi pasien dan kalau ada masalah layanan, ada komite medik, kalau ada dokter yang nakal, ada komite etik. Jadi saya membaca, dokter itu jangan selalu dihukum, yang saya inginkan bagaimana untuk sentuhan hati yang telah dijelaskan pada dr Slamet tadi, bagaimana reward terhadap dokter-dokter ini? Kalau hukuman, punishmentnya tadi ada di kode etik. Pada waktu kunjungan selama 10 hari tidak dijelaskan kapan dokter-dokter itu diberangkatkan untuk ngangsu kawruh di tempat lain, untuk menimba ilmu di tempat lain, karena itu juga untuk mengurangi stress selain menambah ilmunya. Saya khawatir karena

## Lampiran 2: Transkrip program talkshow “Bedah Layanan Publik” edisi 21 Maret 2006 (sambungan)

dokter itu on call 24 jam, karena terbukti ketika Prof Edi menyelamatkan seorang pasien yang seharusnya-nyuwun sewu- nyaris meninggal tapi bisa diselamatkan dengan tujuh tenaga medis yang ada ketika kami kunjungan. Nah kami khawatir dokter, kalau para dokter-dokter PPDS, yaitu dokter pendidikan spesialis yang membantu perawat dan para medis lain tidak diberikan rekreasi, ngangsu kawruh di tempat lain, kemudian sentuhan hati dan senyum itu saya khawatir nanti karena stress tidak bisa merawat dengan senyum. Ya ini karena pada saat kunjungan tidak dijelaskan reward kepada para pegawai dan paramedis yang lembur itu tadi apa ada kompensasi, meskipun tidak berupa uang tapi ada kompensasi waktu istirahat atau rekreasi. Jadi reward-reward, karena SDM-SDM yang ada di sini yang jumlahnya 400 merupakan aset yang berharga buat bapak. Terima kasih..

MM: Baik, terima kasih. Suara Surabaya, selamat pagi..

Pak Iwan (pendengar): Assalamualaikum..Selamat pagi. Ini kami seperti meneruskan apa yang disampaikan bu Nina yaitu tentang kompensasi kerja. Mungkin kompensasi kerja ini keliatannya kalo didiskusikan kok rada ngga pas tapi bagaimanapun juga itu menyangkut dengan tingkat service yang dapat diberikan oleh SDM. Dalam hal ini apalagi nanti bapak akan mengoperasikan rumah sakit yang kelasnya lain, apakah kompensasi-kompensasi kerja yang diberikan bagi SDM di rumah sakit itu berbeda dengan yang ada di biasa? Dan kalau hal itu terjadi, apakah tidak akan terjadi semacam kesenjangan sosial? Maturnuwun...

MM: Terima kasih, Pak Iwan. Baik kawan untuk yang lainnya yang masih ingin bergabung silahkan anda bisa telpon di 560000, anda masih mengikuti program Bedah Layanan Publik.

### **BREAK**

MM: Baik, anda masih mengikuti program Bedah Layanan Publik dan pagi ini kita membedah pelayanan di RS dr. Soetomo bersama dr.H. Slamet Riyadi Yuwono Direktur Utama RS dr. Soetomo dan juga dr. Sudarso Msc Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Jatim dan ketua Pokja Kesehatan Dewan Kota Surabaya. Baik dr. Slamet, sudah ada 3 kawan memberi catatan, Pak Iwan, Bu Nina dan Dr.Iwan. Silahkan..

SR: Ok, terima kasih jadi ada 3 pertanyaan ini kita kelompokkan menjadi dua. Pak Iwan yang bukan Dr dan Bu Nina dan Dr. Iwan ini saya kira hampir sama. Pak Iwan, jadi itu keluhan tentang antrian operasi begitu ya.. Jadi kembali kita punya gedung pusat diagnostik, sekarang gedung bedah pusat, dulu sebelum dibangun itu hanya 12 kamar operasi, sekarang kita sudah menjadi 22 kamar operasi dengan harapan mempercepat pelayanan dan ini sudah beroperasi kurang lebih 4 tahunan. Kemudian problem ini sering muncul, antrian ini, pasien disana itu dibagi 2, pasien yang paviliun yang biasanya dirawat di Graha Amerta atau di bedah I, kemudian pasien yang non paviliun. Kemudian yang non paviliun dan bedah I tadi, dia memang memilih dokter, agak private, dia ingin dibedah oleh siapa itu, antriannya tergantung dari dokter tersebut sudah punya pasien berapa. Tetapi yang non paviliun, dia harus antri sesuai daftar urutnya. Untuk menghindari dalam tanda kutip, permainan tadi, maka sekarang kita punya KTP, jadi untuk klinik bedah terpadu, jadi ada suatu unit yang dia mendaftar semua yang mau operasi tadi, KTP tadi, untuk dijadwalkan sesuai dengan jenis penyakitnya. Nomer telponnya 5501135, jadi silahkan complain atau menyampaikan kalau urutannya panjang. Ini kita siapkan nomer telponnya, khusus ini untuk poli bedah. Di poli bedah itu, ada yang mengatur tentang antrian bedah tadi. Telponnya 5501135, dan nanti akan diatur secara proporsional sesuai dengan urutannya tadi.

MM: Jadi katakanlah, memang dalam pelayanan bedah sendiri, kalau itu non paviliun maka harus sesuai dengan daftar urutannya...

SR: Nah urutan ini kadang-kadang terganggu ketika ada emergency, jadi ketika ada gawat darurat maka kita harus nyawa dulu itu..Jadi misalnya sudah dijadwal, tiba-tiba ada pasien yang gawat, tiba-tiba ada kecelakaan lalu lintas, dan dokternya sama maka harus mendahulukan yang nyawa tadi, ia harus lari ke IRD itu. Nah hal-hal seperti ini, kadang-kadang komunikasi terhadap pasiennya yang tidak jelas. Bu, ditunda.. kenapa? Wis pokoke ditunda.. Ini yang kadang-kadang tidak jelas, atau komunikasi yang di rumah sehingga bapak ibu yang antri di dr. Soetomo tidak perlu harus ke rumah sakit, telpon saja

## Lampiran 2: Transkrip program talkshow “Bedah Layanan Publik” edisi 21 Maret 2006 (sambungan)

nanti akan kita jadwal. Lalu ada 3 kelompok operasi tadi, kelompok yang harus cepat, gawat darurat tadi, lalu ada kelompok operasi besar yang memerlukan waktu yang panjang contoh dalam waktu dekat ada operasi face off yang butuh waktu lama, kembar siam yang butuh waktu lama, ini menyebabkan antriannya menjadi molor ini, lalu operasi-operasi yang ringan. Mudah-mudahan kita akan perbaiki istilah yang mafia tadi...

MM: Jadi istilahnya seperti yang tadi dikeluhkan pak Iwan tadi, adalah miskomunikasi antara dokter atau perawat dengan pasien.

SR: Ya, makanya transparansi menjadi sangat penting. Ini lho jadwal operasinya, ini adalah orangnya lalu ketika ada penundaan dikomunikasikan. Yang kedua saya setuju dengan Bu Nina itu, reward. Jadi reward dan punishment sebenarnya, di rumah sakit pemerintah itu kadang-kadang tidak jelas reward dan punishmentnya. Kadang-kadang orang-orang yang bolosan tadi, punishmentnya apa, ini mungkin yang perlu dipikirkan. Reward itu ada materiil dan nonmateriil, misalnya yang nonmateriil, kita sekarang di rawat jalan ada yang namanya perawat idol, perawat idola, jadi dia dipilih oleh pasien. Jadi pasien itu akan membuat suatu, ini saya milih ini, dikumpulkan, dia dapat banyak, dia akan mendapat sebagai perawat yang idol tadi. Di IRD juga demikian. Lalu kalau untuk peningkatan pengetahuannya, sebetulnya beruntunglah kita sebagai teaching hospital-rumah sakit pendidikan-mereka para dokter itu, atas sendiri dia selalu meningkatkan kemampuannya, mengikuti seminar-seminar dan updatenya baik di dalam maupun di luar negeri. Tolong jangan dicemburui, kalau-kalau dokter saya itu relatif sering ke luar negeri-bukan ngelencer dia- dia akan menimba ilmunya dan pulangnya akan diterapkan disini.

MM: Itu bukan atas prakarsa dari pihak rumah sakit ya, dok?

SR: Ya, sepengetahuan. Tapi biayanya mereka akan koordinasi dengan jaringan organisasi profesinya, ini barangkali yang perlu diketahui bahwa peningkatan kemampuannya, dia bisa operasi kembar siam, dia bisa transplan ginjal, dia Insya Allah sebentar lagi akan bisa memface off, operasi yang sebentar lagi akan dilakukan. Itu relatif kita, pemerintah itu tidak membiayai itu, ada sekedar barangkali namanya jasa pelayanan itu sebenarnya tidak berarti kalau dibanding dia harus melakukan pengobatan di swasta. Oleh karena itu maka Graha Amerta itu salah satu bentuk memberikan reward materiil pada mereka, dengan pelayanan yang private tadi. Silahkan dirawat di sini, dioperasi disini, lalu di sebelahnya lagi dia harus ngajar disitu gitu, jadi dia harus mengajar, melayani harus operasi dsb. Ini salah satu bentuk tujuannya kenapa Graha Amerta yang jamannya Prof. Dikman (??) itu dibangun, untuk itu tadi..Dia lebih kerasan, at home di rumah sakit kemudian ada reward materiilnya tapi beliau juga kewajiban mengajarnya juga dilakukan. Kemudian pak Iwan juga hampir sama, jadi rumah sakit ini kalau ada komplain, kita punya manajemen komplain yang terstruktur tadi, kalau masalahnya masalah etik maka ada komite etik itu, kalau masalah-masalah medis maka ada komite medik. Kalau masalah-masalah yang misalnya kenyamanan dsb, ini ke jajaran direksi tadi, ke bagian penunjang dsb. Jadi komplain yang 18 komplain itu kita pilah-pilah, ini masalah medik, masalah etik, atau masalah mutu layanan atau masalah lain-lain. Ini barangkali ada sistemnya, jadi setiap keluhan apapun baik melalui kotak saran, melalui mass media, kita kelola. Seperti kemarin kasus yang barangkali sedang kita bicarakan tadi, komplain umpamanya tentang orang ASKES mbayar dulu...

MM: Nah mekanisme-mekanisme katakanlah dok, mekanisme bagi pasien yang ingin komplain sendiri ini, mekanismenya seperti apa?

SR: Kalau komplain sendiri, jalurnya..Jadi kita punya saluran-saluran yang ada, jadi silahkan, bergantung pada kasusnya. Kalau yang pelayanan publik secara umum, kita menyediakan telponnya, mungkin bisa dilihat di koran ya, no telponnya adalah 5501259, 5501239 atau di flexi 70813188, ini yang sifatnya komplain secara umum. Tapi kalau lokusnya jelas, misalnya ada pelayanan di IRD, kita siapkan di sana, 5501488, ya silahkan dan sekarang sudah...

MM: Jadi artinya di sini sudah ada hotline-hotline..

SR: Ada hotlinenya, kita pasang sekarang di depan taman-taman di IRD. Kalau anda ada keluhan silahkan hubungi ini. Mungkin di rawat jalan, di IRJ dsb, sekarang kita pasang itu dan sekaligus dengan

## Lampiran 2: Transkrip program talkshow “Bedah Layanan Publik” edisi 21 Maret 2006 (sambungan)

tarif-tarifnya juga terpancang di situ sehingga alurnya juga ada di situ. Kalau rawat jalan juga ada lagi, bisa menggunakan website, kita punya juga website yang bisa komunikasi lewat http.... Jadi yang ke dokter rudi, di sana juga ada. Lalu khusus Graha Amerta juga ada sendiri, 5012155 dan 5501355 atau di fax juga bisa, lalu customer service khusus Graha Amerta 370541355, barangkali...

MM: Berarti ketika seorang pasien masuk ke loket, itu di sana sudah jelas gitu ya dok, katakanlah prosedurnya seperti apa, biayanya seperti apa...(dipotong)

SR: Ya, jadi alur yang..sudah kita pasang di depan loket, jadi habis ini mau kemana. Tapi karena tarif ini ribuan, tidak mungkin dipasang. Mungkin yang paling banyak, misalnya tarif karcisnya berapa, jadi sambil membayar dia bisa melirik ke tas,oo sesuai ndak itu. Kita maskudnya transparansi di situ, jadi nanti makin lama masyarakat akan makin mengontrol pelayanan rumah sakit, kepastian pelayanan rumah sakit, kepastian biayanya dan alurnya harus jelas. Jadi ini kita pasang di berbagai tempat, alurnya habis gini harus kemana dsb. Ini salah satu komitmen kita untuk keterbukaan dengan mereka...

MM: Ya, sebelum saya ke pak Sudarso, kita ke penelpon dulu ya pak..Selamat pagi.

Pak Sumarwito (pendengar): Selamat pagi, Pak Slamet dan Pak Sudarso. Tadi apa yang dipasang di taman tadi, semboyannya apa, saya lupa karena waktu saya ikut kunjungan itu ada semboyannya yang bagus itu ya...Terus ini, kenapa banyak penunggu pasien yang keleleran di situ, dok? Ya itu apa nanti ndak kena undang-undang pelayanan publik ya, di situ keleleran, ada yang tidur, ada yang pacaran juga..Terus terang saja, waktu saya ikut kunjungan dengan Bu Nina itu, itu salah satu dokter, itu kalo malem PSK juga ada disitu. Itu apa ndak ada petugas kepolisian atau satpol PP yang ngatur, tapi itu kalau diusir lha wong ga duwe, orang luar kota, lha gimana caranya, apa dana dari provinsi minta tambah lagi gitu? Nah satu lagi untuk tempat parkir, yang bagus di Graha Amerta, yang lainnya itu yang saya liat itu, perbagian perbagian, per pintu-pintu itu masuk sakkarepe dewe, ditarik duik dhisik, montor'e ga diatur, terus keliatannya dikuasai preman-preman. Gimana Pak Slamet, itu ngatur preman-preman itu minta bantuan petugas kepolisian? Terima kasih pak...

MM: Selamat pagi Suara Surabaya...

Pak Iwan (pendengar): Selamat pagi dokter, gini saya tadi setuju banget dengan perubahan paradigma bahwa kita sekarang harus mencari konsumen ya, karena sekarang sudah mulai banyak rumah sakit baik swasta maupun yang dari luar negeri yang sudah mulai mengembangkan pasarnya di Indonesia khususnya di Surabaya. Ya mungkin kemudian paradigma itu bisa dilebarkan seperti ini bahwa kalau ke rumah sakit, itu, berkunjung, dulu kan selalu ada kesan menakutkan, sekarang harus sudah mulai dipublikasikan bahwa rumah sakit itu menyenangkan. Dengan harapan konsumen nanti nggak cuma sekali dua kali kapok tapi punya rasa kangen kapan sih ke rumah sakit lagi, tapi bukan mengharap sakit lagi, tapi dengan pelayanan, dengan suasana yang dibangun dengan seharmonis di hotel, begitu ya. Lha itu butuh suatu langkah yang besar tapi dengan langkah kecil itu kita bisa mulai. Nah ini dari ....(??) sendiri juga punya perhatian terhadap dunia kesehatan sekarang ini, pak..Kita sudah coba mendekati Ibu Menteri Siti Fadillah kemudian kita melalui teman-teman rumah sakit di Jakarta yang kebetulan waktu itu kita undang RSCM, itu kita coba membuat public relation bahwa pembenahan rumah sakit ini sudah harus berubah mulai sekarang, karena jika tidak nanti pasar yang ada di Indonesia akan lari semua. Lha ini apakah di dr. Soetomo sudah mulai punya pemikiran seperti ini? Khususnya kalau dari kita, ...(??) itu, meng approach dari manajemen operasionalnya ya, karena kita tahu dr. Soetomo sangat bagus dalam hal manajemen administrasinya.. Gitu aja, terima kasih.

MM: Terima kasih, Pak Iwan..

### **BREAK**

MM: .....Baik anda masih mengikuti program Bedah Layanan Publik dan pagi ini kita membedah program pelayanan di rumah sakit dr. Soetomo bersama dr.Slamet Direktur Utama RS dr. Soetomo dan juga dr. Sudarso Msc Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Baik sebelum saya ke materi pesan, ya pak Sudarso ada beberapa catatan yang ingin disampaikan...

## Lampiran 2: Transkrip program talkshow “Bedah Layanan Publik” edisi 21 Maret 2006 (sambungan)

S: terima kasih, jadi dari pendengar yang masuk dan dr. Slamet tadi, sudah luar biasa menata rumah sakit ini dan kami mengetahui begitu berat ya. Tapi mungkin kami dari Dewan Kota sesuai dengan masukan yang ada, itu tadi komunikasi itu sudah jelas, seperti menyampaikan kata, ini memang keliatannya hal yang sepele, tapi itu merupakan faktor yang penting. Seperti: kita tunda!! (perintah), dengan tolong, mohon maaf, ini masih... (sopan), itu berbeda. Jadi kata-kata, kalimat, yang bu Nina tadi sentuhan hati pada pasien, jadi ini yang kadang-kadang... Karena saya melihat rumah sakit dr. Soetomo itu secara phisycal sekarang sudah jauh beda, environmentnya, sanitasinya sudah cukup bagus. Tapi komunikasinya, pulasan dari komunikasi supaya betul-betul... Ya namanya orang sakit kadang kan sensitif sehingga perlu sentuhan, bahasa komunikasi yang.. Karena masyarakat itu ingin performancenya begitu, ngga tau yang di belakang, pokoknya yang dengan saya itu baik begitu. Tentang ini dari pak Sumarwito, tentang yang keleleran itu memang begitu, sehingga kadang-kadang mengganggu etika dan lingkungannya sekitar apalagi kalau buang sampah sembarangan ds. Mungkin ya ini juga masukan dari kami...

### **BREAK**

MM: ....Baik anda masih mengikuti program Bedah Layanan Publik dan pagi ini kita membedah program pelayanan di rumah sakit dr. Soetomo bersama dr.Slamet Direktur Utama RS dr. Soetomo dan juga dr. Sudarso Msc Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Baik dok sebelum kita tanggapi pak Sumarwito dan Pak Iwan tadi, ini sudah ada yang menunggu kembali...Selamat pagi dengan bu Ratih. Silahkan..

Ibu Ratih (pendengar):..jadi saya juga cukup mengetahui lah apa yang dipaparkan tempo hari dan saya juga melihat sendiri mungkin karena tegangnya itu, kadang-kadang seyumnya itu ketinggalan. Nah itu memang kita nggak bisa memungkiri, kadang situasi begitu tegang bagaimana kita mau, tapi itu pertama kali kita masuk dr.Soetomo itu seyogyanya memang sudah harus dengan senyum, jadi tidak menampakkan...Untuk informasi, mungkin budaya masyarakat kita kurang senang membaca gitu ya dan juga tulisan di dr.Soetomo itu mungkin agak kurang besar dan mungkin untuk orang yang dari desa, maaf mungkin kurang begitu paham. Jadi bisalah itu selain informasi tulisannya agak besar, itu juga ada 1 orang atau beberapa orang yang bisa memandu gitu pak. Jadi mungkin seperti pramugari kalau kita naik pesawat, sudah ada yang memandu. Pertama kali sudah pasti senyum, kemudian menyapa, ditanyakan mau kemana, nah ini dijuruskan langsung jadi mereka ngga bingung. Terus terang saya kalau datang ke sana sendirian itu, pertama kali lagi, mungkin saya ya bingung, kelabakan pak. Kemudian yang kedua, untuk perawat. Ini kan saya juga merasa waktu saya kunjungan itu, saya lihat memang kurang ya pak, apakah itu tidak bisa dengan dinas propinsi atau daerah meminta tambahan perawat gitu, karena kalau melelahkan susah sekali itu pak, satu banding 30. Istirahatnya sangat-sangat kurang. Itu dari saya, terima kasih...

MM: Terima kasih, bu Ratih.

### **BREAK**

MM: Baik dok sebelum kita tanggapi Pak Sumarwito, Pak Iwan, dan bu ratih, katakanlah disini memang keinginannya memberikan pelayanan yang terbaik, tapi ternyata masih ada kendala-kendala pada SDM yang tadi juga disampaikan dr.Slamet terutama komunikasi dsb. Katakanlah di sini bentuk treatment atau pengawasan dari pihak dr. Soetomo terhadap perawatnya atau manajemennya, itu seperti apa dok?

SR: Ok, secara umum ingin saya sampaikan bahwa harus ada konsep yang jelas, bahwa kita ingin memberikan pelayanan yang ideal dengan bentuk rumah sakit yang bagus, pelayanan yang dengan senyum dsb, itu goalnya..Lalu kita ukur kita sekarang sampai dimana, nah untuk dari sekarang sampai kesana itu ada program-program yang harus kita lakukan. Program yang sekarang kita lakukan itu untuk menengah dan jangka panjang. Kembali kelemahan tadi, karena inti dari manajemen adalah leadership, inti dari leadership adalah hubungan antar manusia, inti dari hubungan antar manusia adalah komunikasi, komunikasi adalah inti dari segala inti suatu permasalahan di rumah sakit ini. Nah oleh karena itu, teknik yang kita lakukan adalah bagaimana teknik komunikasi, cuman komunikasi senyum itu tidak bisa dikomando, how to command smile itu ngga bisa, tapi how the inspire the heart, jadi

## Lampiran 2: Transkrip program talkshow “Bedah Layanan Publik” edisi 21 Maret 2006 (sambungan)

bagaimana sentuhan hatinya. Nah bagaimana menyentuh hatinya, faktor-faktor ada kesejahteraan, lingkungan kerja, reward tadi, barangkali faktornya tidak segampang yang dilihat tadi, coba perawatnya suruh senyum, sudah kita latihkan di JRP, John Robert Power, sudah kita latihkan di ISQ tapi kalau kesehariannya seperti itu pasti akan kembali ke naturenya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh excuse, kita lakukan walau sedikit-sedikit bergerak, jadi kita punya beberapa program, misalnya program buku saset kecil, jadi perawat dan petugas sudah punya buku saset: salam, senyum, tanya, jadi kalau salam, misalnya selamat pagi, assalamualaikum, kemudian senyum lalu kita tanya. Ini panduan-panduan yang kita buat, tapi tidak semudah itu untuk dilakukan, walaupun dia melakukan tapi tidak dengan hati, kayak robot. Tapi kalau dengan hatinya, faktor hati yang kita analisis tadi, faktor kesejahteraan harus dipikirkan, lingkungan kerjanya, peralatannya lengkap supaya dia bisa bekerja dengan leluasa dsb.

### BREAK

MM: Berarti di sini katakanlah dalam bentuk pengawasannya apakah juga bisa dari kode-kode etik yang tadi disampaikan dok?

SR: Ya, jadi sebagai seorang profesional itu adalah rahasia yang otonom. Jadi dia mempunyai profesi yang otonom, digerakkan oleh hati dan profesinya. Ini ciri-cirinya jadi tidak bisa dikomando, sehingga perintahnya ada melalui etika dan peningkatan kemampuan profesinya tadi. Ini barangkali kata kuncinya disana sehingga kita memberikan panduan-panduan, buat kelompok-kelompok tadi, misalnya kepala ruangnya mengawasi anak buahnya tapi dia sekedar mengingatkan tolong senyum, tapi bukan jam 7 sampai jam sekian harus senyum, ngga bisa itu. Kayak orang baris, walaupun senyum itu dia kaku, jadi mungkin istilahnya obat simptomatis, kalau panas dikasih paracetamol, tapi kalau sakitnya ngga pernah diselesaikan. Nah di sini yang jangka menengah panjang itu kausatifnya, bagaimana saya berusaha meningkatkan kesehatan mereka. Bagaimana lingkungan kerjanya supaya bagus, alat-alatnya harus dilengkapi. Nah ada lima dasar yang harus diperhatikan supaya mereka dilihat oleh konsumennya bagus, yang satu yang terukur, tangible, jadi penampilannya, bajunya, sekarang tidak harus putih, anda lihat disana sesuai dengan, hari senin apa, Selasa apa. Lalu dandanannya rambutnya, tidak harus pake... (??) silahkan yang kira-kira tidak menakutkan tadi saya setuju, bau kreolin kita hilangkan, jadi bau yang masih aman tapi yang wangi, yang seger. Warnanya tidak harus putih, dia warna kainnya... (??) misalnya, kalau dulu kita sakit, kecil kan, tak suntik ke dokter lho, jadi memang dokter itu sebagai momok ke rumah sakit, sehingga kita sekarang menjadi familiar. Yang kedua responsif, artinya tanggap, lalu empati, senyum, cara memandangnya, lain memandang dengan kosong dan penuh perhatian, lain itu, cara kedipan matanya, ucapannya, gerakan tangannya, itu empatinya. Lalu juga assurance, jaminan bahwa dia kalau datang ke situ, dilayani dengan baik dengan mutunya yang baik. Insya Allah kalau Soetomo sebagai teaching hospital, itu mutu-mutu pelayanannya standard, karena kita sudah diaudit dengan text book yang terbaru dsb. Ini barangkali yang perlu kita perhatikan....Kemudian pak Sumarwito tentang parkir, insya Allah dalam waktu dekat kita akan bangun dua buliding, tingkat masing-masing empat lantai untuk parkir tadi, sehingga nanti setingkat dengan pelayanan di Graha Amerta. Terus juga ini masih dalam konsep master plan, gambaran yang sudah jadi, kalau kita akan membangun sebuah hotel di sebelah timurnya Graha Amerta itu yang untuk menampung keluarganya pasien di Graha Amerta yang di kelas atas itu, lalu di bawahnya itu untuk menampung mereka yang sekarang keleleran di lorong-lorong itu. Itu konsep yang akan kita lakukan, kemudian digunakan juga untuk nginep, kalau Sabtu minggu kan juga ada pendidikan dokter berkelanjutan, setiap Sabtu minggu, ada dokter bedah, kumpul disini nah itu bisa nginep disitu. Itu hal-hal yang perlu kita lakukan. Lalu terima kasih semboyan-semboyan akan kita buat lebih besar, lalu kita punya tim yang namanya tim PKRS: Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit, ini yang secara berkelompok, berkala itu diberikan penyuluhan-penyuluhan, penjelasan tadi. Kemudian perorangan kalau diperlukan ada konsultasi, kita punya ruangan customer service disana. Kalau ada ruang masuk rawat jalan, di sebelah kanan di pojok itu ada ruangan. Jadi kalau ada komplain silahkan masuk disana, nanti akan ditanggapi masalahnya. Jadi kita melakukan yang terbaik bagi pasien, jadi kembali inilah upaya-upaya yang kita lakukan tapi sekali lagi inspire the heart, menggerakkan hati itu tidak cukup hanya satu dua hari mungkin yang kita lakukan sekarang, dua atau tiga tahun ke depan baru kelihatan hasilnya asal konsisten tadi. Sehingga buildingnya harus diperbaiki, master plannya, SDMnya, kemampuannya, penampilannya harus baik, sarananya juga harus begitu. Jadi kalau fungsi sosial

## **Lampiran 2: Transkrip program talkshow “Bedah Layanan Publik” edisi 21 Maret 2006 (sambungan)**

urusannya pemerintah, jangan rumah sakit disuruh mencari uang, sekarang untuk melayani, ya untuk cari duit. Untungnya apa, gubernur dan DPRD kita tidak menyuruh itu sehingga layani dengan baik, kalau anggarannya bisa diajukan dana orang miskin sekarang dicover oleh PT.ASKES. Dengan segala kekurangannya, kita terus perbaiki.

MM: Ya pak Sudarso, ada catatan terakhir pak..Katakanlah untuk kedepan paling tidak bisa lebih baik begitu pak..

S: ....Jadi ada musik-musiknya kalau orang nunggu, terus kalau perawat barangkali untuk seleksi psikologi itu juga berpengaruh, mungkin rekrutmennya selain PNS, tidak ada itu wawancara dengan psikologis, barangkali ini yang mempercepat, pokoknya masyarakat itu ingin dilayani lah...(dipotong)

SR: Boleh satu lagi?? Untuk keperawatan ini memang ada kebijakan...(??) dulu, jadi tidak boleh menambahi petugas, yang pensiun jauh lebih banyak dari yang direkrut jadi minus gitu. Lalu kemarin kita sudah lapor pada pemilik rumah sakit ini, pak gubernur dan sekda bahwa kita nanti akan model kontrak jadi kita akan membuat suatu kontrak dengan perawat-perawat tapi kontrak bukan dijamin dengan PNS, lain ya. Kalau mereka honorer, harus jadi PNS, kalau ini kontrak betul, karena sekarang dari kebijakan pemerintah tidak boleh lagi diangkat sebagai tenaga honorer, karena kalau memenuhi ini, akan jadi masalah terus rumah sakit ini. Jadi pemilik rumah sakit ini, pak Sekda kemarin, ok lakuin aja kontrak atau perawat magang jadi nanti kita akan umumin butuhnya berapa, dengan kontrak 1 tahun, tapi kembali ini kontrak khusus, kayak perusahaan. Lalu perawat magang, biasanya kita PJTKI, pengerahan tenaga kesehatan yang keluar negeri, kita latihan di situ, 3 bulan kita latih dsb, sambil juga bekerja disitu lalu kita siapkan untuk mereka keluar negeri misalnya. Ini salah satu upaya mengurangi masalah keperawatan.

MM: Baik dr. Slamet terima kasih untuk kehadirannya, pak Sudarso terima kasih untuk waktunya bisa hadir di studio. Paling tidak mudah-mudahan catatan-catatan ini bisa menjadi satu wacana tersendiri bagi pendengar-pendengar kita yang mungkin saat ini mungkin banyak yang belum tahu tentang prosedur pelayanan dsb. Terima kasih, dr. Slamet, pak Sudarso. Selamat pagi semua...

**CLOSING**

### Lampiran 3: Transkrip program *talkshow* “Wawasan” edisi 15 Maret 2006

06.00-07.00 Masih seputar Traffic Report

.....Flash news tentang Blok Cepu

Yoyong Burhanuddin (YB): Bojonegoro lagi rame ya hari-hari ini, dan ramenya Bojonegoro sampai ke Jawa Tengah dan sampai ke Jakarta. Orang Bojonegoro, saya belum tahu apakah mereka gembira ria karena di lokasinya akan dilakukan eksplorasi minyak dengan investasi cukup besar, 1,7 triliun kalau saya tidak salah...1,7 triliun kaki kubik, itu jumlah cadangan minyak di Bojonegoro yang akan dieksploitasi dan ternyata eksploratornya adalah Exxon yang dalam posisi, perannya di dalam pengelolaan ini dia menjadi leader. Tadi pagi di Berita Suara Surabaya disebutkan, bahwa soal saham, kepemilikan itu 55% milik pemerintah Indonesia tapi beberapa kawan mengkritisi, 55% itu belum nanti kita harus membiayai proyek-proyek ini, itu kita yang membiayai, uang uangnya kita. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, wah tambah berat ini kita ngadepin ini, cuma tadi ya kalau bupati Bojonegoro senang sekali dengan adanya project ini, siap menerima bahkan sudah siap untuk menyiapkan lahan, tapi tidak ada paksaan, tadi barusan kita dengar ya, pada warga untuk melepaskan lahannya pada Exxon. Kemudian Jawa Timur juga akan bikin jalan tol, Surabaya Bojonegoro karena nanti disana akan dibutuhkan tenaga-tenaga profesional, macem-macem begitu, sehingga dibutuhkan jalur yang lancar dari Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur langsung ke Bojonegoro. Semua menyambut gembira, pokoknya pihak pemerintah sangat menyambut gembira dan sudah banyak langkah-langkah persiapan yang dilakukan, termasuk juga Jawa Tengah, mereka sudah siapkan perusahaan yang akan menangani itu juga ya, jadi kelihatannya semua pemerintah daerah sangat senang dan sangat siap-siap. Tapi tadi pagi, dalam laporan reporter kami dari Jakarta, ada pihak-pihak yang merasa kita ini kembali lagi menggadaikan aset bangsa kepada negara lain, gitu ya. Kemudian kita tetep saja miskin, satu contohnya Freeport, terus disebut lagi Indosat, semua banyak yang mengeluh terhadap pelepasan aset-aset bangsa yang strategis ini. Ini di satu sisi ada yang bergembira ria tapi di satu sisi yang lain, ada yang merasa bahwa ini tidak pas, operasional Exxon di Indonesia ini dalam kasus Bojonegoro tidak memberikan kontribusi yang cukup layak, menurut yang tidak setuju. Selamat pagi, dengan siapa ini?

Pak Eko (pendengar): Dengan pak Eko..... (traffic report saja)

YB: Selamat pagi..

Pak Bambang (pendengar): Selamat pagi mas Yoyong.. (traffic report)...Menanggapi sedikit, Cepu. Inallilahi wa inallilahi roji'un.

YB: Lho kenapa gitu pak?

Pak Bambang (B): Ya karena perjuangan kita sebagai pekerja itu maunya kita yang sedikit tertampil lah. Aku mungkin barisan yang tidak setuju dengan Exxon yang mengelola ya, maunya saya ini mewakili pekerja, kita yang harus mengelola itu.

YB: Kita ya??

B: Kita, bangsa, anak bangsa, putra bangsa yang terbaik. Kita mampu Mas Yoyong, yakin! Seribu % mampu, yakin saya!

YB: Tapi saya juga ada tanda tanya itu pak, sebenarnya apa kita mampu sih nangani itu?

B: Mampu..

YB: Mampu ya..

B: Kenapa tidak? Cuma harus anu ya..kurang lebih tapi kan kita harus yakin dengan kemampuan bangsa sendiri, sapa bilang ngga mampu. Tapi kenyataannya banyak keputusan-keputusan politik yang harus diambil. Ya itulah yang harus kita telan, mau ngga mau suka ngga suka ...

YB: Keputusan politik...

B: Lepas dari sedikit kekurangan, kenapa ngga kita coba dulu. Mundi (??) buktinya kita mampu...

YB: Mundi..

B: Ya, kenapa tidak?? Tapi ya itu, keputusan pemerintah, keputusan yang harus kita telan..Saya yakin kawan-kawan juga kecewa..

YB: Tapi pak Bupati Bojonegoro senang sekali itu pak??

B: Ya, itu kan bupati, tidak tahu. Yang jelas saya yakin, nasionalisme kita sedang diuji saat ini, bahwa itulah realita kita, yang temen-temen sudah mulai digadaikan sedikit demi sedikit, inget itu kasus Freeport, inget itu kasus.... Ya kayak Aceh itu, habis total disedot oleh mereka, apa yang kita dapatkan kan..

**Lampiran 3: Transkrip program talkshow “Wawasan” edisi 15 Maret 2006  
(sambungan)**

YB: Miskin...

B: Miskin...terpuruk, ekonomi lemah. Mau dimana bangsa kita kalo gini...

YB: Kita ngga pernah denger lagi cerita soal Arun ya pak??

B: Lha ya memang sudah itu..ditenggelamkan oleh berita-berita yang tidak..

YB: Abis ya, pak..

B: Abis, mau apa lagi?? Ya itulah Exxon, bangsa.. (berdecak kecewa). Ya ini keputusan manajemen, saya yo suka ngga suka, pahit ndak pahit tetep mendukung tapi saya katakan Inallilahi wa inallilahi roji'un kan...(dipotong)

YB: Posisinya terakhir seperti apa pak?

B: Maksudnya?

YB: Posisi pengelolaannya kan ngga 100% ya, masih boleh melibatkan anak negeri kan, Pertamina..

B: Lha iya, jangan lupa walaupun anak negeri tapi koordinator komandannya kan tetap mereka. Dan biaya tinggi yang diasuransikan kawan-kawan kita itu kan jadi beban pemerintah, apa yang terjadi kalau semua biaya-biaya dipotong oleh bagian kita. Jadi biaya semua yang timbul, biaya yang tinggi-tinggi itu akan dipotong oleh pemerintah kita gitu...

YB: Jadi kita katanya 55% itu masih harus dengan nambahi biaya macem-macem?

B: Iya, dipotong, itu harus ditanggung oleh pemerintah kita..

YB: Besar tho itu pak?

B: Yo, besar sekali.

YB: Besar sekali ya..Duh..

B: Besar sekali, dan itu yang harus ditanggung oleh RI.

YB: Kalau kita kelola sendiri, itu biayanya juga besar sekali begitu??

B: Tidak juga. Kita sudah keluarkan estimasi, jauh di bawah mereka.

YB: Berapa persen?

B: Ada sampai 30% lebih di bawah mereka..

YB: Oh ya??

B: Ada malah yang separo, malahan..

YB: Separo?? (kaget, tercengang, ada penekanan). Untuk pengelolaannya ya?

B: Ya..

YB: Wah, luar biasa...(kaget)

B: Tapi ya itu kritiknya ya, kita antara pro dan kontra. Ada yang mendukung...ya itulah nasionalismenya sedang diuji. Mestinya kan satu suara, wis kita lawan rame-rame. Nggak juga, ada sebagian yang pro, ada yang kontra. Orang saya terakhir baca di Jawa Pos kemarin, duh saya sedih mas, walaupun bukan bidang saya, tapi...(dipotong)

YB: sedihnya kenapa pak?

B: Ya itulah, bangsa kita sudah digadaikan lagi. Apa susahnya, itu ...(??) anak-anak bangsa kita dari tukang sapu sampai orang nomer dua semuanya bangsa kita, mereka tinggal onggang-onggang aja. Kenapa kita tidak berani mengambil sikap gitu lho? Ya lepas dari kekurangan sedikit lah, kita harus berbenah diri dan berubah lah, dengan lambang baru, pasti kita harus berubah. Kalau tidak berubah, auditor maupun masyarakat sudah mulai menilai kan sekarang ini, kita salah sedikit aja, sudah dikritik, dihujat kiri kanan kan. Makanya kita harus berubah, ke depan harus berubah, maju demi benah bangsa. Termasuk saya yang anak-anak muda ini...

YB: Berapa tahun pak??

B: Maksudnya??

YB: Ini berapa tahun ini rencanya nanti?

B: Apanya itu?

YB: Pengelolaan mereka...

B: Ooh, kan 5 tahun pertama dia, 5 tahun kita. Tapi kan 30 tahun bisa diperpanjang terus, kelar sudah mas. Sudah mas yoyong terima saja lah, memang nasib mas..

YB: Nasib..

B: Nasib, ya..

YB: bapak terima kasih...Selamat beraktivitas. Termasuk yang berduka ya..Selamat pagi..

Pak Agung (pendengar): Jadi masalah blok Cepu ini mas, kalau kita makin melebar membicarakan nanti terjadi konflik di grassroot, mas. Lha ini bahaya, mas karena banyak orang akhirnya numpang untuk berkepentingan. Oleh karena itu, karena kita sudah telanjur dalam melangkah...

YB: Didukung saja...

**Lampiran 3: Transkrip program talkshow “Wawasan” edisi 15 Maret 2006  
(sambungan)**

Pak Agung (A): Bukan..

YB: Lho bukan?

A: Bukan didukung saja..

YB: Terus gimana?

A: Sosialisasinya jelaskan pada tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat nanti menyampaikan konstituennya gitu lho...

YB: Sekarang kita masih punya tokoh masyarakat tho pak?? (nada ragu dan ngga percaya)

A: Sedih saya mas, nek sampeyan jawab ngono mas...

YB: Lho saya mau nanya, kalo sampeyan tau, tokoh masyarakat kita sapa pak, yang kira-kira mau dekat sama rakyat kita ini?

A: Ya saya akan bilang sedih, kalo sampeyan tanya gitu. Tokoh masyarakat yang mana gitu lho?

YB: Lha iya..

A: Pusing kan jadinya..Jadi memang kalau tanpa adanya sosialisasi yang bagus, kita nanti yang...Contoh, katakanlah tokoh-tokoh reformasi, mantan-mantan presiden, mantan-mantan, ketemu satu meja, trus njlentrehno mas, iki lho sakjane posisiku sebagai pemerintah. Karena kalau kita kaji jauh ke belakang jauh sekali ke belakang, dunia ini memang terbelenggu oleh kakinya Amerika, mas...Nah, tetapi kita harus bagaimana bermain di antara sela-sela kaki itu supaya menguntungkan rakyat, gitu lho..Itu yang penting, nah itu harus dijelaskan kepada rakyat. Tanpa kita harus katakanlah mengadakan suatu gerakan yang frontal, pokoke ngene, pokoke ngene,pokoke ngene..Kalau semua bicara pada pokoke, ya kita akan mungkin..kita sudah mengalami pada waktu kemarin itu, begitu kakunya bapak Soeharto sehingga kita kena embargo, akhirnya kita kena krisis, akhirnya jatuhlah rezim Soeharto. Apakah kita akan menjatuhkan rezim rakyat yang sekarang ini sedang ingin mengatur negeri ini...

YB: Rezim rakyat, pak??

A: Sekarang kan rezim rakyat, pak..Rakyat boleh bicara kan sekarang ini?Gitu kan.. Rezim rakyat, walaupun rakyat sekarang ini...

YB: Mosok rakyat jadi rezim pak? Saya belum pernah denger ada rakyat jadi rezim..

A: Ya, bukanlah..artinya kebebasan masyarakat gitu lah. Rakyat sekarang kan sudah demokrasi,bisa memiliki tokoh-tokohnya berarti kan sudah mempunyai suatu konstelasi politik dalam ketatanegaraan, kan itu berarti wakil rakyat, hak rakyat sekarang diakui, bargaining positionnya yang sekarang ini perlu kita terjemahkan lagi, kita atur lagi, kita transparasikan lagi..Kalau kita tidak bisa mengadakan suatu sosialisasi, baik itu mengenai Freeport, baik itu mengenai Blok Cepu, kita nanti akan semakin terpuruk karena disitu kepentingan kita dan jaringan intelejen kita belum mampu mengatasi jaringan-jaringan intelejen yang sekarang ini sudah menjadi kaki tangan kapitalis.

YB: Lha ya pak, sekarang ringkesnya itu, kira-kira kita mesti bersikap seperti apa?

A: Kalau kita bersikap, minta kepada para pemimpin untuk mengadakan sosialisasi..

YB: Apa yang disosialisasikan?

A: Ya itu, konstelasi atau posisi kita dalam masalah, artinya kerjasama dengan pihak kapitalis. Sehingga kapitalis itu datang kemari itu, bisa mensejahterakan rakyat, bisa bekerjasama dengan rakyat, posisi rakyat itu bagaimana, posisi pemerintah daerah bagaimana, posisi pemerintah provinsi bagaimana, pusat bagaimana. Itu mind set nya dibuat. Kalau itu sudah dibuat, insya allah saya bilang begitu, rakyat bisa ...(??) pemimpinnya, syukur-syukur mereka masih dianggap pemimpin, kalau tidak, yang sudah sepakat kita, menunjuk pemimpin pada waktu pemilihan presiden dulu 65% itu, terjun ke bawah. Tapi tidak mereka yang sekarang duduk di dalam pemimpin katakanlah sentral, katakanlah yang duduk sebagai presiden dan wakil presiden, membuat suatu konstelasi bagi-bagi kekuasaan.

YB: Jadi, intinya bahwa sekarang ini perlu sosialisasi tentang keuntungan apa yang diperoleh dengan adanya ini, gitu ya?

A: Ya, keuntungan dan kerugiannya..

YB: Ooh, dan kerugiannya...

A: Dan itu pemerintah Amerika sendiri harus menjelaskan, jangan mereka sendakep tangan trus melihat..eh lu kerja lu, lu kerja lu, jangan...Harus dijelaskan, transparansi lah. Gitu aja harapan saya..Terima kasih

YB: Terima kasih. Suara surabaya...Wah pak Eko nih..

Pak Eko (pendengar): Kok pesimis se mas?muter-muter. Negara kita harus optimis mas...

### Lampiran 3: Transkrip program talkshow “Wawasan” edisi 15 Maret 2006 (sambungan)

YB: Optimis...(ada penekanan, yakin)

Pak Eko (E): Tapi pemerintah kita yang sekarang ini pesimis mas, saya melihat semangat anak bangsa ngga dihargain. Jadi memang disini, saat ini yang sedang berkuasa adalah orang-orang pesimis. Dia optimisnya hanya menekan dalam negeri aja, naek semua gitu. Ya hal-hal yang akan mendatangkan manfaat, mereka pesimis, kalau manfaat itu akan diambil oleh orang lain. Saya ngga takut dengan konflik horisontal atau grassroot, ngga ada itu mas. Karena semuanya sudah merasa kok, dan masyarakat kita itu sudah ngga terlalu bodoh kayak dulu lagi. Nah kenyataannya, suara yang di SS juga banyak orang yang bisa berpikir, jadi ngga usah pesimis saya kira. Dan saya kira tokoh-tokoh, itu saya sepakat dengan mas yoyong, apakah masih ada gitu kan? Ada sih ada mas, yang menokohkan dirinya, tapi apakah layak dia sebagai tokoh...

YB: Soalnya kan pas rakyat susah, kejeprit, keinjak, mereka ngga punya haknya, seolah-olah dihilangkan, kemudian penderitaan ekonomi yang dihadapi, saya ngga pernah denger ada tokoh yang....

E: Tidak ada, tapi di saat-saat tertentu itu muncul mas, tiba-tiba tokoh...(??) itu datang semua. Untuk mengambil suatu keuntungan-keuntungan dari sana. Ya mengenai Blok Cepu memang kita sangat prihatin, mas karena filosofi politik dan ekonomi itu sangat berbeda dan saya pesimis terhadap sosialisasi juga, apa yang disampaikan bapak tadi. Karena apa? Karena kalau seorang penguasa, kalau sosialisasi kan pakai bahasa-bahasa politik, mas tapi kalau di dalam mikro, seperti industri itu kan pake bahasa ekonomi. Jadi jauh berbeda, mas bingung rakyat kita mas. Dan di politik dengan perilaku ekonomi sangat berbeda kok. Bingung, ya itu yang justru membuat resah nantinya pada saat perilakunya berbeda. Kan pemimpin kita kalau disuruh sosialisasi pinter mas, wong kampanyenya sukses semua kok. Tapi pada saat perilakunya, perilaku pemerintahan yang harus dia penuhi, prestasinya ngga ada, bahkan sebaliknya kan begitu. Yah mungkin lagu tangisan ibu pertiwi itu perlu dirubah, supaya ngga menangis terus, terus lagunya Ebiet: anakmu sekarang banyak menanggung beban, yah karena merintah terus jadinya merintah. Jadi sebetulnya pemerintah kita tidak merespon kebutuhan rakyat tapi ya mewujudkan syair lagu itu, marilah kita merintah terus menerus.. Terima Kasih..

YB: Terima kasih.. Kebetulan saya jalan-jalan ke catatan temen-temen reporter Suara Surabaya terus ke beberapa media cetak juga gitu ya, ada suasana-suasana yang menarik gitu ya, pembangunan image terhadap kegiatan eksplorasi blok Cepu ini ya, image positifnya tentu saja seperti tadi pagi, anda dengar bagaimana pemerintah itu berusaha membuktikan bahwa otoritas dalam pengelolaan blok Cepu tetap pada pemerintah Indonesia. Di koran juga saya baca beberapa informasi tentang menteri BUMN, Pak Sugiarto yang meyakinkan bahwa kunjungan Conndolezza Rice di Indonesia tidak ada kaitan dengan Blok Cepu, ngga ada sama sekali gitu ya. Dan yang jelas, jadi dalam eksplorasi Blok Cepu itu, pemerintah Indonesia lah yang paling diuntungkan, katanya. Misalnya kalau diproduksi 100 barel dan harga minyak itu 45 US Dollar per barel, maka Exxon hanya (ada penekanan) sebagian 6,75 barel, jadi yang 93,25 barel milik rakyat Indonesia, apakah oleh Pertamina atau Pemda. Dan Pemda itu kan bagian dari Indonesia juga, jadi sebenarnya pemerintah juga merasa bahwa pengoperasian Blok Cepu ini merupakan suatu kerjasama join operationship, bukan penguasaan atau single operationship, jadi tidak usah kuatir rakyat Indonesia. Lalu juga ada yang menyampaikan bahwa akan ada kemungkinan mata rantai ekonomi yang bergerak sampai sekitar 73 triliun katanya dengan adanya Blok Cepu yang dikelola Exxon ini. Namun seperti yang anda baca juga, kemarin ada beberapa komunike dari beberapa kelompok-kelompok masyarakat diantaranya para para pakar geologi, ada ribuan pakar geologi di Jakarta itu menolak masuknya Exxon Mobile dan ini mereka berduka seperti beberapa kawan kita pagi ini ikut berduka ya. Ok, itu kawan beberapa catatan dan kita akan ikuti beberapa laporan-laporan yang terbaru lagi dari kawan-kawan kita yang lain. Selamat pagi...

Pak Rudi (pendengar): Mas Yong..Ini terkait dengan blok Cepu ya. Memang pada satu sisi kita prihatin, tentang keberadaan aset negara ini jatuh kepada asing. Harusnya eksplorasi dari migas ini, harusnya bisa kita lakukan sendiri. Tapi pada sisi-sisi tertentu, saya ada baca di beberapa media memang, ada faktor-faktor kesulitan yang menjadi handycap kita. Khususnya untuk menjadi operator itu, salah satunya justru juga karena faktor pendanaan terus karena faktor tenaga ahli. Tapi sebenarnya menurut saya, itu kita masih bisa lakukan, dengan satu catatan, kita mungkin bisa masih melobi dengan

### Lampiran 3: Transkrip program talkshow “Wawasan” edisi 15 Maret 2006 (sambungan)

beberapa negara lain yang bisa melakukan pendanaan tapi bukan seperti yang sekarang ini. Yang sekarang ini terus terang saja memang sepenuhnya nanti dalam proses pendanaan itu, Exxon yang melakukan, kita hanya berbagi hasilnya saja. Dan ini yang justru menurut saya memprihatinkan. Tapi di satu sisi saya ini juga prihatin, tentang keberadaan saat dikelola oleh sebelumnya, itu dari media yang saya dapatkan, sebelumnya sebenarnya di beberapa titik yang di blok Cepu, itu dulu dikelola oleh Humpuss Group. Terus oleh Humpuss Group, saham itu dilepas, jatuh pada Pertamina. Nah saat jatuh pada Pertamina, saat dilakukan pengelolaan di sana, ternyata masyarakat di sana itu tidak diperhatikan. Jadi jalan itu hancur, jalan itu hancur karena dilewati oleh truk-truk yang melewati dari truk Pertamina sendiri. Nah justru ini yang saya mau tanda tanya, apakah ini yang membuat masyarakat di sekitar itu akhirnya setuju juga pengelolaan...

YB: Lho, sekarang masyarakat sekitar setuju tho pak?

Pak Rudi (R): Justru masyarakat yang di sekitar itu setuju.

YB: Oh ya??

R: Dikelola oleh Exxon itu, cuman yang berada di garis luar ini yang memang justru memberontak, seperti kita-kita ini, yang menghendaki kalau perlu itu jangan. Tapi masyarakat yang di sekitar itu membentuk LSM sendiri..

YB: Ooh..ada LSMnya juga ya??

R: Ya, jadi kemarin saya katakan ada suatu bentuk biografi terkait dengan perjalanan sampai seperti ini dan ada beberapa LSM masyarakat yang berada di sekitar itu yang juga menyampaikan keinginan-keinginan mereka. Nah mereka ada kekecewaan terkait dengan keberadaan Pertamina yang mengelola sebelumnya. Ya, setelah Humpuss, dan Humpuss melepaskan itu pada Pertamina, nah jalan itu hancur, kesejahteraan masyarakat disana tidak didapat. Satu bulan masyarakat di sekitar itu hanya mendapatkan jatah beras cuman 5kg, cuman 5kg !!(ada penekanan). Jadi bisa dibayangkan, mungkin masyarakat disana melihatnya begini, ini jatuh kepada siapapun, anak negeri atau asing ternyata nasib mereka tidak berubah. Nah ini sebenarnya saya miris, kepada pengelola sebelumnya dalam hal ini Pertamina juga, kenapa tidak memperhatikan seperti itu. Pada akhirnya gejolak yang terjadi di masyarakat itu minim sekali, khususnya di desa-desa, yang ada memang titik-titik tertentu yang minyaknya sudah dieksplorasi. Nah ini memang terus terang harusnya ada suatu bentuk evaluasi terkait dengan BUMN-BUMN kita yang ternyata tidak banyak memberikan perhatian kepada mereka juga..

YB: Tapi Blok Cepu sudah ngga perlu dievaluasi, lha wong sudah jadi kok...

R: Nah, ironisnya karena memang sekarang sudah jadi seperti ini, kita tinggal melihat nantinya apakah Blok Cepu ini akan mirip seperti Freeport. Masyarakatnya sekitarnya itu justru ikut merasakan kejayaan Freeport atau tidak?

YB: Iya...(ada nada persetujuan)

R: Merasakan kesejahteraan Freeport atau tidak?

YB: Katanya itu miliaran, ratusan miliar diberikan ke masyarakat sekitar itu...

R: Nah..

YB: Tapi tetep saja masyarakatnya kayak gitu...

R: Betul..

YB: Ngga tau dimana kelirunya..

R: Saya berharap Exxon tidak seperti itu, masyarakat sekitarnya diperhatikan karena masyarakat, dari LSM, dari beberapa LSM yang ada, itu mereka menghendaki bahwa tenaga-tenaga yang diperlukan itu justru diharapkan itu mempergunakan tenaga masyarakat yang ada di sekitarnya..

YB: untuk bidang apa, pak?

R: Khususnya tenaga-tenaga kasar..Ya apa boleh buat memang..

YB: Karena ini padat teknologi, orangnya kan ngga sembarangan ya, ada kualifikasi...

R: Betul, terus yang perlu saya kritisi bangsa dan negara kita ini, kita harus otokritik terhadap diri sendiri juga ya, kita melihat kembali bahwa bangsa dan negara kita ini bangsa dan negara yang maunya enak. Semuanya diserahkan ke orang, kita maunya terima bersih, kan mas. Tapi kita tidak mau transfer teknologi, kita tidak mau belajar kesana, nah pada akhirnya nasib kita ini sampai kapanpun begini terus, mas. Ini yang harusnya mulai kita pikirkan, kita tuh ngga pa-pa serahkan mungkin untuk beberapa tahun pertama, tapi tolong transfer teknologi itu juga kita lakukan ya. Agar nantinya kita tuh bener-bener jadi pintar, dalam tanda petik, pintar (penekanan), jadi supaya nanti kita bisa mengelola itu

### Lampiran 3: Transkrip program talkshow “Wawasan” edisi 15 Maret 2006 (sambungan)

sendiri. Apapun, bukan hanya Exxon saja, bukan hanya blok Cepu saja, tapi yang laen-laen juga begitu. Terima kasih...

YB: Terima kasih Pak Rudi...

#### **BREAK**

YB: Baik kawan kita teruskan kembali program wawasan di Radio Suara Surabaya, dengan informasi-informasi yang terbaru, situasi lapangan soal lalu lintas tapi juga tadi beberapa kawan mulai memberi perhatian soal pengelolaan Exxon Mobile di Bojonegoro dalam Blok Cepu ini. Banyak pihak yang melihat bahwa ini cukup memberi kontribusi pada perekonomian Indonesia dan khususnya di Jawa Timur, untuk itu maka harus disiapkan ini, Jatim siap-siap bikin jalan tol katanya ya. Kemudian di kabupaten Bojonegoro sendiri mereka sudah siapkan lahan-lahannya untuk dibebaskan, tapi tadi kami dapat laporan dari Humas Pemkab Bojonegoro ya, mereka mengatakan tidak (penekanan) ada pemaksaan pada warga untuk melepaskan lahannya yang akan dieksplorasi oleh Exxon ini ya. Tapi bagaimana kelanjutannya, itu yang masih belum tau, kalau tidak dipaksa, terus kalau nolak gimana..Atau kalau mereka menerima itu bagaimana gitu ya?? Yang jelas kawan, Kabupaten Bojonegoro melalui bupatinya tadi pagi dalam Berita Suara Surabaya telah menjelaskan kalau mereka juga sudah siap-siap dengan segala kebutuhan infrastruktur bagi pengelolaan Exxon di Bojonegoro. Ok, kita ketemu dengan kawan kita selanjutnya, selamat pagi...dengan siapa ini?

Pak Hendra (pendengar): Selamat pagi, mas Yoyong. Dengan Hendra.. (informasi lalu lintas dulu). Menanggapi Blok Cepu, pikiran saya ini kok kenapa pemerintah menjual ke Exxon Mobile itu, masalah yang pertama mungkin masalah pendanaan dimana kita ini utang luar negeri cukup besar, kalau ditambah pendanaan itu lagi kita mungkin kita mesti ngambil utang ke luar negeri lagi, sementara kita ini masih utang dimana-mana, banyak. Jadi saya harapkan mungkin semua masyarakat sadarlah, kalau pemerintah mengambil tindakan itu mereka kan punya hitungan-hitungan tertentu...

YB: Kalau alasan mereka menyerahkan, sebenarnya sudah kita ketahui semua kan, pak, alasannya? Karena kan pemerintah sendiri yang sudah menjelaskan, jadi tidak usah diduga-duga. Dugaan punya utang atau apa, tapi sebenarnya sudah ada alasan pemerintah kenapa diserahkan ke Exxon ya?

Pak Hendra (H): Iya, saya harapkan...

YB: Cuman, masyarakatnya mau paham atau tidak gitu...

H: Cuman kita liat saja nanti, pemberdayaannya masyarakat di sekitar sana itu dapat kesejahteraan...Cuma itu saja, saya kira kalau permasalahan pengelolaan, mungkin kita teknologinya mungkin masih kurang dibandingkan Exxon Mobile, mungkin dia lebih...

YB: Canggih ya...

H: Lebih canggih, permasalahannya dia itu internasional. Itu kita sendiri sebagai bangsa juga merasa kalau diri kita kedisiplinannya sangat kurang, sehingga kita sendiri, kepercayaan terhadap pemerintah, terhadap rakyat, semakin merosot. Karena apa? Karena ketidaksiplinan kita, kita harapkan masing-masing individu lah, koreksi diri sendiri supaya kita istilahnya disiplin dalam hal-hal tertentu, misalnya jatah kita, kita terima tapi kalau bukan jatah kita ya jangan diambil. Jadi saya harapkan pemerintah yang bersih, di kemudian hari. Saya kira Blok Cepu ini jangan dipermasalahkan terlalu besar yang penting kita lihat nanti efeknya bagi masyarakat sekitar itu ada faedahnya ngga. Kalau ada faedahnya, itu berarti pemerintah melihat bahwa kepentingan untuk rakyat pasti diperhatikan...

YB: Kalau ndak??

H: Ya, itu sebaliknya, kontroversi. Kontroversi, jadi pemikiran kita berubah, bahwa kepercayaan kita terhadap pemerintah jauh lebih merosot lagi. Terima kasih..

YB: Ok, Pak Hendra. Terima kasih...Suara Surabaya..

Pak Edi (pendengar): Selamat pagi, mas Yoyong. Ini gini masalah Blok Cepu, saya pikir polemik tentang siapa yang ditunjuk itu kan sudah selesai dan hari ini Insya Allah ditandatangani. Ini memang pilihan yang berat bagi pemerintahan SBY, jadi antara profesionalisme dan nasionalisme. Tapi

### Lampiran 3: Transkrip program talkshow “Wawasan” edisi 15 Maret 2006 (sambungan)

sekarang kita tidak akan membahas apa kelebihan dan kekurangan Pertamina, maupun Exxon, yang penting kita sekarang, masyarakat Indonesia utamanya tentu akan segera menikmati daripada hasil eksploitasi tersebut, jadi bagi kelompok masyarakat...

YB: Setahu anda, apa yang akan diterima masyarakat, anda sebut mendapatkan hasil itu, hasil apa yang akan diterima masyarakat kita, pak?

Pak Edi (E): Jadi, sebagaimana yang sudah dijelaskan pemerintah berkali-kali itu. Jadi misalnya kalau dari 100 barel yang dieksploitasi itu, itu yang diambil Exxon kan hanya 6,75 itu. Selebihnya itu milik Indonesia, disitu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tentu bersama masyarakat. Nah kalau masyarakat yang menikmati langsung adalah yang terkait dengan *comodity development* sedangkan yang masuk ke pemerintah nantinya akan dikembalikan berupa sarana dan prasarana, infrastruktur itu. Jadi sekarang ini kalau masih ada yang menyatakan bahwa ini mewakili kelompok masyarakat ini masih menggugat dsb, justru kita mempertanyakan masyarakat yang mana, masyarakat sekarang sudah menunggu, kita sudah terlalu lama selalu mengimpor minyak, cukup besar devisa negara yang dibuang untuk itu...

YB: Pak Edi, anda kan dari fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur, dan berarti anda posisi yang akan melihat keuntungan masyarakat Jawa Timur. Kira-kira kalau buat masyarakat Jawa Timur apa yang akan diterima, pak, keuntungannya (ada penekanan, dikatakan satu-satu)?

E: Ya, jadi kan dari bagi hasil itu saja itu cukup besar...Sekarang kan ada dua keuntungan, yang pertama dari participating interest itu, yang 10% akhirnya dibagi 6,7% untuk pemerintah daerah Jawa Timur. 6,7 itu dibagi untuk 2,2% untuk Pemprov Jatim, 4,5 untuk Pemkab Bojonegoro. Nah itu nanti akan dikembalikan berupa pelayanan umum kepada masyarakat, bisa berupa perbaikan jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dsb. Nah..

YB: Bagaimana memastikan langsung keuntungan itu diterima oleh masyarakat tanpa ada kemungkinan nyantol ke pemerintah, daerah dsb, pak??

E: Nah, jadi gini yang ke pemerintah daerah kan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu nanti misalnya bangunan prasarana di Bojonegoro itu, kan akan dinikmati oleh kita semua. Nah sedangkan yang berupa CD development, pembangunan lingkungan bagi masyarakat setempat, itulah yang akan kita kontrol bersama-sama. Kalau memang selama ini ada macet dsb, trus ada bisa dibelanjakan kemana-mana itu memang menjadi tanggung jawab kita bersama, dan bukan menjadi kendala, gitu lho..

YB: Bukan menjadi kendala...

E: Ya, sehingga ke depan justru kita mempersiapkan seperti infrastruktur, jalan tol, trus bagaimana penyediaan air baku, itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai nanti fasilitas pendukung tersebut di Cepu, yang mereka disana sudah lebih dulu lebih siap daripada kita.

YB: Pak, kalau kaitannya..Kalau tadi itu kan keuntungan yang akan diperoleh. Kira-kira kemungkinan kerugian apa yang akan dialami masyarakat Jawa Timur dengan ini, pak?

E: Ya, kerugiannya begini, Biasa kalau kita mengeksploitasi alam itu pasti ada dampak lingkungannya. Itulah yang akan kita upayakan semaksimal mungkin bagaimana meminimalisir daripada dampak lingkungan tersebut.

YB: Bagaimana caranya pak meminimalisir?

E:Ya, itulah. Kita sekarang sedang membahas rencana tata ruang wilayah, dimana kita sudah sepakat bahwa pembangunan di Jawa Timur itu berwawasan lingkungan. Nah kita tahu, dalam penegakan lingkungan itu aparat kita kan terbatas, oleh karena itu kita membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui rencana pengembangan wilayah. Sehingga yang mengawasi itu semua masyarakat, karena tahu aparat itu tidak sampai 1% penduduk Indonesia, bagaimana mungkin dia tahu ada pembangunan di tengah hutan yang melanggar lingkungan itu? Itu persoalannya...

YB: Jadi betul anda sudah cukup baik, tinggal kita tunggu saja ya pak..

### Lampiran 3: Transkrip program talkshow “Wawasan” edisi 15 Maret 2006 (sambungan)

E: Ya, kita tunggu saja, supaya minyak tetes pertama itu keluar dari bumi Bojonegoro itu, dan masyarakat sekitar segera menikmati, kita segera menikmati. Barangkali harga BBM bisa dikendalikan, ini kan akan naik terus BBM ini..

YB: Ok, terima kasih Pak Edi. Itu kawan catatan dari Pak Edi Wahyudi, dari fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur, beliau memberikan gambaran tentang keuntungan dan kerugian. Kerugiannya bisa ada persoalan lingkungan, yang itu harus diantisipasi kemudian keuntungannya banyak, jadi lebih banyak keuntungannya sehingga kita lebih baik memikirkan bagaimana tol dibangun, bagaimana infrastruktur di Bojonegoro dibangun daripada nanti Cepu yang mendapat keuntungan ya..Cepu, Jawa Tengah ya..Terima kasih Pak Edi, saya ke Wismanti dulu....

#### **BREAK**

YB: Selamat pagi Suara Surabaya...

Pak Rahmat (pendengar): Selamat pagi.. Silang pendapat tentang Blok Cepu ini, kan saya melihat bahwa kalau kita telusuri, keputusan yang diambil sekarang ini, ini memang kan sangat sulit. Di satu sisi kalau kita mau bicara pure ekonomi, jadi murni ekonomi memang kita harus tahu diri, tadi sudah disampaikan oleh beberapa kawan, masalah teknologi, masalah pendanaan. Itu kalau bicara masalah pure ekonomi. Tapi masalah pure ekonomi di suasana global ini kan sangat sulit, jadi ekonomi pasti ada embel-embelnya di belakangnya, ekonomi politik. Kalau politik, juga ada politik ekonomi, tidak ada yang pure saat ini. Semua berinterferensi sehingga terlepas dari keputusan itu membuat lega, atau membuat kecewa pihak-pihak yang berkepentingan, kita dan khususnya saya yang bergelut di dunia usaha saya hanya menyikapi bahwa bagaimanapun juga pemerintah kan perlu membuat suasana atau iklim bisnis itu menjadi kondusif. Mungkin pemerintah dengan adanya keputusan saat ini, ingin agar ada tricker untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, ini dugaan saya. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa dari 1,4 juta barel yang pernah kita capai dulu per tahun, per hari, itu kan kita sekarang kadang-kadang ada di bawah 1 juta. Kita kan sangat merosot ekspor kita, dengan adanya keputusan ini diharapkan memang kita bisa mendongkrak kembali ekspor kita ke pasar internasional. Lha saat ini dimana harga minyak tinggi, kita kan tidak menikmati, semuanya menjadi harapan yang sia-sia. Kita terkenal sebagai anggota OPEC yang bisa memasok pasar minyak ke pasar internasional, namun kapasitas produksi sekarang ini lemah sekali sehingga kita tidak mendapat keuntungan atau bonansa (??) minyak yang baru saat ini. Ini kan ironis, sehingga kalau dari kajian ekonomi pure, keputusan ini memang sangat-sangat strategis ya bagi pemerintah, ya kita harapkan, sekali lagi kalau dari kacamata pure ekonomi semoga keputusan ini nanti akan meningkatkan kesempatan kita untuk perbaikan ekonomi di masa depan. Benar tadi seperti yang dismskan pakar komunikasi, Pak Henri Soebianto tadi, bahwa kalau dikelola oleh kita, tingkat kontribusi Blok Cepu ini terhadap perekonomian nasional, akan lebih lama, akan lebih panjang, dengan kalau dikelola oleh Exxon Mobile. Ingat ya, saya ini bicara dalam konteks ekonomi pure ya, bukan ekonomi politik. Namun kalau kita bicara ekonomi politik, lain lagi. Kita harus bicara masalah-masalah berkaitan nasionalisme dsb, namun semua sebenarnya bisa dikaji, ada SWOT analysis, bagaimana caranya, nanti ahli-ahlinya kan lebih tahu.

YB: Ada kepastian ngga pak, itu minyak juga akan dimanfaatkan secara nasional, sehingga katanya kita sendiri dalam masalah perminyakan masih banyak impor? Atau karena Exxon, produk ini akan tetap dibawa keluar?

Pak Rahmat (R): Ya, itu tergantung kepiawaian manajerial orang-orang kita, bagaimana menciptakan bargaining position yang positif bagi kita. Jadi masalahnya kan masalah manajerial ini, tidak semata-mata masalah teknologi, masalah dana dsb. Bagaimana menciptakan, tadi saya katakan, bargaining position yang positif untuk kita, nah selama ini posisi-posisi tawar kita ini gimana?kalo toh selalu lemah, ya kita upayakan menjadi lebih baik...

YB: Meskipun posisi puncaknya ada pada Exxon, tapi tinggal kepiawaian kita saja ya..

R: Kepiawaian kita dalam mengatasi masalah-masalah ini. Saya pikir kalau kita pintar, kita akan mendapatkan keuntungan untuk itu.

YB: Terima kasih pak Rachmat Urip, kawan kita dari Asosiasi Manajemen Indonesia cabang Surabaya. Baik kawan, anda masih bersama saya Yoyong Burhanudin, dan pagi ini kita terus memberi peluang

### Lampiran 3: Transkrip program talkshow “Wawasan” edisi 15 Maret 2006 (sambungan)

untuk informasi lalu lintas, tapi diskusi tadi juga sudah dimulai dengan sorotan masuknya Exxon ke Bojonegoro.

#### **BREAK**

YB: Baik, kawan untuk anda yang masih bersama Suara Surabaya, terima kasih. Suara Surabaya...

Pak Edi Hariadi (pendengar): Selamat pagi..Bicara soal blok Cepu, sederhana saya sebagai anggota masyarakat khususnya sebagai masyarakat Jawa Timur, saya sependapat dengan pak Rachmat Urip dan Mas Henri Soebianto tadi ya, persoalannya adalah manajerial. Jadi kenapa kok tidak Pertamina saja yang menjadi operator? Mungkin Pertamina nggak pede, karena tidak pede, makanya tidak DP, tidak dipercaya maksudnya. Tapi yang penting, hasil Blok Cepu itu harus memberi kontribusi bagi kemakmuran rakyat.

YB: Jadi kita nggak perlu kuatir, siapapun pengelolanya?

Pak Edi Hariadi (EH): Ya, jadi itu yang penting. Jadi kita kembali ke UUD 1945 pasal 33 itu, kita banyak melihat dari propinsi-propinsi lain kan, seperti Kalimantan Timur, Aceh sendiri dan Papua. Itu semua kan yang diperlihatkan pada rakyat Indonesia, sejauh mana kontribusi hasil bumi kita sendiri itu bisa dimanfaatkan oleh rakyat kita sendiri.

BREAK sejenak...

YB: Ya pak Edi, jadi tadi ya menurut anda yang penting itu bagaimana masyarakat itu bisa menikmati hasilnya, gitu ya?

EH: Ya. Jadi sekarang ini, kabupaten Bojonegoro karena ada Blok Cepu itu, jadi pusat perhatian ya. Tidak saja masyarakat Jawa Timur, mungkin juga dunia. Kita lihat seperti itu, ya mudah-mudahan sebagai rakyat Jawa Timur ini, jangan sampai ada pepatah Melayu: kita menyusui anak monyet, tapi anak sendiri busung lapar. Itu aja mas Yoyong, terima kasih...

YB: Pak Edi, maturnuwun. Ini penting juga ya, jadi perhatian. Baik kawan masih anda simak program wawasan di Radio Suara Surabaya... Ya, Wis..

Wismanti (gatekeeper): Ya, ini kita sudah bersama Bpk. Marwan Batubara, ini anggota DPD RI dan juga anggota gerakan rakyat penyelamat Blok Cepu di line 1....(interview)

YB: Ok, pak Marwan, selamat pagi...

Pak Marwan Batubara (narasumber): Selamat pagi pak..

YB: Ya, saya dengar anda salah satu anggota DPD yang menolak masuknya Exxon dalam Blok Cepu ini. Apa alasannya, pak?

Marwan Batubara (MB): Karena dengan mereka masuk, keuntungan yang harusnya 100% bisa untuk negara dan untuk rakyat Indonesia yang banyak yang miskin, ini jadi berkurang. Ada perhitungan sampai 51 triliun, itu bisa berapa orang miskin yang tertolong, berapa juta.

YB: Berkurang 51 triliun ya pak?

MB: Ya, kira-kira itu belum lagi nanti dari yang lain-lain. Karena kalau kita bicara biaya, biaya untuk gaji orang Amerika itu kan bisa tiga empat kali lipat dibanding kita. Biaya ngebornya aja, Pertamina itu nggak cukup dengan 3 juta dollar per sumur, kalau Exxon Mobile itu sampai 6 juta dollar.

YB: Dua kali lipat?

MB: Iya, kemudian juga untuk biaya modal, namanya capital expenditure dan OPEX, operational expenditure, ini kalau ditotal yang diajukan Exxon itu sekitar 2,55 milyar dollar, kalau Pertamina itu sekitar 1,4 milyar dollar, jadi 2,5 dibanding 1,4. Jadi Pertamina itucukup dengan 60% dari biaya Exxon Mobile., itu bisa dieksplorasi. Dan itu...(dipotong)

YB: Operatinal Expenditure selama berapa lama itu, pak?

MB: Selama enam tujuh tahun..

YB: Enam tujuh tahun..Nah, apakah ada alasan lain, pak yang menguatkan bahwa kemudian ada penolakan, pak?

### Lampiran 3: Transkrip program talkshow “Wawasan” edisi 15 Maret 2006 (sambungan)

MB: Saya kira ini dari awal yang punya hak pengelolaan itu Pertamina. Konsesinya itu bagi Pertamina, lalu wajar saja Pertamina ngomong mengelola menjadi operator, dan tidak ingin memperpanjang kontrak dari 2010 menjadi 2030. Karena awalnya mereka yang punya hak, dan itu ada perjanjian-perjanjiannya. Tapi justru Pertamina itu, ditekan oleh pemerintah sendiri untuk memperpanjang, lalu menyerahkan operatorship ke Exxon Mobile.

YB: Indikator pemaksaannya apa pak?

MB: Kalau kita baca ceritanya ya..Di DPR itu, pak... (???) sebagai Dirut ya, bulan Februari itu sudah menyatakan memperpanjang lalu ingin mengelola sendiri. Tahun 2003, .....(??-nama orang), itu juga sama statementnya, kemudian 2004, Widya Purnama juga sama, tidak ingin memperpanjang, ingin mengelola sendiri. Jadi kalau bicara business to business, biarkan saja Pertamina punya sifat seperti itu, ya pemerintah dukung. Eh malah sebaliknya yang terjadi, Pertamina sikapnya jelas, justru pemerintah tidak menginginkan Pertamina jadi operator, tidak mendukung dan malah juga memberikan kesempatan Exxon Mobile untuk memperpanjang.

YB: ada sinyalemen masyarakat yang melihat bahwa selama ini Pertamina tidak melakukan itu dengan baik, sehingga tidak memberi keuntungan lebih baik. Bagaimana pendapat anda pak?

MB: Itu lebih banyak sifatnya manipulatif, karena Pertamina itu sejak tahun 70an sudah bisa melakukan sendiri di Pangkalan Brandan-Sumatera Utara. Mereka bisa memproduksi sampai 70 barel per hari, dan dananya tidak ada jaminan dari pemerintah. Mereka pinjam sendiri dan itu berhasil. Lalu di sekitar Blok Cepu itu, kan ada sumur-sumur lain yang Pertamina kelola, itu juga bisa mereka lakukan. Lalu kalau bicara dana, dengan harga minyak yang sekarang ini, orang mau bersedia melakukan heching. Jadi heching itu sekarang mereka kasih uang dengan harga 55 dollar itu banyak yang mau, nanti penyerahannya 2008-2009. Itu baru mau, artinya uang itu sudah diterima, bisa dipakai investasi oleh Pertamina, tanpa perlu bantuan Exxon, misalnya..

YB: Ya pak, tentang investasi tadi, katanya kalau misalnya diserahkan kepada Pertamina, butuh waktu lebih lama untuk Pemerintah Indonesia menerima keuntungan-keuntungan, pak. Sedangkan kalau Exxon, itu 2007 sudah bisa menerima. Bagaimana pak?

MB: Bohong besar itu, bohong besar. Tidak mungkin juga Exxon melakukan itu...

YB: Bagaimana penjelasannya?

MB: Ya karena ini ada proses juga, proses membangun sumur, ada evaluasi dan itu tidak bisa seperti itu. Tapi seandainya itu bisa mereka lakukan kita kan tidak bicara itu lalu diserahkan ke asing, ya kan, apa alasannya itu? Toh uang itu tetap ada di sana, apalagi ke belakang harga minyak itu akan naik kalau sekarang 60, orang sudah bicara soal 70 80 dollat per barel. Jadi kalau seandainya tertunda, justru harga itu akan naik, jadi tidak masalah.

YB: Tapi sebenarnya kalau menurut anda, apakah Pertamina memiliki kompetensi dari sumber daya manusia sampai sumber dananya saat ini, pak?

MB: Ya, jelas dong. Orang tadi saya sudah bilang, mereka dari sejak 70 sudah bisa, itu di Timur Tengah, orang-orang kita, Pertamina itu diakui.

YB: Kalau sumber dananya, pak?

MB: Tadi saya sudah bilang, kalau sumber dana itu karena potensi minyaknya sudah jelas, bank itu ngantri. Kemudian juga ada yang bersedia heching. Heching ngerti maksudnya? Jadi orang mesen, dibayar sekarang, penyerahannya nanti, 2008-2009, tapi harganya memang harga 55 misalnya. 55 dibanding 60 sekarang kan sudah cukup bagus. Jadi kalau nanti harganya 60 70 , ya itu risiko, Pertamina tidak menerima itu secara penuh, cuma 55.

YB: Pak sementara ini kalau dilihat faktanya bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat senang, pak, provinsi Jawa Tengah sangat bergembira dan mereka sudah menyiapkan infrastruktur termasuk provinsi Jawa Timur, dan rakyat Bojonegoro sendiri merasa menerima, pak. Tapi mengapa ada kawan-kawan di luar lokasi ini malah keberatan. Bagaimana melihat penerimaan-penerimaan mereka pak?

MB: Ya, mereka kan tidak tahu masalahnya secara utuh. Yang kedua, ada orang-orang yang bermain di sana. Saya pernah datang ke Bojonegoro, ada pengerahan masa, pembayaran ini itu oleh satu

### Lampiran 3: Transkrip program talkshow “Wawasan” edisi 15 Maret 2006 (sambungan)

perusahaan. Saya datang ke sana, jadi saya kira kalau kita bicara dengan orang yang tidak punya informasi secara utuh, tidak mengetahui permasalahan secara jelas, janganlah itu yang jadi patokan kita untuk mengambil keputusan.

YB: kira-kira bagaimana menjelaskan pada masyarakat luas tentang yang mereka tidak ketahui?

MB: Ya, bahwa menurut UUD, sumber daya alam ini milik negara dan harus diberdayakan, diupayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau tidak diusahakan oleh perusahaan negara, ada perusahaan asing disana, keuntungan itu tidak utuh lagi. Sehingga rakyat juga akan berkurang pendapatannya. Jangan lupa pembagian 85 15 %, 85% untuk pemerintah, 15% untuk Exxon Mobile, Pertamina, dan Pemda, itu sudah dipotong dulu dengan biaya cost recovery. Biaya cost recovery ini, kalau asing lebih mahal dibanding Pertamina, tadi saya sudah kasih contoh, cuma 60% kalau itu Pertamina. Jadi temen-temen di Bojonegoro ini harus diberdayakan, dikasih tau lah, disosialisasikan.

YB: Anda sendiri apa yang akan anda lakukan untuk mensosialisasi itu pada masyarakat supaya paham, gitu pak?

MB: Saya sendiri dengan temen-temen mahasiswa, gerakan, ormas, LSM, akan coba nanti mengadakan seminar, bedah buku, yang bukunya sendiri sedang kita siapkan. Semoga Allah menolong kami, yang sedang menyiapkan ini sehingga ada referensi untuk masyarakat bisa tahu, baca gitu.

YB: Sebenarnya apa goals yang ingin anda capai dengan terlibat dalam persoalan ini, lalu juga melakukan penolakan-penolakan, pak?

MB: Saya kira sudah jelas tadi, kita ingin itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan kita, oleh negara, dan itu sesuai dengan amanat konstitusi yang akhirnya nanti keuntungan itu akan sebesar-besarnya dan itu akan jauh lebih besar daripada dikelola asing, untuk kesejahteraan rakyat.

YB: Tidak ada sesuatu untuk kepentingan pribadi, ya pak?

MB: Kalau untuk kepentingan pribadi, saya dulu di Indosat lebih enak, saya ngga ada ya. Itu ada juga salah satu petinggi partai di Bojonegoro, dia sebagai ketua fraksi mana lah, saya ngga sebut fraksinya, dia bilang orang Jakarta jangan hanya sekedar ngomong, lihat aja ke Bojonegoro. Saya sudah dateng, justru disana saya menengarai ada manipulasi, bagaimana bisa misalnya, Pemda Bojonegoro dengan DPRD Bojonegoro itu melakukan presentasi untuk sosialisasi bahwa satu perusahaan akan menjadi partner Pemda. Tapi acara sosialisasi itu justru dianggap forum pengambilan keputusan, lalu anggota-anggota DPRD itu dikoor, digiring untuk melakukan koor setuju setuju. Hanya satu orang yang tidak setuju, yang lainnya setuju, padahal itu bukan forum pengambilan keputusan. Itu hanya forum untuk sosialisasi...

YB: Baik, pak Marwan, Terima kasih perbincangan di Suara Surabaya. Semoga perkembangan selanjutnya bisa kontak-kontak lagi, pak..Demikian pak Marwan, satu di antara anggota DPD Republik Indonesia dan tergabung dalam satu forum yang menolak masuknya Exxon di Blok Cepu.

#### **BREAK**

YB: Selamat pagi...Dengan siapa ini?

Pak Masiran (pendengar): Dengan pak Masiran ini pak, putra daerah Cepu ini. Kebetulan rumah saya itu tidak jauh dari minyak yang tempo hari dikunjungi pak Yusuf Kalla. Saya ingin turut menyampaikan, sebenarnya saya salut dengan apa yang disampaikan Pak Marwan, itu kalau memang bisa membuat rakyat lebih makmur, lebih terangkat secara ekonomi, saya salut sekali. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang bisa dirasakan rakyat langsung, misalnya kalau itu dikelola oleh Exxon Mobile ya itu baiklah, karena ini kan sudah ditandatangani, ya tho?? Tapi kalau itu bisa dinikmati secara langsung oleh rakyat, buat saya begini, untuk Blok Cepu ini kan hanya mencakup dua kabupaten, kabupaten Blora Jawa Tengah dan kabupaten Bojonegoro. Jadi menurut saya, di dua kabupaten itu, untuk faktor pendidikan, itu tolong, tolong diprioritaskan itu. Sebabnya disana itu kaya akan minyak, kaya akan kayu jati, kaya akan tembakau, tapi bagaimana masyarakat disana? Miskin,

### Lampiran 3: Transkrip program talkshow “Wawasan” edisi 15 Maret 2006 (sambungan)

pak! Saya sendiri tidak jauh dari kilang minyak Cepu itu, cuman 250 meter dari rumah kakek saya, tapi apa yang terjadi? Rakyat disana itu tidak bisa menikmati, karena apa? Itu hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok mereka. Suatu contoh, soal pendidikan, bagi orang yang katakanlah di luar orang Pertamina dan Migas, itu sulit untuk masuk di STM Migas. Di sana ada STM Migas, jadi bagi orang yang anak atau keluarga dari Migas atau Pertamina, walaupun danemnya itu tidak memenuhi, saya jamin pasti masuk di Migas, atau di RS Migas, ada juga itu di Cepu. Lha jadi menurut saya, kalau nantinya itu dikelola oleh Exxon Mobile, saya mohonlah pendidikan di dua kabupaten tersebut, itu diberikan gratis atau bagaimana. Atau misalnya untuk rakyat yang miskin, itu yang listriknya pelanggannya di bawah 450 watt tolong digratiskan, jangan diberikan biaya beban, karena disitu sudah terindikasi bahwa orang itu tidak mampu. Begitu, itu bisa dirasakan langsung oleh rakyat disana...

YB: Apa yang menjadi alasan, masyarakat disana harus mendapat yang gratis-gratis gitu pak?

Pak Masiran (M): Alasannya karena disana itu terdapat kandungan-kandungan kekayaan alam, lha kemudian kalau di daerah setempat itu tidak bisa menikmati, bagaimana secara keseluruhan rakyat Indonesia bisa menikmati, wong di kandangnya sendiri ngga bisa lho..Menurut saya kok begitu, seperti yang di Irian Jaya itu, terserah pemerintah mau seperti apa, tapi saya mohon di lokasinya ini tolong diperhatikan dulu...

YB: jangan-jangan kayak di Irian itu...

M: lho itu jelas, pasti lah. Bisa ditambah sedikit? Untuk Pak Marwan, kalau mau mengerahkan massa disana, saya dukung, mungkin disana masih banyak temen-temen saya juga yang di pengeboran Wonocolo, saya juga kenal di sana. Lalu di Nglobo, itu juga sumber minyak, kemudian di Kecamatan Sambong, namanya desa Ledok, itu juga ada, kemudian di Sumber Wates, daerah Randu Blatung, saya juga banyak rekan-rekan disana juga...

YB: Asal, untuk kesejahteraan masyarakat sekitar diperhatikan...

M: Iya, dong. Terima kasih...

YB: Anda lihat ya kawan-kawan dari lokasi disana ya..Tidak tahulah siapa yang mau kelola itu, ngga penting. Yang penting, wong disana itu banyak potensi-potensi tapi rakyatnya masih tetep seperti itu....Jadi siapapun harus memperhatikan kepentingan masyarakat disana.

#### **BREAK**

YB: Ok, kita ketemu lagi dengan kawan-kawan yang lain. Selamat pagi, Suara Surabaya...

Pak Henri Subijakto (pendengar): Ingin menyampaikan perspektif yang agak berbeda ya, Exxon Mobile itu sebenarnya dia kan sudah punya kontrak dengan di Cepu itu sampai tahun 2010. Dan sebelum ini mereka sangat luar biasa dalam artian, ini bedanya antara perusahaan minyak internasional dengan Pertamina, tadi kan pak Rudi mengatakan masyarakat sekitar jauh lebih welcome dan jauh lebih diuntungkan dibandingkan dengan Pertamina yang...

YB: Kalau diuntungkan belum tau, lha wong belum dikelola..

Pak Henri Subijakto (HS): Ya tapi ada berita-berita di kalangan LSM, di kalangan orang-orang Bojonegoro yang sekarang yang muncul di media itu, memang mereka seakan-akan menerima dengan Exxon..

YB: Pak, bagaimana dengan indikator LSM-LSM itu ternyata mendapat bagian-bagian dari orang-orang tertentu?

HS: Itu yang ingin saya sampaikan. Tahun 2002, tahun 2003 itu sebenarnya riset-riset tentang community development itu dilakukan terus oleh temen-temen dari Exxon, ini berarti apa? Bahwa mereka sudah jauh-jauh hari, 5 tahun sebelum kasus ini muncul, mereka sudah menyiapkan infrastruktur sosial dan komunikasi...

YB: Datanya dari mana?

HS: Lho, yang melakukan temen-temen saya, gimana..Istri saya terlibat disitu, community development itu bagaimana supaya masyarakat bisa menerima atau memiliki image yang baik terhadap Exxon.

YB: Itu temen-temen anda itu terlibat disitu atas permintaan Exxon atau bagaimana?

### Lampiran 3: Transkrip program talkshow “Wawasan” edisi 15 Maret 2006 (sambungan)

HS: Exxon, tapi kita kan ndak tau kalau sekarang ada minyak yang sebegitu besar. Waktu itu memang asumsinya jangan sampai ada penolakan seperti yang terjadi di Aceh, Exxon Mobile Aceh kan sempet ramai waktu itu. Kemudian jangan sampai ada penolakan seperti kasus kayak Freeport, sehingga lalu mereka betul-betul mencoba merangkul banyak aspek, banyak kelompok sosial masyarakat di Bojonegoro dan sekitarnya. Sehingga yang namanya mahasiswa, aktivis, LSM itu biasa, dikumpulkan, ditraining, diajak pergi kemana, sehingga memang banyak kalangan kelompok-kelompok masyarakat disana yang merasa sudah dirangkul oleh Exxon Mobile. Dan akhirnya yang terjadi....(dipotong)

YB: itu melalui tim anda, temen-temen anda tadi...

HS: Oh nggak, ini hanya risetnya saja kita ini. Jadi ada rekomendasi-rekomendasi yang harus kita lakukan. Kita sangat profesional, dalam artian tidak dalam konteks mendukung seperti ini, justru ini sebenarnya adalah kekeliruan-kekeliruan kita, kadangkala kan kalau orang profesional, disuruh riset ya riset, suruh gimana enaknya community development, ya kita bikin program-programnya. Tapi ternyata itu menguntungkan Exxon sampai sekarang. Jadi saya hanya ingin mengatakan, sebenarnya BUMN seperti Pertamina perlu juga membuat semacam langkah-langkah seperti mereka. Bahwa kalau mereka ingin mendapat dukungan dari masyarakat sekitar, itu tidak hanya sekedar mengeksplorasi tapi juga mempersiapkan infrastruktur sosial, kemudian juga mempersiapkan dengan cara mencari dukungan terhadap masyarakat di sekitarnya. Nah itu yang dilakukan oleh Exxon, dan ini bisa dikonfirmasi dengan Humasnya Exxon yang sekarang ada disini juga... Termasuk Diva di Jakarta, itu sangat intens sekali ketika membuat community development dan nyatanya memang...

YB: Kalau humasnya disini sudah sukses pak..Itu semua media sudah...

HS: Ya, termasuk media-media itu selalu dirangkul oleh Exxon, itu memang seperti itu. Nah itulah makanya, kadangkala apa yang disampaikan Pak Marwan tadi tidak muncul di permukaan, karena keberhasilan Exxon untuk melakukan community development termasuk merangkul media.

YB: Tapi terhadap hal-hal yang dicemaskan Pak Marwan, bagaimana anda menilai tadi, pak?

HS: Itu bagus, memang seperti itu sebenarnya. Jadi memang yang seringkali tidak muncul di permukaan itu kan bahwa orang-orang Amerika itu kalau mereka mengeksplorasi itu biayanya sangat jauh lebih mahal dibandingkan dengan Pertamina. Tetapi masalahnya ialah bahwa pertama, mereka sudah menyiapkan infrastruktur, jangan lupa bahwa Amerika itu punya kekuatan-kekuatan yang luar biasa termasuk kenapa Menlunya sekarang kesini ya, Condoleezza Rice, itu kan ada hal-hal di balik persoalan Cepu, Freeport, dan juga Aceh. Jadi ada komitmen-komitmen politik yang mungkin tidak hanya masalah Cepu, tapi itu lebih luas, bahwa pemerintah kita, SBY akan mendapatkan dukungan dari pemerintah Amerika, kalau hal-hal seperti ini mendapatkan, atau diberikan kepada Exxon...

YB: Tapi menurut Sugiarto, pak, BUMN, beliau sampaikan bahwa kedatangan Condoleezza Rice tidak berkaitan sama sekali..

HS: Ya itu kan.. Tapi kalau analisisnya lebih dalam, dalam politik tidak mungkin...Kita harus membaca buku *The Confession of Economic Hit Man*, yang di perpustakaan SS ada itu. Itu buku bagaimana peran pemerintah Amerika kalau masuk ke negara-negara berkembang seperti kita...

YB: Pak, itu bagaimana ya, proses komunikasi yang katakanlah tadi berhasil ya, merangkul dsb, menjamin bahwa tidak ada memang kerugian atau hal-hal negatif yang menimpa masyarakat itu. Gimana menjaminnya pak?

HS: Sebenarnya kita tahu bahwa kalau dikelola bangsa sendiri jauh lebih baik, Bung Karno dulu juga begitu kan. Tapi masalahnya kan kita ini kadangkala ya ingin cepat, terus terang kalau dengan Exxon itu, kan berarti bisa langsung cepat. Kalau Pertamina, itu baru mulai 2010, karena kontrak Exxon itu terakhir 2010, berarti Pertamina baru bisa operasional setelah Exxon selesai...

YB: Tadi katanya 2002, pak, sudah habis katanya...

HS: 2002 atau 2010 saya lupa...

YB: Pak Marwan tadi mengatakan mestinya sudah selesai 2002 itu dengan Exxon..

HS: Diperpanjang, ini katanya malah mau diperpanjang sampai 2030 kan..

YB: Ya, permintaan terakhir...

### Lampiran 3: Transkrip program talkshow “Wawasan” edisi 15 Maret 2006 (sambungan)

HS: Maka, ini kan ada masalah-masalah yang kadangkala publik atau masyarakat tidak tahu. Ini peran media penting sekali untuk mengungkap, melakukan investigasi kesana, cuma kalau medianya sudah dirangkul dan ada community development memang susah..

YB: Jadi, kerjaan sampeyan yang harus mengontrol media..

HS: Makanya SS yang harus coba lakukan investigasi disana. Terima kasih Mas Yoyong..

YB: Terima kasih, Selamat pagi. Pak Henri Subijakto, ada kawan-kawan beliau yang terlibat dalam proses-proses survey, penelitian untuk Exxon ya. Kita sudah mendengar dari banyak kacamata, jadi kita pengen punya suara yang beragam dari persoalan ini, kawan, terutama untuk melihat semua sisi termasuk sisi-sisi yang suporting atau sisi-sisi yang sebaliknya, malah menolak misalnya begitu. Dalam posisi seperti ini kita bisa melihat lebih jernih persoalannya karena kita ini sekarang mau apa, sebagai rakyat kecil kan cuma bisa menilai saja. Tapi bagaimana anda bisa menilai dengan lebih jernih, mungkin ini lebih penting ya...

#### **BREAK**

YB: Selamat pagi.. Dengan siapa ini?

Pak Hendry (pendengar): Selamat pagi, mas Yoyong...saya juga takut masalah rakyat diiming-iming di awal, ini sudah kesekian kalinya saya melihat dari kacamata saya sendiri. Orang Indonesia ini paling senang diiming-imingi, jadi awalnya nanti bakal diseperti ini kan, tapi ini uangnya siapa? Kan tadi kenyataannya biaya operasional saja antara puasanya Exxon dan Pertamina bedanya hampir segitu..

YB: Ya, sekitar 50%...

Pak Hendry (H): Ya 50 60%, saya pikir apa biaya operasional itu ngga mending cari yang...

YB: Biaya operasional itu selain soal mahalnyanya, juga ternyata diserahkan ke Indonesia..

H: Lha iya, uangnya siapa? Kita ini istilahnya gini, kalau kita beli barang, kalau saya sih mending beli yang mahal tapi operasionalnya, maintanancenya murah. Daripada saya beli murah, tapi maintanancenya luar biasa. Saya juga melihat, bargainingnya Indonesia ini dimana? Saya sendiri tadi denger-dengerkan, Indonesia ini menang dimana, nantinya 2010 atau 2030 Indonesia bakal nggak punya bargaining...

YB: Tapi tadi disebutkan pak, dari 100%, Indonesia dapat 85%, yang 15% itu dibagi Exxon, Pertamina, Pemda. Masalahnya adalah 85% itu dari biaya operasional...

H: Ya itu, biaya operasionalnya berapa? Kalau saya lihatnya simpel aja, kalau sekarang kita beli barang tapi ini maintanancenya luar biasa, setiap bulan keluar cost sekian, misalkan 200 ribu per bulan, padahal yang satunya saya beli selisih 500 ribu, tapi setiap bulan saya ngeluarin cuma seribu. Kalau saya sih milihnya yang selisih 500 ribu itu....

YB: Tapi soal community development tadi katanya lemah, pak..

H: Ya...cuman itu kan perlu diperbaiki, itu diaudit kan bisa, secara manajemen kita atur kembali. Memang sih dari segi rakyat, apalagi tadi dari orang sana, mengetahui bahwa kondisinya miskin, itu bagaimana kita bisa bantu tanah-tanahnya mereka. Memang sih pemerintahan yang punya, cuman dikembalikan lagi untuk rakyat. Ini kadang-kadang yang bikin orang-orang petinggi itu lupa. Saya sendiri juga bingung, saya ya di tempat saya, tanah itu ngebor sendiri, kita dikasih pajak untuk air, pajak itu dihitungnya perkubik, padahal kita ndak ikut PDAM. Saya cuma 25 m, itu bisa keluar air, 25 m itu kalau pajak itungannya rumah tangga tapi saya pakai untuk kantor, katanya itu untuk perorangan. Ok, saya minta. Awalnya kita cuma dikasi bon kosong, jadi cuma nota ga ada instansinya, saya kan ngga mau, saya minta yang asli, kalau ngga mau, saya nggak perlu bayar. Lha ini saya kan bingung, waktu itu saya diginikan: sudahlah percaya, ini kan bapak pakai punya negara, tanah negara, air juga hasil negara, untuk negara. Terus saya bilang, apa ngga dikembaliin untuk rakyat? Lho saya kalau mbayar ngga papa, tapi kalau mbayarinya dengan nota kosong apa yaa...

YB: Ok, baik. Terima kasih...

#### **BREAK**

YB: Baik, kawan, pagi ini.....Lalu juga kita diskusi soal Exxon, sebenarnya urusannya ini urusan gede, urusan nasioanal dan sudah diputuskan, dan pagi ini jam 9, kata reporter kita di Jakarta, rencana akan ditandatangani ya, dan itu akan disaksikan oleh Condoleeza Rice, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dan kemudian kaitannya dengan itu tadi banyak sekali pendapat dan komentar, yang penting

**Lampiran 3: Transkrip program talkshow “Wawasan” edisi 15 Maret 2006  
(sambungan)**

sederhana harusnya potensi bangsa ini digunakan untuk kesejahteraan bangsa ini, termasuk kalau bisa pengelolaannya oleh bangsa ini. Tapi ya itu tadi, banyak lebih kurangnya dan kita sudah mendengar semua catatannya dan seperti biasa saya tidak simpulkan mana yang terbaik...

**BREAK**

YB: Ya kawan sampai disini saya Yoyong Burhanuddin bersama anda di program Wawasan Radio Suara Surabaya, kita bertemu di kesempatan yang lain, dan sukses untuk anda semua ya..Assalamualaikum...

**Lampiran 4 : Tabel analisa program *talkshow* “Diskusi Lembaga Konsumen Media (LKM)” edisi 24 Januari 2006**

Elemen	Bukti	Interpretasi
<p>Tema (tematik) Kritikan terhadap media massa karena ketidakimbangan berita tentang buruh</p>	<p>“...Kekerasan-kekeraan merekalah yang banyak mewarnai media sementara fakta-fakta di belakang berita itu mengenai mengapa buruh itu turun ke jalan, mengapa mereka marah sampai sedemikian, itu memang acapkali tidak terekspos.”</p> <p>“...berbagai media termasuk media-media nasional itu memberitakan...Namun kami di sini ingin sedikit memberikan semacam kritikan terhadap apa yang muncul di berbagai media yaitu memang ada semacam ketidakproporsionalan melihat persoalan buruh di media massa. ...”</p> <p>Restu Indah: “...Kita membahas, bagaimana sih sebetulnya peliputan demo buruh dari media kita, semuanya. Nah menurut Pak Henri tadi di awal beliau memberikan penilaian bahwa media kita kurang proporsional, termasuk dari Pak Djoko ya, analisa-analisa yang sudah disampaikan”</p> <p>“...selama ini media kita hanya menampilkan sisi anarkhisme dari buruh saja, atau dari perspektif pengusaha tetapi bagaimana kehidupan para buruh yang riil, itu ternyata masih belum banyak diberikan tempat oleh media.”</p>	<p>Pemilihan topik tentang buruh ini menggambarkan Radio Suara Surabaya sebagai sebuah radio yang peduli dengan kondisi buruh di Indonesia, dan mengkritisi media massa termasuk dirinya sendiri adalah hal yang perlu, karena media massa sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di era modern sekarang ini, dan Suara Surabaya harus menjadi media yang berfungsi secara ideal, salah satunya dengan bersikap netral atau tidak berpihak pada kelompok tertentu.</p> <p>SS menganggap media massa yang tidak proporsional dianggap sebagai suatu hal yang salah sehingga perlu dikritik. Apalagi hal seperti ini memberikan pengaruh buruk pada konsumen media, karena kalau audience hanya disuguhi berita negatif tentang buruh, pelan-pelan mereka akan punya stigma negatif juga pada buruh. SS dan narasumber yang berasal dari Lembaga Konsumen Media berkewajiban melindungi konsumen media dari pemberitaan media massa yang tidak proporsional.</p> <p>Pemilihan topik ini juga mengingatkan, mempengaruhi dan meyakinkan pendengar kembali supaya kritis terhadap media massa, karena terkadang isi beritanya tidak proporsional dan memihak pada kelompok tertentu.</p>
<p>Skema (skematik) - Alur perbincangan ini diawali dengan pengantar informasi yang disampaikan pak Henri Subijakto dan pak Djoko Susanto yang memaparkan kondisi yang menyebabkan munculnya kritikan pada media massa karena bersikap tidak proporsional pada buruh</p>	<p>Henri S: “Seakan-akan buruh-buruh kita ini adalah penyebab utama. Jadi media ini secara tidak sengaja seringkali melakukan pembingkaihan bahwa nampaknya persoalan buruh kita adalah penyebab utama dari berbagai hal berkaitan dengan katakanlah ketakutan terhadap investor yang mungkin akan lari ke luar</p>	

<p>- Selanjutnya, para narasumber menunjukkan berbagai fakta tentang media yang pemberitaannya tidak proporsional sekaligus fakta lain terkait kondisi riil dari kehidupan buruh.</p>	<p>negeri, atau ketakutan investor masuk.”</p> <p>“...fakta-fakta di belakang berita itu mengenai mengapa buruh itu turun ke jalan, mengapa mereka marah sampai sedemikian, itu memang acapkali tidak terekspos”</p> <p>“...dari golongan menengah bawah ini, sebenarnya memiliki persoalan- persoalan yang juga cukup pelik. Tetapi kepelikan-kepelikan ini banyak yang tidak terekspos di media”</p> <p>Henri S: “ Di berbagai media juga menurut perhitungan kami, hampir setiap berita selalu ada pengusaha yang diwawancara. Tetapi hanya 60%, yang buruhnya diwawancara, jadi 40% ngga ada buruhnya yang diwawancara. Kemudian sebenarnya akan lebih imbang kalau misalnya yang diwawancara itu adalah para pengamat ekonomi atau pengamat perburuhan yang netral. Bukan para pengusaha, pemerintah, atau polisi.”</p> <p>“...penelitian investigasi yang dilakukan oleh warga asing , dari Australi, John Billgreen yang meneliti tentang buruh di Indonesia. Sebagian besar buruh-buruh kita itu banyak yang menghabiskan waktunya di perusahaan itu 16 jam sehari...dan mereka berdiri tidak pernah duduk... kalau pas export itu biasanya sampai ada yang 24 jam, baru diberi save karena mengejar export...lebih banyak bekerja dalam temperatur 40 derajat Celcius, tidak ada AC di ruang-ruang tempat mereka bekerja...dengan gaji rata-rata sebenarnya berada pada ambang batas untuk normal hidup yang katakanlah untuk menghidupi keluarga itu ambang sangat rendah....”</p>	
---	--	--

<p>- Alur berlanjut dengan interaksi dengan pendengar. Ternyata pendengar yang berpartisipasi memiliki pendapat yang beragam, ada yang mendukung pendapat narasumber ataupun sebaliknya.</p>	<p>Para pendengar:</p> <p>“...upah untuk buruh dari perusahaan itu hanya 5%, tetapi untuk birokrat, untuk perijinan dsb itu menghabiskan 35%...memang betul kalau media kita itu semacam memojokkan pada buruh...” (Yusuf)</p> <p>“...karena saya melihat adanya kecenderungan bahwa pers ini sengaja mau mengadu buruh dengan pemerintah, atau pemerintah setempat. Terbukti dengan eksposi-eksposi yang nyaris boleh dikatakan berlebihan” (Iwan)</p> <p>“...problem ini bukan murni ada di buruh itu sendiri atau sebenarnya bukan murni juga ada di pengusahanya sendiri. Sebenarnya ini tidak terlepas dari aspek regulasi yang dibuat oleh pemerintah... mohon maaf saya ada di tengah... Harusnya sekarang itu lebih proporsional dalam menempatkan berita untuk buruh maupun pengusaha... kalau dengan pemerintah, saya malah syukur, karena yang menjadikan keadaan seperti ini adalah pemerintah - tetapi justru diadu dombanya buruh dengan pengusaha itu sendiri. Ya, ini yang saya harap bisa dinetralisir oleh kalangan pers atau media agar tidak memanas-manasi...” (Rudi)</p> <p>“...tidak dapat dipungkiri biaya hidup ini kan meningkat sedemikian rupa. Tapi apakah biaya ini hanya dialami oleh buruh? Bagaimana dengan pengusaha? ....Sedangkan penjualan mengalami penurunan, jadi kalau masih dituntut dengan upah yang meningkat sedemikian tajam, kan semakin memberatkan.” (Halim)</p> <p>“.... Saya kira pemberitaannya kan sudah berimbang, pak...” (Sumarwito)</p>	
--	--	--



	<p>“...Ya, radio harus hati-hati karena memang radio itu interaktif dan ketika segmennya dari banyak pengusaha biasanya lalu suara pengusaha lebih banyak, mendominasi...”</p> <p>kejadian kekerasan, tetapi apa tuntutananya, mengapa mereka ada masalah, itu agak sedikit diungkap...”</p> <p>“...Ya, radio harus hati-hati karena memang radio itu interaktif dan ketika segmennya dari banyak pengusaha biasanya lalu suara pengusaha lebih banyak, mendominasi...”</p>	
Latar (Semantik)	<p>“...jadi buruh-buruh kita ini dalam beberapa minggu terakhir ini banyak mendapat sorotan setelah kira-kira 2 minggu yang lalu demo besar di Surabaya..”</p> <p>Ya, sengaja memang saya angkat di Suara Surabaya karena pendengarnya mayoritas lebih banyak pengusaha. Jadi suaranya di Suara Surabaya ketika kita pantau memang sebagian besar itu selalu juga sedikit negatif terhadap gerakan-gerakan buruh. Kemarin itu nampak sekali bahwa dari para pendengar framenya selalu mereka harus dikerasi karena telah melakukan kekerasan.</p> <p>Henri S: “...Jadi media ini secara tidak sengaja seringkali melakukan pembingkaiian bahwa nampaknya persoalan buruh kita adalah penyebab utama dari berbagai hal berkaitan dengan katakanlah ketakutan terhadap investor yang mungkin akan lari ke luar negeri, atau ketakutan investor masuk”</p> <p>“...gambar-gambar media itu penuh dengan suatu hiruk pikuk yang kemudian mengkhawatirkan, begitu...penuh dengan investor A mau lari kemana, investor B mau lari</p>	<p>SS mengangkat topik ini alasannya antara lain karena masalah ini baru saja terjadi artinya Suara Surabaya concern membahas masalah yang aktual dan dekat dengan pendengar.</p> <p>Topik tentang buruh diangkat di Suara Surabaya yang pendengarnya mayoritas pengusaha adalah hal yang kontradiktif. Namun perbedaan itulah yang menjadi alasan LKM mengangkat topik ini di SS. Karena beda, maka pendengar SS harus memberi perhatian, melihat buruh dengan cara pandang lain, dan lebih peka terhadap masalah mereka. Ini juga menunjukkan keterbukaan SS untuk menerima perbedaan dan kritikan Alasan-alasan diangkatnya topik ini lebih ditekankan atau dititiberatkan pada sikap atau kebijakan media massa yang tidak proporsional, sehingga memang terlihat narasumber menekankan bahwa kritikan ini muncul karena kesalahan media massa. Dengan menyudutkan media massa, narasumber mengarahkan pendengar supaya kritis terhadap pemberitaan di media massa, sehingga akan melindungi konsumen dari pemberitaan media massa yang tidak proporsional. Melalui alasan ini, narasumber berusaha meyakinkan pendengar bahwa bagi sebuah media massa, prinsip</p>

	<p>ke mana dan ...yang diwawancarai adalah wakil presiden kita. Dan wakil presiden kita adalah seorang pengusaha.”</p> <p>“...selalu buruh itu diframe, dianggap, didefine dia adalah masalah...seakan-akan diagnosenya itu kalau buruhnya itu diam, bisa menerima, maka investor masuk. Padahal yang namanya investasi masuk itu belum tentu hanya persoalan buruh, banyak sekali.</p>	<p>balance atau cover both side adalah sangat penting. Ketika prinsip tersebut tidak dijalankan, maka hal itu adalah sesuatu yang salah dan perlu diluruskan, sehingga media perlu dikirtik dan diberi masukan.</p>
Detail (Semantik)	<p>“...Di berbagai media juga menurut perhitungan kami, hampir setiap berita selalu ada pengusaha yang diwawancara. Tetapi hanya 60% yang buruhnya diwawancara, jadi 40% ngga ada buruhnya yang diwawancara.”</p> <p>Henri S: “...John Billgreen yang meneliti tentang buruh di Indonesia. Sebagian besar buruh-buruh kita itu banyak yang menghabiskan waktunya di perusahaan itu 16 jam sehari...dan mereka berdiri tidak pernah duduk...lebih banyak bekerja dalam temperatur 40 derajat Celcius, tidak ada AC di ruang-ruang tempat mereka bekerja...dengan gaji yang UMKnya memang.. ya itu relatif.. Ada yang 650, ada yang 750, ada yang 850. Tapi ini rata-rata sebenarnya berada pada ambang batas untuk normal hidup yang katakanlah untuk menghidupi keluarga itu ambang sangat rendah...jadi kalau pas export itu biasanya sampai ada yang 24 jam, baru diberi save karena mengejar export...”</p> <p>Ini yang diungkapkan oleh peneliti dari Australia itu...Itu akan menjadi lost generation, karena generasi mereka tidak mungkin anaknya akan mendapat sekolah yang baik dengan UMK yang sekian. Tidak mungkin mereka akan memiliki gizi yang baik untuk anak-anaknya, dan itu berarti generasi berikutnya akan</p>	<p>Berbagai detail fakta yang diungkap oleh narasumber bertujuan untuk menguatkan berbagai argumen yang sudah dinyatakan di awal. Dari detail fakta yang dikemukakan narasumber, semakin menunjukkan bahwa Radio Suara Surabaya tidak menghalangi adanya suatu perbedaan karena detail yang muncul dari narasumber semuanya tentang buruh, padahal jelas sekali bahwa narasumber berbicara di sebuah radio yang pendengarnya sebagian besar adalah kalangan atas.</p> <p>Fakta-fakta tentang buruh ini diungkap untuk memunculkan empati pada buruh, serta mengkritik bahwa media seharusnya perlu lebih mengeksplor unsur why atau bahkan solusi dalam satu pemberitaan, karena hal itu dapat memberi dampak yang besar bagi masyarakat. Mungkin bisa memunculkan ide-ide baru untuk memperbaiki nasib buruh.</p> <p>Fakta-fakta ini juga menggambarkan bahwa SS sebagai radio yang concern pada kota Surabaya, juga memberi perhatian pada kondisi bangsa, dengan menekankan fakta bahwa kehidupan buruh yang baik/buruk akan berpengaruh pada masa depan bangsa.</p> <p>Detail ini juga untuk memberi wacana baru pada masyarakat tentang buruh. Melalui fakta seperti ini, narasumber ingin mempengaruhi pendengar, bahwa jika</p>

	<p>merosot secara biologi.</p> <p>“...keuntungan dari para buruh itu, ketika produknya diexport hanya sekitar 0,5... ketika uang rupiah kita sekitar tahun 97-98, ketika rupiah itu jatuh sampai 1 dollar itu 16 ribu, itu gaji buruh tidak dinaikkan, padahal exportnya tetap menggunakan dollar sehingga rupiahnya tinggi sekali. Keuntungannya ada dimana, di perusahaan kan...”</p> <p>“...runner journalist, atau jurnalisme yang hanya sekedar berlari kesana berlari kesini, untuk memotret peristiwa yang sedang terjadi, yaitu biasanya apa yang tampak misalnya kekerasan, kemudian demo buruh yang merusak sesuatu, kemudian konflik dengan aparat keamanan. Dia hanya kesana, tapi apa dibalik itu, yaitu mereka mencoba untuk mengungkap lebih dalam, katakanlah menjadi penulis yang memahami betul persoalan perburuhan, itu sedikit...akhirnya ya pe mberitaan itu hanya 5W 1H, tapi tidak pernah ditambah dengan solusi misalnya...Memotret 5W1H pun minimal, whynya harus banyak...”</p> <p>“...Di Amerika dll, upahnya dihitung dalam kerangka perjam. Hitungannya lebih jelas, artinya orang yang bekerja lebih banyak akan dapat upah lebih banyak..di Amerika, perjam saja sudah hampir 8 dollar, sementara kita yang bekerja seharian, berdiri, kepanasan dsb rata-rata hanya 2 dollar sehari...”</p> <p>berapa persen dari biaya produksi itu yang murni masuk ke buruh, yang lainnya masuk ke sektor yang misalkan non efisiensi, seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi. Berapa persen yang kemudian harus dibayarkan oleh seorang pengusaha kepada pemerintah? Berapa persen</p>	<p>media hanya menunjukkan hal-hal yang buruk tentang buruh, maka itu akan berpengaruh buruk, karena audience akan beranggapan sama.</p> <p>Detail dari sisi pengusaha sempat muncul dari pendengar, meskipun tidak banyak. Pernyataan pendengar ini menggambarkan pembelaan atau dapat juga diinterpretasikan sebagai keberanian untuk berbeda pendapat dengan narasumber.</p> <p>Hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa di Suara Surabaya, setiap elemen masyarakat boleh bergabung untuk menyampaikan pendapatnya, baik itu saling mendukung atau saling menentang satu sama lain.</p> <p>Perbedaan pendapat antara pendengar atau narasumber adalah hal yang biasa dan sering terjadi.</p> <p>Bagi Suara Surabaya, keberanian berpendapat atau bersuara dari pendengar merupakan hal yang terus menerus berusaha dibangun sehingga pendengar belajar untuk menerima perbedaan dimana suatu masalah bisa dipandang dari berbagai sisi.</p> <p>Dengan berbagai kritikan ini, SS juga berusaha menjadikan media massa sebagai sumber informasi yang proporsional, tidak membela kepentingan kelompok tertentu, karena hal ini juga akan berpengaruh pada konsumen media. Dan kritikan ini juga untuk melindungi dan membuat konsumen media menjadi kritis terhadap isi media.</p>
--	--	--

	<p>pungutan-pungutan yang seharusnya tidak ada itu?</p> <p>“...tadi dibilang bahwa paling banter buruh bisa 5% sampai 10%, sementara kita bisa mengeluarkan untuk marketing kadang-kadang bisa sampai 20%...”</p> <p>Pendengar: “...waktu itu bahwa pihak buyer pun pintar, ngerti kalau dollarnya mengalami perubahan gitu ya, mereka minta diskon 35% pak..Nah itu, sedangkan produsen dalam negeri memakai produk atau bahan baku juga import. Nah, kan sebenarnya juga tidak bisa dibilang mengalami keuntungan...”</p> <p>Pendengar: Tapi apakah biaya ini hanya dialami oleh buruh? Bagaimana dengan pengusaha? Buruh ikut pengusaha, pengusaha ikut siapa? Kemudian belum lagi biaya-biaya kenaikan BBM dsb kemudian rencana tarif listrik, ya..Sedangkan penjualan mengalami penurunan, jadi kalau masih dituntut dengan upah yang meningkat sedemikian tajam, kan semakin memberatkan.</p>	
Ilustrasi (Semantik)	<p>Pendengar: “...Saya hanya membaca Kompas saja, dari media massa ini yang memberitakan secara fair. Disana dikatakan bahwa upah untuk buruh dari perusahaan itu hanya 5%, tetapi untuk birokrat, untuk perijinan dsb itu menghabiskan 35%...”</p> <p>Pendengar: “...saya melihat di situ begitu antusias media elektronik ya, untuk meliput kejadian itu dan yang saya lihat mereka lebih terkonsentrasi ketika ada gejolak, ada orang mendorong dengan petugas kepolisian...”</p> <p>“...Kita lihat ketika uang rupiah kita sekitar tahun 97-98, ketika rupiah itu jatuh sampai 1 dollar itu 16 ribu,</p>	<p>Dari berbagai ilustrasi yang dikemukakan narasumber atau pendengar terlihat bahwa ada usaha untuk menampilkan image positif tentang buruh, yaitu dengan cara menyudutkan dan menyalahkan pemberitaan media yang tidak proporsional. Sementara di sisi lain, secara implisit juga tergambar bahwa ada sikap tidak pro terhadap pengusaha dan pemerintah, ini tergambar dari ilustrasi yang lebih banyak mengkritik dan memunculkan sisi negatif tentang pengusaha atau pemerintah. Kritikan terhadap pengusaha ini menunjukkan SS sangat terbuka terhadap perbedaan, karena narasumber justru membela buruh, dan mengkritik pendengar radio SS sendiri, yang mungkin sebagian besar adalah pengusaha.</p>

	<p>itu gaji buruh tidak dinaikkan, padahal exportnya tetap menggunakan dollar sehingga rupiahnya tinggi sekali. Keuntungannya ada dimana, di perusahaan kan.. Itu hanya contoh saja....”</p> <p>“...Jadi ketika buruh itu sudah menutup jalan, kemudian melakukan kekerasan di perusahaan tertentu, karena mengajak buruh-buruh yang lain atau ketika menggedor pintu di kantor gubernur misalnya begitu...”</p> <p>“...Cina itu bukan persoalan buruh saja yang menyebabkan investornya masuk , tetapi infrastruktur yang sangat besar, yang sangat mendukung misalnya begitu, kemudian disana jalan-jalannya sangat luas, kemudian juga semua infrastruktur itu mudah, perijinan itu mudah...”</p> <p>“...Sementara yang dilakukan sekarang kan tidak seperti itu, seperti sedang menonton adu jago kemudian dia panas-panasin dan dia takut-takutin kalau ini terjadi seperti apa, terus kemudian besoknya langsung wawancaranya ditampilkan investor lari, ada yang lari dari jawa timur ke jawa tengah dsb...”</p> <p>“...ada perusahaan-perusahaan yang multinasional, jadi ya memang dia punya perusahaan cabang di Indonesia, misalnya sepatu Nike..Itu punya cabang-cabang disini dengan buruh yang dibayar dengan standard UMK di sini, tetapi dibeli dan barangnya dijual secara global. Di sini berarti apa? Bahwa ada persoalan-persoalan yang kompleks, tidak sederhana. Memang ada perusahaan yang sangat susah tetapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang mengambil untung dari UMK-UMK itu...”</p> <p>“...jadi misalnya seperti foto ini yang ada di media</p>	<p>Dengan ilustrasi ini SS mengajak untuk melihat masalah ini tidak hanya dari sudut pandang yang sempit dan negatif, melainkan harus peka dan berempati pada buruh. Media juga harus peka, karena berfungsi sebagai sarana informasi dan mendidik masyarakat.</p> <p>Ilustrasi ini mengajak pendengar untuk selalu kritis terhadap setiap berita yang muncul di media massa, karena ada kecenderungan perilaku media di Indonesia sekarang hanya bisa menjadi provokator dan mempertajam konflik.</p>
--	--	--

	<p>yang sekarang ada di depan saya, ini foto tentang kekerasan antara buruh dengan aparat keamanan. Di media-media lain hampir sama seperti itu, selalu gambarnya adalah gambar ketika buruh disemprot dengan air, atau ketika mereka sedang merobohkan pagar. Itu baru mereka diambil gambarnya, televisi juga melakukan hal yang sama seperti itu...”</p> <p>“...Contohnya begini, buruh gajinya tetep kecil, tapi kenapa daya beli tetep tinggi karena di sisi lain kita ini dihidupkan dengan budaya konsumtif , jadi yang terjadi adalah suatu daya beli yang semu sehingga kemudian mereka berniat membeli motor, bukan karena punya kemampuan beli motor tetapi karena berani menghutang... Seperti kemarin ketika BBM naik, pengusaha minta kompensasi dengan mengurangi beberapa terminal handing, charge, beberapa ongkos-ongkos itu, dalam konteks buruh ini, kenapa pengusaha tidak melakukan itu? Dan itu tidak disorot oleh media... banyak media malah lebih fokus pada memperkeruh keadaan dengan misalkan menampilkan adanya investor yang lari dsb padahal ada banyak aspek untuk mereka pindah seperti itu..”</p> <p>“...ketika dibicarakan di Metro TV pun yang berdebat itu hanya pemerintah dengan ketua APINDO begitu ya..Kemudian yang mewakili buruh atau yang moderat itu tidak ada...”</p>	
Pengandaian (Semantik)	<p>“...media tidak mengulas sisi misalkan bahwa dengan memberikan kenaikan UMR itu akan menjadi stimulan buat kenaikan daya beli. Dan dengan kenaikan daya beli, berarti produk-produk yang sudah dibuat itu menjadi akan juga bisa bergulir di pasaran. Dan itu kan satu cara pandang yang lain, kita tidak dapati di media...”</p>	<p>Berbagai pernyataan ini menunjukkan SS mendorong semua pihak memiliki pemikiran yang jauh ke depan, dan membawa suatu perubahan ke arah yang lebih baik. SS mempengaruhi media untuk membuat perubahan dengan memiliki ide-ide baru tentang fakta yang bisa diungkap di media massa. Ini penting untuk membuka wawasan bagi masyarakat. Jika hanya disuguhi berita</p>

	<p>“...Misalkan seperti ini -dan kita butuh peran media disitu- media ketika buruh melakukan demo mestinya dia menurunkan analisis berapa persen dari biaya produksi itu yang murni masuk ke buruh, yang lainnya masuk ke sektor yang misalkan non efisiensi, seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi. Berapa persen yang kemudian harus dibayarkan oleh seorang pengusaha kepada pemerintah? Berapa persen pungutan-pungutan yang seharusnya tidak ada itu? ...”</p> <p>“...Ya, terus misalkan demo juga turunkan ongkos2 misalkan terminal handing, charge atau yang lain, yang itu memberatkan. Nah dalam konteks seperti itu kan bisa sebenarnya buruh dan pengusaha itu mereka saling bekerjasama, nah ini kemudian yang oleh gerakan-gerakan buruh di Indonesia belum banyak dipikirkan...”</p> <p>“... misalkan ada ulasan benarkah kita sudah meletakkan sistem ini dengan benar? Contohnya UMR selama ini dihitung berdasarkan individu padahal bukan dalam kerangka mereka cukup untuk hidup sendiri, tapi apakah mereka layak untuk hidup sekeluarga? ...buruh kita minta ongkos naik tapi mereka kinerjanya rendah, pernahkah kita berpikir, barangkali sistem kita sudah baguskah?Apakah kita sudah pernah berpikir, untuk merubah sistem yang upah harian itu, dirubah menjadi upah perjam?...”</p> <p>“...78 juta misalkan begitu ya.. Coba bayangkan kalau mereka hidup dalam suatu standard yang sangat minimal maka itu lost generation...jadi kalau mereka sistem penggajiannya itu tidak baik itu akan menghilangkan suatu generasi...”</p>	<p>kekerasan, bukan tidak mungkin bisa berdampak buruh pada perilaku audience. Atau jika media hanya memunculkan suara pengusaha yang memojokkan buruh, audience juga akan punya stigma negatif pada buruh.</p> <p>SS juga mengajak pendengar untuk peduli dengan kondisi bangsa kita sekarang, bahwa masyarakat sekarang ini harus mulai memikirkan perubahan dan perbaikan kehidupan buruh karena hal itu sangat berkaitan erat dengan kualitas bangsa kita di masa datang.</p> <p>SS menganggap bahwa sangat baik kalau masyarakat dan media massa memiliki pandangan yang objektif terhadap buruh, sehingga akan mendorong adanya pemikiran serta kebijakan baru dari pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan buruh. Kondisi ini akan membuat situasi sosial menjadi lebih baik, dimana tidak terjadi konflik yang berkepanjangan seperti sekarang ini.</p>
--	---	--

	<p>“...buruh sekitar 78 juta, itu suatu kekuatan yang sangat besar untuk menggerakkan perekonomian. Kalau misalkan masing-masing saja pendapatannya meningkat 10% saja, itu sudah suatu insentif yang luar biasa, jauh lebih besar dari insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah...”</p> <p>Tidak hanya buruh yang seharusnya menuntut kepada pemerintah, pengusaha juga seharusnya menuntut, oke saya akan naikkan itu tapi tolong ini kurangi...Mestinya pengusaha melakukan suatu tawaran kepada pemerintah bahwa mereka akan menaikkan UMR ini dengan kompensasi pemerintah ini menurunkan biaya ini ini ini...”</p> <p>“... Pengusaha dan pemerintah misalkan harus kita blow up besar-besaran pengusaha yang mengatakan misalkan saya mau bayar buruh lebih tinggi asalkan biaya-biaya tinggi pemerintah diturunkan...” Tidak hanya buruh yang seharusnya menuntut kepada pemerintah, pengusaha juga seharusnya menuntut, oke saya akan naikkan itu tapi tolong ini kurangi...Mestinya pengusaha melakukan suatu tawaran kepada pemerintah bahwa mereka akan menaikkan UMR ini dengan kompensasi pemerintah ini menurunkan biaya ini ini ini...”</p> <p>“... Pengusaha dan pemerintah misalkan harus kita blow up besar-besaran pengusaha yang mengatakan misalkan saya mau bayar buruh lebih tinggi asalkan biaya-biaya tinggi pemerintah diturunkan...”</p>	
Penalaran (Semantik)	“...Karena itu akan mempengaruhi bagaimana gizi mereka, makanya jangan heran kalau buruh diberi	Kondisi yang disampaikan secara logis ini menunjukkan bahwa SS sangat peduli dengan

	<p>kesempatan bicara mereka juga akan sulit menyampaikan pemikirannya karena sebenarnya sudah sangat sulit dalam kehidupan, mereka intelektualitasnya sudah sangat rendah...”</p> <p>Jadi selalu media itu agak bias terhadap khalayaknya. Nah, khalayak media yang paling banyak memang kalangan menengah atas, kan. Pembaca koran itu adalah mereka-mereka yang kalangan menengah atas, buruh itu kan sedikit yang membaca koran. Kalaupun membaca, mereka satu koran bisa untuk 5 atau 10 orang di kantor, mungkin, artinya agak ada bias terhadap kelas menengah.</p>	<p>kehidupan buruh sehingga fakta-fakta terkait buruh dijelaskan dengan transparan dan terbuka, Ini untuk mempengaruhi pendengar supaya memberi perhatian juga pada masalah buruh ini.</p>
Keyword (Stilistik)	Media massa, buruh, tidak proporsional	
Pemilihan kata (Stilistik)	<p>Media massa: koran, radio, televisi</p> <p>Kekerasan: anarkhisme, konflik, merusak.</p>	<p>Penggunaan kata yang berbeda ini menunjukkan adanya perbedaan tujuan pembicaraan. Kata “media massa” dipakai untuk menunjuk pada semua jenis media massa yaitu koran, televisi, radio, internet, majalah, dsb yang memberitakan secara negatif tentang buruh, jadi tidak ada perkecualian.</p> <p>Sementara penggunaan kata “koran” , “televisi” atau “radio” menunjuk secara spesifik pada satu jenis media, dengan diikuti bagaimana media itu menampilkan sisi negatif buruh. Kalau koran dalam bentuk foto, hasil interview dengan pengusaha atau pemerintah. Kalau televisi menampilkan gambar bergerak, interview dengan pengusaha atau pemerintah, kalau radio dari suara pendengar khususnya pengusaha yang menyudutkan buruh, atau dari pemberitaan reporter/tim redaksi yang menyudutkan buruh.</p>
Ekspresi (Retoris)	<p>“...Jadi media ini secara tidak sengaja seringkali melakukan <i>pembingkaiian</i> bahwa ...”</p> <p>“...<i>media</i> kita rupanya masih belum</p>	<p>Dalam suara narasumber tergambar ekspresi yang tidak respek terhadap media massa, meskipun narasumber sebenarnya juga para praktisi media. Ini menunjukkan bahwa narasumber bersedia mengkritik dirinya sendiri,</p>

	<p><i>proporsional...Kekerasan-kekerasan</i> merekalah yang banyak mewarnai media ...”</p> <p>“...Misalkan di tengah kelesuan ekonomi, <i>kita, media</i> tidak mengulas sisi ...<i>gambar-gambar media</i> itu penuh dengan suatu <i>hiruk pikuk</i> yang kemudian mengkhawatirkan ...”</p> <p>“...<i>mengapa</i> buruh itu turun ke jalan, <i>mengapa</i> mereka marah ...”</p> <p>“...<i>Tetapi kenapa</i> tidak mencari <i>mengapa</i> mereka bergerak? <i>Apakah</i> akan bergerak kalau tidak ada masalah yang mendasar? ...”</p> <p>“...tetapi <i>mengapa</i> konflik terjadi, <i>mengapa</i> ibu-ibu yang menjadi buruh yang umurnya setengah baya pun sampai mau, rela berdarah-darah...Itu <i>kenapa??</i>”</p> <p>“...menghabiskan waktunya di perusahaan itu <i>16 jam sehari</i>, rata-rata <i>sebagian besar 16 jam</i>, dan mereka <i>berdiri tidak pernah duduk</i> ... lebih banyak bekerja dalam <i>temperatur 40 derajat Celcius, tidak ada AC...</i>”</p> <p>“...<i>bagaimana</i> mereka akan menghidupi keluarganya. Itu akan menjadi <i>lost generation</i>, karena generasi mereka <i>tidak mungkin anaknya akan mendapat sekolah yang baik</i> dengan <i>UMK yang sekian. Tidak mungkin</i> mereka akan memiliki <i>gizi yang baik untuk anak-anaknya</i>, dan itu berarti <i>generasi berikutnya akan merosot secara biologi. ...</i>”</p> <p>“...<i>upah untuk buruh</i> dari perusahaan itu hanya 5%, tetapi untuk <i>birokrat, untuk perijinan</i> dsb itu menghabiskan 35%...<i>Bayangkan</i> perbandingan perusahaan itu...Padahal itu terus terang <i>birokrat</i> yang</p>	<p>untuk mengarahkan media menjadi lebih baik. Narasumber beberapa kali memberi penekanan ketika mengatakan kata “mengapa”, atau “kenapa”. Ini menunjukkan bahwa bagi narasumber fakta-fakta tentang unsur why, mengapa buruh melakukan demo, kenapa mereka secara brutal melakukan kekerasan sangat penting untuk dibahas, daripada hanya sekedar unsur what. Dalam sebuah berita memang harus memenuhi unsur 5W1H, tapi jangan sampai ada di antara unsur tersebut yang kurang terpenuhi, karena nantinya pemberitaan menjadi tidak proporsional.</p> <p>Narasumber memberi penekanan ketika mengatakan data hasil penelitian John Billgreen, terutama data yang berupa angka. Ini menunjukkan bahwa bagi SS data ini penting untuk memberi wawasan baru pada pendengar, tidak menilai masalah dari satu sisi saja, tapi harus objektif. Selain itu, penekanan ketika mengatakan beberapa kata seperti “lost generation” ,“tidak mungkin” menunjukkan SS memiliki kepedulian yang besar terhadap masa depan bangsa.</p> <p>Penekanan pada kalimat “upah untuk buruh 5%, untuk birokrat 35%” dan pada kata “birokrat” menggambarkan dua kondisi yang sangat berbeda jauh antara pemerintah dan buruh. Ini bisa memberi image</p>
--	--	---

	<p>menyebabkan terjadi seperti itu. ....”</p> <p>“...yang harus dipegang adalah <i>ini bukan salah pengusaha</i>, tetapi ada suatu sistem yang buruk...”</p>	<p>negatif tentang pemerintah, karena kelihatannya pemerintah hanya mementingkan keuntungan, dan menjadi penyebab buruknya kondisi buruh.</p> <p>Penekanan pada kata “pengusaha”, dan “sistem” akan memberikan kesan bahwa dalam persoalan buruh ini, kesalahan bukan terjadi pada pengusaha, melainkan pada sistem. Maksud kata sistem disini adalah sistem penggajian, sistem kerja dll, dan ini secara tidak langsung menunjuk pada pemerintah, karena pemerintahlah yang menetapkan tarif UMR dan jam kerja buruh. Ketika dikatakan bahwa ada suatu sistem yang buruk, maka ini menggambarkan narasumber menyalahkan pemerintah karena menetapkan sistem yang tidak baik dan juga tersirat tuntutan pada pemerintah untuk mengkaji ulang semua kebijakannya terkait buruh.</p> <p>Dalam setiap ekspresi yang ditunjukkan, tergambar adanya kritikan, dan tuntutan supaya semua pihak melakukan introspeksi diri, dan menyadari bahwa kalau masing-masing hanya mementingkan dirinya sendiri, maka kondisi buruh dan konflik yang terjadi sekarang tidak akan selesai.</p>
--	--	---

**Lampiran 5 : Tabel analisa program *talkshow* “Bedah Layanan Publik” edisi 21 Maret 2006**

Elemen	Bukti dalam teks	Interpretasi
Topik/Tema (tematik)	<p>Jenis pelayanan:  “...pelayanan utama kita dalam melayani pasien itu ada dua, yaitu yang rawat jalan dan rawat inap, dan kemudian kegiatan-kegiatan penunjang...”</p> <p>Sistem pelayanan:  “...untuk ini ada 5 dasar yang harus diperhatikan untuk bisa memberikan pelayanan yang baik. Satu: kita harus menyiapkan SDMnya terutama, brain ware nya... hard ware nya, jadi perngkat kerasnya termasuk buildingnya... ketiga soft ware nya, jadi prosedur-prosedur pelayanannya harus standardnya yang internasional,... maka info ware nya, networkingnya juga diperlukan. heart ware nya, perangkat hati...”</p> <p>Kendala:  “...Yang kurang menonjol adalah perawat, jadi anda bayangkan, satu orang perawat terutama kalau malam hari...1 perawat itu bisa mengawasi 30 orang. ...”</p> <p>“...faktor peralatannya, fasilitasnya ini kita pelan-pelan selama 3-4 tahun terakhir ini, sudah makin kita lengkapi tetapi alat-alat medis memang sangat mahal sehingga ini yang harus kita perbaiki. Kemudian tata letaknya, Soetomo itu tata letaknya, situasinya itu semrawut itu...”</p> <p>“...mind set kita, para petugas kesehatan kita yang tadinya merasa dibutuhkan oleh masyarakat, menjadi kita balik kita membutuhkan mereka, sebagai pelayan... hrus persuasif memberikan contoh pada mereka bahwa kalau rumah sakit ini di era sekarang ini ingin dicintai</p>	<p>Suara Surabaya berusaha membantu instansi-instansi publik untuk memperbaiki pelayanannya pada masyarakat, karena dalam program ini masyarakat bisa memberikan masukan, keluhan, dsb sehingga pihak RS dr. Soetomo mengetahui secara langsung suara-suara konsumennya dan akhirnya bisa memperbaiki layanannya.</p> <p>Topik ini diangkat di Radio SS, karena SS memberi perhatian besar pada kepuasan masyarakat atau publik yang menjadi konsumen dari RS dr. Soetomo. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sistem pelayanan seperti apa yang dijalankan, karena hal itu juga berpengaruh langsung pada mereka. Program ini memberi kesempatan pada masyarakat untuk mengkritisi segala sesuatu berkaitan dengan pelayanan RS ini, sehingga dengan demikian masyarakat dapat ikut menilai bagaimana kualitas pelayanan di RS ini.</p> <p>Narasumber yang dihadirkan, harus menjelaskan dengan transparan dan terbuka segala seluk beluk pelayanan di RS, sedangkan pendengar juga diberi kesempatan secara bebas untuk menyampaikan suaranya terkait pelayanan di RS ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Radio SS dikembangkan sikap terbuka, dan dalam suasana keterbukaan itu akan muncul suasana perbedaan pendapat yang bisa membentuk sikap demokratis masyarakat.</p>

	<p>oleh konsumennya, kita harus terbalik mind setnya, kita butuh mereka. ...”</p> <p>“...ada 18 komplain yang masuk sampai dengan hari kemarin, itu sebagian besar, 70 persen lebih adalah masalah komunikasi yang tidak jalan, jadi penjelasan antara petugas dan pasien kurang clear sehingga menimbulkan misinterpretasi...”</p> <p>Mengatasi kendala:  “...kita punya manajemen komplain yang terstruktur tadi, kalau masalahnya masalah etik maka ada komite etik itu, kalau masalah-masalah medis maka ada komite medik. Kalau masalah-masalah yang misalnya kenyamanan dsb, ini ke jajaran direksi tadi, ke bagian penunjang dsb...”</p> <p>“...Jadi kita punya saluran-saluran yang ada.. Kalau yang pelayanan publik secara umum, kita menyediakan telponnya...5501259, 5501239 atau di flexi 70813188, ini yang sifatnya komplain secara umum...”</p> <p>“...program buku saset kecil, jadi perawat dan petugas sudah punya buku saset: salam, senyum, tanya..Ini panduan-panduan yang kita buat...”</p> <p>Rencana ke depan:  “...tentang parkir..kita akan bangun dua buliding, tingkat masing-masing empat lantai ... kita akan membangun sebuah hotel di sebelah timurnya Graha Amerta itu yang untuk menampung keluarganya pasien di Graha Amerta...”</p>	
Skema (skematik)	- Alur dimulai dengan penjelasan tentang jenis-jenis pelayanan yang ada di RS dr. Soetomo:	Alur ini menunjukkan suatu skema yang menyempit, dimana penjelasan dimulai dari hal-hal yang umum

	<p>“...pelayanan utama kita dalam melayani pasien itu ada dua, yaitu yang rawat jalan dan rawat inap, dan kemudian kegiatan-kegiatan penunjang.. rumah sakit terbesar di Indonesia, karena lebih dari 1500 tempat tidur..”</p> <p>- Alur dilanjutkan dengan membahas bagaimana sistem yang digunakan RS ini untuk melayani masyarakat, apa saja kendala yang dihadapi, dan cara mengatasinya</p> <p>“...untuk ini ada 5 dasar yang harus diperhatikan untuk bisa memberikan pelayanan yang baik. Satu: kita harus menyiapkan SDMnya terutama, brain ware nya... hard ware nya, jadi perngkat kerasnya termasuk buildingnya... ketiga soft ware nya, jadi prosedur-prosedur pelayanannya harus standardnya yang internasional,... maka info ware nya, networkingnya juga diperlukan. heart ware nya, perangkat hati...”</p> <p>“...ada 18 komplain yang masuk sampai dengan hari kemarin, itu sebagian besar, 70 persen lebih adalah masalah komunikasi yang tidak jalan, jadi penjelasan antara petugas dan pasien kurang clear sehingga menimbulkan misinterpretasi...”</p> <p>“...kita punya manajemen komplain yang terstruktur tadi, kalau masalahnya masalah etik maka ada komite etik itu, kalau masalah-masalah medis maka ada komite medik. Kalau masalah-masalah yang misalnya kenyamanan dsb, ini ke jajaran direksi tadi, ke bagian penunjang dsb...”</p> <p>- Ada interaksi dengan pendengar, untuk mendengar suara konsumen mengenai pelayanan di RS dr.Soetomo</p>	<p>yaitu jenis pelayanan mengarah ke hal khusus dan spesifik, seperti bagaimana cara atau sistem pelayanan yang dijalankan, serta kendala-kendalanya, Alur ini menunjukkan bahwa radio SS mengarahkan pendengar supaya memperoleh gambaran yang utuh dan sistematis sehingga nantinya dalam sesi interaktif, pendengar bisa mengkritisi atau memberi respon dengan baik.</p> <p>Dalam setiap program <i>talkshow</i> di SS selalu ada inetaksi dengan pendengar,, ini menunjukkan bahwa di radio SS, pendengar bisa menyampaikan pendapatnya secara bebas. Suasana interaktif yang terjadi antara pendengar dan narasumber menunjukkan bahwa di radio Suara Surabaya, semua elemen masyarakat bisa bergabung dan mengambil bagian dalam program ini, karena justru itulah yang hendak dibangun oleh Radio Suara Surabaya, yaitu supaya masyarakat berani mengemukakan pendapatnya, tetapi tentu saja tidak mengarah ke hal yang anarkhis atau merusak, namun mengemukakan pendapat dengan konsekuensi berani menerima pendapat yang berbeda dari orang lain.</p>
--	--	--

	<p>“...ada mafia, mafia yang bisa mempercepat operasi...memang kalau you mau cepet operasi ya harus pilih dokternya...kalo pake dokter spesialis sekarang masuk besok operasi. ...”</p> <p>“...kenapa banyak penunggu pasien yang keleleran di situ, dok? ... tempat parkir... perbagian perbagian, per pintu-pintu itu masuk sakkarepe dewe, ditarik duik dhisik, montor’e ga diatur, terus keliatannya dikuasai preman-preman...”</p> <p>- Alur diakhiri dengan penjelasan tentang apa saja rencana-rencana perbaikan pelayanan yang akan dilakukan RS dr. Soetomo</p> <p>“...tentang parkir..kita akan bangun dua buliding, tingkat masing-masing empat lantai ... kita akan membangun sebuah hotel di sebelah timurnya Graha Amerta itu yang untuk menampung keluarganya pasien di Graha Amerta...”</p> <p>“...kontrak atau perawat magang dengan kontrak 1 tahun..Lalu perawat magang, biasanya kita PJTKI, pengerahan tenaga kesehatan yang keluar negeri, kita latihan di situ, 3 bulan kita latih dsb, sambil juga bekerja disitu lalu kita siapkan untuk mereka keluar negeri misalnya. Ini salah satu upaya mengurangi masalah keperawatan....”</p>	
Latar (Semantik)	<p>Latar belakang atau alasan diangkatnya topik ini adalah:</p> <p>“...kita akan membedah layanan publik di Rumah Sakit dr. Soetomo karena RS dr. Soetomo sebagai rumah sakit rujukan terutama bagi masyarakat Jawa</p>	<p>Latar ini menunjukkan bahwa sebagai instansi publik, RS dr. Soetomo harus bersedia dinilai pelayanannya oleh masyarakat, karena di program “Bedah Layanan Publik” ini, masyarakat punya peran yang besar dalam mengevaluasi dan menilai kualitas pelayanan instansi</p>

	<p>Timur,..”</p> <p>“...sering kita mendapat catatan dalam Program Kelana Kota Suara Surabaya, ada beberapa kali laporan tentang pelayanan di RS dr. Soetomo yang katanya masih kurang maksimal...”</p>	<p>publik termasuk RS dr. Soetomo.</p> <p>Selain itu RS dr. Soetomo adalah rumah sakit rujukan yang dikenal luas, dan mungkin banyak orang mendengar tentang kualitas yang dinilai bagus. Oleh karena itu, masyarakat diberi kesempatan untuk mengetahui secara langsung bagaimana sistem pelayanan yang dijalankan serta menyampaikan saran atau kritik pada pihak RS dr. Soetomo.</p> <p>Masih banyaknya komplain yang diterima SS juga menjadi alasan diangkatnya topik ini. Hal ini menunjukkan bahwa SS peka terhadap kebutuhan pendengarnya, bahwa para pendengarnya masih belum puas dengan layanan RS ini, karena itu secara khusus pihak RS diundang untuk menjelaskan secara langsung kepada publik tentang seluk beluk pelayanan yang mereka jalankan.</p>
<p>Detail (Semantik)</p>	<p>- Profil RS dr.Soetomo:</p> <p>“...pelayanan utama yaitu yang rawat jalan dan rawat inap, dan kemudian kegiatan-kegiatan penunjang rumah sakit terbesar di Indonesia, karena lebih dari 1500 tempat tidur ...Karyawan kita juga cukup banyak, 5 ribu lebih. Kemudian rawat jalan itu terdiri dari kurang lebih 30 bagian ilmunya, kemudian ada kurang lebih 115 poliklinik...2 tahun terakhir ini kita membangun suatu pelayanan yang private, yang untuk VIP, Graha Amerta ...kapasitasnya 200 tempat tidur...”</p> <p>- Konsep manajerial RS dr.Soetomo berkenaan dengan pelayanan:</p> <p>“...untuk ini ada 5 dasar yang harus diperhatikan untuk bisa memberikan pelayanan yang baik. Satu: kita harus menyiapkan SDMnya terutama, brain ware nya... hard ware nya, jadi perangkat kerasnya termasuk</p>	<p>Detail yang menunjukkan kelebihan atau hal-hal yang baik dari RS ini lebih banyak jumlahnya. Sementara detail tentang kekurangan atau kelemahannya tidak terlalu banyak. Jumlahnya cukup jauh berbeda dibandingkan detail positif. Ini mungkin sengaja dilakukan untuk membentuk citra positif tentang RS dr.Soetomo di benak pendengar.</p> <p>Beberapa detail yang positif dipaparkan dengan sangat jelas sesudah ada pendengar yang memberikan komplain, sebenarnya ini selain untuk menanggapi komplain juga berusaha melakukan defense, dengan menunjukkan pada pendengar, bahwa sistem pelayanan mereka sudah bagus dan sistematis. Hal ini dilakukan untuk membentuk citra positif tentang RS ini, menunjukkan bahwa pihak RS sudah paham tentang kebutuhan pasien dan sudah berusaha maksimal dalam meningkatkan pelayanan pada konsumen.</p>

	<p>buildingnya... ketiga soft ware nya, jadi prosedur-prosedur pelayanannya harus standardnya yang internasional,... maka info ware nya, networkingnya juga diperlukan. heart ware nya, perangkat hati...”</p> <p>- Kendala yang dihadapi:</p> <p>“...Yang kurang menonjol adalah perawat, jadi anda bayangkan, satu orang perawat terutama kalau malam hari...1 perawat itu bisa mengawasi 30 orang. ...”</p> <p>“...ada 18 komplain yang masuk sampai dengan hari kemarin, itu sebagian besar, 70 persen lebih adalah masalah komunikasi yang tidak jalan, jadi penjelasan antara petugas dan pasien kurang clear sehingga menimbulkan misinterpretasi...”</p> <p>- “...Jadi kita punya saluran-saluran yang ada.. Kalau yang pelayanan publik secara umum,kita menyediakan telponnya 5501259, 5501239 atau di flexi 70813188, ini yang sifatnya komplain secara umum...”</p> <p>- “...namanya perawat idol, perawat idola, jadi dia dipilih oleh pasien.. mereka para dokter itu, atas sendiri dia selalu meningkatkan kemampuannya, mengikuti seminar-seminar dan updatenya baik di dalam maupun di luar negeri...”</p> <p>- Rencana perbaikan:</p> <p>“...tentang parkir..kita akan bangun dua buliding, tingkat masing-masing empat lantai ... kita akan membangun sebuah hotel di sebelah timurnya Graha Amerta itu yang untuk menampung keluarganya pasien di Graha Amerta...”</p>	<p>Rencana ke depan dari RS ini dijelaskan dengan sangat detail, ini juga menggambarkan usaha membentuk citra positif tentang RS, menunjukkan pada pendengar bahwa pihak RS sangat memperhatikan kepuasan publik.</p> <p>Detail yang dijelaskan ini haruslah sesuai dengan fakta, setiap narasumber harus memegang prinsip transparansi bahwa apa yang dikatakan adalah benar. Ini menunjukkan SS menuntut setiap pernyataan yang disampaikan adalah sesuai dengan fakta, dan tidak terjadi kebohongan publik di dalam programnya.</p>
--	--	--

	<p>“...kontrak atau perawat magang dengan kontrak 1 tahun..Lalu perawat magang, biasanya kita PJTKI, pengerahan tenaga kesehatan yang keluar negeri, kita latihan di situ, 3 bulan kita latih dsb, sambil juga bekerja disitu lalu kita siapkan untuk mereka keluar negeri misalnya. Ini salah satu upaya mengurangi masalah keperawatan....”</p>	
Ilustrasi	<p>“...Yang kurang menonjol adalah perawat, jadi anda bayangkan, satu orang perawat terutama kalau malam hari, ini meningkat sekali, tingkat hunian kita lebih dari 80% sekarang, tempat tidurnya hampir terisi 80% lebih dan 1 perawat itu bisa mengawasi 30 orang. Andaikata dalam waktu yang sama, 10% saja mengeluh dalam waktu yang sama, maka dia yang dicover hanya sepertiga. Berarti komplainnya, tingkat kepuasannya itu hanya 30%, itu pun kalau melayaninya baik...”</p>	<p>Ilustrasi ini menggambarkan sikap terbuka, jujur dan transparansi dari pihak RS untuk mengungkapkan persoalan yang mereka hadapi. Selain itu secara implisit menggambarkan narasumber berusaha menarik simpati pendengar tentang masalah kekurangan jumlah perawat, dan mungkin secara tidak langsung juga minta solusi dari pendengar. Ini menunjukkan bahwa di radio SS tidak tertutup kemungkinan narasumber meminta solusi pada pendengar, berarti disini masyarakat dididik tidak hanya untuk menyampaikan komplain, atau kritikan, namun juga belajar memberi solusi.</p>
Pengandaian	<p>“....Jadi selama menunggu itu ada tretament-treatment yang tadi mustajab itu untuk keluarganya itu tenang. Jadi misalnya begini, tunggu!!, itu lain dengan maaf ya, ini sebentar ya, ditunggu. Itu agak berbeda kata-kata itu...”</p> <p>“...kapan dokter-dokter itu diberangkatkan untuk ngangsu kawruh di tempat lain, untuk menimba ilmu di tempat lain, karena itu juga untuk mengurangi...kami khawatir dokter tidak diberikan rekreasi, ngangsu kawruh di tempat lain, kemudian sentuhan hati dan senyum itu saya khawatir nanti karena stress tidak bisa merawat dengan senyum.”</p> <p>“...Jadi misalnya sudah dijadwal, tiba-tiba ada pasien</p>	<p>Pengandaian-pengandaian ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih banyak hal yang masih harus diperbaiki dalam sistem di RS dr.Soetomo, baik itu terkait konsumen atau karyawan RS sendiri. Pengandaian ini tidak hanya muncul dari masukan pendengar namun dari narasumber sendiri juga menyadari bahwa masih banyak aspek pelayanan yang masih harus diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Ketersediaan narasumber untuk memaparkan hal-hal ini menunjukkan keterbukaan mereka untuk mengungkap pada publik masalah-masalah yang terjadi dan masih dicari jalan keluarnya.</p>

	<p>yang gawat, tiba-tiba ada kecelakaan lalu lintas, dan dokternya sama maka harus mendahulukan yang nyawa tadi, ia harus lari ke IRD itu...”</p> <p>“...Jadi bisalah itu selain informasi tulisannya agak besar, itu juga ada 1 orang atau beberapa orang yang bisa memandu ...seperti pramugari kalau kita naik pesawat, sudah ada yang memandu. Pertama kali sudah pasti senyum, kemudian menyapa, ditanyakan mau kemana, nah ini dijuruskan langsung jadi mereka ngga bingung. ...”</p> <p>“...kontrak atau perawat magang dengan kontrak 1 tahun..Lalu perawat magang, biasanya kita PJTKI, pengerahan tenaga kesehatan yang keluar negeri, kita latihan di situ, 3 bulan kita latih dsb, sambil juga bekerja disitu lalu kita siapkan untuk mereka keluar negeri misalnya. Ini salah satu upaya mengurangi masalah keperawatan....”</p>	
Penalaran	<p>“...jadi anda bayangkan, satu orang perawat terutama kalau malam hari...1 perawat itu bisa mengawasi 30 orang... terjadi exhausted, kecapekan perawat itu sehingga kadang-kadang emosional itu menjadi sangat rentan..”</p>	<p>Pernyataan ini menunjukkan suatu keterbukaan dari pihak RS terhadap publik, bahwa ada persoalan tentang jumlah perawat yang kurang dan berakibat pada pelayanan mereka pada publik. Pihak RS secara implisiti berusaha meraih simpati pendengar, sementara melalui program ini radio SS menjadi jembatan antara pihak RS dan publik untuk saling memahami dan mengerti masalah masing-masing.</p>
Keyword	Pelayanan, rumah sakit, pasien.	
Pemilihan Kata	--	--
Ekspresi	<p>“...sehingga pemerintah provinsi bukan main subsidiya untuk rumah sakit Soetomo. Alhamdulillah, pak gubernur kita, pak Sekda kita dan DPRD nya sangat mengerti itu sehingga tidak sebanding antara pendapatan rumah sakit itu dengan yang dikeluarkan,</p>	<p>Narasumber menunjukkan nada suara yang menunjukkan pujian atau ucapan terima kasih yang mendalam pada pemprov yang mensubsidi RS ini, bisa jadi secara implisit narasumber ingin membentuk image yang baik tentang pemprov pada pendengar, karena</p>

	<p>namun goal yang beliau-beliau harapkan adalah berikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat...”</p> <p>“...Saya punya pengalaman yang agak buruk ya di dr. Soetomo... saya menangkap seperti itu, itu realita memang di lapangan seperti itu, ternyata memang ada permainan seperti itu...”</p> <p>“...Terus ini, kenapa banyak penunggu pasien yang keleleran di situ, dok? Ya itu apa nanti ndak kena undang-undang pelayanan publik ya, di situ keleleran, ada yang tidur, ada yang pacaran juga... tempat parkir, perbagian perbagian, per pintu-pintu itu masuk sakkarepe dewe, ditarik duik dhisik, montor’e ga diatur, terus keliatannya dikuasai preman-preman...”</p>	<p>sikap masyarakat kita terhadap pemerintah pada umumnya tidak begitu baik, sehingga narasumber berusaha memperbaiki penilaian masyarakat itu.</p> <p>Ekspresi menyalahkan yang muncul dari pendengar, menunjukkan ketidakpercayaannya pada sistem pelayanan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh narasumber. Bagi pendengar ini konsep pelayanan yang dimiliki terdengar sangat bagus dan sistematis, namun pada kenyataannya tidaklah seperti itu sehingga muncul ekspresi tidak respek dan sangsi terhadap penjelasan narasumber.</p> <p>Sementara dari pendengar yang lain, muncul ekspresi yang mengkritik, ini menunjukkan tuntutan dari pendengar untuk memperhatikan masalah pengaturan penunggu pasien dan tempat parkir yang dinilai masih semrawut. Ekspresi mengkritik ini muncul karena pendengar ini berpikir bahwa mungkin bagi pihak RS, masalah tersebut tidak dianggap terlalu penting, namun bagi pendengar ini hal tersebut cukup mengganggu.</p>
--	--	---

Lampiran 6 : Tabel analisa program *talkshow* “Wawasan” edisi 15 Maret 2006

Elemen	Bukti	Interpretasi
Topik (Tematik)	<p>“...Orang Bojonegoro, saya belum tahu apakah mereka gembira ria karena di lokasinya akan dilakukan eksplorasi minyak dengan investasi cukup besar, 1,7 triliun kalau saya tidak salah...1,7 triliun kaki kubik, itu jumlah cadangan minyak di Bojonegoro yang akan dieksploitasi dan ternyata eksploratornya adalah Exxon yang dalam posisi, perannya di dalam pengelolaan ini dia menjadi leader... Kemudian Jawa Timur juga akan bikin jalan tol, Surabaya Bojonegoro karena nanti disana akan dibutuhkan tenaga-tenaga profesional, macem-macem begitu, sehingga dibutuhkan jalur yang lancar dari Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur langsung ke Bojonegoro. Semua menyambut gembira...”</p> <p>Pendapat pro dan kontra pendengar tentang Blok Cepu yang dikelola Exxon:</p> <p>“...sudah mulai digadaikan sedikit demi sedikit, inget itu kasus Freeport, inget itu kasus.... Ya kayak Aceh itu, habis total disedot oleh mereka, apa yang kita dapatkan kan...”</p> <p>“... Memang pada satu sisi kita prihatin, tentang keberadaan aset negara ini jatuh kepada asing. Harusnya eksplorasi dari migas ini, harusnya bisa kita lakukan sendiri. Tapi pada sisi-sisi tertentu, saya ada baca di beberapa media memang, ada faktor-faktor kesulitan yang menjadi handycap kita. Khususnya untuk menjadi operator itu, salah satunya justru juga karena faktor pendanaan terus karena faktor tenaga</p>	<p>Permasalahan Blok Cepu ini merupakan masalah nasional yang menyangkut daerah Jawa Timur, karena eksplorasi minyak akan dilakukan di Bojonegoro. Ini menunjukkan bahwa SS peduli dengan dengan persoalan bangsa, dan terutama memberi perhatian pada persoalan yang terjadi di Jawa Timur, karena ini sesuai dengan misi SS yaitu menjadi sentra informasi Jawa Timur.</p> <p>Program ini juga memberi ruang bagi pendengar menyampaikan komentar baik pro maupun kontra, ini menunjukkan SS sebagai radio yang terbuka terhadap perbedaan pendapat dan mendorong pendengar untuk memberikan berbagai macam informasi yang dapat memberi wacana baru pada pendengar yang lain.</p> <p>SS mengangkat topik ini, karena sangat peduli pada kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur, dimana masalah Blok Cepu ini akan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dimana eksplorasi minyak tersebut akan dilakukan.</p>

	<p>ahli...”</p> <p>“...Ini memang pilihan yang berat bagi pemerintahan SBY, jadi antara profesionalisme dan nasionalisme. Tapi sekarang kita tidak akan membahas apa kelebihan dan kekurangan Pertamina, maupun Exxon, yang penting kita sekarang, masyarakat Indonesia utamanya tentu akan segera menikmati daripada hasil eksploitasi tersebut, jadi bagi kelompok masyarakat...”</p>	
Skema (Skematik)	<p>- Alur dimulai dengan pemaparan dari penyiar tentang reaksi pro dan kontra beberapa pihak terhadap keputusan tentang pengelolaan Blok Cepu oleh Exxon:</p> <p>“...beberapa kawan mengkritisi, 55% itu belum nanti kita harus membiayai proyek-proyek ini, itu kita yang membiayai, uang uangnya kita, jadi sebenarnya kalo mau jujur tambah berat, tapi bupati Bojonegoro senang sekali.. pemerintah sangat menyambut gembira dan sudah banyak langkah-langkah persiapan yang dilakukan...”</p> <p>- Alur berlanjut dengan munculnya berbagai pro dan kontra dari pendengar tentang masalah ini:</p> <p>“...Lha iya, jangan lupa walaupun anak negeri tapi koordinator komandannya kan tetep mereka. Dan biaya tinggi yang diasuransikan kawan-kawan kita itu kan jadi beban pemerintah, apa yang terjadi kalau semua biaya-biaya dipotong oleh bagian kita. Jadi biaya semua yang timbul, biaya yang tinggi-tinggi itu akan dipotongkan oleh pemerintah kita gitu...”</p> <p>“...Tapi sekarang kita tidak akan membahas apa kelebihan dan kekurangan Pertamina, maupun Exxon,</p>	<p>Skema alur ini menunjukkan SS dalam program “Wawasan” memang lebih banyak memberi kesempatan pada pendengar untuk berpendapat. Jam program ini lebih banyak didominasi dengan menerima telepon dari pendengar dan mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dengan panjang lebar. Dengan munculnya berbagai pro dan kontra, juga akan terjadi pertukaran informasi di antara pendengar, yang dapat menambah wawasan dan memberi sudut pandang baru bagi pendengar terutama dalam melihat masalah Blok Cepu ini.</p> <p>Selain itu, hal ini juga menunjukkan Radio Suara Surabaya menyediakan ruang atau forum bagi publik untuk saling menyampaikan pendapatnya, dan ini menunjukkan usaha SS untuk menciptakan suasana demokratis di masyarakat. Beberapa pendengar secara tegas juga memberi masukan pada pemerintah untuk belajar dari kekuatan negara lain sehingga bangsa ini jadi lebih baik, ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat yang besar terhadap masalah ini, dan merupakan gambaran suasana keterbukaan, dimana masyarakat bisa mengkritik atau memberi saran, dan pemerintah juga bersedia untuk dikritik.</p> <p>Narasumber yang dihubungi terkait masalah ini, adalah pihak yang secara jelas menentang Exxon mengelola</p>

	<p>yang penting kita sekarang, masyarakat Indonesia utamanya tentu akan segera menikmati daripada hasil eksploitasi...”</p> <p>“...Betul, terus yang perlu saya kritisi bangsa dan negara kita ini, kita harus otokritik terhadap diri sendiri juga ya...Tapi kita tidak mau transfer teknologi, kita tidak mau belajar kesana, nah pada akhirnya nasib kita ini sampai kapanpun begini terus, mas. Ini yang harusnya mulai kita pikirkan, kita tuh ngga pa-pa serahkan mungkin untuk beberapa tahun pertama, tapi tolong transfer teknologi itu juga kita lakukan ya. Agar nantinya kita tuh benar-bener jadi pinter...jadi supaya nanti kita bisa mengelola itu sendiri. Apapun, bukan hanya Exxon saja, bukan hanya blok Cepu saja, tapi yang laen-laen juga begitu...”</p> <p>- Setelah pro dan kontra dari pendengar, ada narasumber yang dihubungi (Marwan Batubara):</p> <p>“...Karena dengan mereka masuk, keuntungan yang harusnya 100% bisa untuk negara dan untuk rakyat Indonesia yang banyak yang miskin, ini jadi berkurang. Ada perhitungan sampai 51 triliun, itu bisa berapa orang miskin yang tertolong, berapa juta...”</p> <p>- Perbincangan ditutup tanpa kesimpulan dari penyiar, tidak disampaikan mana yang benar/salah, semuanya kembali ke pendengar.</p> <p>“...Tapi ya itu tadi, banyak lebih kurangnya dan kita sudah mendengar semua catatannya dan seperti biasa saya tidak simpulkan mana yang terbaik...”</p>	<p>Blok Cepu, dan juga kontra terhadap pemerintah. Pemilihan narasumber yang kontra ini secara implisit menunjukkan sikap SS yang juga berada di pihak yang menentang pengelolaan Exxon terhadap Blok Cepu dan juga menentang pemerintah.</p> <p>Sedangkan akhir program yang tanpa kesimpulan menunjukkan bahwa SS mendorong pendengar untuk bersikap kritis, bisa menganalisa masalah setelah dipaparkan berbagai fakta, dan kemudian memutuskan sikapnya, apakah akan pro atau kontra terhadap masalah ini.</p>
Latar (Semantik)	Latar diangkatnya topik ini adalah karena adanya	Latar ini menunjukkan sikap SS yang selalu kritis

	<p>keputusan pemerintah bahwa eksplorasi minyak di Blok Cepu akan dilakukan Exxon Mobile milik Amerika, sementara Pertamina yang justru perusahaan bangsa sendiri tidak diberi kesempatan mengelola:</p> <p>“...Bojonegoro lagi rame ya hari-hari ini, dan ramanya Bojonegoro sampai ke Jawa Tengah dan sampai ke Jakarta. Orang Bojonegoro, saya belum tahu apakah mereka gembira ria karena di lokasinya akan dilakukan eksplorasi minyak dengan investasi cukup besar, 1,7 triliun...itu jumlah cadangan minyak di Bojonegoro yang akan dieksploitasi dan ternyata eksploratornya adalah Exxon...”</p>	<p>terhadap kebijakan pemerintah, SS sebagai sebuah media massa melaksanakan fungsi kontrol, yang harus menjadi pengawas kinerja dan kebijakan pemerintah. Dengan membahas topik ini, SS juga mengarahkan pendengar untuk selalu kritis, serta ikut mengevaluasi dan menilai kebijakan pemerintah.</p>
Detail (Semantik)	<p>- Detail yang pro:</p> <p>YB: Posisi pengelolaannya kan ngga 100% ya, masih boleh melibatkan anak negeri kan, Pertamina..</p> <p>B: Lha iya, jangan lupa walaupun anak negeri tapi koordinator komandannya kan tetep mereka. Dan biaya tinggi yang diasuransikan kawan-kawan kita itu kan jadi beban pemerintah, apa yang terjadi kalau semua biaya-biaya dipotong oleh bagian kita. Jadi biaya semua yang timbul, biaya yang tinggi-tinggi itu akan dipotongkan oleh pemerintah kita gitu...</p> <p>YB: Jadi kita katanya 55% itu masih harus dengan nambahi biaya macam-macam?</p> <p>B: Iya, dipotong, itu harus ditanggung oleh pemerintah kita..</p> <p>YB: Besar tho itu pak?</p> <p>B: Yo, besar sekali.</p> <p>YB: Besar sekali ya..Duh..</p> <p>B: Besar sekali, dan itu yang harus ditanggung oleh RI.</p> <p>YB: Kalau kita kelola sendiri, itu biayanya juga besar sekali begitu??</p> <p>B: Tidak juga. Kita sudah keluarkan estimasi, jauh di bawah mereka.</p> <p>YB: Berapa persen?</p>	<p>Detail yang dipaparkan ini semakin menunjukkan adanya keberagaman pendapat dalam program ini. Pendengar diberi kesempatan untuk bersikap pro atau kontra mengenai kasus ini dan menjelaskan fakta-fakta untuk memperkuat pendapatnya.</p> <p>Detail fakta yang disampaikan ini menunjukkan pendengar mampu bersikap kritis terhadap kasus ini. Fakta yang dipaparkan bisa memberi wacana baru pada pendengar yang lain, baik itu fakta yang mendukung atau menentang Exxon, sehingga pendengar bisa menerima banyak informasi dari dua sisi yang berbeda dan pada akhirnya akan memiliki sikap objektif dalam memandang kasus ini.</p> <p>Detail yang dipaparkan ini juga banyak memberi masukan pada pemerintah, supaya bercermin atau belajar pada kekuatan negara lain. Ini merupakan bentuk kepedulian yang besar dari masyarakat, dimana mereka mengharapkan negara ini mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.</p>

	<p>B: Ada sampai 30% lebih di bawah mereka..  YB: Oh ya??  B: Ada malah yang separo, malahan..  YB: Separo?? Untuk pengelolaannya ya?  B: Ya..  YB: Wah, luar biasa...</p> <p>“...Jadi, sebagaimana yang sudah dijelaskan pemerintah berkali-kali itu. Jadi misalnya kalau dari 100 barel yang dieksploitasi itu, itu yang diambil Exxon kan hanya 6,75 itu. Selebihnya itu milik Indonesia, disitu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tentu bersama masyarakat...”</p> <p>“...Sekarang kan ada dua keuntungan, yang pertama dari participating interest itu, yang 10% akhirnya dibagi 6,7% untuk pemerintah daerah Jawa Timur. 6,7 itu dibagi untuk 2,2% untuk Pemprov Jatim, 4,5 untuk Pemkab Bojonegoro. Nah itu nanti akan dikembalikan berupa pelayanan umum kepada masyarakat, bisa berupa perbaikan jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dsb...”</p> <p>“...ini bedanya antara perusahaan minyak internasional dengan Pertamina... Tahun 2002, tahun 2003 itu sebenarnya riset-riset tentang community development itu dilakukan terus oleh temen-temen dari Exxon, ini berarti apa? Bahwa mereka sudah jauh-jauh hari, 5 tahun sebelum kasus ini muncul, mereka sudah menyiapkan infrastruktur sosial dan komunikasi... mereka betul-betul mencoba merangkul banyak aspek, banyak kelompok sosial masyarakat di Bojonegoro dan sekitarnya. Sehingga yang namanya mahasiswa, aktivis, LSM itu biasa, dikumpulkan, ditraining, diajak pergi kemana, sehingga memang banyak kalangan kelompok-kelompok masyarakat disana yang merasa sudah</p>	
--	---	--

	<p>dirangkul oleh Exxon Mobile...”</p> <p>“...Jadi saya hanya ingin mengatakan, sebenarnya BUMN seperti Pertamina perlu juga membuat semacam langkah-langkah seperti mereka. Bahwa kalau mereka ingin mendapat dukungan dari masyarakat sekitar, itu tidak hanya sekedar mengeksplorasi tapi juga mempersiapkan infrastruktur sosial, kemudian juga mempersiapkan dengan cara mencari dukungan terhadap masyarakat di sekitarnya...”</p> <p>- Detail yang kontra:</p> <p>“...Karena dengan mereka masuk, keuntungan yang harusnya 100% bisa untuk negara dan untuk rakyat Indonesia yang banyak yang miskin, ini jadi berkurang. Ada perhitungan sampai 51 triliun, itu bisa berapa orang miskin yang tertolong, berapa juta...”</p> <p>“...biaya untuk gaji orang Amerika itu kan bisa tiga empat kali lipat dibanding kita. Biaya ngebornya aja, Pertamina itu ngaku cukup dengan 3 juta dollar per sumur, kalau Exxon Mobile itu sampai 6 juta dollar...”</p> <p>“...Iya, kemudian juga untuk biaya modal, namanya capital expenditure dan OPEX, operational expenditure, ini kalau ditotal yang diajukan Exxon itu sekitar 2,55 milyar dollar, kalau Pertamina itu sekitar 1,4 milyar dollar, jadi 2,5 dibanding 1,4. Jadi Pertamina itu cukup dengan 60% dari biaya Exxon Mobile., itu bisa dieksplorasi...”</p> <p>“...Jangan lupa pembagian 85 15 %, 85% untuk pemerintah, 15% untuk Exxon Mobile, Pertamina, dan Pemda, itu sudah dipotong dulu dengan biaya cost recovery. Biaya cost recovery ini, kalau asing lebih mahal dibanding Pertamina...”</p>	
--	--	--

<p>Ilustrasi (Semantik)</p>	<p>“...Inget itu kasus Freeport, inget itu kasus.... Ya kayak Aceh itu, habis total disedot oleh mereka, apa yang kita dapatkan kan..”</p> <p>“...kita tinggal melihat nantinya apakah Blok Cepu ini akan mirip seperti Freeport. Masyarakatnya sekitarnya itu justru ikut merasakan kejayaan Freeport atau tidak?..”</p> <p>“...setelah Humpuss, dan Humpuss melepaskan itu pada Pertamina, nah jalan itu hancur, kesejahteraan masyarakat disana tidak didapat. Satu bulan masyarakat di sekitar itu hanya mendapatkan jatah beras cuman 5kg, cuman 5kg !!...”</p> <p>“...Jadi kita kembali ke UUD 1945 pasal 33 itu, kita banyak melihat dari propinsi-propinsi lain kan, seperti Kalimantan Timur, Aceh sendiri dan Papua. Itu semua kan yang diperlihatkan pada rakyat Indonesia, sejauh mana kontribusi hasil bumi kita sendiri itu bisa dimanfaatkan oleh rakyat kita sendiri...”</p> <p>“..Rakyat disana itu tidak bisa menikmati, karena apa? Itu hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok mereka. Suatu contoh, soal pendidikan, bagi orang yang katakanlah di luar orang Pertamina dan Migas, itu sulit untuk masuk di STM Migas. Di sana ada STM Migas, jadi bagi orang yang anak atau keluarga dari Migas atau Pertamina, walaupun danemnya itu tidak memenuhi, saya jamin pasti masuk di Migas...”</p>	<p>Ilustrasi yang dipaparkan ini menggambarkan pendengar yang berani bersuara, bahkan mengkritik kebijakan pemerintah, yang telah menyerahkan hak pengelolaan Blok Cepu pada Exxon. Disini fungsi kontrol media terhadap masyarakat sangat jelas terlihat, dimana media menjembatani pendapat publik yang ingin mengkritisi atau memberi masukan pada pemerintah. Publik punya hak untuk bersuara pada pemerintah, karena keputusan pemerintah itu juga akan berpengaruh besar pada kesejahteraan masyarakat di sekitar Blok Cepu.</p>
<p>Pengandaian (Semantik)</p>	<p>“...kalau nantinya itu dikelola oleh Exxon Mobile, saya mohonlah pendidikan di dua kabupaten tersebut, itu diberikan gratis atau bagaimana. Atau misalnya untuk rakyat yang miskin, itu yang listriknya pelanggannya di bawah 450 watt tolong digratiskan, jangan diberikan</p>	<p>Pernyataan ini menunjukkan Suara Surabaya mendorong pendengar untuk berani mengungkapkan kondisi riil yang ada di masyarakat, yang mungkin perlu diketahui pemerintah. Jadi secara tidak langsung mendorong pendengar untuk berani bersuara dan juga</p>

	biaya beban, karena disitu sudah terindikasi bahwa orang itu tidak mampu...”	menjadikan media massa yaitu Suara Surabaya sendiri berfungsi mengontrol kebijakan pemerintah, dalam hal ini keputusan tentang pengelolaan Blok Cepu.
Penalaran (Semantik)	<p>“...Jadi ada komitmen-komitmen politik yang mungkin tidak hanya masalah Cepu, tapi itu lebih luas, bahwa pemerintah kita, SBY akan mendapatkan dukungan dari pemerintah Amerika, kalau hal-hal seperti ini mendapatkan, atau diberikan kepada Exxon...”</p> <p>“...bagaimanapun juga pemerintah kan perlu membuat suasana atau iklim bisnis itu menjadi kondusif. Mungkin pemerintah dengan adanya keputusan saat ini, ingin agar ada tricker untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, ini dugaan saya. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa dari 1,4 juta barel yang pernah kita capai dulu per tahun, per hari, itu kan kita sekarang kadang-kadang ada di bawah 1 juta. Kita kan sangat merosot ekspor kita, dengan adanya keputusan ini diharapkan memang kita bisa mendongkrak kembali ekspor kita ke pasar internasional...”</p>	Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa mengkritisi masalah ini tidak hanya dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai masyarakat, namun juga berusaha untuk berpikir logis dari sisi pemerintah. Hal inilah yang ingin diarahkan oleh Suara Surabaya pada pendengarnya, bahwa mereka tidak hanya bisa peduli pada dirinya sendiri sebagai masyarakat namun juga peduli pada kondisi bangsanya.
Keyword (Stilistik)	Blok Cepu, Exxon, Pertamina, eksplorasi minyak, pengelolaan	
Pemilihan kata (stilistik)	“...akan dilakukan <b>eksplorasi</b> minyak dengan investasi cukup besar, 1,7 triliun kalau saya tidak salah...1,7 triliun kaki kubik, itu jumlah cadangan minyak di Bojonegoro yang akan <b>dieksploitasi</b> dan ternyata <b>eksplorator</b> nya adalah Exxon yang dalam posisi, perannya di dalam pengelolaan ini dia menjadi leader...”	Penggunaan kata eksplorasi dan eksploitasi menunjukkan maksud yang berbeda. Penggunaan kata eksplorasi lebih bersifat positif karena menggambarkan bahwa Jawa Timur punya cadangan minyak yang bisa memberi keuntungan pada negara kita, namun kata eksploitasi sengaja digunakan untuk memberi image negatif pada Exxon, untuk menggambarkan bahwa Exxon mengambil cadangan minyak itu untuk pemerintah Amerika, sedangkan masyarakat Indonesia tidak akan mendapat keuntungan apa-apa.
Ekspresi (Retoris)	“...Kita, bangsa, anak bangsa, putra bangsa yang terbaik. Kita mampu Mas Yoyong, yakin! Seribu % mampu, yakin saya!...” (dengan nada yakin dan	Beberapa ekspresi ini menggambarkan berbagai pendapat yang berbeda diantara pendengar. Ada yang merasa sangat yakin bahwa negara kita mampu

	<p>percaya diri)</p> <p>“...sudah mulai digadaikan sedikit demi sedikit, inget itu kasus Freeport, inget itu kasus.... Ya kayak Aceh itu, habis total disedot oleh mereka, apa yang kita dapatkan kan... Miskin...terpuruk, ekonomi lemah. Mau dimana bangsa kita kalo gini...” (nada suara meremehkan dan pesimis)</p> <p>YB: Kalau kita kelola sendiri, itu biayanya juga besar sekali begitu??</p> <p>B: Tidak juga. Kita sudah keluarkan estimasi, jauh di bawah mereka.</p> <p>YB: Berapa persen?</p> <p>B: Ada sampai 30% lebih di bawah mereka..</p> <p>YB: Oh ya??</p> <p>B: Ada malah yang separo, malahan..</p> <p>YB: Separo?? (kaget, tercengang, ada penekanan). Untuk pengelolaannya ya?</p> <p>B: Ya..</p> <p>YB: Wah, luar biasa...(kaget)</p> <p>R: kita tinggal melihat nantinya apakah Blok Cepu ini akan mirip seperti Freeport. Masyarakatnya sekitarnya itu justru ikut merasakan kejayaan Freeport atau tidak? (nada bicara terdengar meremehkan, pesimis)</p> <p>YB: Iya...(ada nada persetujuan)</p> <p>R: Merasakan kesejahteraan Freeport atau tidak?</p> <p>YB: Katanya itu miliaran, ratusan miliar diberikan ke masyarakat sekitar itu...</p> <p>R: Nah..</p> <p>YB: Tapi tetep saja masyarakatnya kayak gitu... (nada bicara meremehkan)</p> <p>R: Betul..</p> <p>YB: Ngga tau dimana kelirunya.. (meremehkan)</p>	<p>mengelola Blok Cepu, dan seharusnya tidak perlu diberikan ke Exxon. Ekspresi seperti ini menunjukkan bahwa pendengar punya kepedulian yang tinggi dan perasaan bangga terhadap bangsanya.</p> <p>Namun ada pula ungkapan yang menunjukkan kontra terhadap pemerintah, dan mengkritik kebijakan pemerintah dalam hal Blok Cepu ini. Ini menunjukkan pendengar dengan terang-terangan berani menilai tindakan pemerintah, bahkan dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah salah langkah, salah mengambil keputusan. Hal ini menggambarkan masyarakat yang demokratis, berani bicara untuk masyarakat dan juga untuk pemerintahnya.</p> <p>Sementara itu ada pula celetukan-celetukan dari penyiar yang secara implisit menunjukkan sikap SS yang tidak setuju dengan pengelolaan Exxon terhadap Blok Cepu. Ini terdengar jika penyiar berbicara/ menerima telpon dari pendengar yang kontra, maka ada celetukan yang menggambarkan persetujuan dengan pendapat mereka. Namun ketika bicara dengan pendengar yang pro Exxon, penyiar lebih sering memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berusaha menjatuhkan argumen pendengar. Hal seperti ini seharusnya tidak boleh dilakukan, karena itu menunjukkan sikap penyiar yang tidak netral, karena memasukkan opini pribadinya dalam program siaran SS. Sebagai sebuah media, SS dituntut netral, meskipun tidak bisa dipungkiri pasti ada keberpihakan, namun jangan sampai keberpihakan itu dengan sengaja dipaparkan untuk mempengaruhi pendengar.</p>
--	---	--

**Lampiran 7 : Transkrip wawancara dengan Soetojo Soekomihardjo, President Director Suara Surabaya Media (Selasa,9 Mei 2006 pk.15.15 WIB di Kantor Sekretariat PRSSNI, Jln. Teuku Umar no.14 Surabaya)**

Question (Q) : Bagaimana konsep visi SS?

Answer (A) : Sebenarnya berangkat itu kagak muluk-muluk, orang semua itu kan cari hidup, sebenarnya kan begitu. Lalu yang terkenal itu cari kerjaan, untuk berpenghasilan dan sebagainya. SS juga begitu, tapi aku berpendapat selama itu di bidang-bidang halal, dalam arti bukan terlarang, maka niscaya di dalamnya itu sudah terkandung visi misi buat masyarakat. Pasti menimbulkan kegunaan, daya guna buat masyarakat. Taruh kata, orang berangkat di pikirannya cari duit buat cari makan, tapi itu halal kan. Mungkin dia tidak muluk-muluk, saya akan berbakti untuk bangsa dan negara, untuk memberikan kontribusi kelancaran lalu lintas. Ngga, ngga ada. Tapi yang dikerjakan itu pada dasarnya memberikan kontribusi ngga? Ya, sekecil apapun. Cuma masalahnya orang berpikir besar atau berpikir kecil...Bung Karno sering mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Itu sebenarnya kan dalam rumusan berpikirlah besar, kamu akan menjadi besar. Cuma dalam porsi itu, tapi sebenarnya visi dan misinya terkandung di dalamnya, bisa sadar bisa tidak. Cuma akhirnya secara ilmiah, itu dikonsepsikan dan ditulis, SS di awalnya tidak menulis itu. Itu baru ditulis mas Errol di dekade 90-an, setelah apa yang dilakukan dengan sebenarnya diletakkan dari awal, tapi tidak terumus, tapi ternyata memberikan kegunaan buat masyarakat. Dan itu dinyatakan oleh beberapa pihak, besar lho manfaatnya, keberadaan SS dan sebagainya. Hanya meletakkan dengan visi yang benar, cuma tidak terumus. Setelah sadar di akhir-akhir ini begini, lho, mas Errol menemukan, tulis saja kalau begitu. Sebab filosofi yang diletakkan dari awal memang begitu, jadi berangkat dari awal, SS nya ngga ada itu, tapi ini di pikiran untuk menjalankan ini memang demokratisasi. Beberapa rekan, tahun 66, gerakan reformasi tahun 98, oh demokrasi. Orang berbincang di situ, yang dirubah oleh SS dengan bantuan dari perkembangan teknologi, ternyata orang bisa berdialog di situ satu sama lain. SS jadinya ajang untuk berdialog satu sama lain di masyarakat itu. Kalau radio sebelumnya adalah punya pemerintah, searah ke rakyat tanpa menampung apapun, ternyata radio itu bisa dijadikan forum dua arah sebenarnya, itu sebagai forum, ruangan, tempat orang berdialog dua arah. Nah itu diciptakan dengan era teknologi sekarang, menjadi interaktif. Menjadi berubah, satu arah menjadi dua arah. Dalam mengadakan begitu, saling menghormati pendapat dan itu salah satu prinsip demokratisasi. Tentu banyak kesalahan yang dilakukan SS sendiri, karena belum berpengalaman, pengalaman sambil berjalan, sambil ada kritik, ada guru-guru yang mengingatkan, bahwa kalau anda mbangun demokrasi ya harus kayak gini, jangan kayak gitu. Oya, SS sendiri belajar tentang demokrasi, jadilah itu secara tidak sadar, tidak dirumuskan dari awal, berangkat dari prinsip ya saya akan pergunakan seperti ini, ternyata harus dirumuskan jadinya. Oo, ternyata ini alat demokratisasi. Itu perjalanannya, harus diakui tidak dari awal tertulis ini ini, sebab dalam perjalanannya ternyata perkembangan masyarakat ini sendiri, ada gerakan, ada reformasi dsb, itu menempatkan SS dalam posisinya yang kayak begitu sebagai tempat dimana ajang itu, dialog demokrasi itu berjalan, dalam proses itu pematangannya sampai pematangan ke dalam maupun ke luar. Keyakinan yang lain adalah ternyata perjalanannya sama-sama. Masyarakatnya mengarah kesana, SS nya nyiapkan diri, ternyata benar konsepnya, menempatkan diri sebagai alat yang bisa dipergunakan untuk perkembangan masyarakat itu sendiri. Itu nyangkut apa? Masyarakat itu berubah dari awal itu dengan gerakannya dsb, SS juga harus berubah, untuk kesiapan sebagai alat yang siap terus dipakai oleh masyarakat. Perkembangannya adalah perkembangan budaya, perkembangan sosial, politik, itu harus diikuti di SS nya sendiri, itu implementasinya harus kayak begitu. Mau tidak mau harus ikuti itu, diisi siarannya, teknologinya, SS juga harus ikuti. Tau SS di awal ngga punya telepon? Tapi upaya itu tetep diselenggarakan, reporter lari-lari, pulang, masuk siaran, secepat mungkin karena dia harus lebih cepat dari media apapun. Ato pinjam telepon di toko atau tempat lain, langsung laporan. Kemudian dengan HT, beli 10 atau 12, bikin pemancar, di situ masuk di studio, dikirim, jadi ngga usah pulang. Setahun dua tahun ada handphone masuk, ini ngga kepake. Jadi awalnya ngga punya telepon, karena telpon untuk daerah darmo, untuk SS, itu ngga kuat beli, kalau padanan sekarang 200jutaan, kalo dulu 8 juta. Sulit dapatkan, itu kalau orang jual tidak dipake baru bisa dibeli, tapi kemudian Telkom menawarkan mau berapa, 100 nomer saya kasih. Terakhir, perkembangan teknologi ini harus diikuti, makanya di visinya dimasukin. Jadi SS itu orangnya boleh mati boleh ganti, tapi SSnya harus berjalan sesuai dengan

**Lampiran 7 : Transkrip wawancara dengan Soetojo Soekomihardjo,  
President Director Suara Surabaya Media (sambungan)**

perkembangan masyarakatnya. Pelaksananya boleh ganti, tapi visi harus tetap begitu agar bisa pas, klop dengan kepentingan masyarakat dan teknologinya.

Q: Implementasinya secara konkret dalam radio SSnya sendiri, produknya harus mengacu pada visi misi. Menurut Bapak, di radio SS produknya harus seperti apa supaya mengacu pada visi misi itu?

A: Bentuknya adalah tempat dialog, ajang dialog masyarakat. Bentuknya bisa macem-macem. Jadi kedudukan yang ditempati adalah, saya ini perantara, ini hanya ajang, penyiar dan sebagainya, kita memberikan forumnya tapi yang berdialog adalah masyarakat sendiri.

Q: Lalu kemudian *content*nya, isu harus disaring, isu yang seperti apa yang bisa muncul di siaran SS?

A: Isu itu apa, ada sesuatu info atau berita itu adalah tugasnya untuk beritahukan agar masyarakat supaya tahu, menyangkut kepentingan sosial juga. Jadi suatu info, berita itu kenyataan, fakta tapi sejauh itu fakta itu adalah salah satu syarat saja. Tapi apakah setiap fakta harus diudarkan, harus diberitahukan ke masyarakat? Belum tentu. Yang penting mengukur seberapa hasil dari pelemparan, efeknya, impactnya di masyarakat. Kalau di masyarakat, menjadi, membuahkan kejelekan, ya jangan. Jadi itu mencerdaskan, menjadi tahu, menjadi selamat. Misalnya lagi ada huru hara, jangan lewat situ. Jadi yang diukur adalah impactnya di masyarakat, bahwa mengukur itu keliru, ya segera tarik, segera stop. Bisa diperhitungkan ini baik untuk diketahui tapi ternyata sadar bahwa itu keliru, segera hapus, jangan dilanjutkan. Banyak media menyangka hal yang tidak pantas diudarkan, tetep disampaikan ke masyarakat, biasanya dasar mereka ini fakta, dan rakyat punya hak untuk tahu. Hak untuk tahu itu, ada batasannya, kalau pada akhirnya itu buahnya bagus. Kalau buahnya kacau, merugikan ya jangan.

Q: Kalau dari SDM nya sendiri itu dituntut seperti apa, supaya pendemokratisasian itu berjalan?

A: Idealnya adalah setara dengan pendengarnya tapi hal itu kan tidak mungkin. Jadi paling tidak kedudukannya adalah dia cakap untuk melayani, pendidikannya cukup, intelegensianya cukup untuk mempertimbangkan hal-hal yang bisa dilakukan atau tidak. Tapi bagaimanapun kami adalah pelayan, jadi filosofinya adalah sebenarnya produk itu apa sih? Produk itu adalah layanan, begitupun jasa, jadi dilihat kebutuhan, *goal* nya apa sih. Kalau *goal* nya ngga kepikir, ngga tercapai dan berikutnya bisa kacau. Kami hanya berusaha, SDM yang memproduksi itu harus bisa menghasilkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan itu tidak ada sekolahnya jadi harus berlatih, in house training lah. Sambil jalan sambil belajar.

Q: Kalau tadi dibidang SS itu tempat dialog, berarti kan memberi ruang, forum publik..

A: Demokratisasinya sendiri terjadi di situ. Demokratisasi itu salah satunya mendidik masyarakat untuk menerima pendapat orang lain, menghormati pendapat orang lain meskipun kita tidak setuju itu.

Q: Sampai sejauh mana orang bisa bebas berbicara di SS?

A: Kalau saya bilang Tuhan itu Allah, dan anda bilang Tuhan itu Yesus, ya ngga pa-pa kan berpendapat seperti itu. Biarkan saja, tapi meskipun saya ngga setuju dengan anda, ya stop, jangan dikorek-korek lagi. Wong itu keyakinan. Atau bisa saja saling melengkapi. Kalau semua pendapat itu dihormati, itu bisa saling melengkapi. Pendapat orang berbeda, namun kalau mendengar oh ternyata ada pendapat yang seperti ini dan itu, berarti bisa saling melengkapi. Ada unsur-unsur yang bisa saling melengkapi. Belum tentu pendapat orang yang kita ngga setuju itu betul, cuma kita ngga melihat itu, tapi ternyata itu salah satu unsur dari ini. Pendapat saya juga, saya yakin betul yang saya lihat kayak begitu kok, tapi yang dilihat orang itu, kita tidak melihat itu. Sebenarnya jadi betul.

Q: Jadi sebenarnya, program SS itu tidak akan menyimpulkan apa-apa ya pak..

**Lampiran 7 : Transkrip wawancara dengan Soetojo Soekomihardjo,  
President Director Suara Surabaya Media (sambungan)**

A: Cuma alat, kita tidak akan jadi hakim. Yang bener itu kayak gini, ngga, kita ngga akan bilang seperti itu. Info itu ini lho, sumbernya ini, itu harus ada. Saya sendiri SS berpendapat seperti ini, namun bukan berarti pendapat itu bener. Saya bisa bilang itu gini lho, itu kalau saya tidak salah saya bisa salah. Masyarakat akan terbangun di situ, dia mengambil kesimpulan yang kayak apa.

Q: Pendengar yang call ini ke studio kan kebanyakan adalah orang-orang yang sama. Bagaimana membangun demokratisasi masyarakat secara keseluruhan, kalau toh orang-orang yang berpendapat adalah orang-orang itu saja?

A: Kalau itu biarkan saja. Yang berniat untuk memberi kontribusi silahkan saja, tapi kalau dia sudah menutup kesempatan buat yang lain, itu harus dijaga. Karena itu di SS mengutamakan caller yang baru untuk on air. Ada batasannya, tidak seenaknya memakai jam, hak dia jangan ditutup tetapi kalau ada caller baru pasti didahulukan. SS sudah ada dua gelombang, daftar caller yang black list, karena merasa saya berjasa pada SS jadi saya harus diutamakan. Mereka biasanya merasa sakit hati, karena SS lebih mengutamakan caller baru, sehingga pindah on air ke radio lain. Radio lain merasa, wah acara saya laku, padahal itu cuma untuk melawan SS. Biarkan saja, itu bagian dari demokratisasi juga.

Q: SS mengapa mengambil pasarnya adalah Surabaya dan Jawa Timur, apakah hanya karena alasan kedekatan (proximity) atau karena ingin memberdayakan masyarakat Surabaya terlebih dulu, sebelum mendemokratisasi masyarakat lain di luar Surabaya?

A: Kalau konsep lokal itu, mau tidak mau ya karena peraturannya diharuskan seperti itu, ya daerah itu yang harus digarap. Diharapkan SS itu memang mewakili Surabaya dan Jawa Timur, itu harus direbut. Salah satu alasan kenapa dulu namanya Suara Surabaya, yang pertama adalah klaim, agar dirasa oleh orang Surabaya, iki radiomu lho..Yang kedua, itu ke dalam, itu memacu, kamu mewakili Surabaya lho, jangan macem-macem, jangan seenaknya. Kamu itu pakai nama Suara Surabaya, kalau tidak mewakili anda diumpat orang, supaya yang kedalam juga berhati-hati. Ini memacu ke dalam, tanggung jawab memikul nama itu. Namun sekaligus itu juga kedudukan, kalau dibilang positioning, diambilnya di situ, saya mengambil posisi di situ.

Q: Jadi sebenarnya masih ada keinginan untuk menjangkau yang lain ya?

A: Sebenarnya ya, karena itu upayanya pake internet. Ngga salah kalau di situ, tidak dilarang peraturan kalau menjangkau lewat internet. Salah satu yang diletakkan mas Errol, yang namanya lokal itu, untuk lokal atau dari lokal. Kalau pengen rawon, ya dari sini, tapi karena ini produk lokal. Lokal itu ada pengertian untuk lokal dan dari lokal. Yang SS ambil dari lokalnya ini, dunia boleh dijangkau dengan alat apapun, termasuk internet, tetapi yang akan disajikan ini unggulannya adalah lokal itu, terutama kalau ada hal-hal tentang lokal, sedapat mungkin dunia itu tahunya dari SS dulu. Bahan-bahan berita tentang Jawa Timur itu menjadi olahan kita. Kalau untuk Surabaya dan Jawa Timur, itu memang harus karena peraturan frekuensinya. Tapi sebenarnya yang perlu dijangkau, lewat internet juga bisa kemana-mana tapi sedapat mungkin dunia itu tahu tentang Surabaya dari SS.

Q: Jadi tetep prioritas utamanya adalah Surabaya dan Jawa Timur, berarti isu-isu yang berkaitan dengan lokal itu pasti akan digarap lebih dulu dari isu yang lain, misalnya isu nasional?

A: Iya, betul..Meskipun tidak mengelak kalau ada untuk lokalnya itu nilainya tinggi, mungkin bahan dari luar juga bisa. Jadi untuk lokal, untuk pendengar yang disini, tentang hal-hal yang nilainya sangat berkepentingan, meskipun terjadi di luar, atau dimanapun, tetep, pendengar akan suka itu. Atau di dunia ini di manapun, sedapat mungkin tentang lokal, Surabaya akan suka itu. Itu pengertian lokal, dan dari lokal itu sendiri merupakan kekuatan untuk melawan yang global maupun nasional. Contoh, radionya RCTI, SCFM, dia dari Jakarta, berita yang dilempar kebanyakan tentang nasional, nilai kelokalannya lemah. Nah, anda boleh kuat disitu, saya akan buat di sini. Di sini juga letak kekuatan lokal itu.

**Lampiran 8 : Transkrip wawancara dengan Errol Jonathans, *Operational Director* Suara Surabaya Media (Kamis, 11 Mei 2006 pk.12.00 WIB di Radio Suara Surabaya, Jln. Wonokitri Besar no.40c Surabaya)**

Question (Q): Bagaimana konsep visi dan misi SS?

Answer (A): Jadi, prinsip-prinsip di visinya SS sebetulnya ada beberapa poin yang penting. Jadi kalau kita lihat di visinya itu, yang pertama kita melihat bahwa di visi SS itu tidak disebutkan nama radio, yang disebutkan Suara Surabaya perusahaan media massa. Ini memberikan peluang kepada kemungkinan berbagai macam bentuk media massa itu bisa masuk, dan itu memang sudah terbukti ketika terjadi konvergensi antara radio broadcasting dengan internet, maka kemudian ada radio on demand, radio online dan segala macam. Ga ada di visi itu, kata-kata radio. Nah itu menjadi fleksibel, untuk media massa secara umum. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa peran adalah pada pemberdayaan masyarakat untuk demokratisasi. Ini yang kita pengenkan sebenarnya, bagaimana radio itu bukan sekedar lagi menjadi medium komunikasi, tapi dia punya kekuatan untuk melakukan empowering terhadap masyarakat untuk menjadi lebih demokratis. Nah kenapa SS kok memilih visi demokratisasi nya ini, karena buat kita ini menjadi sangat penting, masa depan bagi orang-orang di Indonesia ini adalah bagaimana dia bisa berpikir, berperilaku, dan dia juga mampu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sebagai simbol dari negara atau bangsa yang maju. Nah kemudian pada poin yang terakhir, adalah mengikuti perkembangan teknologi, karena sebetulnya radio itu, yang namanya teknologi untuk radio itu adalah keniscayaan, selalu terjadi secara automatically, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, bahwa yang namanya teknologi telekomunikasi dan komunikasi itu akan selalu berimbas pada radio. Tetapi kenapa SS mencantumkan itu di dalam visinya, kalau itu memang sebuah keniscayaan? Karena kalau kita ngga memasukkan, maka kita pun juga tidak berupaya mengejar itu, karena bisa saja berpikir ya radio konvensional aja, seperti apa adanya. Itu berjalan, tetapi kemudian dalam jangka panjang itu akan tergilas. Itulah sebabnya kemudian dalam strategi perencanaan (business plan) SS, aspek teknologi ini juga dipertimbangkan terus, karena ini akan berimbas pada cost, pada biaya ketika harus melakukan 'renovasi-renovasi' teknologi. Maka itu harus berimplikasi pada perencanaan biayanya, tetapi ini untuk kepentingan publik, karena harus paralel dengan perkembangan masyarakat sendiri yang aware terhadap perkembangan-perkembangan teknologi. Jangan sampai kemudian radio ini selangkahnya lebih ke belakang dibandingkan pendengarnya, karena yang kita kepengenkan harusnya radio ini menjadi trendsetter bagi pendengarnya. Ya itu tiga pokok yang jadi pilar dalam visi ini.

Q: Demokrasi itu dipahami SS seperti apa?

A: Demokrasi adalah keberanian orang untuk berbicara, keberanian orang untuk mendengarkan pendapat yang lain, kemudian kesiapan orang untuk berbeda pendapat. Dan disinilah yang kita inginkan, ruang dan waktu yang ada di SS, dipakai orang untuk sharing, untuk berdebat, untuk discuss, tapi tujuannya jelas yaitu untuk kemajuan. Nah ini yang menjadi penting bagi SS, karena medium radio ini sangat memungkinkan untuk melakukan itu dibandingkan medium yang lain. Katakanlah medium seperti televisi dan koran, televisi memang bisa tapi lebih repot dibandingkan radio. Kemudian konsep programming mereka tidak seperti radio atau SS yang memungkinkan sangat fleksibel untuk terjadi komunikasi interaktif. Itu pemahaman SS tentang demokratisasi.

Q: Kemudian misinya kan ada 4, bisa dijelaskan satu per satu?

A: Jadi intinya begini, dalam pemahaman terhadap misi ini kita harus sadar bahwa SS ini adalah sebuah lembaga business, karena statusnya dia radio swasta. Radio swasta diikat oleh status PT, kalau ngomong PT, itu berarti dia adalah sebuah lembaga usaha, badan usaha. Makanya di misi SS, disebutkan usaha media massa, ya karena dia adalah lembaga bisnis. Tapi pada sisi yang lain, dia punya tanggung jawab dan tuntutan untuk peran-peran sosialnya. Nah seperti ini harus dicombine, tapi yang tetep harus dipahami oleh Suara Surabaya bahwa ini adalah usaha bisnis juga, makanya ini tidak boleh keteteran. Kita bisa saja sukses secara peran sosial, tapi ketika bisnis tidak menguntungkan maka sebetulnya visinya ndak tercapai juga. Nah ini yang menjadi pemahaman dasar, bagaimana materi-materi kita yang sifatnya ideal itu juga mampu sukses secara bisnis, secara ekonomi. Nah itu pemahaman yang paling basic, nah kemudian untuk mencapai ini maka kita perlu punya produk. Produk-produk yang namanya hasil siar, atau aktivitas non siaran

## Lampiran 8 : Transkrip wawancara dengan Errol Jonathans, *Operational Director* Suara Surabaya Media (sambungan)

atau non air. Produk on air dan non air ini yang harus menjadi penyebab datangnya keuntungan bisnis dan image idealnya. Karena itu kemudian kita melihat, apa yang harus kita produk kalau begitu, nah muncullah pendekatan strategi format. Formatnya itu adalah berbasis kepada seluruh aktivitas informasi yang bersumber dari Surabaya dan Jawa Timur. Jawa Timur itu kan terkait coverage area nya SS yang memasuki sebagian

wilayah Jatim. Jadi sumber-sumbernya adalah segala macam info tentang Surabaya dan Jawa Timur, tetapi juga berbagai macam info yang memenuhi kebutuhan segmentasi pendengar SS yang ada di

Surabaya dan Jawa Timur. Nah ini pendekatan secara demografis dan psikografis. Basis kita kemudian ada dimana untuk hal-hal yang menyangkut Surabaya dan Jatim? Yaitu basisnya adalah pada informasi, nah kemudian SS memilih format sebagai radio informasi atau news radio. News dalam pengertian luas, bukan bentuk berita ya, tapi jurnalistik secara umum yang kemudian kita memilih strateginya adalah pada komunikasi yaitu interaksi. Nah karena itu, selain produk-produk jurnalistik yang paket sudah jadi, yang konsepnya one way, tapi kita juga mengembangkan konsep interaksinya. Nah itu untuk produknya. Kemudian pada sisi yang lain, untuk membuat ini selalu efektif dan terasa betul pendengar itu menjadi bagian dari proses kegiatan teknologi yang harus kita pakai. Teknologinya harus dipikirkan dari segi efisiensi dan efektifitas, bagaimana efisien dalam konteks produksi dan cost, tetapi efektif dalam konteks komunikasi dan penyebarannya kepada publik. Nah ini otomatis kalau sudah sampai pada tiga hal ini, berarti kita sudah yakin bisnis ini akan berjalan dengan baik. Lalu peran ideal kita juga akan dirasakan oleh masyarakat, fungsi media ini dalam konteks peran sosialnya. Cuman kemudian kita berpikir, model yang kayak SS ini, pencapaian visi dan misi SS ini ngga akan pernah berhasil kalau kualitas dan kualifikasi SDM kita ngga bagus. Kalau gitu, SS berpikir yang harus ada di SS adalah orang-orang yang mengabdikan hidupnya kepada profesi ini dan harus merasa yakin bahwa mereka mampu hidup dari profesi ini. Maka kemudian pada misi yang terakhir itu, saya ngomong kesejahteraan atau tempat dimana orang-orang disini akan merasa dia akan hidup dari kegiatan ini. Kalau dia ngga yakin dengan itu, saya ngga akan mampu menghasilkan orang-orang yang qualified. Kalau orang-orangnya udah ngga qualified, produksi macam apa yang kita harapkan, dan visi itu jadi jauh. Karena itu kemudian kita declare disini bahwa yang namanya kesejahteraan itu adalah bagian dari misi kita. Sederhananya dalam aplikasinya diomongin gini, kamu mau naik gaji, ayo kita bikin apa lagi biar incomenya gede dan gaji kita jadi gede juga. Kita ngga bisa ngomong: "Pak Toyo saya mau naik gaji", lalu apa yang kita punya sekarang, bisa ngga bikin kenaikan gaji, dari mana duitnya. Nah itu bagian dari keterlibatan temen-temen, memang Suara Surabaya adalah bagian dari kehidupan mereka dan disinilah mereka merasa hidup atau ada di sini untuk hidup. Nah itu gambaran besarnya...

Q: Berarti kegiatan pemberdayaan dan demokratisasi sebagai bagian dari misi SS, itu bukan hanya produk siaran tapi juga produk non siaran?

A: Termasuk itu, makanya kenapa SS bikin seminar, melakukan temu dengan pendengar untuk temu dengan nasrasumber, misalnya mempertemukan pendengar kita dengan polisi dalam sebuah forum, ketemu dengan PLN, dengan Telkom, dengan Pemkot, dengan institusi-institusi layanan publik. Itu kita jadikan, hasil dari siaran itu kita jadikan kegiatan non siaran. Itu kita pertemuan, sehingga dengan begitu proses pemberdayaan itu tidak hanya sekedar di udara, tapi sampai dengan face to face, dalam sebuah forum, jadi SS berfungsi sebagai jembatannya, moderatornya, bahkan secara konkret melakukan aktivitas yang menjadi solusi bagi semua persoalan yang diangkat di siaran. Misalnya bagaimana kita melakukan penghijauan kota, melibatkan pengusaha, Pemkot, segala macam. Kemudian bagaimana SS merintis Surabaya Academy, jadi itu secara konkret visi misi itu diaplikasikan dalam bentuk aktivitas non siaran, karena seringkali siaran saja tidak cukup untuk melakukan itu, harus ada tindakan nyata.

Q: Lalu bagaimana dengan pembekalan sumber dayanya sendiri, apakah termasuk kegiatan pemberdayaan dan demokratisasi?

A: Itu adalah efek, jadi dia tidak termasuk dari misi. Misi ini adalah untuk publik, tapi secara otomatis, kalau itu bisa berjalan, SDM saya sudah berdaya duluan. Kalau dia ngga berdaya, untuk

## Lampiran 8 : Transkrip wawancara dengan Errol Jonathans, *Operational Director* Suara Surabaya Media (sambungan)

melakukan pemberdayaan, maka ini omong kosong. Yang dimaksud SDM ku harus berdaya duluan, itu dalam hal knowledge, skillnya, tetapi selebihnya adalah kemampuan dia dalam konteks jaringan. Jadi misalnya kalau dia mau ngomong sampah, berarti dia harus punya dong referensi sampah. Skill, nah dia mengendalikan siaran macam apa, talk show kah, kelana kota, atau apa, news, berarti dia harus trampil untuk membuat produksinya. Kemudian selebihnya adalah bagaimana dia membuka jaringannya, siapa narasumbernya, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa dia menggali informasi, nah itu kemudian yang dilakukan adalah in house training, yang dilakukan dalam bentuk pelatihan skill, kemudian diskusi untuk memperluas wawasan, tetapi juga kegiatan lain, kunjungan on the spot, untuk memahami berbagai hal secara riil. Jadi kita melakukan kunjungan ke Telkom, ini terkait banyaknya komplain tentang Telkom, tapi kita juga harus liat bagaimana sih produk Telkom ini sebenarnya. Nah temen-temen datang berkunjung, dan disana dapat pengetahuan baru, ooh kalau perbaikan jaringan itu tidak harus datang ke rumah konsumen, kadang-kadang ada penelepon yang bilang: "Telkom bilang mau diperbaiki, tapi tak tunggu kok ngga dateng-dateng", nah Telkom nya bilang: "lho ngga perlu dateng, yang rusak itu bukan jaringan yang disana, tapi jaringan yang disini". Jadi yang diperbaiki mungkin di jalan, bukan di rumah. Nah bagaimana SS bisa paham itu juga, kalau ngga pernah liat. Atau kita pernah ke jalan tol, yang namanya pengawasan, kinerja di jalan tol itu, kayak apa, kita juga harus liat. Atau diskusi mendatangkan narasumber untuk menambah wawasan, kekayaan berpikir temen-temen. Itu otomatis itu adalah bagian konsekuensi dari memberdayakan publik, maka orang-orang saya pun harus berdaya duluan., dalam arti adalah punya kemampuan. Namun ada juga yang penting selain itu adalah pada sistem kita, pada performance appraisal, yang sudah dilakukan Suara Surabaya adalah 360 derajat. Ini sangat penting juga untuk memberdayakan temen-temen di Suara Surabaya. Karena dengan mengukur kinerjanya, maka kita juga tahu kekuatan dan kelemahannya, sehingga treatmentnya pun akan tepat, sehingga juga akan bisa diterapkan reward dan punishmentnya sekaligus. Kalau dia prestasinya bagus, maka rewardnya automatically akan dia dapat, tapi kalau ngga, ya punishmentnya harus diberlakukan. Kalau tidak menggunakan cara-cara pandang seperti ini, saya khawatir proses percepatan kualifikasinya SDMnya ngga jalan. Kalau aplikasi lain yang menurut saya paling sulit adalah visioning, penyamaan visi. Bahkan secara konkret pun, kamu paham ngga visinya SS? Buat saya, dia boleh ngga hapal itu kalimat, tapi dia nangkap ngga rohnyanya itu dimana, karena terbukti kadang-kadang dites secara mendadak itu ngga ngerti. Ketika meeting, saya tanya tolong sebutkan tiga pilar visi SS, ketika tolah-toleh, saya bilang, bagaimana saya bisa percaya, mengandalkan anda untuk aktif disini, ketika anda sama sekali ngga ngerti saya berada di tempat apa ini, yang tujuannya mau kemana. Ini berarti saya tidak bisa mengandalkan orang-orang macam begini, sebab kalau saya kerja di Suara Surabaya, saya ngga tau Suara Surabaya itu mau apa, mau kemana, berarti aku kan cuma menghabiskan umur di sini, atau hanya sekedar jadi orang gajian. Saya mengatakan, saya tidak butuh pekerja, tidak butuh tukang disini, saya butuh kreator, butuh komunikator, saya butuh broadcaster, tapi bukan tukang siaran. Kalau cuma tukang siaran, ya ngga cocok di SS, bukan di SS tempatnya karena personil-personil SS itu kualifikasinya sudah lebih dari sekedar itu.

Q: Kemudian implementasi secara konkret dalam program itu, mungkin bisa dijelaskan program macam apa sih yang bisa mendemokratiskan dan content nya?

A: Dalam keyakinan saya, yang harusnya masuk ke wilayah itu adalah program-program jurnalistik. Kenapa begitu, dan bukan program hiburan misalnya? Sebab persepsi orang tentang hiburan itu selalu bukan hal-hal yang sifatnya faktual, aktual, dan hiburan itu dianggap lebih tidak serius dibandingkan dengan jurnalistik. Nah kita memilih jurnalistik, karena dalam jurnalistik itu ada proses-proses untuk menggali kebenaran-kebenaran, untuk menyajikan kebenaran-kebenaran. Fakta yang harus kita angkat, kemudian aktualita terhadap sebuah isu, sebuah peristiwa, sebuah keadaan yang harus kita angkat. Kemudian kita juga harus memikirkan crosscheck, cek and ricek terhadap kebenaran-kebenaran itu, termasuk juga aktivitas yang melibatkan berbagai pihak sebagai narasumber. Nah ini yang saya lihat dengan konsep jurnalistik itu, maka proses demokratisasi itu jadi lebih mudah. Jadi saya ngga mungkin bisa membuat orang bisa berbeda pendapat, kalau ok kita ngomong imajiner, buat apa? Tapi kalau kita ngomong riil, ini ada Perda penanganan sampah,

## Lampiran 8 : Transkrip wawancara dengan Errol Jonathans, *Operational Director Suara Surabaya Media* (sambungan)

misalnya, ini perda nya gini, anda setuju atau ndak? Kalau anda setuju kenapa, kalau ngga kenapa. Kemudian kita libatkan yang mbuat perda itu, kita libatkan eksekutif yang akan melaksanakan perda itu, misalnya begitu. Kita libatkan LSM yang berkepentingan dengan sampah atau publik. Ini kemudian menjadi semacam aktivitas yang memudahkan atau mempercepat proses demokratisasi dalam konteks SS tadi ya, berani berbeda pendapat, berani mengemukakan pendapat, berani mendengarkan pendapat yang tidak sama, terbiasa juga menerima perbedaan. Itu intinya kenapa lalu kita milih jurnalistik, kalau kita masuk program hiburan, maka yang ada adalah request, game, kuis, sandiwara radio. Kita ngga yakin bahwa ini semua akan mempercepat itu.

Q: Demokrasi itu bisa terjadi, kalau SS sendiri bisa menyampaikan fakta-fakta, maksudnya tidak dikekang untuk menyampaikan fakta. Tapi sejauh mana sih kebebasan itu, apakah boleh sebebaskan fakta apapun boleh keluar, atau ada kontrolnya?

A: Yang menjadi kontrol bagi semua pertama kali, adalah bukan peraturan perundang-undangan, tapi yang pertama kali menjadi alat kontrol adalah kemampuan kita untuk memperhitungkan dampaknya, dampak siaran. Karena itu bagi SS, fakta bukan segala-galanya, karena kalau hanya sekedar atas nama fakta, namun kemudian implikasinya menjadi buruk di masyarakat, impactnya buruk, maka itu kesia- siaan juga buat SS. Karena itu yang pertama kali ada dalam regulasinya Suara Surabaya, setiap orang yang memproduksi materi untuk disiarkan, harus tahu dampak yang akan terjadi, harus mampu berpikir lebih jauh. Dan itu bukan cuma siaran, tapi juga termasuk iklan segala macam, artinya apa yang bunyi di SS, apa yang keluar di Suara Surabaya, itu harus diperhitungkan dampaknya. Bagaimana kita untuk bisa melatih dampak itu? Kita menggunakan acuan-acuan juga, acuan-acuannya adalah regulasi, baik regulasi yang langsung terkait dengan dunia siaran ini, atau juga regulasi yang tidak terkait langsung tapi akan mempengaruhi, karena itu yang namanya undang-undang, peraturan, termasuk juga memahami tentang kode etik siaran kita. Selain dari itu juga, sekali lagi kita mengukur lewat performance appraisal, tentang apa yang harusnya kita lakukan, secara individu anda harus berperan apa dalam jabatan anda, dalam fungsi-fungsi anda, karena itu jangan sampai melanggar ini itu. Dengan ini semua, diharapkan produk yang keluar dari Suara Surabaya akan memberi kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.

Q: Itu batasan dari medianya, kemudian kalau SS memberi forum, memberi ruang bagi masyarakat untuk bicara, apakah mereka juga dibatasi oleh SS? Bebas sampai sejauh mana mereka boleh ngomong?

A: Ada, bahwa yang dia omongkan itu berdampak apa kira-kira, kemudian katakanlah ruang dan waktu di SS akan dipakai oleh pendengarnya, maka dia juga harus mengedukasi pendengar kita. Substansinya itu ada dimana sebenarnya, apakah dia hanya sekedar pengen marah-marah, maki-maki orang, atau yang lebih substansial dari itu adalah perbaikan keadaan. Atau ketika dia komplain tentang pelayanan publik, intinya terjadi perbaikan terhadap pelayanan publik. Itu SS juga punya standard, karena itu tidak semua orang yang nelpon di SS, automatically itu berhak mengudara, makanya ada mekanisme gate keeper, itu mekanisme yang pertama, kemudian mekanisme yang kedua adalah penyiarnya sendiri, untuk melakukan controlling. Sehingga dengan begitu, pendengar pada tahap-tahap awal itu mengalami proses edukasi, bahwa dia sedang berbicara di sebuah media massa, dia bukan lagi berbicara secara orang per orang, tapi sudah berbicara secara publik, karena itu kemudian cara dia berbicara menjadi penting, dan kemampuan untuk menyampaikan pemikirannya, itu juga menjadi penting. Termasuk orang tidak bebas untuk berbicara di SS itu, masalah waktu, dia akan dibatasi, karena itu orang harus berlatih berbicara ringkas, padat, lugas, tetapi efektif. Itu proses awalnya ngga mudah, karena itu juga butuh keberanian dari si penyiarnya untuk kontrol, ngecutnya, bagaimana ngecut dengan etis, ngecut dengan substansinya sudah tercapai. Atau kemampuan penyiar itu untuk mengarahkan dia pada koridornya, bukan mengarahkan pendapatnya, tetapi mengarahkan pada, kalau kita ngomong isu A, ketika dia mulai A,B,C, maka harus dibalikin ke A lagi. Itu bagian dari bagaimana publik tidak serta merta juga dia bebas ngomong apa saja, karena teman-teman di gate keeper berhak mepending info yang diberikan oleh pendengar, manakala gate keeper merasa ini perlu cek dan ricek dulu, atau terkesan sepihak, karena itu perlu balance, perlu konfirmasi. Nah pendengar ini kan tidak mampu melakukan konfirmasi, media inilah yang bertugas melakukan konfirmasi.

## Lampiran 8 : Transkrip wawancara dengan Errol Jonathans, *Operational Director* Suara Surabaya Media (sambungan)

Q: Suara-suara yang muncul di SS mungkin kebanyakan adalah dari kalangan menengah ke atas, karena itu segemnnya SS. Lalu bagaimana SS bisa mewakili suara-suara yang lain, karena demokrasi itu juga harus beragam?

A: Yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah segmentasi, karena itu SS tidak mungkin melayani seluruh segmen, karena SS sudah menempatkan kualifikasi segmennya yaitu kalangan menengah ke atas, dewasa, berpendidikan tinggi, punya kepedulian sosial. Kemudian tidak salah kalau orang mengatakan, ya tapi SS kan tidak melayani semua pendengar, bagaimana dengan grassroot yang suka dangdut? Itu bukan urusan SS, karena dalam penyelenggaraan radio ini, efektifitas bisa dicapai kalau kita fokus pada target konsumen tertentu. Sebab sangat sulit melayani seluruhnya, yang sangat heterogen, sangat-sangat susah. Tetapi meskipun katakanlah bahwa yang dilayani SS ini adalah kalangan yang terbatas, bukan berarti kita tidak bisa bicara persoalan-persoalan kelompok yang lain. Karena itu kemudian di dalam konteks angle, dan kemudian cara pandang kelompok segmentasi ini, kita juga berbicara masalah kelompok lain. Misalnya katakanlah pendengarku mayoritas bukan PKL, tapi ketika kita membicarakan tentang PKL, itu dalam frame, paradigma dan kemampuan pendengarku untuk mencari solusi segala macam, maka itu memberikan manfaat pada PKLnya sendiri. Dalam hal ini sering, unsur PKLnya pun harus diajak bicara, tetapi dari pendekatan dan angle, cara pandang Suara Surabaya, berdasarkan format dan segmennya. Kemudian kelompok pendengar saya inilah yang kemudian saya ajak untuk mampu berempati, untuk mampu berpikir seolah-olah mereka juga menjadi bagian dari kehidupan mereka, karena katakanlah masalah traffic, jalanan macet gara-gara PKL, ini menyangkut persoalan saya sebagai segmentasinya SS juga. Saya ngga bisa cuma sekedar bla bla bla, gimana pemkot ini, tapi kalau kita ngga paham, maka dengan begitu kepedulian-kepedulian ini perlu juga ditampilkan. Karena itu kemudian kalau SS disuruh melayani semua segmentasi itu impossible, tidak mungkin, karena secara prinsip, konsep, itu hasilnya sangat tidak efektif. Nah dalam hal ini sebenarnya SS sudah melakukan untuk segmentasinya, nah sebenarnya secara pribadi saya berharap, mbok radio lain melakukan hal yang sama juga lah, untuk segmentasinya. Itu yang sebenarnya aku pengen, karena dengan demikian, maka masyarakat secara keseluruhan akhirnya bisa terwakili. Tetapi kalau toh SS ternyata tidak bisa secara maksimal mewakili seluruh kalangan tadi, ya memang karena itu konsekuensi dari pemilihan segmentasi itu tapi kita selalu berusaha mengkaitkan persoalan-persoalan di luar segmentasi, karena itu adalah mata rantai yang ngga bisa dipisah-pisahkan begitu. Contohnya waktu pendengar SS complain tentang anak jalanan, yang minta-minta duit segala macam. Kita kemudian ngomong, kenapa ada anak-anak di jalan? Ok, anda kepengen terbebas dari anak-anak jalanan, yang kemungkinan nodong, njambret dsb, ayo berpikir secara lebih jauh lagi, kenapa terjadi seperti ini? Lalu muncullah wacana perlu ngga ya kasih seratus perak? Wah itu rame, riuh rendah perdebatannya, ada yang setuju, ada yang ngga. Nah itulah proses demokratisasi buat saya. Tetapi kita pun care terhadap kehidupan kota ini dan masyarakatnya secara lebih utuh.

Q: Jadi kalau bisa disimpulkan, prinsip-prinsip demokrasi seperti apa yang berusaha diterapkan di program siarannya Radio Suara Surabaya?

A: Ya, prinsip-prinsip demokrasi itu adalah kita mampu untuk hidup secara harmonis di tengah-tengah keberagaman. Lalu kita mampu untuk sepakat di dalam ketidaksepakatan, atau kita juga harus mampu untuk berdampingan dengan segala macam perbedaan. Dengan begitu, yang kita kepengenkan di SS itu, bahwa orang mampu menerima bahwa heterogeneity ini adalah sebuah realita dan bahwa kehidupan kota Surabaya dengan gretaer area nya dan lebih jauh lagi kehidupan manusia-manusianya itu merupakan keberagaman yang menjadi sebuah realita di masyarakat, dan itu harus mampu kita hadapi dan kita atasi, dengan tidak lagi mempersoalkan kenapa kok ada perbedaan, kenapa ada ketidak sepakatan? Ini wacana seperti ini yang saya pikir radio harus mampu untuk menghadirkan realita itu...

Q: Menjadi ruang itu, memberikan forum itu ya...

A: Ya, dan ini istilahku, menjadi semacam alun-alun, kayak alun-alun sebuah kota dimana berbagai macam orang datang, berbagai macam kepentingan, orang dengan latar belakang yang beda-beda...

## Lampiran 8 : Transkrip wawancara dengan Errol Jonathans, *Operational Director Suara Surabaya Media* (sambungan)

Q: Dan SS sendiri hanya sebagai menyediakan tempatnya saja, jadi kayak ajang saja..

A: SS hanya ajang, SS akan memoderatori, akan memfasilitasi untuk itu, dan SS yang mungkin akan memberikan inspirasi untuk itu.

Q: Kalau sampai misalnya jadi alun-alun, terus kemudian orang-orang itu kles sendiri. Itu SS memosisikan diri seperti apa?

A: Ya, artinya kita berharap bahwa..ini implikasi siaran. Kita ngga kepengen bahwa dampak siaran kita itu menciptakan orang kles, harusnya adalah mengedukasi pendengar itu, jangan sakit ati ya kalau ada yang ngga setuju, atau jangan kemudian marah lho ya, kalau kemudian ada orang membantah, mendebat. Karena ini pernah terjadi dan SS harus belajar dari situ. Cuma masalah sepele, lalu lintas, ada dua orang pendengar yang saling marah. Pendengar yang satu bilang, jalan Jemursari macet, 20 menit kemudian ada pendengar lain bilang, ngga macet kok, dan dia ngomong, pendengar yang tadi bohong. Pendengar yang dibilang bohong, marah, telpon ke SS :”minta no telponnya saya, tak hadapi sendiri” , ternyata dua-duanya sama bener, tapi ada tenggat waktu 20 menit, dan dalam waktu 20 menit itu terjadi pencairan. Nah di sini SS belajar, ooh kalau gitu faktanya harus diangkat sampai ke waktunya juga. SS belajar bagaimana memperjelas konteks informasinya tadi, sehingga orang jadi paham.

Q: Pendamai juga ya...

A: Ya dibilang pendamai kok juga susah ya hahaha (tertawa). Artinya lebih pada mendudukan persoalan pada proporsi yang ideal, dan itu tugas dari siaran juga, karena itu semua faktanya harus diangkat. Sama juga kayak dulu SS mengangkat isu berdasarkan complain dari pendengar tentang sikap petugas lalu lintas waktu dia ditilang. Ketika kita mendalami, interview dengan polisinya, ketahuanlah pokok masalahnya, bahwa polisi ini sudah berdiri di sana 6 jam. Secara fisiologis, 6 jam berdiri di

panas menghirup gas buang, ininya jadi spaneng, ngga salah kalau dia ngomongnya ngga kayak Public Relation Officer, itu yang oleh konsumen itu sikapnya dianggap tidak melayani. Tapi kemudian ujungnya, pendengar lain mengatakan: “ya kalau begitu kondisinya, yang paling bener ya jangan melanggar lalu lintas, itu aja, supaya kita ngga diomeli polisi”. Ini yang kayak begini buat saya, menempatkan semua pada proporsinya, itu tugas dari SS, karena itu SS tidak boleh hanya menampilkan sepihak. Namun kalau toh sudah dari dua pihak, itu bisa kita follow up, itu lalu dalam siaran kita menganut motto news interaktif solutif, yang menjadi landasan siaran kita. Filosofinya kalau news itu konsep produknya, produk kita jurnalistik. Interaktif adalah pola komunikasinya, jadi kita tidak menggunakan pola komunikasi searah, tapi sudah multi arah. Solusi, siaran-siaran kita itu memberi solusi apa sih, kita bersiaran buat apa. Kalau ada persoalan yang diangkat di SS ngga memberi solusi apa-apa, SS itu keranjang sampah namanya, tempat orang cuman ngomel, kritik, kemudian maki-maki. Istilah kasarnya itu tempat orang buang hajat, tetapi fungsi kita lalu apa, itu solusi menjadi penting. Termasuk kemudian mengedukasi pendengarnya, ngga cukup kalau sekedar ngomel, harus kita tanyai, kalau begitu menurut anda sebaiknya gimana ini? Dia juga harus share, harus kontribusi. Kalau dia mengatakan ini bukan urusannya, ya ini bukan pendengar yang diharapkan SS. Kalau dia mengatakan ini bukan urusannya, lalu faktanya kayak begitu, ya trima aja. Ada baiknya dia memberikan saran, kalau begitu enaknya gimana, nah itu yang akan kita teruskan lagi pada pihak yang dia kritik tadi. Sehingga Suara Surabaya bukan lembaga pengadilan, bukan kita yang menentukan benar dan salah. Kita lebih berharap orang lebih memahami pokok permasalahannya daripada sekedar benar dan salah. Pendengar tidak bisa mengharapkan SS membuat legitimasi, karena kita bukan justice department, kita bukan lembaga untuk melakukan pengadilan.

Q: Berarti empowering nya itu bukan hanya supaya mereka ngomong, tetapi kasih sesuatu untuk masyarakat?

A: Iya, ayo berpikir, ikut sharing, bahwa ini lingkungan hidup kita. Tumbuhkanlah kepedulian, pendapatnya itu sudah merupakan bentuk kepedulian. Ketika bisa memberikan solusi yang dapat memberi inspirasi bagi orang lain, itu sudah sangat berharga. Ngga harus kasih yang material,

kasih saja yang non material, itu sudah sesuatu kok...Karena itu kan saya tertarik dengan  
**Lampiran 8 : Transkrip wawancara dengan Errol Jonathans, *Operational Director* Suara Surabaya Media (sambungan)**

statement seorang sopir taksi yang mengatakan: “ya secara segmen saya bukan pendengar SS, tapi saya senang denger SS karena banyak orang pintar yang ngomong di SS. Saya belajar banyak dari SS, tiap hari saya dengerin SS”. Itu berarti fungsi SS benar, bisa saja orang yang tidak pintar jadi pintar karena SS, yang tadinya ngga ngerti jadi ngerti karena SS. Karena itu SS harus mendrive, kita tidak cukup puas dengan penelepon banyak, kalau cuman seperti itu gampang, tapi so what, apa itu hasil dari Suara Surabaya yang bermanfaat bagi masyarakat. Ngga...

Q: Lalu itu kontrolnya gimana, menilai suatu program sudah mencapai pemberdayaan dan demokratisasi?

A: Ya, itu kita melihat pada berbagai macam pendekatan. Yang paling sederhana adalah dari reaksi publik, karena di SS itu udah sangat terlatih, ketika ada publik yang tidak setuju dengan cara kita, mereka ngomong. Cara handling, cara memoderatori, cara bertanya, itu kalau pendengar ngga setuju itu otomatis akan ngomong, baik secara terbuka atau tertutup. Langsung on air, atau telpon saya, telpon manajernya, atau kirim email. Ya itu proses untuk kontrol. Kemudian, yang lain yang lebih sistematis adalah melalui survey pendengar tentang SS, itu bisa lebih diukur sistematisnya. Survey dari SS sendiri atau dari pihak luar. Itu adalah upaya kontrol terhadap produk kita sendiri, terhadap kesetiaan kita pada tujuan kita sendiri. Dan sampai hari ini saya masih sangat terbuka menerima kritik dari pendengar. Ada contoh, sms pendengar ke saya: “sampai kini masih sering terjadi feed back saat interaktif, pemecahan mendasar adalah di tiap gagang telpon, diberi segitiga kecil dari fiber glass bening, bertuliskan: ‘mohon kecilkan/matikan volume radio ini’”. Kayak begini ini menunjukkan bahwa mereka tahu di SS itu tidak bisa hanya complain, tapi juga harus kasih solusi. Aku juga ngomong di dalam, kita harus terbuka dikritik, termasuk kritik terbuka di udara. Ngga boleh gate keeper menghalangi-halangi orang yang mau kritik SS, berarti bagaimana kita mau mendemokratisasikan orang, kalau kita sendiri ngga demokratis.

Q: SS ini jadi tempat dimana orang atau masyarakat menyampaikan complain. Masyarakat males untuk telpon ke instansi ini itu, telponnya ke SS aja. Nah sebenarnya posisinya SS ini seperti apa pada pemerintah?

A: Ini sebenarnya impact yang tidak pernah kita bayangkan. Dari awalnya aku ngga pernah nyangka, kita ini diistilahkan oleh mereka, LSM, kita ternyata DPRD tandingan, dan anehnya kok nyaris terlegitimasi, dan itu merupakan kesalahan lembaga layanan publik. Anehnya kok kalau orang complain di SS, itu kok segera diperbaiki, dan lebih bagus pelayanannya ketimbang si pendengar ini complain ke lembaga itu, ke customer servicenya. Kalau aku dateng kesana, ngga jelas kapan, begitu aku on air di SS, kok langsung ditanggapi, langsung ada tindakan konkret. Aku berpikir, di satu sisi saya bersyukur ternyata SS fungsional, memberikan solusi, bahwa itu musibah bagi lembaga itu, ya silahkan perbaiki kinerja anda sendiri, bukan urusanku. Bahwa kalau lewat customer relation officer mereka atau tempat untuk complain mereka, ternyata jadi lebih lamban penanganannya, daripada kalau mereka lapor ke SS. Berarti aku melihat dalam hal ini kepercayaan dua belah pihak itu ternyata tinggi, konsumen sama institusi yang dicomplain tadi. Ternyata kok dengerin dan nanggapi dan kemudian bikin solusi konkret. That is, aku pikir secara fungsi, visi misi dengan filosofi siaranku, itu sudah jalan. Institusi itu memperbaiki kinerja internal, harusnya sama bagusnya antara yang complain di SS dengan yang complain di front desk mereka. Ketika SS menjadi seperti itu, sampai ada orang telpon kucingnya ilang, anaknya jadi ngga mau makan karena anjingnya ilang. Ada pendengar marah, karena ada orang lapor ke SS karena sepatunya ilang di masjid, tapi kan kita mengatakan, dia harus balik kantor tanpa sepatu, bukan persoalan sepatu ilang atau kucing ilang, ini ada sesuatu. Jadi akhirnya orang mengatakan lapor ke SS lebih cepat nanganinya, tapi kita juga mengedukasi masyarakat, kita selalu bilang, sudah lapor kesana belum? Lapor dulu lah, kalau pelayanan disana ngga bagus, on air’o, karena SS tidak menggantikan pemkot, DPRD, dinas-dinas. Kita bukan itu pekerjaan kita, karena buat saya yang paling penting itu anda complain tentang telponmu mati, itu kan solusinya telponmu segera nyala. Lha siapa yang bisa bikin itu bisa segera nyala? Ya kantor telkom, bukan kita. Tapi kita bolehlah memoderatori, memediasi.

## **Lampiran 8 : Transkrip wawancara dengan Errol Jonathans, *Operational Director* Suara Surabaya Media (sambungan)**

Q: Tapi jangan-jangan ketika mereka lapor ke SS, SS juga akan mendemokratiskan instansi publiknya sendiri. Kalau mereka complain ngga ditanggepi, instansinya kan ngga diberdayakan juga?

A: Betul, karena itu kenapa kita tidak menjadi lembaga pengadilan. Kalau saya keras, ooh Pemkot memang brengsek, ketika dia tertutup, ngga ada solusi apa-apa. Itu kemudian yang aku ngga setuju, banyak radio di Jakarta, zaman-zamannya setelah reformasi, mereka pikir mereka akan makin sukses kalau makin kenceng ngritik pemerintah, dan itu bukan hanya kritik tapi nyerang, mendiskreditkan. Kalau makin kenceng, mereka makin bangga. Buat aku keliru, ngga. Kita ini ngga bisa berpihak pada siapapun, belum tentu masyarakatnya bener juga kok..Hari-hari ini banyak masyarakat yang ngga bener kok, ngga disiplin lalu lintasnya, kayak gitu gitu, trus kita mengatakan pemerintah selalu buruk? Ngga, karena itu SS harus di tengah, atau kalau istilahku dalam piramida itu, SS menempati titiknya sendiri, karena itu saya menggunakan konsep segitiga sama sisi, peran radio, peran publik, peran institusi itu sama, karena berada pada segitiga sama sisi. Tugas SS adalah itu, memoderatori, memfasilitasi, termasuk kemudian bagaimana caranya mendemokratiskan institusi itu, ya kita harus kejar mereka untuk berani berbicara, ayo berani menanggapi, tak jamin bahwa ketika anda muncul di SS, itu kredit poin atau hal positif yang akan anda dapatkan, respek masyarakat akan tumbuh. Termasuk juga iklan pariwara, misalnya orang blocking time di sini, iklankan misalnya spring bed. Kita juga mengatakan pada pemasang iklan, anda ndak boleh mengatur saya kalau ada pendengar yang mengkritik ngga boleh on air. Ga iso, itu sudah melanggar visinya SS sendiri, tapi kita yakinkan pada mereka, semua kritik yang masuk sebetulnya menguntungkan anda, karena anda tahu persis, perbaikan yang harus anda lakukan. Nah itu kemudian ngga complain tuh, kalau produk-produknya, udah bayar mahal, ngga selalu dipuji oleh pendengar, tapi kadang-kadang juga dikritik. Itu yang kita harapkan, bahwa rupiah nya menjadi berharga ketika bayar di SS, dia bisa mendapatkan masukan konkret dari konsumennya. Karena temen-temen juga punya usul, menurut anda gimana supaya produknya jadi lebih baik lagi. Nah itu, bukan hanya produk siaran, artinya informasi, jurnalistik, namun juga iklannya juga.

Q: Jadi SS itu ngga boleh berpihak kemana-mana ya?

A: Ngga boleh, bahkan dia tidak boleh berpihak pada dirinya sendiri, belum tentu SS itu bener kok. Karena itu dia harus terbuka untuk dikritik. Makanya, ketika siaran LKM. Suatu saat, LKM itu ngangkat isunya tentang SS, aku dapat telpon dari pendengar yang marah, gimana sih SS ini, itu sudah dapat siaran gratis trus nyerang yang ngasi gratis, ngga bener itu, saya ndak suka. Ya aku cuman berpikir, ini belum demokratis betul, SS juga kan bukan steril. Bahwa dia memberi lahan gratis pada LKM, itu adalah persoalan yang lain, ketika LKM dalam posisinya sebagai media watch juga harus mengkritisi radio, dalam hal ini SS juga. Ya...SS harus belajar.

Q: Ada ngga sih kejadian, penyiar itu berpihak, memang tidak ngomong langsung, tapi dari celetukannya, terasa kalau berpihak?

A: Iya, itu beberapa kali terjadi, dan itu langsung mendapat reaksi dari publik, dari pendengar. Salah satu kasus yang paling merepotkan SS adalah kasusnya Iman dengan suporter. Dia tidak bermaksud begitu, tapi yang tidak bisa dia salahkan adalah publik menginterpretasikan demikian, dan buat aku yang salah tetap komunikator. Masih ada lagi yang lain, ketika misalnya Yoyong mewawancarai Pak Pengki, itu terlihat kalau subjektif, aku mendapat banyak telpon pagi itu. Tapi yang kemudian aku seneng adalah siapapun boleh kontrol, dan saya lebih bahagia, kalau yang kontrol langsung publik bukan saya. Kalau aku lebih administratif, perusahaan ini, tapi kalau publik, menurut aku harus lebih diperhitungkan, karena menyangkut citra ini.

Wawancara (Jumat, 19 Mei 2006 pk.12.15 WIB di Gedung C Universitas Kristen Petra, Jl. Siwalankerto no.121-131 Surabaya)

Q: Dalam misinya SS menyatakan diri sebagai sentra informasi Surabaya dan Jawa Timur. Apakah ini berarti SS lebih memprioritaskan isu lokal, lalu bagaimana dengan isu nasional misalnya? Perbandingannya bagaimana?

## Lampiran 8 : Transkrip wawancara dengan Errol Jonathans, *Operational Director Suara Surabaya Media* (sambungan)

A: Kalau sentra informasi dan Jawa Timur itu adalah pada core productnya. Jadi begini, ada persoalan dengan nama, Suara Surabaya, jadi itu sangat aneh kalau orang bilang Suara Surabaya tapi kok dikit banget ya tentang Surabayanya, maka otomatis sebagai konsekuensinya, maka local news atau local information itu harus menjadi prosentase yang terbesar. Kemudian pengertian kita tentang Surabaya itu automatically termasuk Jawa Timur, karena Surabaya sentra dari propinsi ini. Tetapi bukan berarti tidak ada prosentase untuk news-news yang sifatnya lebih global, regional, nasional, maupun internasional, hanya saja itu nanti pendekatannya adalah pada kepentingan dari segementasi yang mendengarkan siaran itu, tapi harus terasa bahwa Suara Surabaya itu identity nya apa, maka kita memberi identity pada produk, fokus, heavy nya adalah info-info terutama tentang Surabaya dan Jawa Timur. Itu maknanya disana...

Q: Dilihat kepentingan yang bagaimana, terhadap info dari luar Surabaya?

A: Di lihat pada value proximity nya, jadi misalnya apakah orang Surabaya itu peduli sih dengan Merapi, misalnya. Seberapa menariknya Merapi bagi orang-orang Surabaya. Nah memang disini pendekatan ini butuh judgement-judgementnya terus, tapi yang tidak boleh dihindari adalah jangan sampai berita-berita di luar Surabaya dan Jawa Timur itu lebih mendominasi. Aku kan selalu ngelihat statistik dari gate keeper terutama, sangat terasa sekali laporan Yoyong prosentase terbesar, dominan, itu adalah tentang traffic. Tentang public service, public complain itu juga besar, tapi lebih besar traffic, itu aku merasa ok, itu berarti visiku tidak melenceng. Informasi tentang Surabaya dan Jawa Timur memang masih dominan. Nah kemudian pendengar kita yang online, itu kan sebenarnya mereka tidak ada kepentingan, tetapi ketika mereka punya kebutuhan, bukan kepentingan tapi kebutuhan, untuk tahu what hapening di Surabaya, itu mereka sudah punya outlet yang jelas. Keliru besar kalau misalnya SS gagal memberikan citra kepada siapapun bahwa info-info yang ada di SS itu adalah info Surabaya. Kalau dia pengen info Jakarta ya salah dia masuk di SS. Tapi lebih salah lagi SS kalau jadi ngga jelas, kalau SS membuat prosentase semua sama, itu pendengar maupun netter itu bisa confuse ini fokusnya dimana sih, kita mau jadi pujasera atau rumah makan rawon. Tapi selain rawon, ya ada sedikit makanan yang lain tapi itu bukan positioningnya, bukan fokusnya.

Q: Fungsi SS sebagai watchdog itu bagaimana?

A: Ya itu memang terjadi dalam konteks watchdog, karena visinya ya. Visi kita itu kan pemberdayaan masyarakat menuju demokratisasi. Lha pemberdayaan masyarakat berarti merangsang mereka, melatih mereka atau mendorong mereka untuk mampu menjadi masyarakat yang juga kritis. Nah ketika masuk pada wilayah kritis, berpikir kritis, itu berarti kan sudah masuk pada wilayah pengawasan, salah satu ekspresinya kan begitu. Maka dari itu, tidak salah kalau orang mengatakan Suara Surabaya itu semacam watchdog, tetapi yang kita anut valuenya adalah kita bukan oposisi ya, bukan oposan. Watchdog dalam pengertian yang ada di Suara Surabaya adalah terhadap value, terhadap opini, peristiwa. Kita bukan watchdognya pemerintah, tapi watchdognya masyarakat, masyarakat itu di dalamnya ada pemerintahnya juga. Karena itu yang terjadi di SS bukan pengadilan terhadap pemerintah, tapi juga sering mengadili masyarakatnya sendiri. Kalau misalnya pendengar kritik di udara, itu tadi saya lihat mobil no sekian sekian, buang tisu dari jendela, muncul. Kemarin sore aku baru denger, ada pendengar yang complain, itu ada mobil kijang L sekian-sekian, melanggar marka jalan, itu mustinya sebelah kiri untuk belok kiri, dia malah terus. Itu watchdog sebenarnya, karena itu kemudian pemahaman watchdog saya adalah bukan pemahaman yang sempit, bahwa kita kemudian memata-matai, mengontrol pemerintah, tetapi masyarakat secara keseluruhan. Dan itu terjadi, bahkan pendengar mengkritisi, mengkontrol pendengar sendiri. Termasuk juga aparat juga pernah mengkritik masyarakat, bahwa misalnya katakanlah dinas pertamanan yang sekarang ditangani Bu Risma, itu juga pernah complain. Bahwa dia udah tanam susah-susah, dirawat susah-susah, ternyata ada orang maku pohon untuk nempel poster partai, misalnya begitu. Itu kan watchdog juga menurut saya...

Q: Radio online itu juga merupakan bagian dari visi sebagai sebuah perusahaan media massa, tapi apakah adanya radio online itu juga merupakan bentuk mengikuti perkembangan teknologi?

## Lampiran 8 : Transkrip wawancara dengan Errol Jonathans, *Operational Director Suara Surabaya Media* (sambungan)

A: Ya, sebetulnya ada. Jadi begini, itu sebetulnya berpikirnya secara bisnis. Hubungannya pertama kali itu gagasannya dengan dunia periklanan, kemudian persoalan promosi, yang ketiga adalah perluasan jaringan, yang keempat adalah keniscayaan teknologi, dan kemungkinan perubahan dalam lifestyle masyarakat terhadap akses informasi. Nah pada waktu kaitannya dengan iklan, itu kita harus mengirimkan bukti siar kita, iklan yang diputar itu ke Jakarta, zaman itu kita harus bikin report tertulis, lama-lama kita berpikir itu waste time, sangat tidak efisien, lalu mengapa kita ngga menggunakan teknologi? Supaya pemasang iklan bisa langsung kontrol sendiri, aku pesen iklan di jam 9 sampai 10, udah tak tongkrongin aku denger siarannya. Tapi karena jaraknya jauh ngga mungkin makanya teknologi online ini dipakai. Tapi yang kedua mulai berkembang company profile secara elektronik kan? Nah ini kemudian kita manfaatin juga, dengan siaran online ini sekalian juga PR ing, sekaligus mempromosikan. Tapi dari sisi masyarakatnya, ini strategi untuk menunjukkan pada masyarakat, kita ini mengikuti perkembangan lho, tiap perubahan sosial dalam konteks teknologi komunikasi, kita juga ready lho, kita selalu siap. Sehingga masyarakat itu ekspektasinya itu masih besar pada SS, terutama masyarakat komunikasi yang sudah gadget generation itu juga merasa oh ya SS masih bisa diakses dari situ. Kemudian kita juga kepengen memperluas peranan Suara Surabaya dalam konteks visi itu tadi bahwa ketika misalnya audio tidak cukup, maka perlu ada gambar, ketika karakteristik yang tidak terdokumentasi itu tadinya menjadi seperti itu, ada teknologi yang bisa mengatasi itu. Lalu kenapa ngga kita pakai? Kemudian sisi yang lain, adalah sisi perkembangan teknologi, karena teknologi konvergensi sudah terjadi, yang saya melihat sangat connected, antara kebutuhan dari produk kita sendiri kemudian juga dengan teknologi yang berkembang. Apalagi teknologi yang berkembang ini juga di accept oleh masyarakat, nah ini kemudian kita sekaligus memanfaatkan peluang yang seperti itu. Tetapi meskipun ada teknologinya, tapi kalau kita ngga punya gagasannya yang ngga akan kejadian. Artinya banyak juga radio hari ini yang ngga convergence, karena ya tidak punya gagasan-gagasan sampai kesana.

Q: Bedanya radio online dengan radio on demand?

A: Nah, radio online itu adalah real time, tapi receivernya bukan radio tapi komputer. Jadi kalau mau dengerin SS tanpa lewat radio, ya masuklah suarasurabaya.net, klik facility radio online, termasuk pada area yang sulit dijangkau secara teritorial. Jadi misalnya SS ngga mungkin didengerin di Jakarta, tapi dengan radio online, itu bisa. Lalu kemudian radio on demand, itu adalah arsip siaran auditif, itu sederhananya. Dan itu kenapa on demand, karena saya yang mengakses by my demand, aku kepengen apa sih, ya tentu adalah arsip-arsip siaran yang saya masih punya kepentingan. Misalnya kemarin aku tertarik dengan statementnya wakil walikota tentang Surabaya, tapi aku kemarin dengernya sepotong, nah dia bisa klik lagi untuk mendengarkan dari awal. Jadi bentuknya radio on demand itu adalah arsip sebenarnya, arsip audio dari seluruh siaran. Jadi bukan direkayasa lagi, tapi seluruh siaran itu apa adanya itu terekam, dengan sistem per file itu per 10 menit.

Wawancara (Kamis, 15 Juni 2006 pk. 09.30 WIB melalui telepon)

Q: Tentang etika, dalam menjalankan siaran untuk mendemokratiskan masyarakat, bagaimana SS menjaga penyiar dan gatekeeper supaya tidak sampai melanggar kode etik?

A: Yang pertama yang harus dilakukan lebih dulu adalah proses sosialisasi tentang etika, nah etika yang kita pakai itu ada dua, jadi dulu yang namanya Kode Etik Wartawan Indonesia, KEWI, tapi sekarang kan sudah berganti jadi Kode Etik Jurnalistik ya, nah kemudian di dunia siaran di jalurnya PRSSNI, kita juga punya kode etik siaran. Jadi dua itu yang digunakan sebagai landasan. Tapi persoalan yang paling penting itu bukan sekedar nyebut bahwa eh kita mengacu pada kode etik jurnalistik atau kode etik siaran, tetapi kemudian bagaimana sosialisasi kemudian memberikan pemebelajaran tentang itu. Bagaimanapun juga temen di siaran dan pemberitaan itu kan juga harus mendapat latihan, paling tidak kan pake studi-studi kasus. Nah sering yang kemudian kita lakukan adalah mengambil sendiri situasi-situasi dan fakta-fakta yang muncul di SS ke dalam konteks itu. Ada itu di Suara Surabaya kira-kira beberapa waktu yang lalu, saya melakukan lagi sosialisasi

## **Lampiran 8 : Transkrip wawancara dengan Errol Jonathans, *Operational Director* Suara Surabaya Media (sambungan)**

untuk kode etik jurnalistik yang baru tadi itu. Jadi itu yang kita lakukan kemudian dampak dari manager siaran dan manager pemberitaan adalah betul-betul memantau dan otirisasi atau tanggung jawabnya ada pada mereka untuk setiap materi yang mengudara, itu langsung memenuhi kaidah-kaidah kode etik.

Q: Semacam training yang dilakukan tadi, apa berlangsung secara rutin?

A: Kalau sosialisasi itu secara berkala itu memang tidak selalu rutin, tapi kontrol dan pengawasan dari seluruh manajernya itu setiap saat. Dan misalnya anak buahnya melakukan kesalahan maka dia berkewajiban untuk semacam pembelajaran individual, bahwa harusnya ini begini begini.

Q: Apakah SS juga membuat aturan-aturan atau standard sendiri yang juga mengacu pada aturan-aturan kode etik ini?

A: Kita punya yang namanya Sisdur ya, Sistem dan Prosedur atau istilahnya SOP, kemudian kita juga punya unsur-unsur yang masuk ke dalam performance appraisal. Itu semua sebenarnya ada kaitannya dengan bagaimana menciptakan produk-produk yang kalau sudah tampil di siaran itu, itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu semua sudah diatur dalam sisdur, sistem dan SOPnya itu. Jadi itu ada walaupun saya tidak harus membuat kode etik tersendiri, nah karena itu sudah diatur di SOPnya segala macam, itu tersebutlah bahwa harus terkait dengan kode etik, UU penyiaran, UU Pers dll.

Q: Coverage area Jawa Timur itu dimana saja?

A: Sebenarnya di pendekatan siaran kita itu kan ada pendekatan geografis dan psikografis. Jadi kalau kita ngomong tentang TKI dari Jawa Timur yang bermasalah di Malaysia itu terkait dengan psikografinya. Tetapi yang secara geografis masuk dalam cakupan siaran kita, secara spesifik itu ada 3 kota yang masuk siaran jaringan SS yaitu Banyuwangi, Madiun dan Malang. Kita pilih Banyuwangi itu merupakan gerbang yang ke arah timur, termasuk yang ke Bali. Malang kita menanggap sebagai second city di Jawa Timur, Madiun kita menganggap sebagai gerbangnya wilayah Barat. Tapi secara insidental kita juga bisa bekerjasama dengan radio dimanapun, kalau terjadi apa-apa di daerah mereka. Pendekatan kita bukan pada di kota mana SS bisa didengarkan, tapi bahwa orang Surabaya juga punya kepentingan terhadap kota-kota lain di Jawa Timur. Ya kalau ngomong secara geografis dimana SS bisa didengarkan itu ya tidak merata, jadi di Banyuwangi itu bisa dengar, tapi di Probolinggo atau Situbondo mungkin ngga bagus. Kalau ke wilayah Barat, mungkin sampai ke Nganjuk, tapi mulai ke Madiun udah ngga bisa, tapi ternyata di Ngawi bisa denger. Kalau ke utara, efektif cuman sampe Lamongan. Kalau ke selatan, ke Malang sudah ngga bisa, paling jernih sampai di Lawang. Kalau dihitung-hitung ya separo Jawa Timur.

**Lampiran 9 : Transkrip wawancara dengan Yoyong Burhanuddin, *On Air Manager* Radio Suara Surabaya, produser dan penyiar program *talkshow* “Wawasan” (Selasa, 23 Mei 2006 pk.10.25 di Radio Suara Surabaya, Jl.Wonokitri Besar no.40c Surabaya)**

Q: Bisa dijelaskan tentang visi dan misi nya SS?

A: Visi misi Suara Surabaya, visinya itu SS menjadi perusahaan media massa yang bertujuan untuk mendorong pemberdayaan dan demokratisasi masyarakat, dan sebagai sebuah media massa dia mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan telekomunikasi. Itu visinya, kalau misinya itu implementasi dari visi tadi, misalnya yang pertama ingin mendorong terwujudnya masyarakat yang demokratis, masyarakat yang berdaya, kemudian juga kita pengen supaya ada upaya kesejahteraan kepada seluruh karyawan di radio Suara Surabaya, dan kemudian kita juga pengen menjadi sumber informasi tentang Surabaya dan Jawa Timur. Nah itu visi misinya.

Q: Pemberdayaan dan demokratisasi masyarakat yang diinginkan SS itu seperti apa?

A: Masyarakat yang demokratis itu adalah masyarakat yang secara berdaya mereka mengekspresikan, mewujudkan kehendaknya secara mandiri dan independen. Lalu apa yang dia lakukan itu untuk dirinya, dilakukan oleh dirinya.. Jadi dari, oleh, dan untuk mereka sendiri. Jadi aplikasinya misalnya kota atau propinsi Jawa Timur ini seharusnya dibangun sesuai dengan keinginan masyarakat Jawa Timur, bukan keinginan dari pemimpinnya tapi keinginan dari masyarakat Jawa Timur, jadi konsepnya bottom up. Kemudian demokratisasi itu juga memperlihatkan kebebasan mengekspresikan sikap dan pendapat masyarakat, masyarakat tidak boleh lagi dibungkam, tidak boleh tidak bicara kemudian masyarakat juga menyuarakan apa yang mereka inginkan. Nah suasana batin di era-era yang lalu itu, kan lebih sering tentang orang terkooptasi, tidak berani bicara. Tapi demokratisasi yang mau kita dorong adalah pembangunan seperti itu.

Q: Kalau untuk mencapai pemberdayaan itu berarti SSnya harus berperan seperti bagaimana?

A: Peran kita tetap dalam posisi sebagai media yang memberikan edukasi, memberikan informasi, juga memberikan pencerahan, mempersuasi masyarakat supaya mereka mendapat pencerahan tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu hidup dalam suasana yang demokratis. Peran itu yang diambil oleh SS, melalui media-media yang ada di Suara Surabaya, jadi kalau radio Suara Surabaya melalui acara-acara siaran itu kita membangun nuansa-nuansa demokratisasi.

Q: Misalnya bagaimana?

A: Misalnya, format siaran SS, formatnya open, open format, artinya 24 jam siaran kita itu terbuka untuk interaksi dengan masyarakat. SS kan punya moto news interaktif solutif, jadi dalam siaran SS selalu ada news, selalu ada interaksi, dan kemudian selalu ada solusi. Semua topik yang dibahas dalam siaran SS itu harus mencapai tiga hal itu, ada konsep newsnya, informasinya, lalu konsep interaksinya, artinya memberi kesempatan orang untuk memberi respon, two way traffic communication, jadi masyarakat ikut memberikan reaksi dan kemudian semua itu dikelola untuk mencapai solusi, solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada.

Q: Itu berarti, news interaktif solutif itu juga merupakan strategi program?

A: Iya, betul. Jadi dia merupakan strategi program, semua program kita berwarna itu. News Interaktif Solutif, dalam berbagai bentuk acara bisa *talkshow*, berita, diskusi, dll.

Q: Itu kan program siarannya, kalau program yang non siaran (off air). Bagaimana implementasi visi dan misi dalam program off air?

A: Kalau yang off air juga tidak jauh berbeda, misalnya yang off air itu ada yang digagas SS sendiri, ada yang kita mendukung aktivitas eksternal. Orang luar bikin apa gitu, bikin off air, kita support. Tapi kedua-duanya selalu kita cari mana yang menunjukkan upaya pemberdayaan masyarakat itu, upaya demokratisasi masyarakat itu. Itu kita tunjukkan yang seperti itu...

Q: Dari content acaranya ya...

**Lampiran 9 : Transkrip wawancara dengan Yoyong Burhanuddin, *On Air Manager* Radio Suara Surabaya, produser dan penyiar program *talkshow* “Wawasan” (sambungan)**

A: Ya, misalnya kita pernah mbuat acara family gathering, itu sebenarnya kalau orang liat kan, kok keluyuran naik mobil keliling-keliling. Kalau secara sederhana iya, tapi kalau mau dipahami, mereka kelilingnya mengajak keluarga, jadi ada harmonisasi dalam keluarga, kan timnya keluarga itu. Trus mereka mengunjungi lokasi-lokasi budaya, sejarah, ada aspek edukasi di situ, orang melihat mendengar. Kemudian ada games-games yang dibuat di acara itu yang membuat terjadinya hubungan keluarga yang lebih dinamis, ada diskusi. Dalam perjalanan itu mereka berdiskusi, menjawab pertanyaan itu macem-macem, yang itu membuat si peserta-peserta tidak hanya keliling-keliling, tapi dia juga memperoleh aspek edukasi, aspek komunikasi, aspek sosial. Karena kan secara sosial, mereka kan pesertanya banyak, mereka ketemu orang lain, ketemu keluarga lain. Lalu disana dibikinkan acara yang kompetitif, baik untuk dalam satu keluarga maupun kompetisi antar keluarga. Itu aktivitas yang dirancang based on our vision itu..Jadi memberdayakan, membangun demokratisasi. Tapi konteksnya off air selalu juga ada hubungannya dengan on air, karena ini kan perusahaan media massa, media massanya radio jadi biasanya kalau ada acara begitu, ada reportase dari lokasi, live dari lokasi, menjawab pertanyaan kuis di radio jadi diinteraksikan. Jadi mungkin selama ini orang yang ngga pernah bicara, pendiam ikut acara itu, tapi dia ingin menjawab kuis, berarti dia sudah mulai melatih dirinya untuk biasa berkomunikasi dengan media SS. Artinya di situ, ada kesempatan dia untuk memulai demokratisasi terhadap dirinya sendiri, dia bisa ngomong. Itu hal-hal yang didorong ke acara-acara off air.

Q: Kalau dibilang ada kebebasan berekspresi untuk pendengar, itu sebenarnya sampai sejauh mana sih diberi kebebasan. Begitu juga dengan SSnya, apakah bisa sebebas-bebasnya memberikan informasi?

A: Sebenarnya demokrasi itu kebebasan. Tetapi kebebasan itu bukan kebebasan yang mutlak, ada batas-batasnya. Tapi dimana batas-batasnya itu terus berubah, batas-batas itu terus berubah dari waktu ke waktu. Misalnya dulu orang ngomong pluralisme, itu agak canggung, pluralisme itu kan menghargai perbedaan, ya to, itu dulu orang canggung ngomong. Kita beda warna kulit, beda bahasa, beda etnis, beda bahasa, beda pekerjaan, beda profesi, itu kan dulu wah rame. Sekarang itu sudah mulai berubah, jadi masyarakat sudah relatif berkembang ke kondisi yang pluralis. Nah di situ kemudian batesnya apa? bates siaran kita, ya batesnya sudah mengikuti kondisi yang seperti itu. Jadi sekarang udah ngga masalah lagi misalnya SS punya program Jalan Sutra, itu mengangkat potensi ekonomi yang dibangun kelompok etnis Tionghoa. Sudah ngga masalah, tapi dulu orang masih ragu, ya kita dulu ngga tau itu boleh atau ngga boleh, tapi masih ragu, tapi sekarang ngga masalah. Jadi batas itu bergeser, sesuai dengan zamannya. Itu dari SS ya, SS terus menghitung artinya mencermati perubahan-perubahan di lapangan, batasnya dimana nih...Misalnya juga gini, dulu kalau ada kunjungan Presiden ngga boleh diinformasikan, jadi rutenya dari Bandara ke sini ke sini ke sini itu ngga boleh dulu sama polisi. Tapi sekarang justru polisinya yang lapor, nanti rutenya ini ini ini ini, nanti masih ditutup dsb, karena dulu katanya itu bagian dari security, protokol kenegaraan, tapi sekarang ngga, jadi kita ngga pa-pa memberikan informasi tentang itu. Jadi itu sudah bergeser juga. Tapi dari sisi eksternal, dari pendengar, karena SS juga membangun edukasi kepada para pendengarnya, kita juga berusaha memberikan keteladanan pada pendengar itu, bahwa mereka harus tahu kalau mereka ada di SS bicara di media ini, mereka juga sedang didenger oleh orang banyak. Orang banyak itu heterogen, jadi karena ini adalah media publik, dimana publik jadi konsumen dari media ini, orang juga harus menghargai nilai-nilai di dalam publik itu, jangan mencaci maki orang, jangan memfitnah, jangan berbicara kotor, jorok, karena ini media publik didenger oleh banyak orang. Nah itu yang kemudian menjadi nilai-nilai yang dipertahankan dan diedukasikan kepada para pendengar sehingga para pendengar, mereka juga menyesuaikan diri dengan pola-pola yang ada dalam siaran SS dan mereka tahu batas, ngga boleh mencaci maki, ngga boleh memfitnah, mereka tidak bicara kotor dan karena tadi ada moto news interaktif solutif, maka setiap orang yang berdialog di SS didorong untuk memberikan solusi masalah. Barangkali orangnya ngga tahu, karena kan tidak ada pendidikan pendengar, pendengar apa dilatih untuk bicara gitu? Ngga pernah, tapi SS sendiri melalui penyiaranya, melalui narasumbernya itu memberi semacam pattern, contoh, pola berbicara di radio itu kayak apa. Nah

**Lampiran 9 : Transkrip wawancara dengan Yoyong Burhanuddin, *On Air Manager* Radio Suara Surabaya, produser dan penyiar program *talkshow* “Wawasan” (sambungan)**

pendengar itu pintar, mereka ngikutin hal-hal seperti itu, lalu kemudian kalau mereka juga ngga ngerti bagaimana berbicara di SS, kita yang mendrive, diarahkan, ditanya, sehingga mereka berbicara sesuai rel yang kita harapkan. Jadi tidak bebas 100%, dan SS juga secara sistem membangun sistem gate keeper namanya, artinya tidak boleh ada orang langsung mengudara di SS, harus melalui suatu proses identifikasi, security, seleksi content, yang kemudian ok bapak ini layak on air, oh yang ini belum layak. Kalau belum layak gimana? Ada prosedurnya itu, ada sistemnya, kalau dia ngga layak dicek dulu contentnya seperti apa, nah kalau content nya tidak bisa disiarkan sendiri oleh narasumber, ya kita yang menyampaikan ke udara. Kenapa? Kalau content ini disampaikan oleh pendengar sendiri, orangnya sendiri, pasti akan emosional, kalau dia emosional pasti akan mencaci maki, pasti memfitnah. Karena itu kita redam, tapi pesannya tetep kita sampaikan, disampaikan oleh siapa? Oleh orang SS yang ngga emosional. Ato juga kalau ada informasi yang masuk ke SS, itu mempengaruhi tata nilai, mempengaruhi kebenaran, jadi misalnya saya tidak percaya pada Tuhan, karena Tuhan itu...Nah itu berarti kan materi yang sangat sensitif ya, kapanpun itu akan sensitif. Nah oleh temen-temen gatekeeper itu tidak ditolak, ditampung saja, diterima. Atau ada orang memfitnah orang lain, kita tahu bahwa ini belum tentu bener, kita tahan informasinya, ndak kita siarkan. Ada policy-policy seperti itu sehingga membuat orang untuk on air di SS itu tidak sembarangan, meskipun kita punya moto interaktif, meskipun kita memahami demokratisasi tadi, kita memahami pemberdayaan mereka tapi dalam koridor, bates yang masih sesuai dengan tata nilai yang ada dalam masyarakat kita. Orang dengan budaya Surabaya seperti ini, misuh, bicara sangat terbuka, itu biasa ya, ngga suka sama orang itu dia ngomong, ngga suka sama hatinya sebenarnya tapi ya karena dia terbuka, bukan ngga suka orangnya. Dia ngga suka sama perilakunya, dia ngomong itu, itu khas Suroboyo. Yang seperti ini mungkin tidak terjadi di tempat lain, di Jogja misalnya. Nah ini kita masuk dalam lingkungan ini, masuk dalam tata nilai orang Surabaya dan sekitarnya, dalam konteks Jawa Timur misalnya dengan karakter tata nilai Jawa Timur itu.

Q: Informasi yang bisa muncul di SS atau mungkin dalam konteks *talkshow*, jenis topik atau informasi macam apa yang bisa dibahas?

A: Topik yang kita pilih mempertimbangkan dampak. Jadi selalu temen-temen itu ketika merancang topik selalu dipikirkan dampaknya. Dampak itu ada 2, dampak terhadap daya tarik acara, kan interaktif. Interaktif berarti harus narik orang berminat. Yang kedua memperhitungkan dampak dari contentnya sendiri, terhadap eksternal. Misalnya ngomong tentang suatu hal yang oleh masyarakat masih dianggap abu-abu, oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang ngga layak diomongin, misalnya tentang seksualitas. SS kan pendengarnya dewasa, sebenarnya kan gak pa-pa dibahas pagi siang sore, tapi kemudian atas pertimbangan tertentu, maka topik seperti ini layak dibicarakan pada malam hari di atas jam 9, meskipun pendengar SS dewasa, kenapa? Karena SS tahu, pendengar dewasa pun sering kali bersama-sama dengan remaja atau anak, kalau satu keluarga naik mobil gitu, jadi kan ngga nyaman denger SS ngomong seksualitas, anaknya nanya gitu kan. Lha itu oleh SS diseleksi, boleh tapi mungkin sebaiknya malam. Lalu ngomong tentang benturan etnis misalnya, itu juga akan diperhitungkan dampaknya apa, kayak yang di Makasar kemarin, geger itu, contoh kasus seperti itu. SS tidak ingin menjadi bagian masalah, kita ingin jadi bagian solusi, walaupun kita akan membicarakan itu yang dipilih adalah materi yang mencari solusi. Jadi misalnya bagaimana sih memahami perbedaan, bagaimana memahami sebuah peristiwa apakah itu tindakan kriminal, tindakan sosial atau tindakan apa. Jadi walaupun sesuatu itu sensitif, akan tetep diupayakan untuk melihat dari sisi-sisi yang dampaknya tidak malah menjadi masalah di masyarakat, tapi yang memberi sentuhan solusi pada sebuah permasalahan masyarakat. Ya memilihnya seperti itu, berita menarik saja tidak cukup, news valuenya bagus saja tidak cukup, karena ada aspek-aspek yang lain yang harus dipertimbangkan, aspek security, aman ndak berita ini. Aspek keakuratannya seperti apa, lalu dampak, implikasi sosialnya kayak apa. Selain yang internal tadi, daya tarik terhadap programnya sendiri, mungkin secara eksternal ga ada masalah, tapi bahasanya ndak menarik sama sekali, ya kita juga hindari, kita pilih mana yang lebih baik.

**Lampiran 9 : Transkrip wawancara dengan Yoyong Burhanuddin, *On Air Manager* Radio Suara Surabaya, produser dan penyiar program *talkshow* “Wawasan” (sambungan)**

Q: Mengontrol suatu program apakah sudah mencapai suatu pemberdayaan dan demokratisasi itu kayak gimana?

A: Jadi di SS, ada kira-kira 20an *talkshow* dalam satu minggu. Tapi kalau yang kelana kota, yang open format tadi, ada namanya agenda setting, itu bisa kapan saja munculnya. Jadi kita membangun yang namanya self censorship, yaitu setiap SDM di SS terutama yang berkaitan dengan siaran, mereka harus memahami filosofi dasar pola penyiaran SS ini, news interaktif solutif, news valuenya pendengar SS, segmentasi pendengar SS itu kayak apa, karakter segmentasi itu seperti apa. Itu semua kita share terus, ini menjadi pekerjaan ngga pernah selesai, untuk menyamakan persepsi dan visi kita. Dengan begitu mereka akan memiliki nilai yang sama, nilai yang sama itu kemudian kita sepakati, kita jaga bersama-sama. Itu yang namanya self censorship, jadi temen-temen menyensor sendiri, ooh ini rawan atau ndak. Dan secara sistem juga disupport, katakanlah ada status merah kuning hijau, ini statusnya kuning ini, maka mereka konsultasi dengan pimpinannya. Kalau penyiar sama supervisor, gate keeper sama supervisor, kalau udah lebih tinggi supervisor kontak manajer, jadi disupport dengan sistem. Tetapi mereka dibangun self censorshipnya, kita pengen semua orang paham bukan karena aturan, ndak boleh karena 1 2 3, trus dia hapal, kita ngga butuh itu. Kita butuh semua orang memahami filosofi dasar, karena kalau dia memahami filosofi dasar, maka semua pekerjaan bisa dengan sangat mudah dikerjakan dengan optimal, karena dia tidak mengerjakan atas nama juknis, petunjuk teknis. Ngga terlalu detail seperti itu, tapi mereka memahami, maka dibangun yang namanya self censorship. Tapi juga disosialisasikan tentang visi misi lalu contoh-contoh pilihan topik, itu juga dilakukan, kemudian secara sistem kan disupport, sistem komunikasi tadi. Secara struktur itu dibantu dengan penunjukan produser acara, jadi ada orang-orang yang telah dianggap memiliki kompetensi lebih baik dibanding yang lain untuk menangani satu acara, maka dia diberi kesempatan untuk memegang fungsi produser pada acara itu. Produser inilah yang kemudian bertanggung jawab pada setiap acara *talkshow* itu, setiap orang dia punya tanggung jawab pada *talkshow-talkshow* itu, sehingga kemudian ketika dalam planning sampai evaluasinya, komunikasinya saya dengan mereka. Produser itu ada juga yang merangkap sebagai pembawa acara, ada juga yang sebagai produser saja, dan itu diberikan kesempatannya kepada siapa saja yang kita anggap sudah memiliki kompetensi untuk itu. Jadi juga ada sistem struktur yang membuat kontrol upaya peningkatan kualitas itu bisa terus tertata, tidak lepas kendali.

Q: Radio kan sebenarnya punya fungsi sebagai watchdog, bahkan dibilang watchdognya pemerintah. SS sendiri bagaimana menjalankan peran ini?

A: Sebenarnya di konsep jurnalistik, media massa itu adalah kontrol sosial. Fungsi media ini salah satunya kontrol sosial. Kontrol sosial ini ngontrol siapa? Yang namanya sosial itu kan semua komponen masyarakat, ya masyarakatnya, ya pemerintahnya, ya asosiasinya ya tentaranya, ya polisinya. Di SS ini menjadi pemegang peran kontrol itu, dari tugas medianya. Jadi kenapa kok ngambil gitu? Ya karena tugas media memang itu sesungguhnya itu, menjadi kontrol sosial. Jadi SS bukan mengada-ngada, SS jadi pengontrol atau watchdog, ngga, media itu adalah kontrol sosial. Nah kemudian dianggap watchdog karena posisinya yang sangat intens melakukan pengawasan, kritikan dsb, itu biar masyarakat saja yang menilai. Tetapi sebenarnya basicly, media punya peran kontrol sosial, nah SS mengambil peran ini. Bahkan SS mengontrol dirinya sendiri, dengan sistem yang kita bangun ini, pimpinan-pimpinan SS memberikan kontrol terhadap internal. Produser bikin topik bisa dicut sama pimpinannya, dan pimpinannya bikin topik bisa dapat masukan dari produsernya. Jadi artinya terjadi saling kontrol, dan SS membuka diri untuk dikontrol oleh pendengar juga, oleh pemerintah juga. Emang pemerintah saja yang boleh kita kontrol, pemerintah juga boleh kontrol SS, dalam kapasitas kontrol demokratis ya. Ngontrol itu kan bukan pengendalian, kalau jaman dulu, jangan, itu kan dikendalikan. Ngga ada kesempatan membela diri, ngga ada kesempatan buat berdiskusi memberi solusi terbaik, ya jadi pemerintah bisa ngontrol. Masyarakat juga boleh mengkritik SS, nah karena kita demokratis maka setiap kritik itu adalah hal yang berharga, sehingga kita melihatnya sebagai masukan yang menjadi bahan pertimbangan. Karena demokratis, juga tidak boleh memaksakan. Jadi kemudian kalau SS dikritik, maka SS akan mempertimbangkan kritik-kritik itu, apakah ini akan kita ambil keputusannya

**Lampiran 9 : Transkrip wawancara dengan Yoyong Burhanuddin, *On Air Manager* Radio Suara Surabaya, produser dan penyiar program *talkshow* “Wawasan” (sambungan)**

seperti yang disarankan oleh kritik itu, katakan kemudian ngga, tapi terima kasih ya untuk masukan, tapi mohon maaf kami tidak bisa memenuhi masukan ini. Sama juga ketika SS ngontrol pemerintah, dan kemudian pemerintah tidak melakukan itu pasti pemerintah juga memiliki alasan, apa, dan mungkin kita ngga ngerti. Lalu kita buka komunikasi, eh pemerintah apa alasannya, oh begini, ya udah kalau menurut anda begitu alasannya ya silahkan dilakukan, tapi kami sudah melakukan fungsi kontrol itu. Masyarakat juga begitu, meskipun ada yang mengatakan suara masyarakat adalah suara Tuhan, tapi tidak semua suara masyarakat itu benar. Karena pertanyaannya masyarakat yang mana, karena sekarang ini masyarakat sudah sangat terkontaminasi, banyak pihak mengeksploitasi yang namanya rakyat ini untuk kepentingan tertentu. Jadi kalau mau suara rakyat suara Tuhan, ya mari kita dudukkan dalam porsinya kan gitu, jadi masyarakat bisa salah lho. Jadi di satu sisi kita mengontrol, tapi di sisi lain, kritikan yang diberikan bukan berarti suatu pemaksaan, ndak perlu itu, ngga demokratis dong...

Q: Kalau tentang program Wawasan, apa ekspektasi SS lewat program ini, apa yang ingin dicapai?

A: Sebenarnya program ini punya peran value building, jadi membangun tata nilai. Yaitu tata nilai dasar bangsa Indonesia, tata nilai yang toleransi, gotong royong, peduli, saling menghormati, membangun keadilan, mendorong kebenaran. Filosofi dasarnya program wawasan itu...Nah kemudian tentang pilihan topiknya apa dalam program wawasan itu sangat populer, mengikuti aktualita, yang rame apa sekarang. Tapi diskusi itu akan digeser ke persoalan tata nilai. Maksudnya gini, tentang korupsi. Ada seorang pejabat diputuskan divonis sekian tahun penjara karena korupsi. Kita belum punya detailnya, kita lakukan aspek news, kontak narasumber dsb. Lalu aspek interaktif, kita undang pendengar untuk memberi pendapat. Kemudian masuk sisi yang ketiga, sisi solutif, kita kontak lagi narasumber lain yang memberikan solusi atas masalah itu, atas opini yang juga berkembang di masyarakat. Dan kemudian, kalau tadi seolah-olah permasalahannya hanya sekedar ada pejabat yang divonis hukuman penjara, nah di dalam wawasan akan digeser akan ditarik suatu sudut pandang persoalan, jadi misalnya kok bisa ya pejabat memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, apa sebenarnya yang melatar belakangi itu? Didiskusikan oleh pakar-pakar sosial, jadi kita kemudian menarik suatu persoalan dari sebuah peristiwa lalu menjadi suatu bahan diskusi, yang goal akhirnya kita pengen agar kalau siapapun jadi pejabat, anda itu sudah dipilih menjadi pejabat oleh orang yang berwenang untuk melayani masyarakat, jangan lagi menginjak-injak masyarakat. Nah itu prinsipnya untuk siapapun yang jadi calon pejabat, kemudian prinsipnya untuk masyarakat biasa, kita itu kan cuma karena belum kebagian jatah, coba kalau kita dapat kesempatan. Tapi ternyata kejahatan itu berujung di terali besi, karena itu siapapun anda, mau jadi apapun, hati-hati, jangan memanfaatkan. Itu ada pesan-pesan nilai moral, yang membuat masyarakat berubah paradigma menjadi paham tentang tata nilai kebenaran, keadilan, yang seperti itu..Tapi siapa yang bicara? Bukan SS, SS hanya fasilitatornya saja, SS mengundang narasumber, menerima masukan dari masyarakat, mari berdiskusi. Karena sharing mereka sendiri, lalu orang melihat ini salah itu salah, mereka belajar dari situ, itu aspek edukasinya terbangun. Jadi wawasan sangat memperhatikan visinya yang memberdayakan demokratisasi itu.

Q: Formatnya interaktif dan dominan pendengar. Sementara narasumber lebih banyak dihubungi lewat telpon. Ada alasan tertentu kenapa seperti itu?

A: Sebenarnya sih ngga selalu ya, kemasan wawasan itu sangat fleksibel terhadap kebutuhan. Kalau kebutuhan narasumbernya dateng, ya mereka dateng, makanya tiap Kamis dua minggu sekali ada yang namanya wawasan dengan dewan kota, dewan kotanya dateng kesini, diskusi dengan masyarakat. Tapi namanya wawasan. Dulu ada KADIN, ngomong tentang ekonomi itu juga begitu, jadi dia dateng kesini. Ada yang misalnya hari senen, itu lalu lintas thok, tapi selain informasi lalu lintas, kita juga menarik salah satu masalah lalu lintas, misalnya disiplin berkendara. Misalkan tentang masyarakat itu tau ngga sih tentang rambu-rambu, jangan-jangan mereka ngga ngerti rambu. Itu kita didiskusikan. Memang ayo share tentang info lalu lintas, tapi karena ini acaranya wawasan kita juga diskusi soal disiplin, tentang kepatuhan pada rambu, atao juga masalah ekonomi, ya sangat aktual. Tapi di hari tertentu, kita planning karena ada source nya

**Lampiran 9 : Transkrip wawancara dengan Yoyong Burhanuddin, *On Air Manager* Radio Suara Surabaya, produser dan penyiar program *talkshow* “Wawasan” (sambungan)**

khusus, jadi bisa saja begitu, itu tidak terbelenggu oleh kemasan tertentu. Wawasan itu justru sangat mampu mengadaptasi kepentingan, kadang-kadang juga untuk iklan, misalnya Pemkot mau apa? Oh, mau ulang tahun Surabaya, ada ngga yang bisa dimasukin wawasan? Oh banyak, misalnya ngomong tentang patriotisme, arek Surabaya kan terkenal egaliter, ayo kita ngomong soal patriotisme. Jadi narasumbernya datang dan mbayar mereka, dan tetep saja polanya ada interaksi dengan masyarakat. Jadi kalau untuk wawasan dari segi kemasan, dia adalah bentuk kecil dari SS, miniatur dari format kelana kota yang 24 jam, kalau mau lihat ya disitu.

Q: Dan itu kenapa tiap hari?

A: Sebenarnya kan ngga tiap hari..Tapi dulu itu acara di jam itu, kelana kota. Lalu nama kelana kota jadi generik, akhirnya jadi semua nama acara di SS, lalu saya tidak lagi katakan acara kelana kota, tapi format kelana kota. Karena nama sudah menjadi format. Nah tapi di jam itu, kemudian harus ada yang spesifik, maka dibuatlah yang namanya wawasan. Wawasan ini ditaruh di pagi hari, yang kedua pertimbangannya adalah highlight, program unggulan. Nah kebetulan orang radio itu kan percaya kalau pagi itu kan prime time, makanya kita bangun highlight di prime time. Kemudian karena saya tahu bahwa ini highlight, dan ini prime time, maka pertaruhannya program ini sangat besar. Maksudnya gini, kalau orang ngga pernah dengerin SS, denger wawasan saja, maka mereka akan tahu sebenarnya SS itu apa. SS yang gede 24 jam itu, kalau mau tahu dengerin aja wawasan, dia akan tahu polanya kayak gitu. Kan sebenarnya sama kalau anda perhatikan, kelana kota kok kayak gitu, iya sama tapi dia lebih intens artinya membahas satu pokok masalah saja, lebih fokus. Kalau yang lain bisa lari kesana kesini, kalau ini lebih fokus membahas sebuah persoalan. Itu menjadi semacam ikon, kalau orang pagi denger wawasan sama kayak dia mendengarkan pola siaran SS secara keseluruhan. Dan itu kemudian membangun semacam image besar bagi SS.

Q: Dengan misi sebagai sentra informasi Surabaya dan Jawa Timur, apakah di program wawasan juga isu lokal lebih dominan? Bagaimana prosentasenya?

A: Tidak ada planning memberikan prosentase, lebih pada aktualita saja. Kalau hari ini ada informasi nasional yang besar ya akan dibahas di wawasan, kalau ada lokal yang besar juga dibahas. Jadi kita tidak lagi melihat besar wilayah, dengan diprosentase, kenapa begitu? Karena orang Surabaya itu sudah global, jangankan Jakarta, pendengar SS itu tiap hari ada yang ke Hongkong, Singapore dll. Artinya tidak bisa lagi kita membatasi Suara Surabaya dalam scoop lokalitasnya saja, meskipun ada yang dipertahankan dari aspek lokal itu. Bukan content nya tapi impactnya..Kebijakan Jakarta, kan secara demografi jauh, tapi persoalan ini akan mengenai orang Surabaya. Kalau begitu atas nama demokrasi tadi, orang Surabaya boleh bicara dong, makanya SS disiarkan melalui internet, melalui satelit. Itu upaya untuk menjangkau wilayah-wilayah yang lebih luas, memperkuat pengaruh informasi yang kita punya, jadi orang Surabaya bisa bicara termasuk untuk kepentingan yang sifatnya nasional. Kita selalu pikirkan dampak untuk orang Surabaya, percuma topiknya bagus tapi ga ada dampaknya. Mending ada dampaknya meskipun topiknya ringan.

Wawancara (Selasa, 21 Maret 2006 pk.09.10 di Radio Suara Surabaya, Jl.Wonokitri Besar no.40C Surabaya)

Q: Bisa diceritakan tentang profil program Wawasan?

A: Program Wawasan itu dimulai tahun 1995, karena kita punya concern pada problem-problem masyarakat. Acaranya 3 jam, mulai jam 6 pagi sampai jam 9, dari senin sampai jumat. Di dalamnya, pola acaranya interaktif dengan audience, jadi model acaranya ada yang diskusi, ada yang call in. Call ini kita ngga pake narasumber karena data, isunya sudah jelas, kita tinggal memintakan komentar saja dari pendengar. Mereka telepon, itu namanya call in. Ada juga yang diskusi, jadi narasumber kita telpon, untuk memberikan data, atau memberi opini, pandangan secara keilmuan, jadi mereka memberi warna yang lain dalam wawasan. Jadi dalam tiga jam itu

**Lampiran 9 : Transkrip wawancara dengan Yoyong Burhanuddin, *On Air Manager* Radio Suara Surabaya, produser dan penyiar program *talkshow* “Wawasan” (sambungan)**

ada diskusi tentang suatu topik hangat yang berhubungan dengan Surabaya dan sekitarnya lalu kita undang pendengar untuk memberikan opini, pandangan mereka terkait dengan topik itu. Dan bahkan beberapa kasus besar misalkan dalam jatuhnya walikota Surabaya beberapa tahun yang lalu, dan mampu dipertahankannya Bambang DH sebagai walikota, itu ada peran dari Wawasan untuk membangun opini publik, untuk memperoleh dukungan. Kenapa Wawasan punya concern pada persoalan itu, karena Surabaya harus diselamatkan. Surabaya sebagai kota harus tetap jalan, dan harus berpihak pada kebenaran, sehingga ada topik seperti itu. Jadi isu-isu yang ditampilkan itu, kemudian beberapa diantaranya punya pengaruh besar terhadap kehidupan di Surabaya ini, berpengaruh secara langsung. Jadi misinya di Wawasan itu tidak hanya sekedar membangun wacana, pemahaman, memberikan knowledge, tapi juga untuk melakukan perubahan-perubahan sejauh pengaruh komunikasi dari siaran Wawasan itu bisa capai. Jadi kalau bisa diubah, diubah, perubahan apa yang mau dicapai itu ditargetkan di Wawasan itu. Dalam perkembangannya kita evaluasi terus dan ternyata memang apa yang tampil di Wawasan itu sangat bergantung pada kondisi masyarakatnya. Jadi begitu masyarakat Surabaya dalam keadaan tenang, damai, ngga ada apa-apa, itu wawasan juga ikut ngga ada apa-apa, tapi di situ kita tetap bikin kreativitas, bikin sesuatu yang menarik secara program, sehingga orang berminat untuk mendengar dan berminat untuk berinteraksi. Dan sejauh ini kemudian banyak penyesuaian karena kondisi masyarakat dan kebutuhan program SS sendiri, jadi sekarang Wawasan itu hanya ada di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi cuma 4 kali, kalau dulu 5 hari full.

Q: Bagaimana dengan rating program ini? Jumlah pendengar yang berpartisipasi?

A: Ratingnya berubah-ubah ya, jadi rating kita di antara seluruh radio itu 3 bulan atau 4 bulanan. Jadi yang terakhir kemarin wave 3 dan 4 tahun 2005, ada naik turun. Jadi tahun 2005 wave terakhir, itu dia dalam posisi menurun, tapi tidak signifikan, jadi dalam posisi program dengan pendengar yang masih cukup banyak. Dan relatif radio jurnalistik, radio news posisinya menurun, bacaan kita sih melihat sekarang ini orang lagi agak tenang, kebutuhan akan informasi tidak begitu tinggi, jadi kalau dia switch ke radio musik itu tidak ada sesuatu yang hilang. Tapi nanti kalau keadaan tertentu lagi, dia butuh dan kemudian pindah lagi. Nah bacaan saya terhadap wave yang saat itu tinggi, memang suasana di luar lagi hangat.

Q: Kemudian bisa dijelaskan tentang program LKM?

A: LKM itu sudah lebih dari 3 tahun, yang pasti bersamaan dengan diresmikan lembaganya lalu kita fasilitasi. Kenapa kita bikin acara itu? Yang pertama karena kita fasilitasi itu, dan yang kedua apa yang ingin dicapai oleh LKM itu sama dengan visi misinya SS, untuk pemberdayaan dan demokratisasi masyarakat. Karena polanya, sudah jelas, kemasan programnya interaktif dan content programnya sendiri itu memberdayakan masyarakat terutama dari gencarnya serbuan media supaya masyarakat itu cerdas dan tidak pilih sembarang media, tapi dia harus pilih-pilih yang pas, jadi mencerdaskan masyarakat. Jadi kita punya kesamaan tujuan, lalu kita fasilitasi dia untuk tampil di program kita. Tapi supporting mereka juga cukup besar, karena secara operasional mereka menyediakan narasumber, mengundang narasumbernya, mereka kadang-kadang juga menyampaikan ide-ide topiknya. Kita tinggal melakukan pengendalian saja, SSnya mengawasi pelaksanaannya, kalau dalam keadaan tertentu kita kasih masukan, kalau pendengarnya turun, kalau topiknya mulai tidak menarik kita kasih masukan. Nah program ini Selasa jam 3 sore sampai setengah 5, itu mendiskusikan tentang media massa secara umum tidak hanya elektronik, kemudian disitu diundang narasumber yang berkompeten sesuai dengan topik yang dibahas, kemudian juga ada pihak-pihak lain yang berhubungan dengan topik itu kita undang dan dalam diskusi juga melibatkan masyarakat, interaktif itu. Jadi pendengar juga ikut, tidak hanya bertanya tapi mereka juga bisa berpendapat, menyampaikan pandangan. Sebab biasanya kan yang didiskusikan itu sebuah wacana, sebuah pemikiran, nah itu yang mengundang publik untuk punya kesempatan memberikan pikiran mereka tentang topik yang lagi dibahas. Dan ratingnya kalau tidak salah sampai wave ini, ada kenaikan, jadi dia cukup banyak peminatnya. Dari analisisku, memang kelihatan beberapa topiknya aktual, jadi dia menjaga hubungan antara apa yang sedang terjadi di masyarakat pada saat itu, terus dibahas. Makanya orang kemudian jadi connect.

**Lampiran 9 : Transkrip wawancara dengan Yoyong Burhanuddin, *On Air Manager* Radio Suara Surabaya, produser dan penyiar program *talkshow* “Wawasan” (sambungan)**

Q: Lalu tentang Bedah Layanan Publik....

A: Bedah Layanan Publik itu sebenarnya adalah refreshment program *talkshow* Otonomi Daerah, yang ada sejak tahun 2000. Kemudian dia berakhir tahun 2006, karena sudah terlalu panjang, life cycle programnya sudah menua, otonomi daerah sendiri juga lebih sering dibahas esensinya, daripada ketentuan perundangannya. Sebab kita tahu sudah dirubah to, bukan UU otonomi daerah, sudah UU 32 tentang pemerintah daerah, baru tahun 2005. Sehingga isu-isu otonomi daerah menurun, kemudian kita kemarin melihat angka, data kita juga ada penurunan, kita harus selamatkan jamnya. Salah satunya adalah dengan merefresh programnya, ada beberapa pilihan waktu itu, mau ngomong soal potensi daerah atau soal pelayanan publik, tapi semangat di program itu memang mau mendorong semangat pemberdayaan publik. Tentang potensi daerah itu sebenarnya pemberdayaan daerah, nah itu juga merupakan visi kami, tapi di saat yang sama juga ada pelayanan publik karena kan barusan ada Perda Pelayanan Publik, yang disahkan DPRD bulan Desember 2005. itu artinya 9 bulan ke depan ada masa sosialisasi dan persiapan kelengkapan, karena itu nanti ada Komisi Pelayanan Publik, yang itu nanti harus segera dibentuk. Ada 5 orang nanti, orang ini super body karena 5 orang ini akan menjadi orang yang sangat penting dalam menilai sesuatu itu melanggar Perda atau ndak. Ini sekarang sedang dalam proses, nah suasana hangat tentang Perda inilah yang kemudian diambil momentumnya oleh program Bedah Layanan Publik ini. Dan kita commit untuk mengawal peningkatan pelayanan publik, Perda itu sebenarnya merupakan bagian dari regulasi yang memungkinkan layanan publik itu lebih bagus, makanya kita pun menjadi bagian dari itu. Termasuk SS karena kita commit dalam soal pemberdayaan dan demokratisasi maka kita juga melakukan pilihan untuk membuat program yang berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi ada klop antara suasana di luar, antara pemprov Jatim dan visi SS yang pengen pemberdayaan itu, bersatu trus kita jadikan..Kebetulan ini juga dapat respon dari temen-temen pemprov, jadi mereka merasa bahwa dengan adanya program ini maka SS dianggap yang ikut mengawal implementasi dari Perda itu sekarang, dan bahkan SS sekarang sudah dianggap sebagai KPP Partikelir, jadi komisi pelayanan publik swasta oleh Pemprov dan beberapa staf ahli DPR. Jadi mereka merasa SS ini sebenarnya sedang mengerjakan peran kontrol terhadap pelayanan publik, apalagi dirumuskan acara khusus, bedah layanan publik itu. Jadi semua institusi publik dibedah itu, dan itu disupport oleh pemprov jatim. Kemasannya sama, interaktif ya jadi menerima telepon dari publik, tapi sementara ini orientasinya kita mengundang institusi yang memberikan layanan publik, misalnya BPN, RS dr. Soetomo, Samsat, ada banyak ya...

**Lampiran 10 : Transkrip wawancara dengan Iman Dwihartanto, produser dan penyiar program *talkshow* “Diskusi LKM” (Jumat, 19 Mei 2006 pk.14.30 di Radio Suara Surabaya, Jl.Wonokitri Besar no.40C Surabaya)**

Q: Bagaimana pemahaman Mas Iman terhadap visi dan misi Suara Surabaya?

A: Visi kita itu adalah mimpi kita untuk mencapai sesuatu yang sangat-sangat sempurna, sederhananya perkembangan teknologi komunikasi dan juga perkembangan industri radio itu sendiri selalu pesat dan selalu muncul hal-hal baru dari aspek teknologi dan keilmuannya sebagai seorang praktisi. Terbukti sejak tahun 1992 sampai sekarang, saya sudah mengalami beberapa fase, kalau bisa disimpulkan ada tiga fase yang bisa aku kutip, fase dimana radio itu hanya sebagai wahana untuk siaran radio, hiburan, basicly seperti itu, umumnya pada radio-radio yang ada dan kedua kita aktif dalam peran serta memberikan informasi secara gamblang atau sederhananya kita juga berperan dalam memberikan informasi dan ketiga kita juga mengaplikasikan perkembangan teknologi, ini fase terakhir yang kita lalui sekarang dengan menggunakan teknologi digital, dan juga menggunakan teknologi satelit, itu kita pakai. Itu angan-angan, at least sederhananya Suara Surabaya ingin selalu mengikuti perkembangan telekomunikasi baik dari segi SDMnya, dan juga dari segi hardwarenya. Untuk misi kami, yang jelas secara sederhana, kami ingin memberdayakan semua unsur yang terlibat di Suara Surabaya, apakah itu orang internal atau orang eksternal. Sebab disini kita menerapkan prinsip klien internal dan klien eksternal. Klien internal artinya sesama kolega, kita saling memberdayakan, berdiskusi, saling mengisi untuk memberikan gambaran sekaligus menambah kualitas sebagai seorang individu atau sebagai seorang angkasawan, sebagai praktisi radio. Kemudian kalau klien eksternal kami yaitu pendengar. Kita ingin memberikan layanan sekaligus input yang pada ujungnya kita sama-sama membangun dan sejahtera, harapannya seperti itu. Jadi kalau industrinya bangun, masyarakat dan konsumennya bangun, kuat, berdaya, tentu industri radio akan survive, dan kalau survive kami yang hidup di radio juga akan survive.

Q: Terkait dengan visi dan misi, sebenarnya apa tujuan SS melalui program ini?

A: Ya, program LKM eksis mulai tahun 1999, dan waktu itu cikal bakalnya digagas Direktur Operasional Suara Surabaya bersama kawan-kawan LKM, waktu itu masih Ibu Sirikit Syah sebagai direktornya. Dari diskusi yang terjalin dan angan-angan dari LKM itu sendiri, ternyata klop dengan visi misinya SS. Kita mengikuti perkembangan dari segi kualitas content siaran, dan dari segi manusianya sendiri kita juga memanfaatkan. Artinya begini bahwa lembaga konsumen media itu tujuannya adalah membuka cakrawala dunia jurnalistik dan juga media komunikasi penyiaran, dan juga cetak. Nah kita dalam LKM ini juga membahas masalah-masalah di produk jurnalistik, mungkin peng angle an, atau mungkin juga ketajaman, bisa saja seperti itu. Dan kalau kita tampil di program LKM itu sendiri, kita bisa mengundang konsumen media untuk call in, mengungkapkan pengalaman mereka mencerna, mengamati sekaligus menikmati produk jurnalistik yang dibuat atau disiarkan dimana saja, baik itu di media penyiaran maupun media cetak. Itu sih sederhananya seperti itu, kalau mau dijabarkan lagi, kita sama-sama self correction, kritik, saling kritikkah untuk meningkatkan dari sisi konsumen, kita ingin memberikan informasi tentang produk jurnalistik yang benar, yang balance, yang aman, sebab dulu itu ada pemahaman good news is not news, bad news is good news. Nah sekarang, good news is also news, kalau untuk bad news tentu kita layak udarakan.

Q: Suara Surabaya pengen pendengarnya menjadi bagaimana setelah mendengarkan program ini?

A: Mendengarkan LKM, kita berharap, bercita-cita pendengarnya atau konsumennya untuk lebih berdaya terhadap produk jurnalistik, satu, kedua, kita juga ingin, mengharapkan pendengarnya supaya aware terhadap berita di balik berita. Itu yang utama, sebab kita tahu dipungkiri atau suka atau tidak suka, ada produk berita yang tendensius, ada produk berita yang dibuat kurang berimbang, ada produk berita yang ternyata punya hidden agenda. Nah disitu kita ingin memberikan gambaran serta basic kepada pendengar sekaligus konsumen bahwa kalau ada berita begini begini begini, itu belum tentu beritanya ditelan mentah-mentah, tapi disikapi dengan lebih jeli, lebih bijak, dan lebih dalam. Makanya kita beberapa kali terkadang menyarankan supaya pendengar atau konsumen itu tidak hanya mendapatkan satu source saja, jadi semakin banyak

## Lampiran 10 : Transkrip wawancara dengan Iman Dwihartanto, produser dan penyiar program *talkshow* “Diskusi LKM” (sambungan)

informasi yang dia dapatkan dari beragam sources yang ada di lingkungan kita atau sekitar kita, dia akan lebih bisa menelaah, itu harapan kita.

Q: Apa maksudnya berdaya terhadap produk jurnalistik?

A: Berdaya terhadap produk jurnalistik tentunya dia tahu, sesuai dengan misi kita, bahwa kita ingin memberikan informasi, to inform lah ya. Kemudian dari informasi yang dia dapat, dia jadi lebih paham terhadap keadaan sekitarnya, terhadap apa yang sedang terjadi di negara kita atau apa yang sedang

terjadi di dunia internasional, kalau itu berkaitan dengan berita internasional. Atau mungkin juga berkaitan dengan keputusan, nah dia berdaya untuk ambil keputusan. Itu yang paling gampang untuk

diterjemahkan. Jadi berdaya dalam artian dia mampu untuk menelaah, mampu untuk mencerna dan mampu untuk mengambil keputusan yang tepat untuk dia, bukan kita yang memberikan keputusan untuk dia, tapi untuk konsumen.

Q: Berdaya untuk mengambil keputusan dalam mengkonsumsi media ya?

A: Bisa saja seperti itu, bisa saja untuk mengkonsumsi. Bisa saja untuk bersikap atau berperilaku dalam kehidupan masyarakat, sebab kita di media penyiaran komersial seperti Suara Surabaya tentunya kita berusaha untuk memberikan kesempatan konsumen kita untuk banyak pilihan, sehingga dia bisa menentukan pilihannya untuk mengkonsumsi, to consume, tapi di sisi lain, kita juga ingin supaya pendengar kita juga pintar.

Q: Untuk menentukan topik apa yang akan dibahas dalam program ini apakah ada kriteria tertentu?

A: Kita hampir bisa dibilang tidak pernah menentukan kontrol oh isu ini yang mestinya diliput, oh isu itu yang harusnya begini atau pengambilan atau peng angle an seperti ini. Kami dari pengalaman dari tahun 90-an sampai dengan sekarang, itu tidak pernah memberikan batasan isu ini layak atau tidak layak. Kita tidak berhak untuk menilai itu, tapi kita memberikan informasi yang sedang in informasinya seperti ini. Nah, kemudian kita telaah, kita bedah, informasi ini dibuat apakah sudah cukup lengkap, apakah sudah cukup balance, apakah sudah mencakup semuanya, atau cuman permukaan saja. Atau ada cacat-cacat editorial, yang sepele-sepele lah, atau ada cacat keakurasian, kurang tepat soal nama, soal pangkat, soal jabatan, atau mungkin ada sources atau narasumber yang mestinya bisa ditampilkan tapi tidak diangkat. Jadi kita tidak pernah memberikan batasan bahwa kamu harus begini, atau konsumen harus begini, atau berita ini harusnya begitu. Tidak, tapi kita memberikan gambaran seluas-luasnya opsi ini semestinya begini begini. Itu yang kita lakukan.

Q: Itu yang menentukan topik dari LKM atau dari SS?

A: Terkadang kita diskusikan, jadi biasanya kawan-kawan LKM membawa misi, biasanya mereka juga membawa hasil survey, data yang mereka lakukan, dari riset mereka kemudian kita diskusikan di udara. Ada juga yang kesempatan tertentu, sudah beberapa kali terakhir ini kita diskusikan, isu-isu yang kita angkat, karena memang kelihatannya semakin banyak berita yang berkembang di sekitar kita. Itu terus terang saja, kita sendiri agak sedikit kebingungan. Jujur, kita kebingungan mana yang harus kita diskusikan.

Q: Bagaimana dengan narasumber, apakah hanya dari pihak LKM saja atau dari pihak lain juga?

A: Betul, dari luar LKM. Kita beberapa kali menghadirkan orang luar yang betul-betul luar artinya dia adalah pure konsumen. Kita juga pernah menghadirkan kawan-kawan Jawa Pos, Surabaya Post, Surya, Kompas, bahkan dari aspek pengiklanan pun, kita juga pernah menghadirkan, orang-orang iklan media itu juga pernah kita hadirkan, jadi etika beriklan. Kita juga pernah menghadirkan orang-orang non LKM, itu biasanya kawan-kawan LKM juga punya akses ke beberapa narasumber. Mereka yang memberikan kita akses untuk masuk ke mereka dan kita kontak secara langsung. Kita pernah ngomong dengan Rosiana Silalahi, juga dengan Pak Djoko Susilo yang juga anggota dewan, dan kita juga ngomong dengan beberapa orang yang notabene bukan orang LKM.

## Lampiran 10 : Transkrip wawancara dengan Iman Dwihartanto, produser dan penyiar program *talkshow* “Diskusi LKM” (sambungan)

Q: Pertimbangannya apa mengundang orang-orang dari luar LKM?

A: Kompetensi beliau untuk bicara, layak untuk tampil, relevan, dan biasanya juga berhubungan dengan pelaku. Contoh, sekarang kita sedang memberi perhatian pada undang-undang penyiaran, dan juga PP Penyiaran. Dan kita melibatkan orang-orang yang tahu dengan sejarah perumusan rancangan undang-undang penyiaran, waktu masih RUU, dan sekarang sudah diundangkan. Termasuk kita sedang mencoba untuk mengupayakan untuk judicial review UU Penyiaran plus PP Penyiaran, jadi mereka yang terlibat.

Q: Jadi itu bisa melibatkan siapa saja ya untuk jadi narasumber?

A: Praktisi, politikus, dan mereka yang berkepentingan terhadap industri dunia penyiaran.

Q: Yang dibahas di LKM itu tentang dunia media penyiaran dan cetak juga ya?

A: Ya, dunia penyiaran dan cetak. Beberapa waktu belakangan ini kita juga mulai merambah komunikasi, tidak hanya tentang dunia broadcast atau print, tapi juga tentang etika berkomunikasi, secara gamblangnya komunikasi massa. Lebih global lagi, contohnya waktu kita beri perhatian tentang peran kehumasan atau peran juru bicara di era Megawati dan era SBY. Kita tahu sendiri sekarang SBY menggunakan berapa juru bicara, yang notabene orang-orang yang cukup mumpuni. Sementara Ibu Megawati menerapkan prinsip *silence is golden*. Kita coba komparasikan, dari sisi pemberitaan, dari sisi kepentingan dia sebagai pejabat publik, dia sebagai presiden.

Q: Kenapa ditayangkan sore hari, ada alasan khusus?

A: Dulu kita siarkan itu dari pukul 4 sampai pukul 5. Sekarang kita geser pukul 3 sampai setengah 5. Alasannya sih biasa, alokasi kapling. Khusus di Suara Surabaya, penempatan siaran kita sudah padat betul, dan di saat-saat itulah orang sudah mulai reda. Katakanlah kalau sudah mau pulang, ya sambil menyimak, kerjaan di kantor relatif lebih reda ketimbang pagi hari saat mereka lagi seger-segernya untuk bekerja atau menghadapi tantangan hari itu. Kenapa kok sore hari? Kita cari gampang, kaplingnya memang cuma ada sore.

Q: Bukan karena alasan karena sore hari itu kan prime tiemnya radio?

A: Tidak ada, kalau kita mau bicara soal prime atau tidak prime, di Suara Surabaya ini kita bisa sedikit bragging (menyombongkan diri), kita prime semua, terbukti kita di siaran terbukti dari pagi sampai siang itu kita alokasikan untuk *talkshow* dan itu *talkshow* yang advetorial dan bayar dan mahal, tidak ada *talkshow* pagi sekian, *talkshow* siang sekian, semua prime. Kita pernah coba taruh LKM di malam hari, dengan nama lain, diskusi nyantai aja dan kebetulan yang pegang temen-temen malam, itu terjadi pada waktu bulan puasa. Ternyata kurang efektif, responnya datar-datar saja, karena kita alokasi juga bersaing dengan televisi sekaligus minat untuk mendengarkan siaran radio di malam hari menurun, sesuai dengan survey AC Nielsen maupun survey internal.

Q: Kemudian menyinggung sedikit tentang divisi pemberitaan, bagaimana sih implementasi visi dan misi di pemberitaan?

A: Kalau di visi misi kami sih gampang, di pemberitaan pokoknya apa yang paling baru itu kita tampilkan, lalu apa yang paling menyentuh harkat orang banyak, itu yang jadi perhatian utama. Tidak tertutup kemungkinan ada berita-berita ringan yang hanya sekedar untuk lu tau aja. Untuk policy making, itu sudah biasa kita pake, kemudian kalau ada isu-isu baru yang memiliki kemungkinan untuk berkembang, itu juga kita ikuti. Contohnya perkembangan kesehatan pak Harto, gunung Merapi, harga minyak. Kalau diterapkan, dengan perkembangan teknologi komunikasi kita berusaha mendapatkan dan melayani konsumen secepat mungkin, setepat mungkin dan sesingkat mungkin.

Q: Dulu sistem pemberitaannya seperti apa, sebelum ada teknologi yang maju seperti sekarang?

A: Dulu kami memakai buletin, kami lebih banyak menunggu berita bukan mencari berita. Lalu kita butuh reporter untuk menggali informasi langsung di lapangan, dulu reporter menggunakan HT, lalu ponsel, kemudian satelit, kita sekarang menggunakan internet untuk menggali berita.

## **Lampiran 10 : Transkrip wawancara dengan Iman Dwihartanto, produser dan penyiar program *talkshow* “Diskusi LKM” (sambungan)**

Untuk perekaman hunting, kita dulu menggunakan kaset biasa, microtape, juga menggunakan Porta (portable recorder), dan sekarang menggunakan Marantz yang fully digital.

Q: Lalu apakah Radio Suara Surabaya ini lebih memprioritaskan pada isu-isu lokal di Surabaya dan Jawa Timur, sesuai misinya? Kemudian bagaimana dengan isu nasional misalnya?

A: Betul, prioritas. Jadi seperti halnya nama Suara Surabaya, kami menyuarakan apa yang terjadi di Surabaya, tapi karena media penyiaran Suara Surabaya juga didengarkan di Surabaya Greater (Gerbangkertasusila), maka mau tidak mau, kita juga punya perhatian pada tetangga-tetangga kita di sekitar Surabaya. Tidak tertutup kemungkinan, perkembangan sekarang ternyata, belum tentu mendengarkan siaran Radio Suara Surabaya tapi punya korelasi dengan kebijakan di Jawa Timur atau Surabaya secara umumnya. Misalnya masyarakat di Banyuwangi tidak semua bisa mendengarkan siaran Suara Surabaya secara langsung, namun kita butuh masukan dari mereka secara langsung, yang nanti itu kita bawa kesini, kemudian kita klarifikasikan dengan pejabat pemerintah kota, pemerintah provinsi, apalagi dengan hal-hal yang baru muncul, seperti demam berdarah, flu burung, sampai HIV.

Q: Prosentasenya seberapa besar antara info lokal dengan info nasional?

A: Kalau dipilah-pilah secara prosentase, agak susah ya, karena kita juga punya reporter di Jakarta ada 2 orang, dan di Surabaya ada 4 orang. Mereka ini membagi posisi mereka untuk meliput semua aspek berita yang punya nilai berita, punya nilai informasi untuk disiarkan di Radio Suara Surabaya. Jadi

kalau ditanya pada prosentase, semua berita di Jakarta yang punya impact cukup luas bagi kemaslahtan, dan harkat orang Surabaya atau orang Jawa Timur, kita akan tempatkan dia lebih utama. Sementara untuk informasi Surabaya, kalau dia punya impact cukup luas, dia juga bisa jadi utama. Jadi belum tentu berita di Surabaya kita prioritaskan sebagai berita sajian Surabaya, tetapi belum tentu juga berita dari Jakarta itu tidak punya dampak besar bagi Surabaya. Jadi agak sulit kalau dibilang prosentase, dari segi prioritas ya, tapi untuk proporsi tentu saja proporsi Surabaya lebih luas, bisa dibilang 60, 40.

Q: Berarti tolok ukurnya dampak ya, dalam membuat sebuah berita?

A: Iya, dampaknya, karena kalau kita buat berita harus kita perhitungkan juntrungnya kemana sih..Sori kalau aku bilang istilahnya kepuasan pribadi, kalau dalam lingkup latihan kami, itu dibilang onani, hanya untuk kepuasan diri sendiri, aktualisasi diri. Karena kita yang membuat, untuk diri kita sendiri, bukan tapi sesuai kesepakatan kita, kita lakukan untuk eksternal client yaitu pendengar, dampaknya ke pendengar. At least to inform lah, itu cita-cita kami yang paling sederhana, paling tidak mereka tahu, lebih jauh lagi mereka bisa bersikap dan bisa berbuat.

**Wawancara (Jumat, 26 Mei 2006 pk.15.45 melalui telepon)**

Q: Mas, bisa dijelaskan tentang edisi LKM tanggal 23 mei kemarin yang mendadak topiknya diganti. Itu dari topik apa menjadi apa, dan mengapa?

A: Ya, jadi tentang edisi LKM tanggal 23 itu, kita semula membahas tentang jurnalisme infotainment, khususnya dari aspek etika dsb, tapi tahu-tahu kita mendapat informasi dari lingkup DPRD Surabaya, ada lontaran ide dan wacana, DPRD mengalokasikan dana untuk menggaji wartawan yang ngepos disana. Nah ternyata informasi ini berkembang, karena kita mendapat kabar juga, untuk menkonkretkan keputusan itu sempat dibahas dengan sejumlah wartawan, 15 orang. 15 orang inilah yang kemudian terlibat diskusi langsung dengan kawan-kawan anggota dewan. Nah kita laporkan, sebagai follow upnya kita langsung banting stir karena isunya lebih hot itu ketimbang infotainment.

Q: Sebab diganti itu lebih hot karena aktual dan peristiwanya terjadi hari itu juga?

**Lampiran 10 : Transkrip wawancara dengan Iman Dwihartanto, produser dan penyiar program *talkshow* “Diskusi LKM” (sambungan)**

A: Kita ngga melihat itu dari segi aktualnya namun dari segi news valuenya lebih tinggi itu dari infotainment. Waktu itu kita juga sedang hangat-hangatnya membahas tentang kode etik jurnalistik, satu diantaranya adalah pasal 1 dimana wartawan atau jurnalis itu harus independen dan tidak terpengaruh suap. Dari perspektif menggaji wartawan itu, goalnya apa, itu satu. Kedua, rawan terhadap independensi. Ketiga itu uang rakyat, kok dipakai menggaji wartawan yang semestinya mendapat perhatian dari institusi dimana dia bernaung. Kita berusaha menempatkan porsi tema wartawan digaji itu, pada saat tanggal 23 karena alasan seperti itu. Wartawan harus menjadi watchdog dan waktu itu kita menyalak atau menggonggong, pada saat ada kecenderungan anggaran negara atau uang rakyat dipakai untuk hal-hal yang tidak semestinya. Sempat ada juga pro kontra dari jurnalis sendiri, bahkan ada yang protes ke kita lewat mailist, sms langsung ke bersangkutan, alasannya sih untuk meningkatkan kesejahteraan. Kita dapat kesempatan wawancara dengan Imam Abror, PWI, juga sempat ngobrol dengan AJI, dengan Iman, dan juga dengan anggota Dewan Pers, Pak Hinca Pandjaitan. Dan tiga person ini yang vokal terhadap rencana menggaji wartawan, karena ngga ada itu istilahnya. News valuenya lebih tinggi, dan watchdog itu yang kita ambil momentumnya.

Q: Kalau dikaitkan dengan visi misi SS sebagai pemberdayaan dan demokratisasi masyarakat. Apakah topik tentang penggajian wartawan ini lebih mengarah pada proses pendemokratisasian?

A: Betul, jadi kalau dihubung-hubungkan dengan demokratisasi, itulah wujud independensi dimana kita bisa menyampaikan aspirasi sebagai peran media yang betul-betul the real thing. Begitu kita menjadi soko keempat, sebagai pengontrol legislatif dan eksekutif, sebab di jaman-jaman dulu saat demokratisasi itu cukup santer, kan demokratisasinya semu, kemarin itu betul-betul terwujud kita berhasil menggagalkan rencana itu. Kalau keputusannya jadi menggaji, itu jadi lain kan.

Q: Di jeda waktu yang sangat mepet antara pergantian itu, bagaimana persiapannya, mungkin mas Iman sebagai produser?

A: Persiapannya langsung saat itu juga, jadi last minute preparation kita lakukan, karena waktu itu pak Henri sudah menghadirkan Pak Anang, wakil ketua KPID, tapi saat itu kapasitas beliau sebagai wakil

ketua KPID sekaligus pengajar komunikasi, dan kapasitasnya tetep kita pakai, dari perspektif KPID dan seorang pengajar, dan seketika itu juga mbanting stir untuk ganti topik.

Q: Menyiapkan referensinya...

A: Kita sudah punya semua. Waktu kita dapet sudah ada referensi pertama dari Iman, itu sudah dapat dari reporter. Kemudian dari PWI sudah dapat langsung dari penyiar, terus kemudian reporter juga dari wakil walikota Bapak Arif Affandi, nah langsung kita follow up, dewan pers nya kayak apa. Tidak berpikir dua kali tentang siapa yang akan kita hubungi, karena ini yang berkompeten bukan apa kata jurnalis tapi bagaimana dewan pers, ya langsung Hinca Pandjaitan.

**Lampiran 11 : Transkrip wawancara dengan Henri Subijakto, Direktur Lembaga Konsumen Media (LKM) (Selasa, 21 Maret 2006 pk.16.45 di Radio Suara Surabaya, Jl.Wonokitri Besar no.40C Surabaya)**

Q: Pak, apa sih tujuan dari program LKM, dan kenapa kok memilih SS sebagai media untuk berdiskusi tentang media massa?

A: Anda tanya Pak Errol dan Pak Toyo ya bahwa SS ini ingin menjadi lembaga penyiaran yang memfasilitasi informasi-informasi dari publik, memfasilitasi publik untuk berperan aktif menyampaikan berbagai macam informasi dan pendapatnya ke masyarakat lain maupun kepada pemerintah. Saya seringkali mengatakan SS ini justru menjadi local, virtual local parliament, jadi parlemen lokal yang maya, banyak orang memberi masukan pada pemerintah daerah, pemerintah kota, intinya seperti parlemen saja. Tapi itu yang menjadi keinginan temen-temen pengelola SS, bahwa membangkitkan semangat partisipasi masyarakat sekaligus memberikan layanan informasi tentang apa yang sedang terjadi baik itu di jalan maupun dimana-mana. Dalam konteks ini, LKM ikut mendukung partisipasi itu tapi dalam persoalan-persoalan media, memanfaatkan media, demokratisasi media, media literasi, supaya masyarakat melek, atau paham terhadap persoalan media, kritis terhadap isi media, itu yang kami lakukan. Dulu awal-awal itu saya dengar bahwa banyak orang tidak habis pikir kenapa SS itu kok malah memelihara macan yang nantinya bisa mengkritisi SS sendiri. Tapi justru itu yang menjadi kelebihan SS yang terbuka, bahwa SS ternyata bisa menjadi wahana untuk mencerdaskan masyarakat, sekaligus wahana untuk mengkritik media termasuk dirinya sendiri. Nah itu yang kekhasan SS, tidak semua media mau melayani seperti itu. Yang penting, kami LKM difasilitasi di SS itu berarti SS menjadi kritikan-kritikan itu, tidak lalu panas kuping terus ditutup.

Q: Menurut Bapak, apakah visi SS ini sejalan dengan visi LKM, sehingga LKM diberi tempat khusus lewat program ini?

A: Bapak Soetojo Soekomihardjo itu punya misi membangun bahwa radio itu ditempatkan sebagaimana idealnya. Membangun sistem penyiaran dimana radio ditempatkan secara ideal. Itu pak Toyo, dan itu diterjemahkan oleh mas Errol dalam program-program. Nah kami di siaran LKM seringkali bicara juga bagaimana membangun sistem penyiaran yang ideal, yang demokratis, sebagaimana yang diperjuangkan oleh pemilik SS, pak Toyo, sehingga sebenarnya match, makanya sering kita mengkritik peran KPID, peran pemerintah yang ingin masuk terlalu jauh dalam dunia penyiaran, sama persis. Memang ada kesamaan, lebih banyak kesamaan...

**Lampiran 12 :Transkrip wawancara dengan Wismanti, produser program talkshow “Bedah Layanan Publik” (Kamis, 25 Mei 2006 pk.09.50 di Radio Suara Surabaya, Jl.Wonokitri Besar no.40C Surabaya)**

Q: Bagaimana pemahaman mbak wis tentang visi dan misi SS?

A: Ya, intinya memang kan sebuah dunia radio yang aku tahu sejak masuk SS itu, tidak hanya sekedar orang diberi hiburan, tapi setiap orang kan juga harus berkembang. Jadi selain hiburan orang itu juga butuh informasi, dulu mungkin ketika ada media yang hanya memberi acara diskusi atau *talkshow* itu kita kan ngga ngeh, ngga ada perhatian. Tapi sekarang orang justru banyak yang ingin tahu apa yang terjadi saat sekarang, informasinya tetang apa, itu mereka sudah mulai punya kerinduan untuk ke arah sana. Bahkan kalau ngomong soal aturan-aturan, itu kan warga ngga begitu peduli, ok kamu pemerintah bikin aturan apa terserah, pokoke aku warga kota hidup begini, tapi kan sekarang dia ngga bisa apatis, tidak peduli dengan peraturan yang ada. Kalau pemerintah atau pembuat kebijakan itu ngomong soal aturan aku harus tahu, itu kan semakin membuat orang ngga boleh ngga peduli dengan adanya informasi. Yang kedua, unsur pendidikan, edukasi, solusi juga harus ada. Jadi ketika orang mendengarkan Suara Surabaya, itu tidak hanya sekedar anda mendapat hiburan, tetapi anda mendapatkan semuanya. Juga disitu anda diberdayakan. Kalau orang bilang, apa sih solusi? Solusi itu dalam artian, bukan hanya SS memberi solusi tapi intinya disitu anda juga berdaya untuk ikut terlibat dalam merealisasikan adanya solusi itu. Ngga hanya sekedar datang dengan komplain dan lapor, tapi anda juga harus ikut terlibat untuk supaya solusi itu ada, misal ada orang komplain tentang: “mbak ini ngurus gini gini..”, anda ternyata hanya sekedar protes, tapi anda tidak mau ikut berdaya untuk lho ini ada aturannya, penuhi dulu itu. Maka itu juga akan tercapai solusi atau keinginan anda supaya urusannya anda bisa selesai. Jadi disini SS ingin semuanya, jadi dalam artian bukan hanya hiburan, tapi juga edukasi, informasi, ada pemberdayaan warga masyarakat.

Q: Kalau tentang program Bedah Layanan Publik, latar belakang adanya program ini kenapa?

A: Sebelum program Bedah Layanan Publik, kan program Otoda, otonomi daerah tapi karena isu-isunya, gaungnya sudah tidak ada, selain itu relevansinya sudah tidak ada, maka perlu dievaluasi. Kebetulan kan tahun ini, Perda Pelayanan Publik di Jawa Timur, itu kan Perda dari hak inisiatif dewan, lagi digagas dan sebetulnya sudah ada pengesahan cuman ini kan masih belum diterapkan di beberapa daerah. Dalam satu tahun ke depan ini, masih dalam proses sosialisasi ke daerah-daerah untuk Perda Pelayanan Publik. SS ingin ketika mereka sosialisasi, ayo kita juga ikut nimbrung, untuk ngomong soal bedah pelayanan publik, karena kan tiap orang ternyata ngga tau ketika mereka juga punya hak untuk dilayani, warga itu kan ndak tau. Dan pemerintah sendiri, itu kebanyakan pejabatnya juga ngga tau kalau dia punya hak dan kewajiban untuk melayani. Jadi kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, seringkali mereka kan begitu. Jadi ini masih belum banyak yang tahu, dan ternyata dari keinginan temen-temen DPRD untuk Perda Layanan Publik, itu bukan hanya untuk institusi pemerintah untuk memberikan layanan terbaik, tapi juga untuk institusi swasta. Kan kenyataan, kalau misalnya orang ngurus KTP itu cuma bayar 3 ribu, kenyataan di lapangan kan ngga segitu, masih ada permainan-permainan, padahal meskipun tidak ada Perda Pelayanan Publik, itu jadi kewajiban mereka untuk berikan pelayanan, tapi ternyata kenyataan di lapangan kan ngga ada. Ya itu yang pengen kita bongkar sebenarnya gimana sih, eh kamu sebagai sebuah institusi, ini sudah ada Perda, meskipun tidak ada Perda kamu harusnya kan melayani, apalagi ini ada Perda. Perda itu mengatur sanksi dsb, makanya kita coba bedah layanan publik di setiap institusi supaya masyarakat tahu. Misalnya kita undang PLN, pelayanan Puskesmas, PU Bina Marga..

Q: Terkait dengan visi misi, SS sebenarnya pengen apa sih lewat program ini?

A: Masyarakat supaya juga tahu, bahwa tidak hanya sekedar ngeluh aku ini layanano, tapi di pelayanan publik itu juga mengatur sanksi bagi masyarakat, itu ketika kamu ngurus sesuatu juga ada aturan yang harus dipenuhi, ayo sama-sama terlibat. Lalu ketika kamu tidak mendapat pelayanan yang baik, jangan diam, terlibat'o, dalam artian mengkritisi: lho katanya perda nya ngomong demikian, tapi kok aku tidak mendapat apa-apa. Kan selama ini kan ada masyarakat yang mendapat ketidak enakan, itu diam saja, tidak di follow up. Itu artinya kan dia tidak memberdayakan dirinya sendiri, padahal dia tahu dia itu punya hak, hak untuk berbicara, untuk

## **Lampiran 12 :Transkrip wawancara dengan Wismanti, produser program talkshow “Bedah Layanan Publik” (sambungan)**

ngomong, untuk protes sebagai orang yang dilayani. Tetapi dalam artian tidak hanya sekedar kamu protes, kamu juga harus berdaya apakah protesmu itu memang sudah sesuai aturan, katakanlah kamu mau ngurus KTP, itu kan ada harus minta surat RT/RW, menyatakan penduduk di situ, terus nanti ke kelurahan, ke kecamatan. Ternyata yang selama ini mungkin hanya sekedar ngomong ingin dilayani, tapi tidak berdaya dalam artian dia belum memenuhi syarat-syarat itu. Jadi kalau kamu mau dilayani hakmu, ayo sama-sama, kamu juga ada aturan. Nah ketika kamu sudah memenuhi segala aturan ini dan kamu tidak mendapat layanan, jangan diem, teriak'o dan protes. Karena kewajiban pemerintah untuk itu.

Q: Yang menentukan instansi mana yang diundang, SS sendiri atau pemprov sebagai pembuat Perda tersebut?

A: SS sendiri..

Q: Ada kesulitan mungkin ada instansi yang menolak untuk diundang dalam program ini? Kalau menolak, sikap SS bagaimana?

A: Iya pasti karena mereka tidak siap institusinya dibongkar. SS juga tidak bisa memaksa, kalau mereka tidak mau berarti mereka sendiri tidak mau maju. Kalau ada institusi yang tidak malu dikritisi, berarti dia selangkah lebih maju dan tidak akan ditinggalkan masyarakat. Kalau ada institusi yang ngga mau dibongkar, dalam artian apa yang terjadi di institusinya, itu berarti kan dia harus siap, sebentar lagi ditinggalkan masyarakat kalau sudah tidak ada kepercayaan.

Q: SS sendiri tidak berusaha mengingatkan bahwa ini penting?

A: Kita sudah berusaha dan sebenarnya mereka sudah tahu tentang Perda itu, cuma tahunya belum mendetail kalau itu nanti ada sanksi. Dan sebenarnya masyarakat kalau mau komplain dengan membawa bukti-bukti, juga akan dibantu, baik itu lapor ke institusi bersangkutan atau lapor ke LPKS, lembaga perlindungan konsumen. Jadi masyarakat tidak hanya ngomong tapi juga punya bukti nyata sehingga bisa dibantu

Q: Media itu kan punya fungsi kontrol, sebagai watchdog, apakah melalui program ini SS menjadi pengontrol institusi publik?

A: Iya, dan ketika kita undang sebuah institusi berarti itu kan sudah didengar kalau apa yang terjadi di institusi tersebut. Misalnya ngomong sama PLN, tanya seperti apa sih layanannya? Orang pasang baru itu gimana, apa syarat-syaratnya? Yang selama ini orang ngga begitu tahu, karena hanya ngurus lewat orang lain, ternyata biayanya lebih mahal. Ya jelas lebih mahal, coba ngurus sendiri. Tapi kalau ngurus sendiri, lalu dipertanyakan, gimana? Ya ngomong aja ngga papa. Kalau dia ngomong di media begini-begini, tapi ternyata di lapangan kenyataannya ngga begitu, masyarakat bisa ngomong: “Lho kemarin bapak ngomong di radio begini..”, itu bisa jadi feed back. Dan mereka ketika ngomong disitu, mereka akan berpikir seribu kali ketika coba-coba di lapangan kenyataannya ngga begitu. Ketika mereka ngomong di radio, itu kan mereka artinya sudah mulai membuka diri, dan itu kan juga memberdayakan instansi publik itu. Era ini ngga bisa, harus terbuka dengan masyarakat.

Q: Ketika on air, apakah ada kecenderungan narasumber untuk menutupi fakta? Dan kemudian apa yang harus dilakukan penyiar?

A: Itu tergantung dari pertanyaan penyiar, kita coba mbongkar. Kalau dicoba nutupi pasti kentara, dia pasti akan membelok. Makanya sebagai produser aku membuat question route, goal nya mau kemana.

Q: Bagaimana mengontrol program ini apakah sudah mencapai pemberdayaan dan demokratisasi masyarakat, baik itu warga maupun instansi publik?

A: Feed back nya dari masyarakat, dilihat dari respon masyarakat biasanya sudah nggak ada complain tentang itu, meskipun ada complain satu dua, itu kan biasa. Complain masyarakat berkurang tentang instansi publik tersebut, atau bisa lihat juga hasil.....Tapi SS ini tidak bisa

**Lampiran 12 :Transkrip wawancara dengan Wismanti, produser program  
*talkshow* “Bedah Layanan Publik” (sambungan)**

hanya dinilai pendengarnya rame, yang gabung banyak, kita kan yang perlu itu, bener ngga ini menyentuh masyarakat, dampaknya apakah sudah dirasakan masyarakat, aku sebagai produser masih belum tahu. Jadi selama ini yang diukur masih kuantitasnya saja yaitu dari jumlah pendengar yang masuk, tapi harus diukur kualitasnya juga, dan sebenarnya kalau ngomong soal kualitas itu masyarakat yang bisa ngomong bukan kita-kita.

**Lampiran 13 : Transkrip wawancara dengan Mustika Muhammad, penyiar program *talkshow* “Bedah Layanan Publik” (Sabtu, 27 Mei 2006 pk.07.35 di Radio Suara Surabaya, Jl.Wonokitri Besar no.40C Surabaya)**

Q: Bisa dijelaskan tentang visi dan misi SS menurut pemahaman mas Mustika sendiri?

A: Visinya kan pemberdayaan masyarakat, misinya juga ingin memberdayakan, artinya bagaimana masyarakat bisa berpikir kritis, dan SS mewadahi tentang itu dan buktinya pemberdayaan itu sudah mulai memunculkan orang itu sudah tidak takut untuk berbicara, orang tidak takut lagi untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah itu disana visinya, karena dengan pemberdayaan masyarakat maka sebuah civil society juga bisa terbentuk.

Q: Terkait visi dan misi, melalui “Bedah Layanan Publik” ini, SS pengen pendengarnya jadi seperti apa?

A: Ya, supaya masyarakat tahu hak mereka tentang sebuah pelayanan di sebuah institusi pemerintah maupun swasta. Artinya berangkat dari sebuah Perda yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan juga DPRD Jatim, tentang masih adanya masyarakat yang tidak paham bahwa mereka punya hak terhadap sebuah layanan, tapi masalahnya masyarakat tidak tahu hak saya seperti apa. Ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan sebuah pelayanan dan regulasi itu ada, mereka bisa menuntut.

Q: Kalau dari sisi instansi, SS ingin mereka menjadi seperti apa lewat program ini?

A: Ya, goalnya harus lebih meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Ini lho masyarakat pengen pelayanan yang seperti ini, apakah kamu juga sudah sesuai dengan standard seperti itu. Nah, goalnya disana. Jadi instansi itu kita perkenalkan satu di antaranya sebagai sosialisasi tentang standard pelayanan mereka. Dan apakah standarisasi yang mereka miliki sudah sesuai dengan konotasi di masyarakat, kita cross dengan apa yang ada di masyarakat.

Q: Latar belakang program ini apa? Sebelumnya kan otoda, kenapa memilih isu layanan publik sebagai pengganti otoda?

A: Ada 2 kemungkinan setelah otoda ngga ada, yaitu tentang layanan publik, atau melanjutkan otoda. Tapi kita memantau pelaksanaan UU 32 tahun 2005, ketika menindaklanjuti ini mungkin agak kesulitan. Setelah diskusi, akhirnya lebih tertarik pada layanan publik, di satu sisi memanfaatkan momentum bahwa pemerintah provinsi sudah membikin sebuah perda, di sisi lain juga memberdayakan masyarakat supaya tahu hak-hak mereka tentang pelayanan, entah itu di institusi pemerintah maupun swasta. Tapi sejauh ini yang kita kedepankan adalah institusi pemerintah.

Q: Kenapa lebih memprioritaskan instansi pemerintah untuk diundang dalam program ini?

A: Ya, logikanya simpel. Kenapa kok pemerintah? Kalau pemerintah, mereka sangat terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat, ada perasaan bahwa masyarakat merasa memiliki lembaga itu. Itu di satu sisi. Sisi lain, kenapa kita tidak banyak memblow up institusi swasta, ini bukan *talkshow* pariwisata, misalnya dipakai untuk promosi, jualan.

Q: Jadi bukan karena institusi pemerintah itu pelayanannya dianggap lebih buruk mungkin dibanding swasta?

A: Oh, ngga. Bahkan kalau kita mau bedah, banyak institusi pemerintah yang sudah punya ISO tapi hal itu tidak banyak diketahui masyarakat, misalnya dr Soetomo, jasa marga dan masih banyak lagi. Dan kalau mau ngomong swasta, pelayanan mereka bisa dikatakan sudah fixed, sudah prima karena mereka orientasinya keuntungan

Q: Yang menghubungi narasumber kan SS sendiri, ada kecenderungan dari mereka untuk menolak diundang ke sini?

A: Kalau menolak ngga sih, kadang-kadang mungkin karena waktu yang mepet sehingga merasa tidak sanggup karena butuh persiapan. Itu yang pertama, jadi menolak ngga, rata-rata mereka keberatan itu karena waktu yang terlalu mendadak dan ketidak siapan mereka sendiri.

**Lampiran 13 : Transkrip wawancara dengan Mustika Muhammad, penyiar program *talkshow* “Bedah Layanan Publik” (sambungan)**

Q: Menurut mas mustika, apakah mereka keberatan dengan alasan-alasan seperti itu, karena mereka ngga siap untuk terbuka pada masyarakat, ngga siap untuk demokratis?

A: Saya rasa ngga, kalau dilihat ketidaksiapan itu bukan mereka ngga mau, karena ada kecenderungan ketika mereka hadir di SS, mereka akan dihakimi oleh masyarakat dengan adanya complain dsb, otomatis data dan sebagainya harus ada, misalnya narasumber kepala dinas, mereka membawa wakil bagian ini dan itu untuk memback-up data, nah mungkin ketidaksiapannya karena itu.

Q: Bisa diceritakan bagaimana pembagian peran antara mas mustika sebagai penyiar dan mbak wis sebagai produser ketika acara berlangsung?

A: Penentuan topik memang sepenuhnya mbak wismanti, tapi dalam hal merancang goalnya kemana dan apa yang dibahas itu kita diskusi, supaya nanti saya juga tahu goalnya apa. Dalam pelaksanaannya, mbak wis lebih sebagai supervisor mengawasi jalannya dialog ini, ketika misalnya ada sedikit penyimpangan dalam pembahasan, biasanya dia juga meluruskan. Posisi mbak wismanti lebih banyak di gate keeper karena dalam diskusi program ini, tidak ada complain, artinya penelepon yang masuk dan on air dia tidak dalam keadaan complain, tapi kita bener-bener diskusi tentang pelayanan publik. Jadi seorang pendengar yang masuk, misalnya sedang membahas PLN, tidak ada complain “kok lampu di rumah saya mati, padahal bayarnya ngga pernah telat”, tidak dalam kapasitas semacam itu. Itu ketika di on air, tidak ada complain, tapi di gate keeper bukan tidak mungkin ada complain, mbak wis kebanyakan di situ agar kita tidak kebobolan orang complain.

Q: Mengkritisi pelayanan itu, maksudnya gimana?

A: Mengkritisi sistem, memberi masukan-masukan kepada instansi itu. Misalnya di sebuah institusi dia sudah punya standar minimum pelayanan, tetapi ternyata dengan teori, yang mereka lakukan tidak sesuai dengan di lapangan. Ketika masyarakat pernah mengalami itu, dan dia kasih masukan: “mungkin sistem itu harus dirubah seperti ini, ada kecenderungan seperti ini...” apalagi kita juga menghadirkan narasumber pembanding, dimana dia juga mengkritisi tentang sistem itu.

Q: Sistem kontrolnya gimana? Bagaimana mengetahui apakah masyarakat termasuk instansi sudah berdaya lewat program ini?

A: Kalau menurut saya kontrol itu proses, tidak bisa dilihat saat itu juga. Karena selama ini masyarakat ngga tahu haknya, dan Perda itu menjawab permasalahan masyarakat yang tidak tahu sama sekali tentang haknya. Bahkan Perda itu sosialisasinya sampai saat ini juga kurang. Efek dari program ini baru bisa dilihat mungkin beberapa tahun ke depan. Tapi paling tidak disini kita ingin menunjukkan bahwa sebenarnya sebagai masyarakat, anda punya hak untuk dilayani. Kalau saat ini instansi pemerintah mulai ada perubahan paradigma mereka harus melayani, nah yang jadi pertanyaan di masyarakat, apakah anda sudah merasa terlayani oleh instansi pemerintah itu? Itu yang pertama, kemudian di instansi pemerintah sendiri, apakah anda sudah sebagai pelayan? Kalau sudah sebagai pelayan, seberapa jauh pelayanan anda diberikan kepada masyarakat?

Q: Fungsi media sebagai watchdog apakah juga berjalan dalam program ini, bahwa SS mengawasi kinerja instansi publik?

A: Iya, itu terlihat dari kita menghadirkan narasumber pembanding, kemudian kita mengkritisi pelayanan mereka, seperti itu....

**Lampiran 14 :Transkrip wawancara dengan Herru Soleh, Business Development Manager Suara Surabaya Media (Selasa, 21 Maret 2006 pk.14.50 di Radio Suara Surabaya, Jl.Wonokitri Besar no.40C Surabaya)**

Q: Bisa dijelaskan tentang makna corporate value Suara Surabaya?

A: Jadi corporate value itu sebenarnya kita bangun, kita kembangkan untuk menumbuhkan orang-orang internal di Suara Surabaya itu terutama karyawan agar dia bisa bangga bahwa kita punya perusahaan yang ABCD, yang kayak apa sih. Yang dalam corporate value yang kita punya itu, yang punya solidaritas antar unit sebagai kesatuan bisnis, jadi pengertiannya gini, kita ini satu, yang terdiri dari beberapa unit artinya kita tidak boleh ngomong ok deh mosaik aja, meskipun memang secara bisnis dia harus bersaing, bersaing dalam konteks tidak lagi menghambat, menghancurkan internal.

Berikutnya adalah sikap dan etos menghasilkan yang terbaik, ini kalau bicara tentang ukuran, SS media harus menghasilkan yang terbaik. Jadi kalau kita kerja, cuma baik-baik saja, ya itu biasa. Sehingga di internal itu implementasinya adalah kalau orang kerja itu baik dan sesuai dengan aturan, ya ngga perlu dipuji karena bekerja intinya adalah seperti itu, ketika membangun harus yang terbaik.

Kemudian berikutnya adalah memiliki integritas dan independensi, jadi ke dalam dia punya dedikasi terhadap profesinya, terus punya independensi, dalam konteks tertentu karena kita adalah media, maka sudah tidak selayaknya kita bisa dibeli. Misalnya karena dia diundang makan atau dikasih uang akhirnya fakta yang buruk tidak pernah diungkap. Kita tidak bisa diintervensi seperti itu, kalau memang faktanya A ya harus diungkap seperti itu.

Efisien dan efektif, semua perusahaan pasti menginginkan seperti itu.

Dedikasi terhadap profesi, kita ini ngga kerja, kalau aku lihat temen-temen ini bukan kerja. Kalau saya ingat, Mario Teguh itu bilang bahwa 24 jam itu dibagi 8 jam kerja, 8 jam bermain, 8 jam istirahat. Maka kita 16 jam bermain, kerja itu permainan kita, konteks itu akibatnya temen-temen ya harus bisa menjiwai bahwa di Suara Surabaya itu dia ngga kerja tapi dia harus membangun karya, sesuai dengan divisinya dia. Dia bagian apa, ya dia harus menghasilkan sesuatu, yang harus bermanfaat untuk internal dan juga eksternal.

Terus inovatif dan kreatif dalam berkarya, ini sebuah tuntutan yang secara rutin kita sampaikan ke temen-temen bahwa kalau kita hidup harus terus mencari referensi baru, mencari sesuatu yang belum pernah kita lihat atau temui.

Aktif dan selalu mengembangkan diri, ini memang PR kita bahwa setiap orang harus membangun kompetensi, setiap orang harus diperlihatkan ditunjukkan, istilahnya menjual diri dalam tanda kutip, bahwa orang lain itu tahu bahwa saya begini, saya bisa begini, saya mampu begini, sehingga kompetensi itu akan kelihatan. Karena kaitan dengan kompetensi itu kita punya alat yang namanya performance appraisal, dan kita menggunakan 360 derajat. Artinya kalau dia seorang staf, maka dia akan dinilai oleh atasan langsung dan tidak langsung, rekan kerja. Jadi saya ini atasan tidak langsungnya anak-anak reporter, atasan langsung nya kan mas iman, karena saya sama-sama manager sama mas iman, maka saya atasan tidak langsungnya mereka. Terus rekan kerja, misalnya mas rudi, dia bisa dinilai rekan kerjanya siapa yang satu level. Kita menggunakan itu agar setiap kompetensi, setiap orang, itu dinilai lebih objektif, bahkan diri sendiri juga ikut menilai. Ada form dimana dia harus menilai diri saya sendiri, jadi misalnya menurut saya sikap kerja seperti apa, saya orangnya suka bekerjasama...Nah di ujungnya nanti ada sebuah kalkulasi dimana dicompare antara saya mengukur diri sendiri dengan rata-rata orang mengukur kita. Kalau nilai kita terlalu bagus dibanding dinilai orang lain, berarti kan dia over PD. Diupayakan seimbang, jadi kompetensi orang itu sama-sama dilihat oleh orang lain.

Q: Ada tindakan dari manajerial ngga kalau nilai diri sendiri tidak imbang dengan nilai dari orang lain?

A: Kita review, setiap penilaian ini kita lakukan review, kenapa kok kamu lebih tinggi menurut kamu, sementara orang sekeliling kamu tidak melihat bahasa inggris kamu bagus. Berarti kan ada salah mengemas, atau mengkomunikasikan, atau salah menjual sehingga orang ngga tau kamu punya kemampuan. Jadi tidak berarti langsung negatif, tidak, artinya strateginya harus dirubah, kalau kamu punya potensi seperti ini dan kamu bagus, kamu harus kasih tahu lingkungan kamu, sehingga kamu tidak dinilai buruk. Ada perbedaan ukuran antara yang dipahami dia dengan

**Lampiran 14 : Transkrip wawancara dengan Herru Soleh, Business Development Manager Suara Surabaya Media (sambungan)**

dipahami orang lain, sehingga nanti kita lihat apa kekurangan dan kelebihan, lalu apa yang harus dilakukan oleh atasannya langsung, apakah dia harus ditraining atau didevelop di sisi lain. Dari tiga konsep tadi, dari penilaian kinerja atau performance appraisal tadi bisa menghasilkan career review, artinya orang itu karirnya apa perlu kita lihat, bisa saja dia tidak layak jadi staff karena nilainya bagus dan leadershipnya bagus, sehingga layak jadi supervisor. Terus kemudian, bisa saja menjadi alat untuk melakukan promosi, mutasi, maupun demosi. Ketika orang itu tidak cocok pada job description, pada performance yang diharapkan, bisa saja di demosi, diturunkan. Yang terakhir mungkin berkaitan dengan salary, biasanya

di akhir tahun kaitannya dengan kenaikan gaji, berdasar track record performance appraisal, bonus dsb. Termasuk apresiasi lain yang diberikan oleh perusahaan yang tidak diberikan dalam bentuk uang, misalnya training ke luar negeri, perjalanan dinas ke Jakarta atau kunjungan ke Broadcast Asia di Singapura. Kembali ke corporate value, diharapkan teman-teman internal memahami itu. Kalau kita dicompete dengan perusahaan lain, atau media lain saya punya ini semua, value ini yang kita punyai selain kredibilitas yang sudah diakui masyarakat. Employee harus bangga dengan ini, jadi dia harus bangga bahwa kita punya sikap integritas dan independensi, jadi kalau ngomong reporter misalnya reporternya SS itu ngga bisa dibeli, ngga bisa disogok. Bisa siih disogok, tapi dia akan teriak...

Wawancara (Kamis, 27 April 2006 pk.11.10 melalui telepon)

Q: Bagaimana SS sendiri memahami konsep pemberdayaan dan demokratisasi yang menjadi visi dan misi SS?

A: Konsep pemberdayaan itu lebih kepada membuat sesuatu dari mulai tidak ada, yang tidak berdaya menjadi berdaya. Contoh menggerakkan masyarakat untuk sadar bagaimana dia menggunakan sabuk pengaman. Di awal-awal kita memang kesulitan, walaupun itu program yang dicanangkan sama polisi, tapi dalam kenyataan, polisi tidak cukup punya tenaga untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan safety belt. Akhirnya kemarin programnya masuk Radio Suara Surabaya dan didorong dengan disampaikan ke masyarakat pengguna mobil, itu menjadi lebih mudah. Sampai muncul kritikan-kritikan, kemarin saya lihat polisi sendiri kok tidak pake sabuk pengaman, artinya proses itu juga internalisasinya harus berjalan, dari sisi institusi yang menggalakkan program itu maupun masyarakatnya jadi terbiasa, dan yang namanya demokratisasi yang kita bayangkan itu, dulu polisi ngga berani dikritik, tapi dalam tataran tertentu masyarakat secara demokratis mampu mengeluarkan pendapat untuk kebaikan tadi. Termasuk anjuran untuk memakai safety belt, anjuran-anjuran seperti itu yang mendorong proses pemberdayaan dan demokratisasi. Masih banyak contoh yang pernah dilakukan oleh Radio Suara Surabaya ketika itu, dinas pertamanan kota itu punya problem bagaimana mendorong masyarakat itu sadar akan memelihara tanaman dan mau menanam lingkungannya dalam target penghijauan. Dan kalau itu selalu diambil dari prospek yang up bottom jadi atas ke bawah, dari pemerintah sampai level RT/RW itu ngga jalan. Trus kita bikin program mari menanam pohon, waktu itu kita dorong masyarakat agar dari level rumah tangga, RT RW, kelurahan, itu meminta bibit pohon yang akan ditanam keluarganya, atau dia sendiri di rumahnya, atau di public area tempat dia tinggal dan itu dengan memberikan surat pernyataan bahwa dia sanggup merawat dan itu berjalan. Akhirnya pemerintah kota sendiri kewalahan dengan jumlah permintaan bibit pohon, nah pada sisi tertentu permintaan bibit pohon itu harus dipenuhi sebagai bentuk apresiasi akhirnya kita mengetuk masyarakat atau pengusaha, dalam hal ini yang punya uang lebih, ayo kita kumpulin uang untuk beli bibit pohon, eh ternyata 134 juta terkumpul, dan ini sebenarnya menggerakkan, ini kan proses empowering, dari sebelumnya masyarakat tidak mau menjadi mau dan membangun partisipasi masyarakat, itu adalah proses demokratisasi artinya bahwa pengusaha juga mulai berpikir, oh ya lahan gua mesti hijau juga ya. Itu bentuk-bentuk yang mungkin diimplementasi dalam program dari visi misi itu. Seringkali visi itu abstrak kan, tapi itu bisa kita implementasikan, contoh-contoh seperti itu.. Begitu juga PDAM yang tidak mampu digerakkan oleh masyarakat sendiri dengan complain, tapi dengan konsep di on airkan di Suara Surabaya mereka menjadi panik. Karena apa,

**Lampiran 14 : Transkrip wawancara dengan Herru Soleh, Business Development Manager Suara Surabaya Media (sambungan)**

karena fungsi media sebagai kontrol itu berjalan. 3 fungsi media itu selain hiburan, informasi, edukasi dan sekaligus kontrol terhadap masyarakat, yaitu institusinya maupun masyarakatnya.

## Lampiran 15 : Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

### Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

### Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
- b. Menghormati hak privasi
- c. Tidak menyuap
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

### Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

## Lampiran 15 : Kode Etik Jurnalistik (sambungan)

- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang

### Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul

Penafsiran:

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara

### Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan

Penafsiran:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah

### Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap

Penafsiran:

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi

### Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya
- d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan

### Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

**Lampiran 15 : Kode Etik Jurnalistik (sambungan)**

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan

**Pasal 9**

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik

**Pasal 10**

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa

Penafsiran:

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok

**Pasal 11**

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional

Penafsiran:

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki

**Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers  
Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers**

**Lampiran 15 : Kode Etik Jurnalistik (sambungan)**

Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI)-Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)-Uni Z Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)-OK.Syahnan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK)-Dasmir Ali Malayoe
6. Federasi Serikat Pewarta-Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia(GWI)-Fowa'a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)-RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)-Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Bekti Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBABA)-Boyke M.Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)-Kasmarios SmHk
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)-M.Suprpto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)-Sakata Baru
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI)-Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)-A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI)-Hans Max Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)-Hasnul Amar
19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI)-Ismed Hasan Potro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)-Wina Armada Sukardi
21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)-Andi A.Mallarangan
22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)-Jaja Suparja Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI)-Ramses Ramona S
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI)-Ev.Robinson Togap Siagian
25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)-Rusli
26. Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat-Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)-Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI)-Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII)-Gunarso Kusumodiningrat

## Lampiran 16 : Standard Profesional Radio Siaran

### STANDAR PROFESIONAL RADIO SIARAN

#### Prakata

Standar Profesional ini adalah perwujudan dari *swakrama (self regulation)* industriradio siaran, yang disusun, dikembangkan, serta disosialisasikan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik PRSSNI, sebagai pedoman bagi penyelenggaraan radio siaran.

Pedoman ini dievaluasi dengan saksama setiap tahun, agar sesuai dengan perkembangan masyarakat, negara dan kemajuan teknologi industri radio siaran. Pedoman ini juga menjamin kebebasan berkreasi, berekspresi, dan menjalankan bisnis, serta untuk beroperasi sesuai kebijakan tentang kebebasan individu yang sejalan dengan tanggungjawab sosial.

Kebebasan yang disertai tanggungjawab, adalah prinsip bagi penyelenggaraan penyiaran radio siaran dalam rangka mengutamakan kepentingan, kenyamanan dan kebutuhan masyarakat. Pedoman ini mengarah pada standar profesionalisme radio siaran yang tinggi.

#### A. MUKADIMAH

Radio siaran adalah saluran bagi kebebasan informasi, pertukaran gagasan, pertukaran opini, hiburan, pendidikan dan periklanan bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan peran tersebut, radio siaran mengutamakan kepentingan umum atas dasar nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan budaya masyarakat, serta hukum yang berlaku.

Standar Profesional Radio Siaran disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas sehingga terbentuk radio siaran yang terpercaya dan profesional.

#### B. STANDAR PROGRAM

##### I. Pemberitaan

##### I.i. Ketentuan Umum

- 1) Pemberitaan haruslah ditangani secara profesional dengan memegang teguh prinsip **faktualitas, aktualitas, akurasi, keseimbangan** dan **keadilan**. Selain itu, hal-hal di bawah berikut pun harus dipertimbangkan.
  - a. Pemberitaan harus menghindari rincian tindak kekerasan dan seks yang mengerikan, sensasional, dan menggegerkan yang tidak penting bagi kefaktualan laporan.
  - b. Informasi mengenai penderitaan dan kesedihan yang dialami manusia, seperti bencana alam, kecelakaan, kekerasan atau korban kejahatan seksual, harus dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan sensasionalitas dan pelanggaran hak privasi individu.
  - c. Pemberitaan tidak boleh menimbulkan kepanikan atau kekhawatiran di dalam masyarakat sehingga memberi peluang bagi spekulasi untuk mengambil keuntungan dari suatu situasi yang tak menyenangkan.
  - d. Bila terdapat kesalahan dalam pemberitaan, maka ralat harus disiarkan sesegera mungkin dengan penempatan yang cukup menarik perhatian dan disertai permintaan maaf jika dibutuhkan.
  - e. Dalam masalah yang kontroversial, pemberitaan haruslah objektif, seimbang, adil dan tidak bertendensi mengarahkan khlayak untuk mendukung atau menolak pihak tertentu, baik dengan cara yang eksplisit atau mencolok dengan bahasa narasi yang

## Lampiran 16 : Standard Profesional Radio Siaran (sambungan)

- f. dibawakan *broadcaster* maupun dengan cara yang halus atau terselubung seperti dengan pemilihan narasumber, urutan penyajian, atau pemilihan kata-kata tertentu.
- 2) Pemberitaan harus mempertimbangkan keamanan nasional, norma-norma sosial dan budaya masyarakat setempat serta hukum seperti hukum yang berkenaan dengan fitnah, menjelekkan nama orang, penghinaan, pelanggaran wilayah, serta hak privasi.
- 3) Selain tidak boleh melanggar hak konstitusional siapapun, pemberitaan harus menghindari kecenderungan *trial by the press*.

### I.ii. Sumber Berita

- 1) Pemilihan dan penanganan sumber-sumber berita haruslah dilakukan secara profesional karena integritas dari berita dan reputasi radio sebagai media berita yang dominan dan berimbang sangat tergantung pada kehandalan sumber-sumbernya. Untuk itu, stasiun radio perlu memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. *Suara* sumber berita yang disiarkan harus benar-benar berasal dari sumber ybs dan dapat diidentifikasi.
  - b. Sumber berita dari *press release* harus dapat diidentifikasi. Sebelum diutarakan, berita yang berasal dari *press release* itu pun harus dipastikan telah mengikuti kaidah jurnalistik.
  - c. Siaran berita boleh menggunakan sumber berita primer ataupun sekunder. Sumber berita primer adalah sumber langsung di mana informasi berasal. Sementara, sumber sekunder adalah sumber tak langsung di mana sumber informasi telah menyampaikan informasinya pada orang penghubung atau pada media lain yang kemudian direkam.
  - d. Sumber informasi sekunder yang direkam dalam media lain (cetak, audio maupun audio visual), harus diperiksa terlebih dahulu sebelum disiarkan untuk menjamin keakuratan fakta yang hendak dilaporkan.
  - e. *Broadcaster* harus memberi perhatian ekstra pada kasus anak-anak sebagai sumber berita. Mereka tidak boleh diinterogasi untuk mendapatkan pandangan mengenai masalah privasi keluarga atau diminta mengungkapkan pendapat tentang hal-hal yang diperkirakan berada di luar batas kemampuan mereka.
- 2) Bila sumber berita adalah orang-orang terlibat dalam kejadian bencana, kecelakaan atau kejahatan maka perlakuan secara bijak harus diterapkan agar tidak menambah kegelisahan atau kesedihan.
- 3) Pemilihan sumber berita pun tidak boleh melanggar hukum. Seorang jurnalis yang mengetahui sebuah rencana kejahatan harus segera melapor pada pihak berwenang dan tidak boleh mengikuti pelaku kejahatan hanya untuk membuat *reportase* tentang kejahatan yang terjadi.

### I.iii. Teknik Menghimpun Informasi

- 1) Penghimpunan informasi harus dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan antara kepentingan masyarakat luas dengan hak privasi.
  - a. Hak privasi sumber berita harus dilindungi, tetapi bila sumber berita berhadapan dengan kepentingan masyarakat, maka kepentingan masyarakatlah yang harus diutamakan.
  - b. Dalam keadaan apapun, jurnalis radio harus dapat menjaga amanah sumber berita yang tak ingin dipublikasikan identitasnya.
  - c. Dalam keadaan apapun, jurnalis radio tidak boleh menyiarkan materi wawancara yang disepakati dengan narasumber sebagai hal yang *off the record*.
  - d. Penggunaan mike yang tersembunyi oleh seorang jurnalis untuk merekam atau menyiarkan kata-kata yang tidak disadari narasumber hanya dapat diterima jika materi jelas-jelas penting untuk kredibilitas dan otoritas cerita yang sangat berpengaruh terhadap kepentingan publik.

## Lampiran 16 : Standard Profesional Radio Siaran (sambungan)

- e. *Broadcaster* tidak boleh menyadap atau menggunakan *receiver wireless* untuk memperoleh informasi mengenai pesan yang tidak semestinya diterima pihak yang merekam kecuali untuk berita yang mempengaruhi kepentingan publik.
- 2) Ketika liputan dilakukan di tempat umum, kata yang diucapkan atau tindakan seseorang boleh disiarkan tanpa meminta izin terlebih dahulu.
- 3) Pernyataan pihak yang diwawancarai melalui telephon harus didasarkan atas izin yang bersangkutan sebelum disiarkan, *kecuali*
  - i. Pada kejadian langka atau khusus seperti investigasi terhadap pelaku kriminal di mana syarat di atas tidak dapat diberlakukan.
  - ii. Pernyataan pihak yang diwawancarai didapatkan melalui *phone-in shows*.

### I.iv. Pelaku

Editor dan reporter yang mengatur pengumpulan berita dan penyebarannya harus dipilih secara profesional, karena kinerja dan kredibilitas stasiun sangat tergantung padanya. Khusus untuk pembaca berita, ia haruslah menguasai bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau salah pengertian pada pendengarnya.

### I.v. Penempatan

Penyiaran program pemberitaan haruslah mengikuti jadwal yang telah diberlakukan pada masing-masing stasiun, kecuali *breaking news* yang boleh diudarkan setiap saat bila perlu.

### I.vi. Berita Duka Cita

- 1) Stasiun radio memegang kontrol editorial atas berita duka cita.
- 2) Sebelum menyiarkan berita duka cita, stasiun harus memastikan bahwa pemohon berita duka cita memiliki kartu identitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta surat keterangan dari ketua RT (Rukun Tetangga) setempat yang mendukung kebenaran berita
- 3) Berita duka cita harus disajikan secara sopan dan penuh penghargaan terhadap keluarga yang tengah berduka.
- 4) Materi program dan perilaku pembawa acara yang mendahului serta mengikuti berita duka cita harus dipertimbangkan secara bijaksana agar tidak menyinggung perasaan keluarga yang tengah berduka.

### I.vii. Lain - Lain

- 1) Berita harus dapat diidentifikasi dengan mudah oleh pendengar dengan memberikan *tune, sound effect* serta tanda-tanda pendukung khusus yang berbeda dari program lainnya.
- 2) Materi berita yang berasal dari kegiatan rekonstruksi yang dilakukan aparat diperbolehkan selama tidak merusak kenyataan. Selain itu, materi rekonstruksi harus jelas terdengar sebagai rekonstruksi bukan sebagai kejadian sesungguhnya sehingga pendengar tidak salah mengerti.
- 3) Pemberitaan radio tidak dibenarkan --bahkan jika hukum mengizinkan-- untuk mengidentifikasi atau memberi kontribusi apapun yang dapat mengidentifikasi anak-anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat kasus seksual baik sebagai korban, saksi mata atau tertuduh.
- 4) Penyiaran informasi yang dapat membahayakan hidup korban atau berkemungkinan menggagalkan usaha negosiasi dengan pembajak, penculik atau penyandera harus dihindari.

## Lampiran 16: Standard Profesional Radio Siaran (sambungan)

## Lampiran 16: Standard Profesional Radio Siaran (sambungan)

### II. Perbincangan (Talk)

Perbincangan atau *talk* adalah spirit radio siaran karena kekuatan medium ini mampu menjamin berlangsungnya arus bebas pertukaran pendapat yang ada dalam masyarakat secara langsung.

Program perbincangan di radio dapat membahas masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat ataupun masalah-masalah khusus dalam bentuk program konsultasi.

#### II.a. Masalah-Masalah Masyarakat

Ketika membahas masalah-masalah masyarakat, program perbincangan dapat mengambil bentuk :

- i. Wawancara
- ii. Debat
- iii. Diskusi
- iv. *News panel* yang melibatkan *Newsmaker* dan *Newsman*.
- v. Interaktif yang melibatkan publik secara langsung, termasuk program keluhan publik tentang berbagai masalah dan acara-acara yang bersifat konsultatif.

Pada bentuk-bentuk di atas, program perbincangan harus memenuhi ketentuan berikut ini.

- 1) Dalam pembagian waktu, *broadcaster* harus memberi kesempatan yang adil bagi masing-masing pihak yang terlibat.
- 2) Program Perbincangan harus disajikan dengan bahasa yang baik serta bebas dari *personal bias*, prasangka, ketidakakuratan, dan informasi yang menyesatkan.
- 3) Pendengar harus diberitahu bila dalam wawancara berlangsung perjanjian antara *broadcaster* dengan narasumber untuk membatasi pertanyaan-pertanyaan yang penting. Pendengar pun harus diberitahu bila narasumber meminta terlebih dahulu daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan dikeluarkan saat wawancara atau narasumber terlibat dalam proses *editing* atau *recording*.
- 4) Manajemen radio tidak dibenarkan memberi uang imbalan wawancara kepada pelaku kriminal yang belum dibebaskan. Manajemen radio pun tidak dibenarkan membayar mantan kriminal sebagai imbalan atas wawancara mengenai kejahatan yang dilakukannya. Perjanjian untuk membayar atau membayar saksi mata juga tidak dibenarkan sebelum hasil persidangan disimpulkan.
- 5) Pendengar yang ingin berpendapat melalui telephon harus disaring terlebih dahulu oleh penyiar yang bertugas atau awak stasiun yang berkompeten untuk memastikan legitimasinya. Setelah tersaring, ia pun harus diberi penerangan singkat tentang tata krama penyiaran.
- 6) Keluhan individu atau kelompok dibolehkan selama menyangkut kepentingan masyarakat.

#### II.b. Program Konsultasi

Program konsultasi adalah program yang bersifat konsultatif yang memberikan informasi untuk bidang dan masalah tertentu yang memerlukan persyaratan-persyaratan khusus.

##### II.b.i. Lingkup program konsultasi antara lain :

Kesehatan

## Lampiran 16 : Standard Profesional Radio Siaran (sambungan)

Hukum  
 Keluarga dan Perkawinan  
 Profesi  
 Hobi

### II.b.ii. Persyaratan Pengisi

Pengisi acara program konsultasi harus dipilih oleh manajemen stasiun dengan dasar pendidikan khusus yang sesuai dan atau pengalaman yang telah diakui secara luas.

Program konsultasi harus memenuhi ketentuan berikut ini.

- 1) Pembahasan materi konsultasi terutama konsultasi seks harus diarahkan untuk menggunakan bahasa ilmiah.
- 2) Pendengar yang ingin berpendapat melalui telephon harus disaring terlebih dahulu oleh penyiar yang bertugas atau awak stasiun yang berkompoten untuk memastikan legitimasinya. Setelah tersaring, ia pun harus diberi penerangan singkat tentang tata krama penyiaran.
- 3) Program konsultasi harus dapat menyediakan saran dari berbagai perspektif yang ada terutama mengenai hal-hal yang kontroversial.

### III. Opini

Opini adalah segala bentuk pendapat dan tanggapan atas peristiwa, masalah, gagasan, cita-cita atau prakiraan, dalam wujud :

- i. Komentar
- ii. Analisis Berita
- iii. Editorial

Komentar dan Analisis berita merupakan opini dari pihak luar manajemen stasiun, sedangkan Editorial adalah pendapat resmi dari manajemen stasiun. Editorial adalah tanggung jawab stasiun sepenuhnya, sedangkan tanggungjawab komentar dan analisis berita selain dipegang stasiun juga dibebankan pada para kontributor. Komentar dan analisis berita ditandai dengan pengungkapan nama penulis secara jelas. Informasi yang disampaikan komentar dan analisis berita dapat dibedakan di mana analisis berita memberi penjelasan yang lebih komprehensif dan mendalam dari sebanyak mungkin aspek serta sudut pandang yang ada, sedangkan komentar relatif hanya dari satu atau beberapa sudut pandang tertentu saja.

Program opini harus memenuhi ketentuan berikut ini.

- 1) Komentar, Analisis Berita dan Editorial harus disebutkan dengan jelas dan dilengkapi dengan *tune*, *sound effect* serta tanda-tanda pendukung khas yang dapat membedakan antara ketiganya.
- 2) Program yang menampilkan berita dan opini dalam satu paket harus memiliki pemberitahuan terlebih dahulu yang membuat pendengar dapat mengidentifikasi masing-masing atau diberi "sekat pembeda" antar keduanya.
- 3) Pembicara, penulis dan sumber lain untuk komentar, analisis berita harus dapat diidentifikasi dengan jelas.

## Lampiran 16 : Standard Profesional Radio Siaran (sambungan)

- 4) Manajemen radio harus memastikan bahwa orang yang menangani program opini memiliki kemampuan, keahlian, kualifikasi serta diberi wewenang untuk melakukannya.
- 5) Manajemen radio harus memastikan bahwa program opini disajikan hanya untuk memenuhi kepentingan masyarakat pendengar.
- 6) Isu yang kontroversial dalam masyarakat harus disajikan dalam program opini secara adil, dan tidak memihak. Radio dalam hal ini berkewajiban untuk menyediakan kesempatan bagi beragam pandangan dari orang-orang yang *qualified*.
- 7) Serangan terhadap pribadi, penghinaan dan pelecehan tidak diperkenankan masuk dalam materi program opini.
- 8) Manajemen radio harus menghindari serangan terhadap sesama *broadcaster* atau stasiun lain karena hal itu merupakan aktivitas yang tidak etis.
- 9) Bahasa yang digunakan dalam program opini haruslah sopan, tidak vulgar, cabul dan menghasut.
- 10) Sebagai usaha perlindungan terhadap stasiun radio, program opini harus memiliki bukti siar berupa rekaman yang harus disimpan sekurang-kurangnya selama 90 hari setelah hari pengudaraannya.

### IV. Pemilu (Siaran Kampanye)

- 1) Di waktu pemilu, program politik harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara radio harus mem-brief / memberi penjelasan secara singkat kepada kandidat politik sehingga dipastikan kandidat politik memahami etika dalam dunia penyiaran.
- 2) Saat periode kampanye yang sah, stasiun radio harus menyediakan kesempatan yang sama bagi partai-partai politik untuk mengemukakan ide-idenya. Namun demikian, ketentuan ini tidak harus berarti bahwa kesempatan bagi partai-partai politik itu diberikan secara cuma-cuma.
- 3) Karena memanfaatkan sumber daya alam milik publik, stasiun radio tidak boleh menjadi media partisan.
- 4) Stasiun radio juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap para peserta pemilu.
- 5) Radio harus memastikan bahwa pertimbangan utama dalam menyiarkan informasi politik adalah kepentingan masyarakat pendengar.

### V. Seks, Kekerasan, Kesopanan dan Kesusilaan

#### V.a. Seks

- 1) Penggambaran hubungan seks sebelum atau di luar nikah tidak boleh terkesan bahwa tindakan tersebut dapat dimaafkan atau dibenarkan.
- 2) Materi tingkah laku hubungan seks secara eksplisit atau segala tindakan hubungan seksual yang menyimpang tidak diperkenankan untuk disiarkan.

#### V.b. Kekerasan

- 1) Penggambaran kekerasan dalam siaran tidak boleh mengesankan kekerasan sebagai hal yang dibanggakan atau dihargai.
- 2) Program tidak boleh berisi hal-hal yang tidak sesuai dengan selera yang baik, kesopanan atau sesuatu yang mungkin mendorong atau merangsang tindak kriminalitas atau mendorong terjadinya kekacauan atau melanggar perasaan publik

## Lampiran 16 : Standard Profesional Radio Siaran (sambungan)

### V.b.i. Kekerasan terhadap perempuan

1. Stasiun radio tidak diperkenankan untuk menyiarkan materi yang berkesan menyetujui, mengembangkan atau membanggakan kekerasan terhadap perempuan.
2. Stasiun radio harus secara bijaksana mempertimbangkan materi agar tidak mengembangkan citra adanya hubungan antara perempuan dalam konteks jenis kelamin dengan perempuan sebagai korban kekerasan.

### V.b.ii. Kekerasan terhadap kelompok tertentu

Stasiun radio tidak diperkenankan menyiarkan materi yang berkesan menyetujui, mengembangkan atau membanggakan kekerasan atas dasar ras, etnis, agama, jender, umur atau kecacatan mental atau fisik.

### V.c. Kesopanan dan Kesusilaan

- 1) Lelucon yang tidak sesuai dengan selera yang baik atau nilai-nilai kesopanan harus dihindari. Merupakan suatu hal tidak baik bila lelucon didasarkan pada karakteristik tertentu seperti ras, gender dan cacat fisik.
- 2) Dialog atau kata yang cabul, menghina, kotor dan vulgar tidak diperkenankan untuk disiarkan.
- 3) Stasiun radio harus memperhatikan hukum yang berlaku tentang kesopanan dan kesusilaan.

### V.d. Penempatan

Meskipun tidak melanggar ketentuan di atas, siaran yang mengandung unsur seks dan kekerasan harus dihindari dari waktu dengar anak-anak

### V.e. Ketentuan di atas berlaku pada semua acara

## VI. Drama

- 1) Program drama harus memperhatikan kemungkinan pengaruh siaran pada semua anggota keluarga.
- 2) Manajemen stasiun harus membuka peluang bagi perkembangan program drama yang inovatif dan kreatif.
- 3) Program drama harus menonjolkan moral, nilai-nilai sosial dan budaya bangsa.
- 4) Program drama harus mendorong terciptanya kualitas hidup masyarakat
- 5) Program drama harus menghormati dan menjunjung tinggi keragaman agama, budaya dan etnis

## VII. Program Anak

Program yang secara khusus dibuat untuk didengar anak-anak harus didasarkan pada konsep-konsep sosial yang sehat, yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penghargaan kepada orang tua, perlakuan wajar pada setiap orang, penghargaan terhadap hukum dan ketertiban; hidup bersih; moral yang tinggi, serta merefleksikan etika dan karakter Indonesia dan mengembangkan pemahaman anak-anak terhadap dunia. Selain itu, program anak harus memenuhi ketentuan berikut.

- 1) Program yang ditujukan bagi anak-anak harus mendorong seni berbicara dan pelafalan yang benar. Materi yang merusak perkembangan bahasa anak harus dihindari. Pelafalan bahasa yang tidak resmi (slang/prokem) dan bahasa yang tidak benar harus dihambat

## Lampiran 16 : Standard Profesional Radio Siaran (sambungan)

kecuali untuk kebutuhan pemeranan yang --dengan suatu cara-- harus pula diperlihatkan kesalahannya.

- 2) Akibat negatif pada masyarakat dan manusia harus pula ditampilkan dalam materi yang berisi kegiatan kriminal. P
- 3) Program anak harus berusaha melengkapi kebutuhan pengetahuan anak-anak.
- 4) Penampilan anak-anak dalam program anak harus seizin orang tua atau wali.

### VIII. Acara Kuis, Permainan (Games) dan Undian

- 1) Acara kuis, permainan (games) dan undian harus didasarkan pada prinsip keadilan bagi semua peserta
- 2) Acara kuis, permainan (games) dan undian tidak boleh mengeksploitasi pendengar.
- 3) Penentuan kemenangan dalam acara kuis dan permainan (games) sebaiknya didasarkan atas kemampuan peserta daripada kebetulan.
- 4) Stasiun radio sebagai penyelenggara harus tunduk terhadap aturan yang berlaku serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan.
- 5) Rincian acara kuis, permainan (games) dan undian termasuk peraturan, persyaratan, hadiah, tanggal di mulai/di akhiri harus diumumkan lengkap dan jelas. Nama pemenang dan masa pengambilan hadiah harus diumumkan secara jelas dan pasti, segera setelah acara kuis, permainan (games) dan undian berakhir.

### IX. Musik

- 1) Stasiun radio lewat program musiknya harus secara aktif mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan musik Indonesia.
- 2) Penyajian musik sebaiknya membuka alternatif pilihan yang mencerminkan selera dan keinginan masyarakat yang beragam.
- 3) Stasiun radio harus menghentikan pengudaraan rekaman lagu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, norma-norma sosial, budaya serta nilai keagamaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.
- 4) Stasiun tidak boleh dimonopoli oleh satu atau kelompok perusahaan rekaman tertentu dalam pemilihan materi musiknya.
- 5) Kebijakan penyusunan program musik merupakan tanggungjawab langsung stasiun radio dan tanggung jawab itu harus bebas dari dari segala bentuk campur tangan, dan intervensi kekuatan luar.
- 6) Merupakan tindakan yang salah bila *broadcaster* menerima uang, pelayanan atau barang sebagai imbalan menyiarkan suatu rekaman musik.
- 7) Manajemen stasiun radio bertanggungjawab untuk memastikan bahwa musiknya tidak dipengaruhi oleh pemberian uang, barang atau pelayanan dari pihak luar.
- 8) Menyiarkan tangga lagu (*top hits*) diizinkan asal tangga lagu itu benar-benar merupakan cerminan dalam masyarakat yang disertai referensi yang mendukung seperti jumlah penjualan, jumlah permintaan pendengar, dll.
- 9) Program musik yang diproduksi dan disponsori oleh suatu perusahaan rekaman dapat diterima dengan syarat; a) benar-benar disponsori oleh perusahaan rekaman yang memproduksi b) disajikan sebagai program sponsor dengan identifikasi perusahaan sponsor yang sepantasnya.

### X. Program Keagamaan

- 1) Program keagamaan harus disajikan oleh perorangan atau kelompok atau organisasi yang bertanggungjawab.

## Lampiran 16 : Standard Profesional Radio Siaran (sambungan)

- 2) Program keagamaan harus disajikan dengan penuh tanggungjawab, tanpa prasangka, dan tidak mempertentangkan keyakinan antar umat beragama.
- 3) Stasiun radio tidak boleh menyiarkan acara keagamaan yang secara ritual atau peribadatannya tidak diterima oleh umum.
- 4) Stasiun radio harus sensitif terhadap pandangan dan keyakinan keagamaan di daerah tertentu.
- 5) Program keagamaan tidak boleh menganjurkan perpindahan agama. Program keagamaan harus ditekankan untuk mempertebal iman yang telah dianut seseorang.

### XI. Pengumpulan Dana

- 1) Stasiun radio tidak boleh melakukan pengumpulan dana kecuali telah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan:
  - a. Maksud dan tujuannya
  - b. Penyelenggaraannya
  - c. Penyalurannya
  - d. Pihak penerimanya
  - e. Pertanggungjawabannya (transparansi)
- 2) Dalam melakukan pengumpulan dana, stasiun radio harus mematuhi peraturan yang berlaku.
- 3) Stasiun radio harus memberitahukan kepada pendengar maksud dan tujuan pengumpulan dana, penyelenggaranya, penyalurannya, pihak penerimanya, jumlah dana yang diterima serta pihak pemberi yang bersedia dan atau mungkin dikemukakan namanya.
- 4) Kemajuan pengumpulan dana harus diberitahukan kepada pendengar secara jelas.
- 5) Stasiun radio harus bersedia diperiksa laporan keuangannya oleh badan resmi berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dana yang dilakukannya.

### XII. Jajak Pendapat (Polling)

Jajak Pendapat (Polling) adalah salah satu alat untuk mengukur pendapat masyarakat tentang sesuatu masalah secara kuantitatif. Penyajian hasil jajak pendapat, baik yang dilaksanakan oleh stasiun radio ybs atau oleh lembaga lain haruslah ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk kepentingan itu, jajak pendapat haruslah:

- 1) Mengangkat masalah atau persoalan yang masyarakat secara luas, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- 2) Menghindari pembentukan opini masyarakat yang dapat mengganggu jalannya pengadilan.
- 3) Mengumpulkan opini masyarakat yang bermanfaat bagi perumusan kebijakan publik, diskusi publik, dan kesadaran publik.
- 4) Jajak pendapat haruslah ditujukan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat tentang suatu masalah. Bukanlah kompetensi jajak pendapat untuk memverifikasi atau membuktikan fakta kejadian.
- 5) Jajak pendapat harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah.
  - Dalam menjelaskan hasil temuan jajak pendapat, stasiun radio harus menghindari kesalahan inferensi (penarikan kesimpulan) dan membedakan antara analisis data (hasil temuan secara statistik) dengan interpretasi data (penjelasan teoritis tentang angka-angka statistik, misalnya tentang apa maknanya, kenapa dsb) yang biasanya dilakukan oleh pakar.
  - Agar pendengar terhindar dari generalisasi yang salah, stasiun radio dalam penyajian jajak pendapat harus mengungkapkan cakupan, batas, waktu populasi, teknik penarikan sample, jumlah sample baik yang valid maupun yang tidak, kemungkinan besar angka sampling error serta teknik pengumpulan data yang dilakukan.

## Lampiran 16 : Standard Profesional Radio Siaran (sambungan)

- 6) Dalam penyajian hasil jajak pendapat, stasiun radio harus mengungkapkan instrumen jajak pendapat (kuesioner/daftar pertanyaan) secara jelas dan lengkap seperti yang dijalankan.
- 7) Stasiun radio harus menyimpan dokumen mengenai jajak pendapat itu untuk sewaktu-waktu diverifikasi pihak lain.
- 8) Dalam menyajikan hasil jajak pendapat, stasiun radio harus bersedia mengungkapkan kelemahan yang muncul.
- 9) Bila suatu jajak pendapat bukanlah hasil kerja stasiun radio ybs melainkan hasil kerja lembaga lain atau seorang ilmuwan yang kredibilitasnya telah dikenal, maka ketika menyiarkannya ketentuan-ketentuan di atas harus sudah dipenuhi.

### XIII. Standard Umum

- 1) Penyajian program tahayul, supranatural, ramalan nasib, ilmu sihir, klenik, hipnotisme tidak boleh mengeksploitasi pendengar yang mudah ditipu.
- 2) Minuman keras dan penyalahgunaan obat-obatan harus ditampilkan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak dapat diterima masyarakat.
- 3) Perjudian tidak boleh ditampilkan sebagai hal yang berguna, kebiasaan baik atau yang merangsang masyarakat melakukannya.
- 4) Praktek program yang menipu harus dihindari.
- 5) Tidak etis menggunakan judul program, *stingers* (bunyi pemisah), *tune* atau *sound effect* yang menjadi ciri atau dikenali penggunaannya oleh radio lain.
- 6) Penyajian siaran atau informasi mengenai pengobatan baru, kontroversial atau alternatif harus disajikan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab.
- 7) Penampilan anak-anak harus seizin orang tua atau wali.
- 8) *Broadcaster* harus memahami hukum tertulis dan adat kebiasaan yang berkenaan dengan pemfitnahan, penjelek-jelekan nama orang, pelanggaran wilayah dan hak privasi serta yang mungkin dinilai sebagai pernyataan yang mengandung hal-hal di atas.
- 9) Manajemen radio harus yakin bahwa materi yang disiarkan tidak melanggar praduga tak bersalah seseorang.
- 10) Mempublikasikan nama, alamat atau pernyataan dalam bentuk suara orang berusia 18 (delapan belas) tahun ke bawah yang sedang terlibat proses persidangan merupakan suatu pelanggaran, kecuali pengadilan menyatakan sebaliknya.
- 11) Manajemen radio harus menghindari penyiaran materi program yang berisi rincian metode-metode atau teknik-teknik kriminalitas ataupun teknik-teknik polisi dalam mencegah dan mendeteksi kriminalitas.

### XIV. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat / Akuntabilitas

- 1) *Broadcasters* harus mengetahui dan menjunjung tinggi norma-norma sosial, budaya, adat istiadat, tradisi, kebutuhan dan karakteristik kelokalan lainnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat.
- 2) Program radio haruslah menghormati dan menjunjung tinggi keragaman agama, budaya dan etnis.
- 3) Peran perlindungan pendengar yang dituntut oleh standar profesional ini haruslah disosialisasikan kepada anggota organisasi radio dan masyarakat.
- 4) Radio harus tanggap terhadap keluhan masyarakat pendengarnya berkenaan dengan kegiatan siaran dan kegiatan *off air*-nya.
- 5) Stasiun radio harus menyelesaikan keluhan pendengar secepat mungkin dan membuat prosedur baku dalam penanganannya.

## C. STANDAR PERIKLANAN

### I. Asas-Asas Umum Periklanan

## **Lampiran 16 : Standard Profesional Radio Siaran (sambungan)**

- 1) Iklan harus jujur, bertanggungjawab dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- 2) Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan martabat negara, agama, susila, adat, budaya, suku dan golongan.
- 3) Periklanan radio merupakan bagian terpadu dari seluruh program stasiun radio.
- 4) Iklan harus dijiwai asas persaingan yang sehat.
- 5) Iklan haruslah memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan periklanan. (UU Perlindungan Konsumen, dll)
- 6) Iklan haruslah memperhatikan Swakrama periklanan Komisi Periklanan Indonesia (KPI)

### **II. Tanggung Jawab Stasiun Radio**

Periklanan adalah sumber pokok penghasilan dalam sistem radio komersial yang bebas dan kompetitif. Ia memungkinkan masyarakat menerima program hiburan, pendidikan, berita dan informasi dengan kualitas yang terbaik. Oleh karena itu periklanan harus dikelola dengan standar profesional yang tinggi.

Dalam hal stasiun radio ikut merencanakan dan memproduksi iklan, stasiun diharuskan memperoleh jaminan tertulis tentang kebenaran informasi produk yang diiklankan dari pengiklan.

### **III. Penempatan dan Standard Waktu Untuk Komersial**

- 1) Penempatan iklan tidak boleh menghalangi inovasi dan kualitas penyajian program yang akan mengganggu pendengar.
- 2) Iklan-iklan yang hanya ditujukan khusus untuk orang dewasa tidak disiarkan pada waktu dengar anak-anak.
- 3) Stasiun radio tidak diperkenankan menyiarkan secara berurutan iklan-iklan dalam kategori produk dan jasa yang sama dan atau yang bersaing langsung.
- 4) Stasiun radio harus menyiarkan iklan pada waktu yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan pengiklan.
- 5) Standar waktu untuk komersial harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

### **IV. Tarif**

#### **1) Kartu tarif**

Segala ketentuan tentang tarif, komisi, rabat periklanan radio, maupun syarat-syarat pemesanan, materi dan pembayaran, harus dinyatakan secara terbuka dan umum.

#### **2) Komisi**

Stasiun radio wajib mencantumkan besarnya “komisi perusahaan periklanan” / “komisi agensi”/ “komisi pemesan” dan secara jelas memisahkannya dari rabat-rabat yang mungkin ada.

## Lampiran 16 : Standard Profesional Radio Siaran (sambungan)

### 3) Rabat

Dalam hal stasiun radio menyediakan rabat-rabat khusus, maka ia wajib mengumumkan (dalam kartu tarif), dan menyisihkan (dalam nota penagihan), sehingga:

- rabat frekuensi hanya menjadi haknya pihak produsen,
- rabat volume hanya menjadi haknya pemesan,
- rabat tunai hanya menjadi haknya pihak penalang.

### V. Pencatatan dan Pelaporan

Setiap iklan yang disiarkan harus dicatat tepat sesuai dengan tanggal dan waktu pengudaraannya, dan disampaikan kepada pengiklan sesuai dengan hasil pencatatan tersebut.

**VI. Penagihan** Stasiun radio hanya boleh menagih spot-spot iklan yang memang telah disiarkan serta menurut tarif, jadwal dan syarat-syarat lain yang telah disepakati bersama dengan pengiklan.

**VII. Embargo** Larangan penyiaran atas iklan-iklan yang lalai melunasi kewajiban pembayaran, hanya dapat dikenakan kepada sumber (produk ataupun pihak), penyebab kelalaian tersebut, dan setelah memberi peringatan tertulis sekurang-kurangnya tiga kali.

**VIII. Iklan Perjudian dan Minuman Keras** Penyajian iklan perjudian dan minuman keras dilarang.

### IX. Iklan Rokok & Tembakau

- 1) Iklan tidak boleh mempengaruhi orang untuk memulai merokok.
- 2) Iklan tidak boleh menyarankan bahwa tidak merokok adalah tidak wajar.
- 3) Iklan tidak boleh ditujukan kepada mereka yang berusia di bawah 18 tahun.
- 4) Iklan rokok dan tembakau harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### X. Iklan Produk Kesehatan

#### X. a. Obat-obatan

- 1) Iklan harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang disetujui Depkes RI
- 2) Iklan tidak boleh menggunakan kata/ungkapan/penggambaran yang menjanjikan penyembuhan dari sesuatu penyakit, tetapi iklan hanya boleh menggambarkan bahwa obat tsb hanya membantu menghilangkan gejalanya.
- 3) Iklan tidak boleh menggambarkan atau menimbulkan kesan pemberian advis, rekomendasi atau keterangan tentang penggunaan obat tertentu oleh dokter, perawat, tenaga kesehatan lain, ahli farmasi, rumah sakit ataupun atribut-atribut profesi medis lainnya.
- 4) Iklan harus memperhatikan keamanan dari penggunaan obat-obatan yang diiklankan, terutama terhadap anak-anak.
- 5) Iklan tidak boleh menganjurkan pemakaian suatu obat secara berlebihan.
- 6) Iklan tidak boleh menganjurkan bahwa suatu obat merupakan syarat mutlak untuk mempertahankan kesehatan tubuh.
- 7) Iklan tidak boleh memanipulasi rasa takut seseorang terhadap sesuatu penyakit karena tidak menggunakan obat yang diiklankan.
- 8) Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti “aman”, “tidak berbahaya”, “bebas resiko” dan sebagainya, tanpa keterangan yang lengkap.

## Lampiran 16 : Standard Profesional Radio Siaran (sambungan)

- 9) Iklan tidak boleh menawarkan pengembalian uang (“warranty”)

### X.b. Pengobatan

Jasa-jasa pengobatan dan perawatan, termasuk klinik spesialis, klinik kecantikan dan pengobatan alternatif tidak boleh diiklankan, kecuali merupakan pengumuman tentang buka, tutup dan pindah praktek, sesuai dengan Kode Etik Profesi masing-masing.

### X.c. Vitamin / Mineral dan *Food Supplement*

- 1) Iklan harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang disetujui oleh Depkes RI.
- 2) Iklan tidak boleh menyatakan/memberi kesan bahwa vitamin/mineral dan *food supplement* selalu dibutuhkan untuk melengkapi makanan yang sudah sempurna nilai gizinya.
- 3) Iklan tidak boleh menyatakan / memberi kesan bahwa penggunaan vitamin/mineral dan *food supplement* adalah syarat mutlak bagi semua orang.
- 4) Iklan tidak boleh menyatakan bahwa kesehatan, kegairahan dan kecantikan akan dapat diperoleh hanya dengan penggunaan vitamin/mineral dan *food supplement*.
- 5) Iklan tidak boleh mengandung pernyataan tentang peningkatan kemampuan seks, kesegaran jasmani secara langsung atau tidak langsung.

### X.d. Kosmetika

- 1) Iklan harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang disetujui oleh Depkes RI.
- 2) Iklan tidak boleh menjanjikan hasil mutlak seketika, bila penggunaan kosmetika tersebut harus dilakukan secara teratur dan terus menerus.
- 3) Iklan tidak boleh menawarkan hasil yang sebenarnya berada di luar jangkauan kosmetika.

### X.e. Alat kesehatan

- 1) Iklan harus sesuai dengan jenis produk yang disetujui depkes RI.
- 2) Iklan kondom, pembalut wanita, deodoran tubuh dan sebagainya harus ditampilkan dengan selera yang pantas.

### X.f. Alat dan fasilitas kebugaran

Iklan yang menawarkan alat atau fasilitas kebugaran, seperti *fitness/slimming center* tidak boleh memberikan janji yang berlebihan ataupun mengabaikan efek samping yang mungkin timbul akibat pemakaian alat atau fasilitas tersebut.

## XI. Kursus dan Lowongan Kerja

- 1) Iklan kursus tidak boleh mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu.
- 2) Iklan lowongan kerja tidak boleh secara berlebihan menyatakan janji dan tunjangan yang ditawarkan, maupun memberi acuan pada adanya diskriminasi suku, agama atau ras.
- 3) Iklan lowongan kerja hanya boleh disiarkan bila pengiklan dapat diidentifikasi secara jelas.

## XII. Iklan Layanan Masyarakat

- 1) Sebagai bagian dari masyarakat, setiap stasiun radio harus membuat dan menyiarkan iklan layanan masyarakat untuk memperkenalkan gagasan-gagasan baru sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Apabila materi ILM berasal dari pihak lain, maka stasiun radio harus meneliti gagasan-gagasan yang ada dalam materi ILM guna kesesuaian dengan target dan format stasiun radio. Selain itu, stasiun radio pun dan harus mengidentifikasi keabsahan sumber.

## XIII. Jaminan, Penawaran dan Promosi

**Lampiran 16 : Standard Profesional Radio Siaran (sambungan)**

- 1) Barang dan jasa yang diiklankan tidak boleh bersifat mengelabui konsumen seperti dalam hal kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa.
- 2) Stasiun radio harus menjamin informasi yang benar, jelas dan jujur.
- 3) Iklan harus mengungkapkan dengan jelas dan beralasan tentang sifat, dan atau nilai, dan atau lama jaminan yang diberikan, dan atau masa berlaku harga yang ditawarkan dan atau masa promosi.

## Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

### I. PENDAHULUAN

#### A. PENGANTAR

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ini pada dasarnya dirancang berdasarkan amanat yang diberikan Undang-undang Republik Indonesia No. 32/2002 tentang Penyiaran kepada Komisi Penyiaran Indonesia.

Dalam pasal 8 UU tersebut dinyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia memiliki wewenang menetapkan Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran Standar dan Pedoman tersebut.

Sebuah Pedoman yang mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam dunia penyiaran Indonesia dibutuhkan mengingat lembaga penyiaran beroperasi dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas, sehingga pemanfaatannya harus senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya. Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan informasi, pendapat dan ekspresi yang dimiliki lembaga penyiaran harus dibarengi dengan penataan yang menjadikan kemerdekaan tersebut membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kaitan itu, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ini dirancang dengan memperhatikan berbagai bentuk Kode Etik dan Standar Program yang telah dikembangkan oleh komunitas profesional dalam dunia penyiaran dan media massa di Indonesia selama ini, seperti: Kode Etik Wartawan Indonesia, Standar Profesional Radio Siaran serta Pedoman Program Penyiaran. Selain itu, Pedoman ini merujuk pada berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU Pers, serta UU Perfilman.

#### B. TUJUAN

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ini dikeluarkan dengan harapan agar tujuan penyiaran sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 UU Penyiaran 2002, dapat diwujudkan, yakni: “. . . memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera. . .”

Sebagaimana diamanatkan pasal 48 UU Penyiaran 2002, Pedoman Perilaku Penyiaran ini disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan: nilai-nilai agama, moral, dan peraturan-perundangan yang berlaku, serta norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.

#### C. ASAS-ASAS PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ini pada dasarnya dirancang dengan merujuk pada serangkaian prinsip dasar yang harus diikuti setiap lembaga penyiaran di Indonesia, yakni:

1. Lembaga penyiaran wajib taat dan patuh hukum terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
2. Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia
3. Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural
4. Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia dan Hak Privasi
5. Lembaga Penyiaran harus menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan dan keakuratan
6. Lembaga penyiaran wajib melindungi kehidupan anak-anak, remaja dan kaum perempuan
7. Lembaga penyiaran wajib melindungi kaum yang tidak diuntungkan
8. Lembaga penyiaran wajib melindungi publik dari kebodohan dan kejahatan
9. Lembaga penyiaran wajib menumbuhkan demokratisasi.

## **Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)**

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 48 (4) UU Penyiaran, dinyatakan pula bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran menentukan Standar Isi Siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

- a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan
- b. rasa hormat terhadap hal pribadi
- c. kesopanan dan kesusilaan
- d. pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme
- e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan
- f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak
- g. penyiaran program dalam bahasa asing
- h. ketepatan dan kenetralan program berita
- i. siaran langsung; dan siaran iklan

### **D. SANKSI ATAS PELANGGARAN**

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran wajib dipatuhi semua lembaga penyiaran di Indonesia.

Seandainya ditemukan ada pelanggaran dilakukan lembaga penyiaran terhadap Standar dan Pedoman ini, UU sebenarnya memberikan wewenang bagi KPI untuk mencabut izin siaran lembaga bersangkutan, setelah adanya keputusan pengadilan yang tetap. Namun KPI menetapkan bahwa dalam kasus ditemukannya pelanggaran, sebelum tiba pada tahap pencabutan izin, KPI akan mengikuti tahap-tahap sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah
- c. Pembatasan durasi dan waktu siaran
- d. Denda administratif
- e. Pembekuan kegiatan siaran lembaga penyiaran untuk waktu tertentu
- f. Penolakan untuk perpanjangan izin
- g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran

Pihak yang harus bertanggungjawab dalam hal terjadinya pelanggaran adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, walaupun lembaga penyiaran memperoleh atau membeli program dari pihak lain (misalnya Rumah Produksi), tanggungjawab tetap berada di tangan lembaga penyiaran. Demikian pula, kendatipun sebuah program yang mengandung pelanggaran sebenarnya adalah program yang disponsori pihak tertentu, tanggungjawab tetap berada di tangan lembaga penyiaran.

Dalam hal program bermasalah yang disiarkan secara bersama oleh sejumlah lembaga penyiaran yang bergabung dalam jaringan lembaga penyiaran, tanggungjawab harus diemban bersama oleh seluruh lembaga penyiaran yang menyiarkan program bermasalah tersebut.

### **E. PENINJAUAN KEMBALI**

Pedoman Perilaku Penyiaran ini tidak bersifat permanen. Dalam Pasal 49 UU Penyiaran dinyatakan bahwa Pedoman ini dapat secara berkala dinilai kembali oleh KPI sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

## Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)

### F. PENGADUAN

KPI diamanatkan oleh UU Penyiaran (pasal 50) untuk mengawasi pelaksanaan Pedoman oleh mereka yang terlibat dalam dunia penyiaran. Dalam kaitan itu, KPI wajib menerima aduan dari setiap pihak yang menilai telah berlangsung pelanggaran terhadap Pedoman dan menindaklanjuti aduan resmi tersebut. KPI wajib memberikan hak jawab tentang aduan tersebut pada lembaga penyiaran yang bersangkutan, sebelum KPI memberikan evaluasi akhir terhadap aduan tersebut.

Sebelum memberikan pertimbangan terhadap suatu keluhan dan pengaduan, KPI harus mengirimkan salinan keluhan dan pengaduan kepada lembaga penyiaran bersangkutan. Di dalam mengambil keputusan, KPI memiliki wewenang untuk meminta kepada stasiun penyiaran bersangkutan, untuk mengirim rekaman bahan siaran yang disengketakan, lengkap dengan penjelasan-penjelasan tertulis dari stasiun penyiaran tersebut.

Apabila KPI memutuskan untuk mempertimbangkan keluhan dan pengaduan, lembaga penyiaran akan diundang untuk didengar pendapatnya guna mendapatkan sanggahan dan penjelasan lembaga penyiaran tersebut.

### II

#### PRINSIP-PRINSIP PROGRAM FAKTUAL

Program faktual merujuk pada program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi. Termasuk di dalam program faktual adalah program berita, features, dokumenter, program realita (*reality program/reality show*), konsultasi on-air dengan mengundang nara sumber dan/atau penelepon, pembahasan masalah melalui diskusi, *talk show*, jajak pendapat, pidato/ceramah, program editorial, kuis, perlombaan, pertandingan olahraga, dan program-program sejenis lainnya.

Berbeda dengan program non-faktual (seperti sandiwara, drama, sinetron, film cerita, dan program-program fiksi lainnya), program faktual harus menyajikan sesuatu yang sesungguhnya terjadi. Dengan demikian, yang membedakan program faktual dengan program non-faktual adalah dalam hal dugaan, harapan dan kepercayaan khalayak mengenai kebenaran informasi yang disampaikan. Terhadap program faktual, khalayak memandang apa yang tersaji di dalam program tersebut adalah hal-hal yang sesungguhnya terjadi. Kendatipun sebuah program faktual mungkin mengandung unsur rekayasa (misalnya dalam hal rekonstruksi sejarah atau rekonstruksi kejahatan), tetap terdapat harapan bahwa apa yang disajikan dalam program tersebut telah dibuat dalam cara yang sejauh mungkin mendekati apa yang sesungguhnya terjadi.

Berdasarkan kepercayaan dan harapan tersebut, khalayak mengandalkan apa yang disajikan melalui lembaga penyiaran saat khalayak berusaha mengetahui dan memahami apa yang terjadi di lingkungannya dan mengambil keputusan-keputusan yang, dalam banyak kasus, memiliki makna penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lembaga penyiaran tidak boleh mengkhianati kepercayaan ini. Karena itu, walaupun Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi, lembaga penyiaran yang menggunakan ranah publik harus menghadirkan program faktual yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik 'keakuratan, keadilan, ketidakberpihakan, dan kenetralan'.

Di sisi lain, mengingat program faktual menyangkut hal-hal yang sesungguhnya terjadi, proses pembuatannya secara tak terelakkan melibatkan kehidupan sehari-hari mereka yang menjadi obyek atau menjadi narasumber. Dalam hal ini, diperlukan pula sejumlah pedoman agar pelibatan warga masyarakat tersebut tak mengakibatkan hal-hal yang merugikan pihak yang dilibatkan tersebut.

Terakhir, penyajian program faktual ini kerap dapat berpengaruh langsung terhadap kehidupan nyata masyarakat. Dalam kaitan ini, program faktual harus dibuat dan disajikan dalam cara yang tidak menimbulkan efek negatif terhadap kepentingan publik.

#### A. PRINSIP-PRINSIP JURNALISTIK: AKURAT, ADIL, TIDAK BERPIHAK

Tanpa dapat ditawar, lembaga penyiaran harus menyajikan informasi dalam program faktual dengan senantiasa mengindahkan prinsip akurasi, keadilan, dan ketidakberpihakan (imparsialitas).

## Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)

### 1. Akurasi

- a. Dalam program faktual lembaga penyiaran bertanggungjawab menyajikan informasi yang akurat dan tidak melakukan kecerobohan dalam penyajian fakta, apalagi penyesatan dan pemutarbalikkan fakta yang dapat merugikan seseorang, organisasi, perusahaan, dan pemerintah. Sebelum menyiarkan sebuah fakta, lembaga penyiaran harus memastikan bahwa materi siaran tersebut telah dicek keakuratan dan kebenarannya.
- b. Bila lembaga penyiaran memperoleh informasi dari pihak lain yang belum dapat dipastikan kebenarannya, lembaga harus menjelaskan pada khalayak bahwa informasi tersebut adalah dalam versi berdasarkan sumber tertentu tersebut. Bila lembaga penyiaran menggunakan materi siaran yang diperoleh dari pihak lain (misalnya kantor berita asing), lembaga penyiaran berkewajiban mengecek kebenaran berita tersebut sebelum menyiarkannya.
- c. Saat siaran langsung (baik berbentuk diskusi ataupun wawancara via telepon), lembaga penyiaran harus waspada terhadap kemungkinan narasumber atau partisipan di studio atau via telepon melontarkan pernyataan tanpa bukti atau belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal itu, semua presenter harus siap mengatasi hal ini dengan melakukan verifikasi atau meminta penjelasan lebih lanjut tentang fakta yang disampaikan narasumber atau partisipasi tersebut.
- d. Jika lembaga penyiaran mengetahui atau menyadari bahwa mereka telah menyajikan informasi yang tidak akurat atau yang menimbulkan salah interpretasi, maka lembaga penyiaran wajib sesegera mungkin menyiarkan koreksi dan pernyataan permintaan maaf jika diminta oleh pihak yang merasa dirugikan oleh penyajian informasi tersebut. Namun demikian jika kesalahan yang terjadi telah merugikan kepentingan publik atau merugikan reputasi seseorang atau pihak tertentu maka lembaga penyiaran wajib menyiarkan koreksi dan pernyataan permintaan maaf tanpa perlu diminta terlebih dahulu.
- e. Ketika lembaga penyiaran harus menyajikan berita atau dokumenter yang didasarkan pada reka ulang (rekonstruksi) dari peristiwa yang sesungguhnya terjadi, rekonstruksi tersebut harus disampaikan dengan:
  - i. Menjelaskan kepada khalayak sejauh mana kesesuaian dan keakuratan materi dengan peristiwa sebenarnya: apakah dibuat berdasarkan interpretasi bebas tentang peristiwa yang terjadi atau setiap detail penggambaran yang ditampilkan benar-benar akurat atau persis dengan peristiwa aslinya.
  - ii. Tidak boleh ada perubahan atau penyimpangan terhadap fakta yang dapat menimbulkan interpretasi yang salah atau tidak adil terhadap pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap isi program.
  - iii. Lembaga penyiaran harus memberitahukan dengan jelas asal versi reka ulang atau ilustrasi tersebut. Stasiun televisi dapat mencantumkannya di layar, dan stasiun radio dapat melakukannya dengan memberitahu di awal atau akhir program.
  - iv. Lembaga penyiaran tidak boleh merugikan pihak-pihak yang menjadi subyek dan obyek reka ulang.
- f. Dalam menyajikan informasi yang sulit untuk dicek kebenarannya secara empirik, seperti informasi kekuatan gaib, lembaga penyiaran harus menyertakan penjelasan bahwa mengenai kebenaran informasi tersebut, masih terdapat perbedaan pandangan di masyarakat.

### 2. Adil

- a. Lembaga penyiaran harus menghindari terjadinya keraguan atau interpretasi yang salah pada khalayak akibat cara penyajian informasi yang tidak lengkap dan tidak adil.
- b. Penggunaan *footage* atau potongan gambar dalam sebuah acara yang sebenarnya berasal dari program lain jangan sampai menimbulkan interpretasi yang salah.
- c. Penyuntingan sebuah rekaman wawancara tidak boleh menimbulkan salah interpretasi terhadap pandangan narasumber bersangkutan.

## Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)

- d. Dalam pemberitaan kasus kriminalitas dan hukum, setiap tersangka harus diberitakan sebagai tersangka sebelum pengadilan memutuskannya sebagai bersalah.
- e. Dalam pemberitaan kasus kriminalitas dan hukum, lembaga penyiaran harus menyamarkan identitas (termasuk menyamarkan wajah) tersangka, kecuali identitas tersangka memang sudah terpublikasi dan dikenal secara luas.
- f. Jika sebuah program acara memuat kritik yang menyerang atau merusak citra individu atau organisasi, mereka yang mendapat kritikan itu harus diberikan kesempatan dalam waktu yang setara untuk memberikan komentar atau argumen balik terhadap kritikan yang diarahkan kepadanya.

### 3. Tidak Berpihak, Netral

- a. Pada saat menyajikan isu-isu kontroversial yang menyangkut kepentingan publik, lembaga penyiaran harus menyajikan berita, fakta, dan opini secara obyektif dan secara berimbang
- b. Jika terdapat dua atau lebih pihak yang saling bertentangan, pandangan semua pihak harus disajikan dalam satu berita atau dalam satu siaran program faktual (berita, dokumenter, *talkshow*) yang sama atau siaran berseri yang berurutan.
- c. Lembaga penyiaran dapat menyajikan program yang mendalami pandangan hanya dari satu pihak saja, dengan ketentuan harus menyajikan pandangan-pandangan yang berbeda dari opini si narasumber dan membuat mekanisme yang memungkinkan adanya pemberian tanggapan, misalnya telepon dari khalayak yang disiarkan dalam program bersangkutan sehingga pandangan yang berbeda juga diberi kesempatan untuk disiarkan.
- d. Dalam program acara yang mendiskusikan isu kontroversial, moderator, pemandu acara, atau pewawancara:
  - i. Tidak boleh memiliki kepentingan pribadi atau keterkaitan dengan salah satu pihak/pandangan.
  - ii. Harus berusaha agar semua partisipan dan narasumber, dapat secara baik mengekspresikan pandangannya.

## B. PERLAKUAN TERHADAP NARASUMBER

Dalam setiap program yang melibatkan narasumber, lembaga lembaga penyiaran harus menjelaskan secara terus-terang, jujur, dan terbuka kepada narasumber atau semua pihak yang akan diikutsertakan, tentang sifat, bentuk, dan tujuan dari acara. Harus dipastikan narasumber sudah benar-benar mengerti semua hal tentang acara dimana mereka akan berpartisipasi.

### 1. Informasi yang Perlu Diketahui Narasumber

Jika narasumber diundang dalam sebuah program faktual (wawancara di studio, wawancara melalui telepon, terlibat dalam program diskusi atau *talk show*), lembaga penyiaran:

- a. Harus memberitahukan tema, topik, dan bentuk acara di mana narasumber akan berpartisipasi.
- b. Harus menjelaskan alasan mengapa narasumber dihubungi atau diundang untuk program acara tersebut.
- c. Harus memberitahukan siapa saja yang akan hadir terlibat dalam acara tersebut.
- d. Harus memberitahukan garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.
- e. Harus menjelaskan hal lain (non-pertanyaan) yang nantinya akan diminta oleh lembaga lembaga penyiaran, misalnya diminta menunjukkan bekas luka.
- f. Harus memberitahukan apakah acara tersebut disiarkan secara langsung (*live*) atau direkam (*recorded*) dan apakah acara tersebut akan disunting atau tidak.

## **Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)**

- g. Tidak boleh melatih, mendorong, atau membujuk narasumber untuk mengatakan hal-hal yang sebetulnya narasumber tidak pahami, atau tahu bahwa itu tidak benar atau tidak sepenuhnya percaya bahwa itu benar.

### **2. Penolakan Partisipasi oleh Narasumber**

Setiap orang berhak untuk menolak berpartisipasi dalam sebuah program acara yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran. Apabila ketidakhadiran seseorang atau organisasi itu disebut atau dibicarakan dalam acara tersebut, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan pernyataan yang bersifat menafsirkan penolakan atau ketidakhadiran narasumber tersebut.
- b. Lembaga penyiaran dilarang membicarakan masalah atas nama narasumber yang menolak atau tidak hadir dengan dasar pembicaraan yang telah dilakukan sebelumnya dengan narasumber tersebut, kecuali atas sizannya.
- c. Lembaga penyiaran tidak boleh menggantikan ketidakhadiran seorang narasumber dengan penggunaan rekaman wawancara atau aktivitas narasumber tersebut, di mana rekaman atau materi itu dibuat untuk program acara yang lain. Rekaman boleh digunakan sebagai latar belakang namun tidak boleh digunakan untuk menjawab pertanyaan atau seolah-olah dibuat menjawab pertanyaan dari presenter ataupun narasumber lain yang hadir pada program acara bersangkutan.

### **3. Wawancara Telepon dan Rekaman Telepon**

Dalam menyiarkan hasil wawancara telepon baik langsung maupun rekaman, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum wawancara dilakukan lembaga penyiaran harus memperkenalkan diri dan menyatakan tujuan wawancara kepada pihak yang akan diwawancarai.
- b. Penyiaran wawancara telepon atau rekaman harus atas sepengetahuan dan persetujuan dari pihak-pihak yang diwawancarai.

### **4. Wawancara Langsung dengan Penelepon dari Luar**

Dalam menyiarkan wawancara langsung dengan penelepon dari luar, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum percakapan disiarkan, lembaga penyiaran telah memperoleh identitas memadai si penelepon.
- b. Lembaga penyiaran harus mengingatkan penelepon dan/atau memberhentikan wawancara apabila saat wawancara berlangsung ada hal-hal yang tidak layak disiarkan secara langsung kepada publik.
- c. Lembaga penyiaran bertanggungjawab atas isi wawancara yang disiarkan.

### **5. Nara Sumber Anak**

Dalam menyiarkan program yang melibatkan anak sebagai narasumber, lembaga penyiaran harus mengikuti rangkaian ketentuan sebagai berikut

- a. Anak di bawah umur tidak boleh ditanya mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya (misal: tentang kematian orangtua, tentang perceraian orangtua, dan sebagainya).
- b. Izin dari orang tua atau wali harus didapat sebelum mewawancarai anak.
- c. Materi siaran yang menyangkut anak-anak harus mempertimbangkan keamanan anak dan masa depan anak.
- d. Anak yang terkait permasalahan dengan polisi atau proses pengadilan, terlibat dengan kejahatan seksual atau korban dari kejahatan seksual harus disamarkan atau dilindungi identitasnya.

## Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)

### C. PRIVASI

Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi (hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi) subyek dan obyek berita, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Isi program siaran yang berhubungan dengan hak privasi dibenarkan selama menyangkut kepentingan publik.
- b. Ketika seseorang secara tidak sengaja terekam dalam suatu liputan, hak privasi yang bersangkutan tidak dengan sendirinya telah dilanggar. Namun penyiaran gambar tersebut harus tetap menghormati hak privasi orang itu.
- c. Liputan dalam suatu institusi tidak memerlukan izin per individu apabila telah mendapatkan izin dari institusi yang bersangkutan. Pengecualian berlaku untuk institusi khusus yang menyangkut isu sensitif (rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, lembaga rehabilitasi), di mana izin per individu diperlukan.

#### 1. Rekaman Tersembunyi

Rekaman tersembunyi adalah tindakan menggunakan segala jenis alat perekam (gambar ataupun suara) secara sembunyi-sembunyi untuk merekam tanpa diketahui oleh orang lain atau subyek yang direkam. Dalam hal ini, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi:

- a. Siaran rekaman tersembunyi dilarang, kecuali menyangkut kepentingan publik atau mendapat izin dari subyek yang direkam dan tidak merugikan orang lain.
- b. Perekaman tersembunyi hanya diperbolehkan di ruang publik. Perekaman tersembunyi di ruang privat tidak diperbolehkan (misal: di dalam kamar, di dalam rumah, di dalam kamar ganti)
- c. Dalam menyiarkan materi rekaman tersembunyi, lembaga penyiaran bertanggung jawab untuk tidak melanggar privasi orang-orang yang secara kebetulan ada dalam materi tersebut.
- d. Rekaman tersembunyi untuk program siaran hiburan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - Meskipun materi yang direkam bukanlah sesuatu yang serius, lembaga penyiaran harus tetap bertanggung jawab untuk tidak melakukan pelanggaran hak privasi.
  - Orang yang menjadi subyek rekaman harus dimintai izin sebelum hasil rekaman disiarkan.
  - Orang yang menjadi subyek dalam rekaman mempunyai hak untuk menolak hasil rekaman disiarkan.
  - Bila pada saat perekaman, subyek mengetahuinya dan meminta perekaman dihentikan, pihak lembaga penyiaran harus mengikuti permintaan tersebut.

e. Rekaman tersembunyi tidak boleh digunakan dalam siaran langsung (*live*).

f. Rekaman tersembunyi dengan penyadapan telepon tidak boleh disiarkan oleh lembaga penyiaran kecuali materi dimaksud merupakan barang bukti dalam pengadilan yang telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap.

#### 2. Pencegatan (Doorstepping)

Pencegatan adalah tindakan menghadang narasumber tanpa perjanjian untuk ditanyai atau diambil gambarnya. Dalam hal pencegahan ini, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembaga penyiaran hanya dapat melakukan pencegahan di ruang publik.
- b. Lembaga penyiaran dapat melakukan pencegahan, selama itu tidak melibatkan upaya memaksa atau mengintimidasi nara sumber.
- c. Lembaga Penyiaran harus menghormati hak narasumber untuk tidak menjawab atau tidak berkomentar dan hak untuk tidak dimunculkan dalam siaran.

## **Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)**

d.Pencegatan, dengan melakukan percobaan berulang untuk mengambil gambar atau mendapatkan wawancara setelah izin untuk melakukan hal itu secara terbuka ditolak dapat dikategorikan pelanggaran privasi.

e.Pencegatan dapat dibenarkan apabila terkait dengan kepentingan publik dan permintaan izin untuk mengambil gambar atau wawancara secara terbuka telah ditolak berulang.

### **3. Privasi Mereka yang Tertimpa Musibah**

Dalam menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a.Peliputan subyek yang tertimpa musibah harus dilakukan secara tepat dan bijaksana untuk melindungi subyek dalam proses pemulihan korban dan keluarganya.

b.Lembaga penyiaran tidak boleh menambah penderitaan orang yang sedang dalam kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi orang bersangkutan untuk diwawancarai atau diambil gambarnya.

c. Pengambilan gambar dan pertanyaan wawancara yang disiarkan tidak boleh menambah penderitaan atau membangkitkan trauma.

d.Penyajian gambar korban yang sedang dalam kondisi menderita hanya dibolehkan dalam konteks yang dapat mendukung tayangan.

e.Pengambilan gambar dan wawancara tidak dapat dilakukan sebelum memperoleh izin dari keluarga korban dan/atau pihak yang berwenang.

f.Liputan terhadap suasana duka cita individu atau kelompok harus mendapat izin dari keluarga atau individu yang berduka.

g.Lembaga penyiaran harus menghormati peraturan mengenai akses media yang dibuat oleh rumah sakit atau institusi medis lainnya.

h.Terhadap korban kejahatan seksual, lembaga penyiaran tidak boleh mewawancarai korban mengenai proses tindak asusila tersebut.

### **D. PELAPORAN TENTANG PERISTIWA YANG DAPAT MENIMBULKAN KEPANIKAN, KERUSUHAN, PENINGKATAN KONFLIK**

Dalam menyajikan program yang berisi liputan dan laporan tentang peristiwa yang diduga dapat menimbulkan kepanikan, mempertajam konflik masyarakat atau dapat mendorong terjadinya kerusuhan, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a.Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan secara langsung peristiwa kerusuhan atau perkelahian fisik yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

b.Dalam meliput dan menyajikan laporan tentang konflik antar kelompok masyarakat, lembaga penyiaran dilarang berpihak pada salah satu kelompok atau dengan sengaja menyajikan informasi yang dipercaya mampu menyulut kemarahan setidaknya salah satu kelompok.

### **E. PELAPORAN TENTANG PERISTIWA TRAUMATIK**

Dalam menyajikan program faktual yang menampilkan kembali, mengulas atau merekonstruksi peristiwa yang traumatik, termasuk kejahatan, kerusuhan sosial dan bencana alam, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a.Lembaga penyiaran harus menyajikan program tersebut dengan mempertimbangkan potensi traumatik, baik pada korban atau keluarga korban maupun khalayak.

b.Lembaga penyiaran harus mencegah kemungkinan bangkitnya kemarahan yang diakibatkan oleh penggunaan materi siaran traumatik.

## **Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)**

### **F. KERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAIN**

Dalam pembuatan program faktual di mana lembaga penyiaran bekerjasama dengan lembaga lain dengan kewenangan di wilayah tertentu, seperti pihak kepolisian, lembaga medis, pemadam kebakaran, dan sebagainya, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembaga penyiaran harus sejak awal membuat dan menyepakati ketentuan dalam bekerja bersama dengan lembaga-lembaga tersebut.
- b. Lembaga penyiaran harus patuh jika diminta oleh lembaga yang bekerjasama untuk berhenti merekam atau meninggalkan tempat, kecuali jika berkaitan dengan kepentingan publik.

### **G. PROGRAM YANG DISPONSORI**

Lembaga penyiaran tidak boleh menjual jam tayang kepada pihak manapun, kecuali iklan. Lembaga penyiaran boleh menyajikan program yang disponsori – baik sebagian maupun keseluruhan -- oleh pihak di luar lembaga lembaga penyiaran tersebut, kecuali: program berita dan editorial

Dalam setiap program yang disponsori, lembaga penyiaran harus:

- a. Memberitahukan kepada khalayak penonton atau pendengar bahwa program tersebut disponsori. Pemberitahuan tersebut harus ditempatkan dalam cara yang memungkinkan penonton atau pendengar dapat dengan mudah mengidentifikasi bahwa program tersebut didanai oleh pihak tertentu.
- b. Dalam program yang berdurasi siar kurang dari atau sampai dengan lima belas menit, penjelasan tentang nama sponsor harus ditampilkan atau disebutkan secara jelas setidaknya dua kali, yakni di permulaan dan di akhir program acara. Dalam program yang berdurasi siar lebih dari lima belas menit, penjelasan nama sponsor harus ditampilkan atau disebutkan secara jelas di permulaan dan di akhir program, dan setidaknya setiap limabelas menit di sepanjang program.
- c. Kontrol editorial atas isi program yang disponsori harus berada di tangan lembaga penyiaran.
- d. Perusahaan yang memproduksi produk yang dilarang untuk diiklankan (misalnya minuman keras, judi) melalui siaran televisi atau radio dilarang mensponsori program.
- e. Program yang disponsori oleh perusahaan yang memproduksi produk yang iklannya dibatasi (misalnya rokok, alat kontrasepsi) dalam siaran televisi atau radio hanya boleh disiarkan pada pukul 22.00 - 04.00.

### **H. RELAI SIARAN ASING**

Lembaga penyiaran dapat menyajikan program faktual yang merupakan relai siaran yang berasal dari lembaga penyiaran asing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembaga penyiaran harus menjaga agar isi program relai siaran asing itu tidak bertentangan dengan kedaulatan nasional, peraturan-perundangan yang berlaku di Indonesia, serta isi Pedoman Perilaku Penyiaran.
- b. Lembaga penyiaran bertanggungjawab atas isi program relai siaran asing.

### **I. PROGRAM PENGGALANGAN DANA**

Dalam menyajikan program yang berisikan permohonan penggalangan bantuan dana kepada khalayak untuk keperluan amal, baik atas inisiatif lembaga penyiaran sendiri maupun pihak lain, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Kegiatan penggalangan dana itu harus seizin yang berwenang.
- b. Lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan permohonan bantuan dana kepada khalayak dalam konteks aksi penggalangan dana untuk mendanai penyelenggaraan siaran.

## **Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)**

c. Sebelum menyiarkan permohonan bantuan dana atas nama pihak tertentu, lembaga penyiaran harus memastikan terlebih dahulu status terdaftar badan atau lembaga bersangkutan.

d. Dalam kejadian bencana tertentu, lembaga penyiaran dapat mengambil inisiatif untuk menggalang bantuan amal. Namun lembaga penyiaran tidak boleh mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.

e. Lembaga penyiaran secara terbuka melaporkan perkembangan jumlah bantuan dan dana yang didapat, serta penggunaannya kepada penonton atau pendengar.

f. Bantuan amal yang terkumpul, baik seluruh maupun sebagian, tidak digunakan sebagai pembiayaan program siaran atau pengeluaran lainnya kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

g. Dalam kasus penggalangan dana melalui pertunjukan (misalnya konser musik) yang disiarkan, lembaga penyiaran diizinkan untuk menyumbangkan keuntungan dengan dikurangi biaya terlebih dahulu, selama hal ini diperjelas dengan penekanan pada khalayak bahwa tidak semua keuntungan yang didapat akan disumbangkan.

### **J. KUIS DAN UNDIAN BERHADIAH**

Dalam menyiarkan program berisikan kuis dan undian hadiah, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Kuis dan undian berhadiah harus diselenggarakan dengan adil dan peraturannya harus diberitahukan secara terbuka dan jelas pada khalayak.

b. Dalam sebuah pertunjukan kuis, tidak ada peserta yang sudah terlebih dahulu memperoleh informasi tentang pertanyaan yang akan diajukan.

c. Dengan atau tanpa sponsor, lembaga penyiaran harus bertanggung jawab atas semua kuis dan undian berhadiah yang disiarkan.

d. Jika sebuah kuis atau undian berhadiah menggunakan fasilitas telepon dan SMS (*short message service*), lembaga penyiaran harus memberitahukan dengan jelas biaya pulsa hubungan telpon atau SMS yang dikenakan.

### **K. POLLING DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam menyiarkan hasil jajak pendapat dan hasil penelitian, lembaga penyiaran wajib memberikan informasi secara terbuka dan jelas pada khalayak tentang metode yang digunakan dan implikasinya terhadap hasil penelitian.

## **III**

### **KESOPANAN, KEPANTASAN DAN KESUSILAAN**

Kepercayaan akan prinsip kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi tidak pernah berarti pengakuan bagi lembaga penyiaran untuk menyiarkan materi apapun sebebaskan-bebasnya.

Lembaga penyiaran pada dasarnya beroperasi dengan menggunakan ranah publik dan, karenanya, harus menyajikan materi dengan menempatkan kepentingan publik pada prioritas teratas. Dengan demikian, kemerdekaan berekspresi melalui lembaga penyiaran dibatasi oleh apa yang dipersepsikan sebagai kepentingan publik.

Sesuai dengan kodratnya, lembaga penyiaran dapat menjangkau secara langsung khalayak yang sangat beragam baik dalam usia, latar belakang, ekonomi, budaya, agama, dan keyakinan. Teori-teori komunikasi juga sudah menunjukkan bagaimana isi siaran dapat mempengaruhi secara kuat khalayak yang menerimanya. Dengan demikian, lembaga penyiaran harus senantiasa berhati-hati agar isi siaran yang dipancarkannya tidak merugikan, menimbulkan efek negatif, atau bertentangan dan menyinggung nilai-nilai dasar yang dimiliki beragam kelompok khalayak tersebut.

## Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)

### A. KEKERASAN

Lembaga penyiaran memang lazim dan bahkan dalam kasus-kasus tertentu merasa wajib melaporkan atau menyiarkan kekerasan. Kekerasan dalam hal ini mencakup hal-hal yang memang sungguh terjadi dalam kehidupan sehari-hari maupun hal-hal yang termuat dalam program fiksi. Namun, terdapat sejumlah pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penyajian kekerasan melalui lembaga penyiaran.

- Mencegah jangan sampai tayangan tersebut menimbulkan hilangnya kepekaan masyarakat terhadap kekerasan dan korban kekerasan.
- Mencegah agar masyarakat tidak berlaku apatis terhadap gejala kekerasan
- Mencegah efek peniruan
- Mencegah agar tidak timbul rasa ketakutan yang berlebihan
- Mencegah agar masyarakat tidak menerima pandangan bahwa kekerasan adalah jalan keluar yang dapat diterima dan dibolehkan.

#### 1. Pembatasan Umum

- a. Program atau promo program yang mengandung muatan kekerasan secara dominan, atau mengandung adegan kekerasan eksplisit dan vulgar, hanya dapat disiarkan pada jam tayang di mana anak-anak pada umumnya diperkirakan sudah tidak menonton televisi, yakni pukul 22.00 – 04.00 waktu setempat.
- b. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program dan promo program yang mengandung adegan yang dianggap di luar perikemanusiaan atau sadistis.
- c. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan film yang dapat dipersepsikan sebagai mengagungkan kekerasan atau menjustifikasi kekerasan sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari
- d. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan lagu-lagu atau klip video musik yang mengandung muatan pesan menggelorakan atau mendorong kekerasan.

#### 2. Kekerasan, Kecelakaan dan Bencana dalam program Faktual

Lembaga penyiaran harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk memperlihatkan realitas dan pertimbangan tentang efek negatif yang dapat ditimbulkan. Karena itu penyiaran adegan kekerasan, kecelakaan dan bencana dalam program faktual harus mengikuti ketentuan sebagai berikut::

- a. Adegan kekerasan tidak boleh disajikan secara eksplisit.
- b. Gambar luka-luka yang diderita korban kekerasan, kecelakaan dan bencana tidak boleh disorot secara *close up* (*Big Close Up, Medium Close Up, Extreme Close Up*).
- c. Gambar penggunaan senjata tajam dan senjata api tidak boleh disorot secara *close up* (*Big Close Up, Medium Close Up, Extreme Close Up*).
- d. Gambar korban kekerasan tingkat berat, serta potongan organ tubuh korban dan genangan darah yang diakibatkan tindak kekerasan, kecelakaan dan bencana, harus disamarkan.
- e. Durasi dan frekuensi penyorotan korban yang eksplisit harus dibatasi
- f. Dalam siaran radio, penggambaran kondisi korban kekerasan, kecelakaan dan bencana tidak boleh disampaikan secara rinci.
- g. Saat-saat kematian tidak boleh disiarkan.
- h. Adegan eksekusi hukuman mati tidak boleh disiarkan.

#### 3. Rekonstruksi kejahatan

- a. Adegan rekonstruksi kejahatan yang eksplisit dan rinci tidak boleh disiarkan.
- b. Adegan rekonstruksi kejahatan seksual dan pemerkosaan sama sekali tidak boleh disiarkan.

## **Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)**

c. Siaran rekonstruksi kejahatan harus memperoleh izin dari korban kejahatan, atau pihak-pihak yang dapat dipandang sebagai wakil korban.

d. Siaran rekonstruksi yang memperlihatkan modus kejahatan secara eksplisit dan rinci dilarang.

e. Adegan rekonstruksi yang memperlihatkan cara pembuatan alat-alat kejahatan tidak boleh disiarkan.

### **4. Kekerasan dalam Program Anak-anak**

a. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program anak-anak yang didominasi kekerasan.

b. Dalam program anak-anak, tidak boleh tercipta kesan bahwa kekerasan adalah hal lazim dilakukan dan tidak memiliki akibat serius bagi pelaku dan korbannya.

### **5. Bahan Peledak**

Lembaga Penyiaran dilarang menyajikan isi siaran yang memberikan gambaran eksplisit dan rinci tentang cara membuat bahan peledak.

### **6. Kekerasan terhadap binatang**

a. Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program yang mendorong atau mengajarkan tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap binatang.

b. Dalam pembuatan acara non-faktual, lembaga penyiaran harus menjaga agar tidak ada hewan yang dilukai.

### **7. Bunuh diri**

a. Penggambaran secara eksplisit dan rinci adegan bunuh diri dilarang.

b. Lembaga penyiaran harus menghindari tayangan program yang di dalamnya terkandung pesan bahwa bunuh diri adalah sebuah jalan keluar yang dibenarkan untuk mengakhiri hidup.

### **8. Kekerasan dalam Olahraga**

a. Tayangan olahraga yang didominasi kekerasan (seperti tinju) diizinkan.

b. Program siaran yang berisikan tayangan permainan atau pertandingan yang tidak dikategorikan sebagai olahraga yang didominasi kekerasan (misalnya gulat profesional, dan semacamnya) hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00 – 04.00 waktu setempat.

## **B. SEKS**

Lembaga penyiaran dalam menyiarkan materi yang mengandung muatan seks harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

### **1. Ciuman**

Adegan ciuman atau mencium yang eksplisit dan didasarkan atas hasrat seksual dilarang. Adegan ciuman atau mencium dalam konteks kasih sayang diizinkan, termasuk di dalamnya: ayah mencium anak atau sebaliknya, ciuman kasih sayang seorang suami kepada istri atau sebaliknya.

### **2. Hubungan Seks**

a. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan aktivitas hubungan seks atau adegan yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.

b. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks.

c. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan percakapan atau adegan yang mewakili/menggambarkan rangkaian aktivitas ke arah hubungan seks.

d. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan yang menggambarkan hubungan seks antarhewan atau manusia dengan hewan.

e. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang isinya memuat pembenaran bagi berlangsungnya hubungan seks di luar nikah.

## **Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)**

### 3. Pemerksaan/Pemaksaan Seksual

- a. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan pemerksaan atau pemaksaan seksual, atau adegan yang menggambarkan upaya ke arah pemerksaan dan pemaksaan seksual.
- b. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang isinya memuat pembenaran bagi terjadinya perksaan atau yang menggambarkan perksaan sebagai bukan kejahatan serius.

### 4. Eksploitasi Seks

- a. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan lagu dan klip video berisikan lirik bermuatan seks, baik secara eksplisit maupun implisit.
- b. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan adegan tarian yang menurut akal sehat dapat dikategorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual atau memberi kesan hubungan seks.
- c. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program atau adegan yang dapat dipandang merendahkan perempuan menjadi sekadar obyek seks.
- d. Lembaga penyiaran dilarang menampilkan tayangan yang menjadikan anak-anak dan remaja sebagai obyek seks. Termasuk di dalamnya adalah adegan yang menampilkan anak-anak dan remaja berpakaian minim, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan dengan daya tarik seksual.

### 5. Masturbasi

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan adegan berlangsungnya masturbasi atau materi siaran (misalnya suara) yang mengesankan berlangsungnya masturbasi.

### 6. Pembicaraan (*talk*) mengenai Seks

- a. Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks dapat disiarkan hanya pada pukul 22.00 – 04.00 waktu setempat.
- b. Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks harus disajikan dengan cara ilmiah dan santun. Pembawa acara bertanggungjawab menjaga agar acara itu tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.
- c. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran di mana penyiar atau pembicara tamu atau penelepon berbicara tentang pengalaman seks secara eksplisit dan rinci.

### 7. Perilaku Seks Menyimpang

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang membahas atau bertemakan berbagai perilaku seksual menyimpang dalam masyarakat, seperti:

- hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/remaja
- hubungan seks antara sesama anak-anak atau remaja di bawah umur
- hubungan seks sedarah
- hubungan manusia dengan hewan
- hubungan seks yang menggunakan kekerasan
- hubungan seks berkelompok
- hubungan seks dengan alat-alat

Dalam menyajikan program berisikan materi tentang perilaku seks menyimpang tersebut, lembaga penyiaran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang mengandung pembenaran terhadap perilaku seksual menyimpang tersebut.
- b. Program yang mengandung muatan cerita atau pembahasan tentang perilaku seksual menyimpang hanya dapat ditayangkan antara pukul 22.00 sampai 04.00

## **Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)**

### **8. Pekerja Seks Komersial**

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan, membahas, atau mengandung muatan cerita tentang pekerja seks komersial dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Program tersebut tidak boleh mempromosikan dan mendorong agar pelacuran dapat diterima secara luas oleh masyarakat.
- b. Dalam program faktual, wajah dan identitas pekerja seks komersial harus disamarkan.
- c. Program tersebut hanya boleh ditayangkan antara pukul 22.00 – 04.00 waktu setempat.

### **9. Homoseksualitas/Lesbian**

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program yang memberitakan, membahas, atau mengandung muatan cerita tentang homoseksualitas dan lesbian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Program tersebut tidak boleh mempromosikan dan menggambarkan bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman yang dapat diterima oleh masyarakat
- b. Program tersebut hanya boleh ditayangkan antara pukul 22.00 – 04.00

### **10. Adegan Telanjang**

Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan gambar manusia telanjang – atau mengesankan telanjang—baik bergerak atau diam.

- a. Lembaga penyiaran dilarang mengeksploitasi gambar—bergerak atau diam—bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap membangkitkan birahi, seperti paha, pantat, payudara, dan alat kelamin.
- b. Penayangan benda seni, seperti patung, pahatan atau lukisan yang menampilkan gambar telanjang dapat diizinkan selama itu ditampilkan tidak untuk mengeksploitasi daya tarik seksual ketelanjangan itu sendiri.

### **C. PELECEHAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU**

Lembaga penyiaran tidak boleh memuat program yang melecehkan kelompok masyarakat tertentu yang selama ini sering dipandang negatif, seperti:

- Kelompok-kelompok pekerjaan tertentu, misalnya: pembantu, hansip, satpam
- Kelompok masyarakat yang kerap dianggap memiliki ‘penyimpangan’, seperti: waria, banci, pria yang keperempunan, perempuan yang kelaki-lakian, dan sebagainya
- Kelompok lanjut usia dan janda/duda
- Kelompok dengan ukuran dan bentuk fisik di luar normal, seperti: gemuk, cebol, memiliki gigi tonggos, juling, dsb.
- Kelompok yang memiliki cacat fisik, seperti: cacat pendengaran, cacat penglihatan, tuna wicara
- Kelompok yang memiliki cacat atau keterbelakangan mental, seperti: embisil, idiot, dsb.

Dalam kaitan itu, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembaga penyiaran tidak boleh menayangkan program yang mengandung muatan yang dapat menyebabkan keresahan atau sakit hati individu dalam kelompok-kelompok tersebut
- b. Lembaga penyiaran tidak menayangkan program yang mengandung muatan yang dapat membangun atau memperkokoh stereotip negatif mengenai kelompok-kelompok tersebut
- c. Lembaga penyiaran menayangkan program yang menjadikan kelompok-kelompok tersebut sebagai bahan olok-olok atau tertawaan

## **Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)**

d. Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang di dalamnya termuat penggunaan sebutan-sebutan yang sifatnya merendahkan atau berkonotasi negatif terhadap kelompok-kelompok tersebut

e. Kalaupun ada muatan dalam program yang mengandung olok-olok atau stereotip negatif mengenai kelompok-kelompok tersebut, itu harus selalu digambarkan dalam konteks tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan.

### **D. KATA-KATA KASAR, MAKIAN**

1. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa atau kata-kata makian yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, serta menghina agama dan Tuhan.

2. Kata-kata kasar dan makian yang dilarang disiarkan mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah, baik diungkapkan secara verbal maupun non-verbal.

### **E. NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA)**

Lembaga penyiaran dapat menyajikan program yang memuat pemberitaan, pembahasan, atau penggambaran penggunaan napza dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program yang menimbulkan kesan bahwa penggunaan napza dibenarkan.

b. Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan cara penggunaan napza dengan eksplisit dan rinci.

### **F. ALKOHOL DAN ROKOK**

Lembaga penyiaran dapat menyajikan program yang memuat pemberitaan, pembahasan, atau penggambaran penggunaan alkohol dan rokok dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program yang menggambarkan penggunaan alkohol dan rokok sebagai hal yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat

b. Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program yang mengandung muatan yang mendorong anak-anak atau remaja untuk menggunakan alkohol dan rokok.

c. Lembaga penyiaran hanya boleh menyajikan program yang mengandung adegan penggunaan alkohol dan rokok pada pukul 22.00 – 04.00 waktu setempat.

### **G. SUKU DAN RAS**

Dalam menyiarkan program yang terkait dengan suku dan ras, lembaga penyiaran harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Dilarang menyajikan muatan yang melecehkan suku dan ras di Indonesia.

b. Dilarang menyajikan penggunaan kata atau perilaku yang merendahkan suku dan ras tertentu.

### **H. AGAMA**

Masalah agama dapat tampil pada program acara agama, non-agama, dan drama/fiksi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Program keagamaan harus disajikan dengan memperhatikan kondisi sosial dan psikologis masyarakat beragama di mana program tersebut disiarkan.

b. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program yang mengandung serangan, penghinaan atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan keagamaan tertentu.

c. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program yang mengandung pesan bahwa sebuah agama sah di Indonesia adalah lebih baik atau lebih benar daripada agama sah lain.

d. Tatkala terdapat kontroversi mengenai salah satu versi pandangan/aliran dalam agama tertentu, lembaga harus menyajikan kontroversi tersebut dalam cara berimbang.

## **Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)**

e. Lembaga penyiaran tidak menyajikan program berisi penyebaran ajaran dari suatu sekte, kelompok atau praktek agama tertentu yang dinyatakan pihak berwenang sebagai kelompok yang menyimpang dan sesat.

f. Lembaga penyiaran tidak menyajikan program berisikan perbandingan antaragama.

g. Lembaga penyiaran harus berhati-hati dalam menampilkan informasi tentang perpindahan agama. Karenanya, cerita atau informasi faktual tentang perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang tidak disajikan secara berlebihan, dan alasan perpindahan agama tidak dipaparkan secara rinci.

### **I. TAYANGAN SUPRANATURAL**

#### **1. Program Faktual**

a. Program faktual yang bertemakan dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik, kontak dengan roh, hanya dapat disiarkan antara pukul 22.00 – 04.00 waktu setempat. Promo acara tersebut juga hanya boleh disiarkan pada pukul 22.00 -04.00 waktu setempat.

b. Dalam program faktual, tidak boleh ada upaya manipulasi dengan menggunakan efek gambar ataupun suara untuk tujuan mendramatisasi isi siaran sehingga bisa menimbulkan interpretasi yang salah; misalnya manipulasi audio visual tambahan seakan ada makhluk halus tertangkap kamera.

c. Lembaga penyiaran harus berhati-hati dalam menyiarkan program faktual yang menggunakan narasumber yang mengaku memiliki kekuatan/kemampuan supranatural khusus atau kemampuan menyembuhkan penyakit dengan cara supranatural. Bila tidak ada landasan fakta dan bukti yang bisa dipercaya, lembaga penyiaran wajib menjelaskan hal tersebut kepada khalayak. Lembaga penyiaran juga wajib menjelaskan kepada khalayak bahwa mengenai kekuatan/kemampuan tersebut sebenarnya ada perbedaan pandangan di tengah masyarakat.

#### **2. Program Non-Faktual**

a. Program drama, film, sinetron, komedi, kartun yang menyajikan kekuatan atau makhluk supranatural dapat disiarkan di sembarang waktu, selama program tersebut menampilkan dunia supranatural sebagai sekadar fantasi.

b. Program dan promo program yang berisikan materi supranatural yang mengerikan dan dapat menimbulkan rasa takut hanya dapat disiarkan antara pukul 22.00 – 04.00 waktu setempat.

#### **3. Horoskop dan Ramalan Bintang**

Program yang membahas materi horoskop dan perbintangan serta ramalan harus disajikan dengan cara yang tidak menimbulkan simpulan bahwa isi program tersebut adalah benar dan serius.

#### **4. Hipnotis**

Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program berisi praktek hipnotis yang mungkin dapat mempengaruhi penonton atau pendengar secara verbal maupun non-verbal.

### **J. KORUPSI**

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang memuat berita, bahasan, atau tema yang mengandung pembenaran terhadap tindak korupsi.

### **K. JUDI**

Lembaga penyiaran dilarang menyajikan program yang memuat berita, bahasan atau tema yang mengandung pembenaran terhadap perjudian.

## **Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)**

### **L. SIARAN BERBAHASA ASING**

Lembaga penyiaran diizinkan menyajikan program acara berbahasa asing dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk program yang disajikan dalam bahasa asing, lembaga penyiaran televisi harus menyertakan teks dalam bahasa Indonesia
- b. Kecualian untuk ketentuan L1, adalah program khusus berita berbahasa asing, program pelajaran bahasa asing, atau pembacaan kitab suci.
- c. Program dalam bahasa asing dapat disulihsuarkan dalam jumlah maksimal 30% (tigapuluh persen) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan lembaga bersangkutan.

### **IV**

### **PENGGOLONGAN DAN PENJADWALAN PROGRAM TELEVISI**

Lembaga penyiaran televisi wajib menyertakan informasi tentang penggolongan program berdasarkan usia khalayak penonton di setiap acara yang disiarkan. Penggolongan program ini akan berakibat pada jadwal tayang acara bersangkutan.

Untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi, informasi penggolongan program ini harus terlihat di layar televisi di sepanjang acara berlangsung.

#### **A. PENGGOLONGAN PROGRAM**

Penggolongan program diklasifikasikan dalam empat kelompok:

- A : Tayangan untuk Anak, yakni khalayak berusia di bawah 11 tahun
- R : Tayangan untuk Remaja, yakni khalayak berusia 12-18 tahun
- D : Tayangan untuk Dewasa
- SU : Tayangan untuk Semua Umur

#### **1. Unsur-unsur yang menyebabkan Program memperoleh Klasifikasi 'A'**

- Tayangan yang khusus dibuat dan ditujukan untuk anak
- Berisikan isi, materi, gaya penceritaan, tampilan yang sesuai dengan dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan anak
- Tidak boleh menonjolkan kekerasan (baik perilaku verbal maupun non-verbal) serta menyajikan adegan kekerasan yang mudah ditiru anak-anak
- Tidak boleh menyajikan adegan yang memperlihatkan perilaku atau situasi yang membahayakan yang mudah atau mungkin ditiru anak-anak.
- Tidak boleh mengandung muatan yang dapat mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas, seperti: berpacaran saat anak-anak, bersikap kurang ajar pada orangtua atau guru.
- Tidak mengandung muatan yang mendorong anak percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik, atau kontak dengan roh.
- Tidak mengandung adegan yang menakutkan dan mengerikan
- Mengandung salah satu atau beberapa hal yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik dan penumbuhan rasa ingin tahu mengenai lingkungan sekitar
- Jika program mengandung gambaran tentang nilai-nilai dan perilaku anti-sosial (seperti tamak, licik, berbohong), program tersebut harus juga menggambarkan sanksi atau akibat yang jelas dari perilaku tersebut.
- Tidak memuat materi yang mungkin dapat mengganggu perkembangan jiwa anak, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, penggunaan obat bius.

## **Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)**

### 2. Unsur-unsur yang menyebabkan Program memperoleh Klasifikasi ‘R’

- Tayangan yang khusus dibuat dan ditujukan untuk remaja
- Berisikan isi, materi, gaya penceritaan, tampilan yang sesuai dengan dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan remaja
- Kandungan muatan kekerasan dapat ditampilkan secara tidak berlebihan dan hanya berfungsi sebagai bagian yang diperlukan untuk mengembangkan cerita serta bukan menjadi daya tarik utama.
- Pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas dan hubungan antar jenis kelamin harus ditampilkan dalam proporsi yang wajar dalam konteks pendidikan seks yang sehat bagi remaja.
- Mengandung salah satu atau beberapa hal yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik dan penumbuhan rasa ingin tahu mengenai lingkungan sekitar.
- Tayangan hendaknya memberikan referensi pergaulan remaja yang positif serta dapat memotivasi remaja untuk lebih mengembangkan potensi diri.

### 3. Unsur-unsur yang menyebabkan Program memperoleh Klasifikasi ‘SU’

- Berisikan muatan yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak dan remaja, namun dianggap layak ditonton anak dan remaja, dan seluruh penonton lainnya.
- Tidak mengandung muatan yang hanya dapat muncul dalam program dengan klasifikasi ‘D’

### 4. Unsur-unsur yang menyebabkan Program memperoleh Klasifikasi ‘D’

- Berisikan materi yang hanya pantas disaksikan oleh orang dewasa
- Mengandung tema atau membahas persoalan-persoalan keluarga yang dianggap sebagai masalah dewasa, seperti: intrik dalam keluarga, perselingkuhan, perceraian.
- Mengandung muatan kekerasan secara lebih dominan, eksplisit, dan vulgar. Namun demikian, program tersebut tetap tak boleh mengandung muatan sadistis dan di luar perikemanusiaan, serta mendorong atau menggelorakan kekerasan.
- Mengandung materi yang mengerikan dan menakutkan bagi anak-anak dan remaja.
- Mengandung pembicaraan, pembahasan atau tema mengenai masalah seks dewasa seperti perilaku seks menyimpang, pekerja seks komersial atau homoseksualitas/lesbian.
- Mengandung penggambaran mengenai penggunaan alkohol dan rokok.
- Program faktual yang mengandung penggambaran tentang dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik, kontak dedngan roh.

## **B. PENJADWALAN PROGRAM**

Penempatan program harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Program klasifikasi A hanya dapat disiarkan pada

- pukul 07.00 – 09.00 dan 15.00– 18.00 di hari Senin-Sabtu
- pukul 07.00 – 11.00 dan 15.00 – 18.00 di hari Minggu/libur nasional

Program dan promo program klasifikasi R hanya dapat disiarkan pada:

- pukul 09.00 – 20.00 namun harus di luar jam yang khusus diperuntukkan bagi anak ( 15.00 – 18.00)

Program klasifikasi ‘U’ dapat disiarkan pada:

- seluruh jam siar

Program dan promo program klasifikasi ‘D’ hanya dapat disiarkan pada:

- pukul 22.00 – 04.00

## **Lampiran 17 : Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (sambungan)**

### **C. KUOTA PROGRAM ANAK**

- Setiap lembaga penyiaran televisi harus mengalokasikan tayangan dengan klasifikasi 'A' setidaknya 260 jam setahun atau sekitar 3 jam dalam seminggu.
- Setiap lembaga penyiaran televisi harus mengalokasikan tayangan dengan klasifikasi 'R' maksimum 416 jam setahun atau sekitar 8 jam dalam seminggu.

### **D. IKLAN DALAM PROGRAM ANAK DAN REMAJA**

#### **1. Iklan dalam Program Anak**

- Tidak ada promo program yang tergolong klasifikasi 'R' dan 'D'
- Maksimal iklan adalah 10 persen dari jam tayang program
- Tidak boleh mengiklankan produk makanan yang tidak sehat bagi anak, seperti yang mengandung banyak gula dan lemak
- Tidak boleh mengiklankan produk yang tidak terkait dengan anak
- Tokoh dalam iklan tidak boleh sama dengan tokoh dalam program yang ditayangkan

#### **2. Iklan dalam Program Remaja**

- Tidak ada promo program yang tergolong berklasifikasi 'D'
- Tidak boleh mengiklankan produk yang tidak terkait dengan remaja.

**Lampiran 18: Rating Radio Suara Surabaya (berdasarkan hasil riset AC Nielsen yang telah diolah oleh Radio Suara Surabaya)**

<b>2005</b>		
Rank	Station	Cume
1	SUARA GIRI	3,225
2	WIJAYA FM	2,561
3	OTHER	1,263
4	SUZANA	1,201
5	MERDEKA	1,112
6	PANORAMA	873
<b>7</b>	<b>SUARA SBY</b>	<b>810</b>
8	MTBFM	788
9	KOTA FM	590
10	MEDIA FM	569
11	CAKRAWALA	554
12	ELVICTOR	545
13	EBSFM	498
14	YASMARA	464
15	METRO FM	462
16	DJFM	417
17	PRAMESWR	365
18	RAJAWALI	301
19	CAROLINA	299
20	ISTARA	284

**Lampiran 19: Data pendengar Radio Suara Surabaya tahun 2005  
(berdasarkan hasil riset AC Nielsen yang telah diolah oleh  
Radio Suara Surabaya)**

**Listener by Sex**

**Male Listener**

<b>Station</b>	<b>2005</b>
<b>Suara Surabaya</b>	<b>444</b>
Elshinta	109
Mercury	78
SCFM	88
Delta	41
Sonora	Na

**Female Listener**

<b>Station</b>	<b>2005</b>
<b>Suara Surabaya</b>	<b>366</b>
Elshinta	109
Mercury	173
SCFM	55
Delta	28
Sonora	NA

Sonora dan Pas FM di tahun 2005 data tidak tersedia karena sample untuk masing-masing station tersebut tidak mencukupi, dan dimasukkan dalam kategori radio others.

**Lampiran 20 : Ranking Program di Radio Suara Surabaya tahun 2005  
(berdasarkan hasil riset AC Nielsen yang telah diolah oleh  
Radio Suara Surabaya)**

Program	AQH (dalam ribuan)
LKM	62
AMA	56
Ragam perempuan	55
NQA	35
Jazz Traffic	35
Wawasan	34
Prospek~Enciety	34
Musik Klasik	33
Dialog IT	32
Otoda	30
Perilaku Sehat	29
Memorabilia	27
Diagnosa	18
Otomotif	16
Klasik Rock	13